



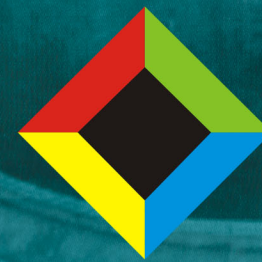
STATISTIK
PEKERJAAN UMUM
<http://www.pu.go.id/infostatistik>

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262



Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS PU) |

2009



Buku Induk

STATISTIK

Pekerjaan Umum

http://www.pu.go.id/info_statistik/



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

KATA PENGANTAR

Penyediaan dan penyebarluasan berbagai bentuk penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PU, perkembangan kependudukan, ketenaga kerjaan dan ekonomi, serta data pendukung lainnya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU), sangat diperlukan. Oleh sebab itu disusun Buku Induk Statistik Infrastruktur ke-PU-an yang selanjutnya disebut sebagai “Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU)”.

Data dan informasi yang disajikan berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Departemen PU, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Dalam Penyusunan BIS-PU ini, disajikan data dan informasi tingkat Nasional yang dirinci per Provinsi. Bentuk penyajian dibuat sederhana, mudah dan menarik untuk dibaca serta informatif.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan BIS-PU ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pengguna buku ini sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	3
BAB II : KONDISI UMUM INDONESIA	
2.1 Wilayah Indonesia	4
2.1.1 Luas Wilayah	4
2.1.2 Wilayah Administrasi	5
2.2 Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan	5
2.2.1 Kependudukan	5
2.2.2 Ketenaga Kerjaan	7
2.3 Ekonomi	9
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)	9
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10
2.3.3 Pendapatan per Kapita	12
2.3.4 Analisis Lapangan Usaha Unggulan Provinsi .	12



BAB III : INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1	Konstruksi	13
3.2	Potensi Lahan Sawah	15
3.3	Angkutan Darat (Transportasi)	16
3.4	Perumahan dan Lingkungan Permukiman	17
3.4.1	Perumahan	17
3.4.2	Lingkungan Permukiman	22
3.5	Bencana Alam	24

BAB IV : INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

4.1	Infrastruktur Sumber Daya Air	25
4.1.1	Wilayah Sungai	25
4.1.2	Danau	27
4.1.3	Rawa	28
4.1.4	Irigasi	30
4.1.5	Bendungan/ Waduk.....	33
4.1.6	Embung.....	35
4.1.7	Analisis Statistik Bidang Sumber Daya Air	36
4.2	Infrastruktur Bina Marga	37
4.2.1	Jalan Tol	37
4.2.2	Jalan	39
4.2.3	Jembatan	44
4.2.4	Analisis Statistik Bidang Bina Marga	46
4.3	Infrastruktur Cipta Karya	49
4.3.1	Penyediaan Air Minum	49
4.3.2	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	51
4.3.3	Pengembangan Permukiman	52
4.3.4	Analisis Statistik Bidang Cipta Karya	72



4.4 Penataan Ruang	75
--------------------------	----

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88

DAFTAR TABEL

I. KONDISI UMUM INDONESIA

1. Wilayah Indonesia

Tabel 2.1 : Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2007 A-1

Tabel 2.2 : Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2004 – 2008 A-2

2. Kependudukan dan Ketenaga kerjaan

Tabel 2.3 : Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2004 - 2008 A-3

Tabel 2.4 : Distribusi Persentase Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2004 - 2008 A-4

Tabel 2.5 : Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2004 – 2008. A-5

Tabel 2.6 : Rumah Tangga Menurut Provinsi Tahun 2004 – 2008 A-6

Tabel 2.7 : Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi Tahun 2004 – 2008 A-7

Tabel 2.8 : Jumlah Penduduk Miskin Di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2004 - 2008 A-8

Tabel 2.9 : Angkatan Kerja Menurut Wilayah per Provinsi Tahun 2008... A-9

3. Ekonomi

Tabel 2.10 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2004 - 2008 A-10

Tabel 2.11	: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 - 2008	A-11
Tabel 2.12	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah) ...	A-12
Tabel 2.13	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, Tahun 2004 - 2007 (Rupiah)	A-13
Tabel 2.14	: Sektor Unggulan Provinsi (PDRB Terhadap Lapangan Usaha) Tahun 2005 / 2006	A-14

II. INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

1. Konstruksi

Tabel 3.1	: Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi Tahun 2003 - 2007	B-1
Tabel 3.2	: Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi (ribu rupiah) Tahun 2003 – 2007	B-2
Tabel 3.3	: Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan (juta rupiah) Tahun 2003 – 2007	B-3

2. Potensi Lahan Sawah

Tabel 3.4	: Luas Panen Padi Menurut Provinsi Tahun 2004 – 2008, (Ha)	B-4
-----------	------------------------------------------------------------------	-----

3. Angkutan Darat (Transportasi)

Tabel 3.5	: Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan Tahun 2004 – 2006, (Unit)	B-5
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

4. Perumahan, Lingkungan Permukiman, dan Bencana Alam

Tabel 3.6	: Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2005 dan 2008	B-6
Tabel 3.7	: Tempat Tinggal di Bantaran/ Tepi Sungai di Indonesia Tahun 2005/2006 dan 2008	B-7
Tabel 3.8	: Tempat Tinggal di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV) di Indonesia Tahun 2005/2006 dan 2008	B-8
Tabel 3.9	: Data Pembangunan Rumah Susun (Konstruksi) Tahun Anggaran 2005 - 2009	B-9
Tabel 3.10	: Status Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tahun Anggaran 2003 - 2008	B-10
Tabel 3.11.1	: Sumber Air Untuk Minum/ Memasak (per Desa/ Kelurahan) Tahun 2005	B-11.1
Tabel 3.11.2	: Sumber Air Untuk Minum/ Memasak (per Desa/ Kelurahan) Tahun 2008	B-11.2
Tabel 3.12.1	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan Tahun 2006 - 2007 (Status per 31 Desember 2006)	B-12
Tabel 3.12.2	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan Tahun 2007 - 2008 (Status per 31 Desember 2007)	B-13
Tabel 3.12.3	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan Tahun 2008 - 2009 (Status per 31 Desember 2008)	B-14

III. INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

1. Sumber Daya Air

Tabel 4.1	: Data Wilayah Sungai (WS) di Indonesia	C-1
-----------	-----------------------------------------------	-----

Tabel 4.2.1	: Wilayah Sungai Lintas Negara	C-2.1
Tabel 4.2.2	: Wilayah Sungai Lintas Provinsi	C-2.2
Tabel 4.2.3	: Wilayah Sungai Strategis Nasional	C-2.3
Tabel 4.2.4	: Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota	C-2.4
Tabel 4.2.5	: Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	C-2.5
Tabel 4.3	: Data Danau dan Situ Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009	C-3
Tabel 4.4	: Data Rawa di Beberapa Pulau di Indonesia Tahun 2007	C-4
Tabel 4.5	: Data Rawa di Indonesia Tahun 2007	C-5
Tabel 4.6	: Pemanfaatan Lahan Rawa di Indonesia Tahun 2007	C-6
Tabel 4.7	: Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Jaringan Irigasi, Tahun 2003	C-7
Tabel 4.8	: Luas dan Jumlah Irigasi dari Berbagai Tingkatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005	C-8
Tabel 4.9	: Skala Irigasi dari Berbagai Tingkatan di Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2005	C-9
Tabel 4.10	: Resume Luasan Irigasi di Seluruh Indonesia Tahun 2006	C-10
Tabel 4.11	: Rekapitulasi Daerah Irigasi	C-11
Tabel 4.12.1	: Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Tahun 2007	C-12.1
Tabel 4.12.2	: Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Tahun 2007	C-12.2
Tabel 4.12.3	: Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tahun 2007	C-12.3
Tabel 4.13	: Rekapitulasi Daerah Irigasi Tahun 2007	C-13
Tabel 4.14	: Daftar Bendungan Indonesia Berdasarkan Provinsi	C-14
Tabel 4.15	: Kondisi Waduk Utama di Indonesia Tahun 2007	C-15
Tabel 4.16.1	: Data Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-16.1
Tabel 4.16.2	: Inventarisasi Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009	C-16.2

Tabel 4.17	: Data Embung Potensi Berdasarkan Nama Embung Potensi di Indonesia	C-17
Tabel 4.18	: Data Embung Berdasarkan Fisik Embung di Indonesia	C-18
Tabel 4.19	: Data Embung Berdasarkan Manfaat Embung di Indonesia Tahun 2009	C-19
Tabel 4.20	: Luas Potensial Daerah Irigasi dan Produksi Padi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2007	C-20

2. Bina Marga

Tabel 4.21.1	: Nama Ruas Jalan Tol dan Panjang Jalan Tol di Indonesia, Tahun 2004	C-21.1
Tabel 4.21.2	: Nama Ruas Jalan Tol dan Panjang Jalan Tol Tahap Konstruksi di Indonesia, Tahun 2004	C-21.2
Tabel 4.22.1A	: Jalan Nasional Jalan Tol	C-22.1A
Tabel 4.22.1B	: Jalan Nasional Jalan Tol	C-22.1B
Tabel 4.22.2A	: Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa Tahun 2005 - 2010	C-22.2A
Tabel 4.22.2B	: Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa Tahun 2005 - 2010	C-22.2B
Tabel 4.22.3A	: Jalan Nasional Jalan Tol, Pulau Sumatera Tahun 2005-2010	C-22.3-4
Tabel 4.22.3B	: Jalan Nasional Jalan Tol, Pulau Sumatera Tahun 2005-2010	C-22.3-4
Tabel 4.22.4	: Jaringan Jalan Tol Pulau Sulawesi Tahun 2005 – 2010	C-22.3-4
Tabel 4.22.5	: Jaringan Jalan Tol Pulau Bali Tahun 2005 – 2010	C-22.5
Tabel 4.23.1	: Jalan Tol Sudah Operasi (Sejak Infrastructure Summit 2005)	C-23.1-2
Tabel 4.23.2	: Jalan Tol Dalam Tahap Konstruksi (Sejak Infrastructure Summit 2005)	C-23.1-2
Tabel 4.24	: Ruas Jalan Tol Yang Telah Beroperasi	C-24
Tabel 4.25.1	: Prioritas Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa	C-25.1

Tabel 4.25.2 : Prioritas Pembangunan Jalan Tol Non Trans Jawa	C-25.2
Tabel 4.26 : Profil Jalan Tol Indonesia	C-26
Tabel 4.27 : Panjang Jalan Nasional, Provinsi Per Wilayah Tahun 2000 – 2004	C-27
Tabel 4.28 : Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi (Km), Tahun 2003 - 2004	C-28
Tabel 4.29 : Panjang Jalan Nasional Menurut Fungsi dan Tipe Perkerasan Jalan Per Provinsi Tahun 2005 (Km)	C-29
Tabel 4.30 : Panjang Jalan Nasional Menurut Kondisi Per Provinsi Tahun 2005	C-30
Tabel 4.31 : Kondisi Jalan Nasional Tiap Provinsi Tahun 2006 (Data Hasil Filterisasi IIRMS Dengan KEPMEN 376/ KPTS/M/2004)	C-31
Tabel 4.32 : Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2007 (Data Hasil Filterisasi IIRMS Dengan KEPMEN 376/ KPTS/M/2004)	C-32
Tabel 4.33 : Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2008 (Berdasarkan Pengelompokan 4 Kondisi Menurut IRI Dalam Satu Ruas Jalan) <i>National Road Condition 2008</i>	C-33
Tabel 4.34 : Rekapitulasi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2007 Berdasarkan Tahun Dibangun (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004).	C-34
Tabel 4.35 : Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2006 (Kondisi Jembatan Secara Umum)	C-35
Tabel 4.36 : Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2007, Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-36

Tabel 4.37	: Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2008, Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-37
Tabel 4.38	: Data Panjang Jalan (Km) dan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi beserta Rasio dan Urutan Kepadatan	C-38

3. Cipta Karya

Tabel 4.39	: Pencapaian Di Bidang Air Minum, 2005 - 2008	C-39
Tabel 4.40	: Lokasi IPA Hingga Tahun 2007 PDAM	C-40
Tabel 4.41	: Lokasi IPAL, IPLT, TPA Hingga Tahun 2007	C-41
Tabel 4.42	: Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase Tahun 2007	C-42
Tabel 4.43	: Pengembangan PS Permukiman Kawasan Perbatasan, Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008	C-43
Tabel 4.44	: Penyediaan PS Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil/ Daerah Tertinggal, Indikator Kinerja Output T.A. 2005 – 2008	C-44
Tabel 4.45	: Penyehatan dan Pengembangan Permukiman (P2P) Daftar Investasi Tahun 2005 – 2006	C-45
Tabel 4.46	: Pengembangan Lingkungan Perumahan Pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Daftar Investasi Tahun 2005 – 2006	C-46
Tabel 4.47	: Peningkatan Kualitas Permukiman Di Desa Pusat Pertumbuhan, Indikator Kinerja Output T.A. 2005 – 2006	C-47
Tabel 4.48	: Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan, Indikator Kinerja Output T.A. 2007 – 2008	C-48

Tabel 4.49	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan RSH, Indikator Kinerja Output T.A. 2007 – 2008	C-49
Tabel 4.50	: Pengembangan KASIBA/ LISIBA, Rekapitulasi Hasil Pembangunan Tahun 2005	C-50
Tabel 4.51	: Bantuan Sarana dan Prasarana, Indikator Kinerja Output T.A. 2006	C-51
Tabel 4.52	: Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Indikator Kinerja Output T.A. 2007	C-52
Tabel 4.53	: Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan Indikator Kinerja Output T.A. 2008	C-53
Tabel 4.54	: Analisis Pencapaian Di Bidang Air Minum, 2007-2008	C-54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia (juta), Tahun 2004 - 2008	8
Gambar 2.2 : Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia (%) Tahun 2004 - 2008	9
Gambar 2.3 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), Tahun 2004 – 2007	11
Gambar 2.4 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), Tahun 2004 – 2007	11
Gambar 3.1 : Nilai Konstruksi yang diselesaikan dari berbagai sumber Dana (000 rupiah)	14
Gambar 3.2 : Jumlah karyawan bidang konstruksi tetap menurut gender ..	15
Gambar 3.3 : Produksi Padi ¹ menurut Provinsi (ton), 2004 – 2008	15
Gambar 3.4 : Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam Negeri (unit) Tahun 2002 – 2006*	16
Gambar 3.5 : Realisasi dan Rencana Pembangunan RS dan RsH (unit) Tahun 2005 – 2008	20
Gambar 3.6 : Realisasi Pembangunan RS dan RsH (unit) Tahun 2005 – 2008	21
Gambar 3.7 : Rencana Pembangunan RS dan RsH (unit) Tahun 2005 – 2008	21
Gambar 3.8 : Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2000 – 2005	23

Gambar 4.1 : Jumlah Rawa di Beberapa Tempat di Indonesia Tahun 2007	29
Gambar 4.2 : Luas Rencana (Lebak dan Pasang Surut) dan Fungsi Irigasi (Ha) di Beberapa Tempat di Indonesia Tahun 2007 ...	29
Gambar 4.3 : Panjang Jalan Nasional, Provinsi Per Wilayah Tahun 2000 – 2004	40
Gambar 4.4 : Panjang Jalan Menurut Fungsi Jalan, Tahun 2003 - 2004	41
Gambar 4.5 : Kondisi Jalan Provinsi dan Kabupaten Tahun 2006 (Status 1 Maret 2006) Berdasarkan Kriteria IRI	42
Gambar 4.6 : Panjang Jalan Di Indonesia Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 2005 - 2008	43
Gambar 4.7 : Jumlah Jembatan di Indonesia Menurut BMS Tahun 2006-2008	48
Gambar 4.8 : Jumlah Kondisi Jembatan di Indonesia Menurut BMS Tahun 2006-2008	48
Gambar 4.9 : Pencapaian Kinerja Air Minum (Jiwa), Tahun 2004 - 2008 ...	49
Gambar 4.10 : Cakupan Pelayanan Air Minum (%), Tahun 2004 - 2008	50
Gambar 4.11 : Pembangunan Talud (m), Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, Tahun 2006 - 2007	52
Gambar 4.12 : Pembangunan Pipa Air Bersih (m), Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, Tahun 2006 – 2008	53
Gambar 4.13 : Pembangunan Hidran Umum (m), Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan, Tahun 2006 – 2008	53
Gambar 4.14 : Pembangunan Jalan Poros Desa (m), Prasarana Sarana Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil, Tahun 2006 – 2008	54
Gambar 4.15 : Pembangunan MCK (unit), Prasarana Sarana Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil, Tahun 2005 – 2006	55
Gambar 4.16 : Pembangunan Gorong-Gorong (unit), Prasarana Sarana Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil, Tahun 2005 – 2007	55

Gambar 4.17 : Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial, Tahun 2005 – 2007	56
Gambar 4.18 : Penduduk Terlayani (Jiwa), Penanganan Bencana Alam Dan Kerusakan Sosial, Tahun 2005 – 2007	57
Gambar 4.19 : Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial, Tahun 2005 – 2006	58
Gambar 4.20 : Kawasan Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial, Tahun 2006 – 2007	58
Gambar 4.21 : Pembangunan Gorong-Gorong (Unit), Kawasan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial, Tahun 2006 – 2007	59
Gambar 4.22 : Ilustrasi Kawasan Permukiman Baru serta KASIBA dan LISIBA	63
Gambar 4.23 : Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pengembangan KASIBA/ LISIBA, Indikator Kinerja Output T.A. 2005	64
Gambar 4.24 : Pembangunan Gorong-Gorong (Unit), Pengembangan KASIBA/ LISIBA, Indikator Kinerja Output T.A. 2005	64
Gambar 4.25 : Bantuan Sarana dan Prasarana, Indikator Kinerja Output T.A. 2006	65
Gambar 4.26 : Bantuan Sarana dan Prasarana, Indikator Kinerja Output T.A. 2006	66
Gambar 4.27 : Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan Rusuna, Indikator Kinerja Output T.A. 2008	66
Gambar 4.28 : Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan Rusuna, Indikator Kinerja Output T.A. 2008	67
Gambar 4.29 : Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan, Indikator Kinerja Output T.A. 2007	68
Gambar 4.30 : Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan, Indikator Kinerja Output T.A. 2007	68

Gambar 4.31 : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan (Termasuk eks-Transmigrasi), Indikator Kinerja Output T.A. 2008	69
Gambar 4.32 : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan (Termasuk eks-Transmigrasi), Indikator Kinerja Output T.A. 2008	69
Gambar 4.33 : Pengembangan Kawasan Eks. Transmigrasi, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Indikator Kinerja Output T.A. 2007	70
Gambar 4.34 : Jumlah Jiwa Terlayani (Jiwa) Di Kawasan Eks. Transmigrasi Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Indikator Kinerja Output T.A. 2007	71
Gambar 4.35 : Jumlah Kawasan (Kws.) Di Kawasan Eks. Transmigrasi, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Indikator Kinerja Output T.A. 2007	71
Gambar 4.36 : Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri PU NO. 286/ PRT/ M/ 2005, Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum (Departemen PU) mendapat tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan serta penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Departemen PU. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya Pusdata menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyusunan program pengolahan data beserta pembinaan dan pengembangannya, kemudian penyelenggaraan sistem informasi, pengelolaan dan penyediaan data spasial serta literal. Data literal disini meliputi data literal dan kestatistikan infrastruktur Pekerjaan Umum, serta data literal dan kestatistikan pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum.

Program pembangunan Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah bagian dari pelaksanaan program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang ke-PU-an tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk membantu perencanaan umum, disain, pelaksanaan, serta pemanfaatan pembangunan. Data serta informasi statistik sangat dibutuhkan disini terutama bila Pimpinan Departemen atau Lembaga/ Instansi terkait ingin mengetahui data atau informasi statistik tentang prasarana dan sarana ke-PU-an dengan cepat.

Data serta informasi yang sesuai dengan bidang ke-PU-an ini dapat diperoleh dari Departemen Pekerjaan Umum melalui Pusdata - Pekerjaan Umum. Data

yang dibutuhkan tersebut merupakan rekapitulasi data secara keseluruhan per wilayah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Selain itu analisis data untuk bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya akan melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Dalam kaitannya dengan fungsi tersebut, maka Pusdata menyediakan data tentang ke-PU-an beserta pendukungnya yang diharapkan bisa memberi gambaran perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana yang telah ada dapat diwujudkan. Diharapkan, dengan adanya dukungan data ini, pelaksanaan pembangunan prasarana tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhannya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Buku Induk Statistik PU ini dibuat dengan tujuan menyediakan informasi statistik dibidang ke-PU-an serta informasi statistik tentang sektor-sektor terkait lainnya dan diperuntukkan bagi para Pimpinan di dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum maupun instansi lainnya serta untuk masyarakat pengguna.

BIS-PU ini dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data statistik bidang lainnya yang terkait. Selain itu akan disajikan analisis bidang ke-PU-an dihubungkan dengan data bidang lainnya yang terkait. Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat membantu dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan Departemen

Pekerjaan Umum, sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih tepat pada sasaran serta dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, penerbitan BIS-PU adalah untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum, sehingga diketahui kondisi dan kebutuhan untuk masa mendatang. Diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui dan memanfaatkan data serta informasi yang tersaji melalui buku ini serta memberikan masukan bagi Departemen Pekerjaan Umum.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Buku Induk Statistik PU ini menyajikan data dan informasi tentang hasil pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan pendukungnya di seluruh provinsi di Indonesia yang dirinci menurut Provinsi. Ruang lingkup data dan informasi ke-PU-an adalah sebagai berikut :

1. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Sumber Daya Air
2. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Bina Marga
3. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Cipta Karya
4. Penataan Ruang

Sedangkan untuk data dan informasi pendukung, meliputi :

1. Wilayah Indonesia
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi
4. Konstruksi
5. Potensi Lahan
6. Transportasi
7. Perumahan dan Lingkungan Permukiman
8. Bencana Alam

Penyajian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabulasi dan grafik.

BAB II

KONDISI UMUM INDONESIA

2.1 Wilayah Indonesia

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai ribuan pulau. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Selain memiliki populasi penduduk besar dan kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah, Indonesia juga memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

2.1.1 Luas Wilayah

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia terletak antara 6° 08' Lintang Utara sampai dengan 11° 15' Lintang Selatan dan antara 94° 45' Bujur Barat sampai dengan 141° 05' Bujur Timur, serta terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Luas daratan Indonesia sekitar 1,91 juta km², mempunyai ratusan gunung api dan sungai (Tabel 2.1). Wilayah Indonesia juga terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehubungan dengan letak yang dikelilingi beberapa samudera, serta banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif, menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa.

Indonesia merupakan negara bahari dengan luas lautnya sekitar 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan dan mempunyai garis pantai nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Batas wilayah Indonesia searah penjurur mata angin, yaitu : Utara (Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan), Selatan (Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia), Barat (Samudra Indonesia), Timur (Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik).

2.1.2 Wilayah Administrasi

Sejak tahun 2005, Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 4 diantaranya memiliki status khusus, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Tahun 2007 (PP No.24/ 2007), menyebutkan bahwa Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat. Pada tahun 2008 dari jumlah provinsi tersebut terdapat 370 kabupaten, 95 kota, 6.131 kecamatan, serta 73.408 desa (Tabel 2.1).

2.2 Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan

2.2.1 Kependudukan

Sinergi yang kuat antara pembangunan dengan kependudukan harus terus dibangun, mengingat persoalan kependudukan dan pembangunan demikian kompleks. Permasalahan kependudukan yang masih harus diselesaikan adalah besarnya jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Disamping laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi atau kesejahteraan penduduk kurang memadai. Untuk itu Pemerintah Pusat-Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat terus bekerja sama memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan penduduk atau kualitas manusia Indonesia.

a. *Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.*

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 sebesar 208,151 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 228,523 juta jiwa pada tahun 2008, tetapi laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Indonesia adalah 228,5 juta, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,36 persen pertahun selama periode 2000-2008 (Tabel 2.2). Pada periode 2000-2008 tersebut, laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (4.79%) dan laju terendah di Provinsi Jawa Tengah (0.55%) (Tabel 2.3).

b. *Persebaran dan Kepadatan Penduduk*

Jumlah penduduk yang besar dan bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk, karena sebagian masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Data tahun 2008 menunjukkan sekitar 59% penduduk tinggal di Pulau Jawa dan Bali. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.91% penduduk tinggal di Provinsi Jawa Barat, 14.28% di Jawa Tengah, serta 16.23% di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan luas Pulau Jawa sendiri secara keseluruhan hanya 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Ironisnya pada gabungan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang memiliki luas sekitar 27.5% dari luas total Indonesia hanya dihuni sekitar 2.22% penduduk. Hal tersebut menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk, kenyataan ini menggambarkan bahwa daya dukung lingkungan yang kurang seimbang di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Bali dan luar Jawa, Bali. (Tabel 2.4).

Besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Bali menyebabkan kepadatan penduduk pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu 18,489 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2004 dan 19,153 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2006 dan menjadi 18.069 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2008. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2008 kepadatan penduduknya mencapai 12.355 penduduk per km^2 . Di sisi lain provinsi Papua yang luasnya hampir 17 persen dari total luas Indonesia hanya dihuni 7 penduduk per km^2 (Tabel 2.5).

c. *Perkembangan Jumlah Rumah Tangga*

Banyaknya rumah tangga pada tahun 2004 tercatat sebesar 58,2 juta rumah tangga, dengan rata-rata besarnya anggota rumah tangga 4,0 orang. Pada tahun 2008 tercatat jumlah rumah tangga sebesar 57,7 juta, sedangkan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di tahun 2008 ini tidak mengalami perubahan. Dari tahun 2004 hingga tahun 2008, rata-rata besarnya anggota rumah tangga tidak mengalami perubahan (Tabel 2.6 dan Tabel 2.7).

d. Kemiskinan

Masalah kemiskinan secara Nasional belum dapat teratasi, walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Oleh sebab itu perlu peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan disemua sektor terkait dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat disemua bidang terutama ekonomi.

Secara umum, perkembangan jumlah penduduk miskin pada periode 2004 - 2006 menunjukkan kecenderungan naik, sedangkan pada periode 2006 - 2008 jumlah penduduk miskin menjadi turun (Tabel 2.8). Dari angka kemiskinan tahun 2008 antar provinsi terlihat bahwa ada beberapa provinsi yang dapat dikategorikan memiliki penduduk miskin yang relatif rendah, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

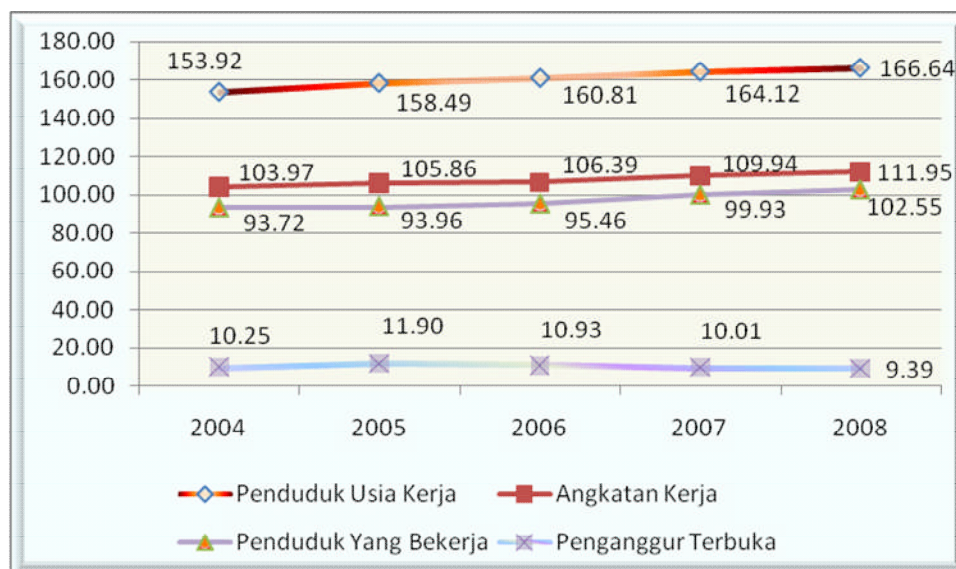
Secara absolut penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berdomisili di Pulau tersebut. Provinsi yang memiliki penduduk miskin terbesar pada tahun 2008 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 34,96 juta jiwa (15.42%). Dibandingkan penduduk miskin tahun 2007 yang berjumlah 37,17 juta jiwa (16.58%), berarti penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta jiwa.

2.2.2 Ketenaga Kerjaan

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung turun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya ketidakcocokan dalam pasar kerja.

Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi, demikian pula halnya dengan perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun 2004 - 2008. Untuk penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan penduduk yang bekerja selalu mengalami kenaikan. Sedangkan tingkat penganggur terbuka mengalami naik turun pada rentang tahun tersebut, dimana tahun 2004–2005 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2005–2008 mengalami penurunan (Gambar 2.1).

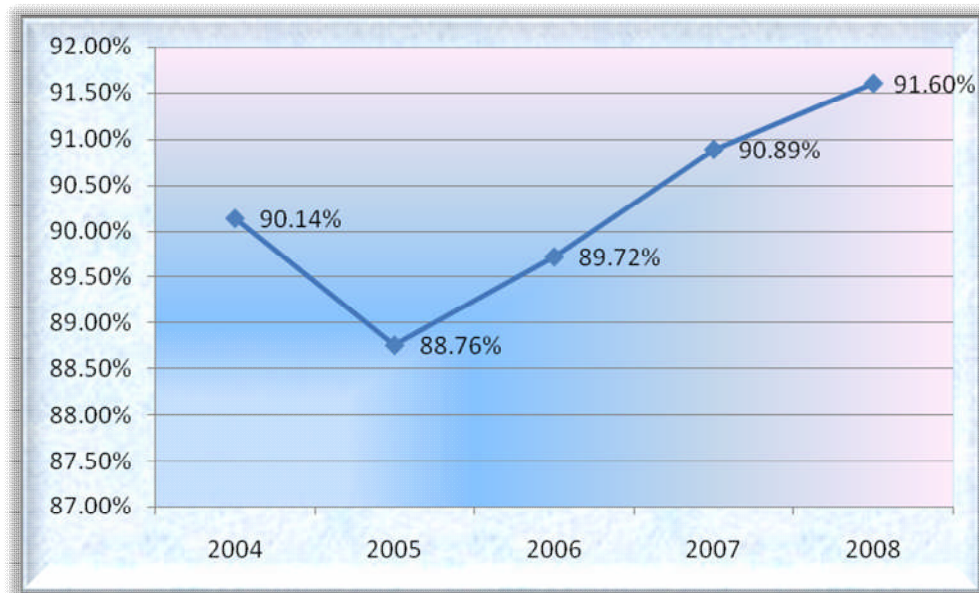
Gambar 2.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia (juta) tahun 2004 – 2008



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html>

Seluruh kebijakan, usaha, dan kegiatan ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada peluang bekerja atau kesempatan kerja. Berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja, karena berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Adanya fluktuasi di sekitar pertumbuhan ekonomi karena situasi perekonomian secara makro mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia. Tingkat kesempatan kerja di Indonesia sempat mengalami penurunan dari tahun 2004-2005, dan mulai ada peningkatan mulai tahun 2005-2008 (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia (%) tahun 2004 – 2008



Dari 111,477 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 65,164 juta dari mereka bekerja di perdesaan, dan di perkotaan sekitar 46,313 juta (Tabel 2.9). Pada tabel terlihat, bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki tempat tertinggi dari jumlah angkatan kerja di Indonesia, yakni sekitar 20,117 juta. Sedangkan angkatan kerja paling sedikit ada di Provinsi Papua Barat, yakni hanya sekitar 344,205 ribu saja.

2.3 Ekonomi

2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Indonesia pada tahun 2008 sedikit menurun dibandingkan tahun 2007, dan meningkat di pertumbuhan dengan migas. Berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 adalah sekitar 6,36 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah sekitar 6,85 persen (Tabel 2.10).

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Indonesia dari Sektor Pertanian ke Sektor Ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDB Indonesia. Pada tahun 2008 sumbangan Sektor Industri Pengolahan sekitar 27,20 persen, diikuti oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sekitar 14,68 persen, sedangkan sumbangan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,41 persen (Tabel 2.11). Pertumbuhan Sektor Konstruksi belum menonjol dibandingkan sektor lainnya, hal ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi Departemen PU sebagai pembinaanya.

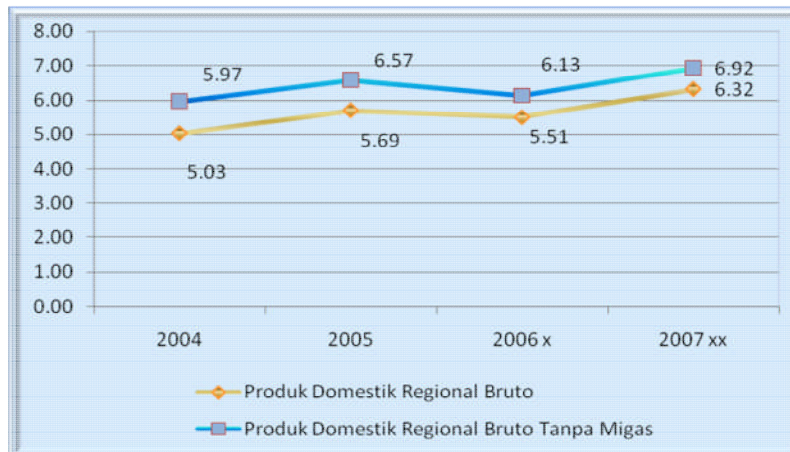
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Besaran PDRB per kapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk. Berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan 2000 dengan migas maupun tanpa migas, Kawasan Barat mempunyai PDRB yang tinggi untuk tahun 2004-2007 (Tabel 2.12). Berdasarkan harga berlaku dengan migas maupun tanpa migas, PDRB Per Kapita di Kawasan Barat juga lebih tinggi dari pada Kawasan Timur dari tahun 2004-2007, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar (Tabel 2.13).

Laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan atau tanpa migas pada kurun waktu 2004-2007 selalu mengalami pertumbuhan positif, kecuali tahun 2005-2006. Pada tahun 2004 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen dan tanpa migas sebesar 5,97 persen. Pada tahun 2007 kinerja perekonomian tumbuh sebesar 6,32 persen dan tanpa migas sebesar 6,92 persen (Gambar 2.3). Hal demikian juga terjadi pada perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 dengan atau tanpa migas (Gambar 2.4). Disini pada tahun 2004 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,66 persen dan tanpa migas sebesar 4,58

persen. Pada tahun 2007 kinerja perekonomian tumbuh sebesar 4,95 persen dan tanpa migas sebesar 5,54 persen.

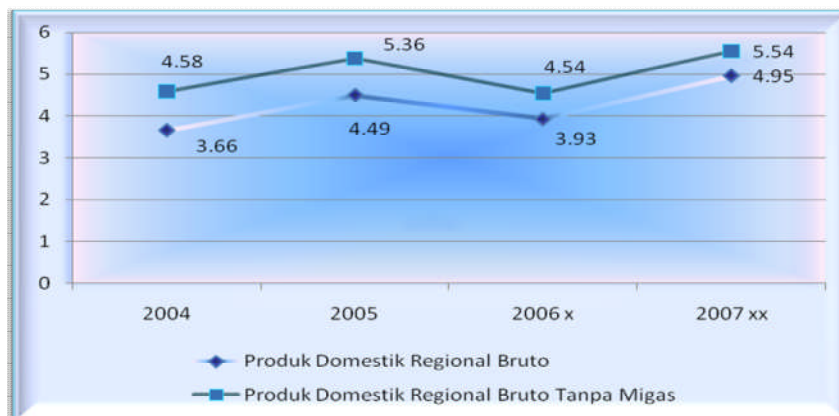
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), 2004-2007



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2008

Catatan : ^x Angka Sementara
^{xx} Angka sangat sementara

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), 2004-2007



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2008

Catatan : ^x Angka Sementara
^{xx} Angka Sangat Sementara

2.3.3 Pendapatan per Kapita

Secara umum pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita. Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 13,2 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 15,5 juta rupiah pada tahun 2007. Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita pada tahun 2007 bila dilihat berdasar harga konstan 2000 meningkat menjadi 5,41 persen, sementara tahun 2006 laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebesar 2,68 persen.

2.3.4 Analisis Lapangan Usaha Unggulan Provinsi

Hasil analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2005/2006 berdasarkan urutan lapangan usaha dari yang terbesar sampai yang terkecil dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB per provinsi, disajikan pada Tabel 2.14. Dari Tabel 2.14 dapat disimpulkan, bahwa lapangan usaha unggulan utama di Indonesia adalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini terbukti dengan adanya 17 provinsi yang memiliki lapangan usaha unggulan utama tersebut. Lapangan usaha unggulan berikutnya adalah Industri Pengolahan yang dimiliki 7 provinsi, disusul dengan Pertambangan yang terdapat di 6 provinsi. Secara khusus, untuk lapangan usaha unggulan utama Perdagangan, Hotel dan Restoran dimiliki hanya Provinsi Bali. Selain itu lapangan usaha unggulan utama Keuangan, Real Estate/ Persewaan dan Jasa Perusahaan hanya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk lapangan usaha unggulan utama Jasa-Jasa hanya dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta. Lapangan usaha unggulan utama, kedua, dan ketiga untuk Listrik-Gas-Air Minum, Bangunan/ Konstruksi, Pengangkutan dan Komunikasi belum dimiliki oleh provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdapat peluang yang besar untuk mengembangkan lapangan usaha di bidang air minum dan bangunan/ konstruksi yang menjadi tanggung jawab Departemen PU sebagai pembina dan penyelenggaraannya.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Provinsi Di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Luas Daratan ¹⁾ (Km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Kabupaten ¹⁾	Jumlah Kota ¹⁾	Jumlah Kecamatan ²⁾	Jumlah Desa ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	57.956,00	3,03	18	5	266	6.260
2	Sumatera Utara	72.981,23	3,82	21	7	378	5.713
3	Sumatera Barat	42.012,89	2,2	12	7	160	918
4	Riau	87.023,66	4,55	9	2	149	1.551
5	Jambi	50.058,16	2,62	9	1	114	1.295
6	Sumatera Selatan	91.592,43	4,79	11	4	202	2.971
7	Bengkulu	19.919,33	1,04	8	1	109	1.314
8	Lampung	34.623,80	1,81	9	2	198	2.265
9	Kep. Bangka Belitung	16.424,06	0,86	6	1	36	325
10	Kep. Riau	8.201,72	0,43	4	2	52	294
	Sumatera	480.793,28	25,15	107	32	1.664	22.906
11	D.K.I Jakarta	664,01	0,03	1	5	44	267
12	Jawa Barat	35.377,76	1,85	17	9	602	5.832
13	Jawa Tengah	32.800,69	1,72	29	6	568	8.573
14	D.I. Yogyakarta	3.133,15	0,16	4	1	78	438
15	Jawa Timur	47.799,75	2,5	29	9	657	8.505
16	Banten	9.662,92	0,51	4	3	152	1.504
17	Bali	5.780,06	0,3	8	1	56	707
	Jawa dan Bali	135.218,34	7,07	92	34	2.157	25.826
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32	0,97	7	2	113	883
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10	2,55	19	1	242	2.780
	Nusa Tenggara	67.290,42	3,52	26	3	355	3.663
20	Kalimantan Barat	147.307,00	7,71	12	2	164	1.686
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	8,04	13	1	117	1.432
22	Kalimantan Selatan	38.744,23	2,03	11	2	146	1.968
23	Kalimantan Timur	204.534,34	10,7	10	4	136	1.406
	Kalimantan	544.150,07	28,48	46	9	563	6.492
24	Sulawesi Utara	13.851,64	0,72	9	4	133	1.360
25	Sulawesi Tengah	61.841,29	3,24	9	1	132	1.628
26	Sulawesi Selatan	46.717,48	2,44	20	3	299	2.893
27	Sulawesi Tenggara	38.067,70	1,99	10	2	173	1.816
28	Gorontalo	11.257,07	0,59	5	1	47	491
29	Sulawesi Barat	16.787,18	0,88	5	0	58	507
	Sulawesi	188.522,36	9,86	58	11	842	8.695
30	Maluku	46.914,03	2,46	7	2	64	886
31	Maluku Utara	31.982,50	1,67	6	2	78	919
	Maluku	78.896,53	4,13	13	4	142	1.805
32	Papua Barat	97.024,27	5,08	8	1	106	1.199
33	Papua	319.036,05	16,7	20	1	302	2.822
	Papua	416.060,32	21,78	28	2	408	4.021
	Indonesia	1.910.931,32	100,00	370	95	6.131	73.408

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006 (Dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri)

Catatan : ¹⁾ Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008

²⁾ Berdasarkan Laporan BPS Provinsi Sampai dengan 31 Desember 2007

Tabel 2.2
Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Penduduk (000)				
		2004 ¹⁾²⁾	2005 ³⁾	2006 ⁵⁾	2007 ⁶⁾	2008 ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.018	4.083,5	4.073	4.223,8	4.293,9
2	Sumatera Utara	12.294	12.418,0	12.643	12.834,4	13.042,3
3	Sumatera Barat	4.372	4.567,2	4.632	4.697,8	4.763,1
4	Riau	5.861	4.835,9	4.763	5.071,0	5.189,2
5	Jambi	2.607	2.650,5	2.683	2.742,2	2.788,3
6	Sumatera Selatan	6.647 ⁴	6.815,9	6.900	7.020,0	7.121,8
7	Bengkulu	1.586 ⁴	1.566,1	1.568	1.616,7	1.641,9
8	Lampung	7.180	7.087,4	7.212	7.289,8	7.391,1
9	Kep. Bangka Belitung	957	1.074,8	1.075	1.106,7	1.122,5
10	Kep. Riau		1.278,9	1.338	1.392,9	1.453,1
	Sumatera	37.289	46.378,2	46.887,0	47.995,3	48.807,2
11	DKI Jakarta	8.636	8.892,3	8.963	9.064,6	9.146,2
12	Jawa Barat	38.383	39.150,6	39.649	40.329,1	40.918,3
13	Jawa Tengah	31.760	31.873,5	32.179	32.380,3	32.626,4
14	DI Yogyakarta	3.249	3.365,5	3.389	3.434,5	3.468,5
15	Jawa Timur	35.396	36.481,8	36.592	36.895,6	37.094,8
16	Banten	9.055	9.071,1	9.224	9.423,4	9.602,4
17	Bali	3.334	3.405,4	3.432	3.479,8	3.516,0
	Jawa dan Bali	129.813	132.240,2	133.428,0	135.007,3	136.372,6
18	Nusa Tenggara Barat	4.286	4.149,1	4.257	4.292,5	4.363,8
19	Nusa Tenggara Timur	4.068	4.279,5	4.355	4.448,9	4.534,3
	Nusa Tenggara	8.354	8.428,6	8.612,0	8.741,4	8.898,1
20	Kalimantan Barat	4.318	4.037,2	4.118	4.178,5	4.249,1
21	Kalimantan Tengah	2.080	1.969,7	1.938	2.028,3	2.057,3
22	Kalimantan Selatan	3.188	3.296,6	3.346	3.396,7	3.446,6
23	Kalimantan Timur	2.737	2.887,1	2.936	3.024,8	3.094,7
	Kalimantan	12.323	12.190,6	12.338,0	12.628,3	12.847,7
24	Sulawesi Utara	2.114	2.143,8	2.161	2.186,8	2.208,0
25	Sulawesi Tengah	2.358	2.312,0	2.349	2.396,2	2.438,4
26	Sulawesi Selatan	8.423	7.489,7	7.630	7.700,3	7.805,0
27	Sulawesi Tenggara	2.032	1.945,1	2.002	2.031,5	2.075,0
28	Gorontalo	865	936,3	941	960,3	972,2
29	Sulawesi Barat		985,7	992	1.016,7	1.032,3
	Sulawesi	15.792	15.812,6	16.075,0	16.291,8	16.530,9
30	Maluku	1.244	1.264,8	1.271	1.302,0	1.320,7
31	Maluku Utara	878	914,1	919	944,3	959,6
	Maluku	2.122	2.178,9	2.190,0	2.246,3	2.280,3
32	Papua Barat		688,2	688	716,0	730,0
33	Papua	2.458	1.934,7	1.974	2.015,6	2.056,5
	Papua		2.622,9	2.662,0	2.731,6	2.786,5
	Indonesia	208.151	219.852,0	222.192,0	225.642,0	228.523,3

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Catatan : 1) Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap

2) Termasuk penduduk yang non respon 2.283.981 orang dan estimasi 2.317.216 orang

3) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, 2005, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

4) Angka perbaikan berdasarkan Sensus Penduduk 2000

5) Hasil Estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005

6) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun (%)				
		2000 - 2004	2000-2005	2000-2006	2000-2007	2000-2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,56	0,77	0,60	1,04	1,12
2	Sumatera Utara	1,37	1,3	1,38	1,4	1,43
3	Sumatera Barat	0,72	1,46	1,45	1,45	1,44
4	Riau	4,32	4,14	3,35	3,64	3,47
5	Jambi	2,01	1,94	1,83	1,88	1,85
6	Sumatera Selatan	1.71 ¹	1,88	1,77	1,77	1,73
7	Bengkulu	2.17 ¹	1,48	1,25	1,51	1,52
8	Lampung	1,63	1,04	1,16	1,15	1,18
9	Kep. Bangka Belitung	1,55	3,61	3,00	3	2,8
10	Kep. Riau		5,05	4,28	4,86	4,79
11	DKI Jakarta	0,81	1,24	1,17	1,16	1,13
12	Jawa Barat	1,81	1,85	1,75	1,75	1,71
13	Jawa Tengah	0,43	0,41	0,50	0,52	0,55
14	DI Yogyakarta	1,01	1,52	1,38	1,38	1,33
15	Jawa Timur	0,45	0,97	0,86	0,85	0,81
16	Banten	2,83	2,3	2,19	2,19	2,15
17	Bali	1,43	1,57	1,44	1,43	1,38
18	Nusa Tenggara Barat	1,69	0,69	1,01	0,98	1,07
19	Nusa Tenggara Timur	1,56	2,28	2,20	2,19	2,16
20	Kalimantan Barat	1,83	0,1	0,42	0,57	0,71
21	Kalimantan Tengah	2,89	1,2	0,76	1,28	1,3
22	Kalimantan Selatan	1,67	2,01	1,93	1,87	1,82
23	Kalimantan Timur	2,79	3,32	3,05	3,05	2,95
24	Sulawesi Utara	1,38	1,39	1,29	1,28	1,24
25	Sulawesi Tengah	2,02	1,22	1,29	1,39	1,43
26	Sulawesi Selatan	1,14	1,03	1,07	1,14	1,16
27	Sulawesi Tenggara	2,78	1,34	1,60	1,58	1,65
28	Gorontalo	0,93	2,35	2,05	2,04	1,94
29	Sulawesi Barat		1,03	1,81	1,18	1,23
30	Maluku	1.62 ¹	1,63	1,44	1,58	1,57
31	Maluku Utara	1.88 ¹	2,32	2,02	2,12	2,06
32	Papua Barat	2,65	3,45	4,46	3,03	2,9
33	Papua		3,45	2,68	3,05	2,93
	Indonesia	1,34	1,4	1,34	1,37	1,36

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Catatan : 1) Angka perbaikan berdasarkan Sensus Penduduk 2000

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Per Provinsi				
		%				
		2004 ¹⁾	2005 ²⁾	2006	2007 ³⁾	2008 ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,86	1,86	1,83	1,87	1,88
2	Sumatera Utara	5,68	5,65	5,69	5,69	5,71
3	Sumatera Barat	2,02	2,08	2,08	2,08	2,08
4	Riau	2,71	2,2	2,14	2,25	2,27
5	Jambi	1,20	1,21	1,21	1,22	1,22
6	Sumatera Selatan	3,07	3,1	3,11	3,11	3,12
7	Bengkulu	0,73	0,71	0,71	0,72	0,72
8	Lampung	3,32	3,22	3,25	3,23	3,23
9	Kep. Bangka Belitung	0,44	0,49	0,48	0,49	0,49
10	Kep. Riau		0,58	0,60	0,62	0,64
	Sumatera	21,03	21,10	21,10	21,28	21,36
11	DKI Jakarta	3,99	4,04	4,03	4,02	4,00
12	Jawa Barat	17,74	17,81	17,84	17,87	17,91
13	Jawa Tengah	14,68	14,5	14,48	14,35	14,28
14	D.I. Yogyakarta	1,50	1,53	1,53	1,52	1,52
15	Jawa Timur	16,36	16,59	16,47	16,35	16,23
16	Banten	4,18	4,13	4,15	4,18	4,20
17	Bali	1,54	1,55	1,54	1,54	1,54
	Jawa dan Bali	59,99	60,15	60,04	59,83	59,68
18	Nusa Tenggara Barat	1,98	1,89	1,92	1,90	1,91
19	Nusa Tenggara Timur	1,88	1,95	1,96	1,97	1,98
	Nusa Tenggara	3,86	3,84	3,88	3,87	3,89
20	Kalimantan Barat	2,00	1,84	1,85	1,85	1,86
21	Kalimantan Tengah	0,96	0,9	0,87	0,90	0,90
22	Kalimantan Selatan	1,47	1,5	1,51	1,51	1,51
23	Kalimantan Timur	1,27	1,31	1,32	1,34	1,35
	Kalimantan	5,70	5,55	5,55	5,60	5,62
24	Sulawesi Utara	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97
25	Sulawesi Tengah	1,09	1,05	1,06	1,06	1,07
26	Sulawesi Selatan	3,89	3,41	3,43	3,41	3,42
27	Sulawesi Tenggara	0,94	0,88	0,90	0,90	0,91
28	Gorontalo	0,40	0,43	0,42	0,43	0,43
29	Sulawesi Barat		0,45	0,45	0,45	0,45
	Sulawesi	7,30	7,2	6,78	6,77	6,80
30	Maluku	0,57	0,58	0,57	0,58	0,58
31	Maluku Utara	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42
	Maluku	0,98	1,00	0,98	1,00	1,00
32	Papua Barat	1,14	0,31	0,31	0,32	0,32
33	Papua		0,88	0,89	0,89	0,90
	Papua	1,14	1,19	1,20	1,21	1,22
	Indonesia	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Catatan : 1) Angka proyeksi penduduk Indonesia

2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, 2005, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

3) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Kepadatan Penduduk Per				
		Km2				
		2004 ¹⁾	2005 ²⁾	2006	2007 ³⁾	2008 ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	77	72	78	75	76
2	Sumatera Utara	167	171	172	177	180
3	Sumatera Barat	102	108	108	111	113
4	Riau	62	55	54	58	59
5	Jambi	49	58	50	60	61
6	Sumatera Selatan	71	113	74	116	118
7	Bengkulu	80	79	79	82	83
8	Lampung	203	188	204	193	196
9	Kep. Bangka Belitung	59	65	66	67	68
10	Kep. Riau		158	15	172	180
11	DKI Jakarta	13.006	12.012	13.499	12.245	12.355
12	Jawa Barat	1.109	1.060	1.146	1.092	1.108
13	Jawa Tengah	976	972	989	987	995
14	D.I. Yogyakarta	1.020	1.074	1.064	1.096	1.107
15	Jawa Timur	739	781	764	790	794
16	Banten	1.047	1.006	1.066	1.045	1.065
17	Bali	592	625	625	639	645
18	Nusa Tenggara Barat	213	211	211	218	221
19	Nusa Tenggara Timur	86	93	93	96	98
20	Kalimantan Barat	29	28	34	35	35
21	Kalimantan Tengah	14	12	13	13	13
22	Kalimantan Selatan	73	75	85	87	89
23	Kalimantan Timur	12	12	15	16	16
24	Sulawesi Utara	138	139	154	157	158
25	Sulawesi Tengah	37	36	34	35	36
26	Sulawesi Selatan	135	85	162	167	169
27	Sulawesi Tenggara	53	51	53	55	56
28	Gorontalo	71	75	77	79	80
29	Sulawesi Barat		11	59	61	61
30	Maluku	26	27	27	27	28
31	Maluku Utara	28	29	23	24	24
32	Papua Barat		21	6	6	6
33	Papua	7	7	6	7	7
	Indonesia	114	116	118	121	123

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Catatan : 1) Angka proyeksi penduduk Indonesia

2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, 2005, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

3) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.6
Rumah Tangga Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Rumah Tangga				
		(000)				
		2004	2005 ¹⁾	2006 ²⁾	2007 ³⁾	2008 ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.024	898,8	908	941,4	957,0
2	Sumatera Utara	2.861	2.802,4	2.846	2.932,9	2.980,4
3	Sumatera Barat	1.079	1.091,4	1.107	1.125,4	1.141,0
4	Riau	1.502	1.068,8	1.111	1.187,5	1.215,1
5	Jambi	667	642,1	654	669,8	680,9
6	Sumatera Selatan	1.678	1.585,3	1.613	1.644,0	1.667,7
7	Bengkulu	411	380,0	385	397,2	403,3
8	Lampung	1.806	1.745,4	1.769	1.791,0	1.815,9
9	Kep. Bangka Belitung	235	257,2	265	272,9	276,8
10	Kep. Riau		345,0	362	378,3	395,0
11	DKI Jakarta	2.416	2.211,0	2.237	2.267,1	2.287,4
12	Jawa Barat	11.324	10.185,0	10.364	10.556,2	10.708,1
13	Jawa Tengah	8.497	8.361,3	8.414	8.487,4	8.551,5
14	D.I. Yogyakarta	1.001	999,9	1.013	1.037,8	1.048,1
15	Jawa Timur	10.144	9.845,2	9.926	10.068,4	10.121,2
16	Banten	2.399	2.145,2	2.192	2.247,1	2.289,8
17	Bali	886	859,4	872	885,3	894,6
18	Nusa Tenggara Barat	1.238	1.085,5	1.104	1.117,4	1.135,9
19	Nusa Tenggara Timur	872	909,2	929	952,6	970,6
20	Kalimantan Barat	1.028	907,6	922	938,2	954,1
21	Kalimantan Tengah	576	472,8	478	501,3	508,4
22	Kalimantan Selatan	869	866,6	883	899,6	912,7
23	Kalimantan Timur	721	682,1	703	725,5	741,9
24	Sulawesi Utara	612	564,0	572	581,4	586,9
25	Sulawesi Tengah	583	545,7	559	570,8	580,9
	Sulawesi Selatan	2.002	1.711,6	1.740	1.760,3	1.784,1
27	Sulawesi Tenggara	487	437,6	446	453,5	463,2
28	Gorontalo	246	234,6	239	244,9	247,9
29	Sulawesi Barat		219,0	223	229,3	232,8
30	Maluku	253	269,6	274	281,0	285,1
31	Maluku Utara	159	188,5	196	201,7	205,0
32	Papua Barat		150,0	166	174,4	177,8
33	Papua	675	451,1	469	485,0	494,8
	Indonesia	58.251	55.118,9	55.941	57.006,6	57.715,9

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Catatan : 1) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, 2005, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut)

hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

2) Hasil Estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005

3) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.7
Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Sumatera Utara	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Sumatera Barat	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
4	Riau	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3
5	Jambi	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1
6	Sumatera Selatan	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3
7	Bengkulu	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1
8	Lampung	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
9	Kep. Bangka Belitung	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
10	Kep. Riau		3,7	3,7	3,7	3,7
11	DKI Jakarta	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
12	Jawa Barat	3,4	3,8	3,8	3,8	3,8
13	Jawa Tengah	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
14	D.I. Yogyakarta	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
15	Jawa Timur	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
16	Banten	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2
17	Bali	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
18	Nusa Tenggara Barat	3,5	3,9	3,9	3,8	3,8
19	Nusa Tenggara Timur	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
20	Kalimantan Barat	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5
21	Kalimantan Tengah	3,6	4,1	4,1	4,0	4,0
22	Kalimantan Selatan	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
23	Kalimantan Timur	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2
24	Sulawesi Utara	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8
25	Sulawesi Tengah	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
	Sulawesi Selatan	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
27	Sulawesi Tenggara	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5
28	Gorontalo	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9
29	Sulawesi Barat		4,4	4,4	4,4	4,4
30	Maluku	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
31	Maluku Utara	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7
32	Papua Barat		4,3	4,1	4,1	4,1
33	Papua	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2
	Indonesia	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Tabel 2.8 :
Jumlah Penduduk Miskin Di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	Jumlah (000)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.157,2	1.166,4	1.149,7	1.083,7	959,7
2	Sumatera Utara	1.800,1	1.840,2	1.897,1	1.768,5	1.613,8
3	Sumatera Barat	472,4	482,8	578,8	529,2	477,2
4	Riau	744,4	600,4	564,9	574,5	566,7
5	Jambi	325,1	317,8	304,6	281,9	260,3
6	Sumatera Selatan	1.379,3	1.429,0	1.446,9	1.331,8	1.249,6
7	Bengkulu	345,1	361,2	360,0	370,6	352,0
8	Lampung	1.561,7	1.572,6	1.638,0	1.661,7	1.591,6
9	Kep.Bangka Belitung	91,8	95,3	117,4	95,1	86,7
10	Kep.Riau	-	148,0	163,0	148,4	136,4
11	DKI Jakarta	277,1	316,2	407,1	405,7	379,6
12	Jawa Barat	4.654,2	5.137,6	5.712,5	5.457,9	5.322,4
13	Jawa Tengah	6.843,8	6.533,5	7.100,6	6.557,2	6.189,6
14	DI Yogyakarta	616,2	625,8	648,7	633,5	616,3
15	Jawa Timur	7.312,5	7.139,9	7.678,1	7.155,3	6.651,3
16	Banten	779,2	830,5	904,2	886,2	816,7
17	Bali	231,9	228,4	243,4	229,1	215,7
18	Nusa Tenggara Barat	1.031,6	1.136,5	1.156,1	1.118,6	1.080,6
19	Nusa Tenggara Timur	1.152,1	1.171,2	1.273,9	1.163,6	1.098,3
20	Kalimantan Barat	558,2	629,8	626,7	584,3	508,8
21	Kalimantan Tengah	194,1	230,9	212,8	210,3	200,0
22	Kalimantan Selatan	231,0	235,7	278,4	233,5	218,9
23	Kalimantan Timur	318,2	299,1	335,4	324,8	286,4
24	Sulawesi Utara	192,2	201,4	249,4	250,1	223,5
25	Sulawesi Tengah	486,3	527,5	553,5	557,4	524,7
26	Sulawesi Selatan	1.241,5	1.280,6	1.112,0	1.083,4	1.031,7
27	Sulawesi Tenggara	418,4	450,5	466,7	465,4	435,9
28	Gorontalo	259,1	255,0	273,8	241,9	221,6
29	Sulawesi Barat	-	0,0	205,2	189,9	171,1
30	Maluku	397,6	411,5	418,6	404,7	391,3
31	Maluku Utara	107,8	118,6	116,8	109,9	105,1
32	Irian Jaya Barat	-	0,0	284,1	266,8	246,5
33	Papua	966,8	1.028,2	816,7	793,4	733,1
Indonesia		36.146,9	36.802,100	39.295,10	37.168,3	34.963,1

Sumber : Diolah dari Susenas kor 2006

BPS, Statistik Indonesia 2005/2006, 2007, 2008

Tabel 2.9
Angkatan Kerja Menurut Wilayah per Provinsi
Tahun 2008

No.	Provinsi	Wilayah		Jumlah
		Perdesaan	Perkotaan	
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.308.687	472.803	1.781.490
2	Sumatera Utara	3.416.629	2.514.263	5.930.892
3	Sumatera Barat	1.511.770	614.014	2.125.784
4	Riau	1.554.333	679.982	2.234.315
5	Jambi	924.786	332.109	1.256.895
6	Sumatera Selatan	2.424.931	1.029.380	3.454.311
7	Bengkulu	624.532	211.716	836.248
8	Lampung	2.849.976	809.196	3.659.172
9	Kep. Bangka Belitung	296.939	204.447	501.386
10	Kep. Riau	131.488	521.049	652.537
11	DKI Jakarta	-	4.559.108	4.559.108
12	Jawa Barat	9.135.177	9.292.065	18.427.242
13	Jawa Tengah	10.394.722	6.945.951	17.340.673
14	D.I. Yogyakarta	874.550	1.108.982	1.983.532
15	Jawa Timur	12.180.486	7.936.759	20.117.245
16	Banten	1.865.462	2.388.899	4.254.361
17	Bali	1.058.688	1.036.009	2.094.697
18	Nusa Tenggara Barat	1.329.096	744.301	2.073.397
19	Nusa Tenggara Timur	1.920.557	290.319	2.210.876
20	Kalimantan Barat	1.661.990	503.689	2.165.679
21	Kalimantan Timur	804.561	273.270	1.077.831
22	Kalimantan Selatan	1.141.916	571.218	1.713.134
23	Kalimantan Tengah	585.254	664.234	1.249.488
24	Sulawesi Utara	636.997	409.668	1.046.665
25	Sulawesi Tengah	979.368	240.089	1.219.457
26	Sulawesi Selatan	2.224.827	1.052.030	3.276.857
27	Sulawesi Tenggara	786.869	176.469	963.338
28	Gorontalo	317.148	106.228	423.376
29	Sulawesi Barat	389.204	88.632	477.836
30	Maluku	412.759	141.589	554.348
31	Maluku Utara	312.486	104.965	417.451
32	Papua Barat	246.979	97.226	344.205
33	Papua	861.077	192.544	1.053.621
	Indonesia	65.164.244	46.313.203	111.477.447

Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html>

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2004 - 2008

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006 ^x	2007 ^{xx}	2008 ^{xxx 1)}
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, peternakan, kehutanan , dan perikanan	2,82	2,72	3,36	3,50	5,33
2	Pertambangan dan penggalian	-4,48	3,2	1,70	1,98	-1,41
3	Industri pengolahan	6,38	4,6	4,59	4,66	4,14
4	Listrik, gas,dan air bersih	5,30	6,3	5,76	10,40	11,88
5	Konstruksi	7,49	7,54	8,34	8,61	7,95
6	Perdagangan,hotel,dan restoran	5,70	8,3	6,42	8,46	7,50
7	Pengangkutan dan komunikasi	13,38	12,76	14,38	14,38	19,96
8	Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	7,66	6,7	5,47	7,99	8,46
9	Jasa-jasa	5,38	5,16	6,16	6,60	6,05
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,03	5,69	5,51	6,32	6,36
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	5,97	6,57	6,13	6,92	6,85

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007, 2008

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

^{xxx} Angka sangat sangat sementara

¹⁾ Data sampai semester I-2008 dihitung berdasarkan perubahan PDB semester I-2008 terhadap PDB semester I-2007

Tabel 2.11
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2004 - 2008

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006 ^x	2007 ^{xx}	2008 ^{xxx 1)}
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, peternakan, kehutanan , dan perikanan	14,34	13,13	12,97	13,83	14,68
2	Pertambangan dan penggalian	8,94	11,14	10,97	11,14	11,37
3	Industri pengolahan	28,07	27,41	27,54	27,01	27,2
4	Listrik, gas,dan air bersih	1,03	0,96	0,91	0,88	0,83
5	Konstruksi	6,59	7,03	7,52	7,71	7,88
6	Perdagangan,hotel,dan restoran	16,05	15,56	15,02	14,93	14,41
7	Pengangkutan dan komunikasi	6,20	6,51	6,94	6,70	6,24
8	Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	8,47	8,31	8,06	7,71	7,4
9	Jasa-jasa	10,32	9,96	10,07	10,09	9,99
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	90,73	88,61	88,86	89,48	88,90

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007, 2008

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

^{xxx} Angka sangat sangat sementara

¹⁾ Data sampai semester I

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah)

No	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto				Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			
		2004	2005	2006 ^x	2007 ^{xx}	2004	2005	2006 ^x	2007 ^{xx}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh D.	40.374.282	36.287.915	36.853.869	36.038.114	22.260.704	22.531.792	24.267.798	26.077.224
2	Sumatera Utara	83.328.949	87.897.791	93.347.404	99.792.273	82.675.239	87.240.283	92.698.982	99.085.667
3	Sumatera Barat	27.578.137	29.159.481	30.949.945	32.912.969	27.578.137	29.159.481	30.949.945	32.912.969
4	Riau	75.216.719	79.287.587	83.370.867	86.213.259	30.879.768	33.516.542	36.417.633	39.420.760
5	Jambi	11.953.885	12.619.972	13.363.621	14.275.161	10.411.851	11.062.278	11.985.807	12.775.067
6	Sumatera Selatan	47.344.395	49.633.536	52.214.848	55.262.115	33.969.083	36.317.674	38.971.024	42.106.150
7	Bengkulu	5.896.255	6.239.364	6.610.626	7.008.965	5.896.255	6.239.364	6.610.626	7.008.965
8	Lampung	28.262.289	29.397.248	30.861.360	32.694.890	27.567.277	28.837.138	30.367.226	32.231.943
9	Kep. Bangka Belitung	8.414.980	8.707.309	8.053.906	9.465.062	8.014.748	8.383.033	8.785.985	9.257.539
10	Kep. Riau	28.509.063	30.381.500	32.441.003	34.713.814	26.671.125	28.559.848	30.625.256	32.937.720
11	DKI Jakarta	278.524.822	295.270.544	312.826.713	332.971.263	277.537.331	294.354.567	311.893.651	332.033.920
12	Jawa Barat	230.003.496	242.883.882	257.499.446	273.995.145	220.295.697	234.010.928	248.774.393	265.834.045
13	Jawa Tengah	135.789.872	143.051.214	150.682.655	159.110.254	127.212.003	133.578.036	140.681.441	149.083.139
14	DI. Yogyakarta	16.146.424	16.910.877	17.535.749	18.291.512	16.146.424	16.910.877	17.535.749	18.291.512
15	Jawa Timur	242.228.892	256.374.727	271.249.317	287.814.184	241.628.131	255.744.993	270.564.918	286.912.119
16	Banten	54.880.407	58.106.948	61.341.659	65.046.776	54.880.407	58.106.948	61.341.659	65.046.776
17	Bali	19.963.244	21.072.445	22.184.679	23.497.047	19.963.244	21.072.445	22.184.679	23.497.047
18	Nusa Tenggara Barat	14.928.175	15.183.789	15.602.137	16.365.476	14.928.175	15.183.789	15.602.137	16.365.476
19	Nusa Tenggara Timur	9.537.095	9.867.309	10.368.505	10.902.404	9.537.095	9.867.309	10.368.505	10.902.404
20	Kalimantan Barat	22.483.015	23.538.350	24.768.375	26.260.648	22.483.015	23.538.350	24.768.375	26.260.648
21	Kalimantan Tengah	13.253.081	14.034.632	14.853.726	15.754.509	13.253.081	14.034.632	14.853.726	15.754.509
22	Kalimantan Selatan	22.171.332	23.292.545	24.452.265	25.922.288	21.692.484	22.841.024	23.995.326	25.453.963
23	Kalimantan Timur	91.050.429	93.938.002	96.612.842	97.803.248	39.307.435	42.478.012	47.840.685	52.412.869
24	Sulawesi Utara	12.149.501	12.744.550	13.532.072	14.407.302	12.127.463	12.725.590	13.508.804	14.382.448
25	Sulawesi Tengah	10.925.465	11.752.236	12.671.549	13.683.882	10.925.465	11.710.851	12.556.451	13.467.249
26	Sulawesi Selatan	37.267.558	36.421.787	38.867.679	41.332.426	37.188.098	36.337.250	38.781.501	41.242.733
27	Sulawaeasi Tenggara	7.480.180	8.026.856	8.643.330	9.331.720	7.480.180	8.026.856	8.643.330	9.331.720
28	Gorontalo	1.891.763	2.027.723	2.175.815	2.339.218	1.891.763	2.027.723	2.175.815	2.339.218
29	Sulawesi Barat	-	3.106.723	3.321.147	3.567.816	-	3.106.723	3.321.147	3.567.816
30	Maluku	3.101.996	3.259.244	3.440.114	3.633.475	3.087.487	3.244.433	3.424.966	3.621.682
31	Maluku Utara	2.128.208	2.236.804	2.359.483	2.501.175	2.128.208	2.236.804	2.359.483	2.501.175
32	Papua Barat	4.969.210	5.307.329	5.548.901	5.934.316	3.665.643	3.915.926	4.204.030	4.566.066
33	Papua	16.282.968	22.209.193	18.388.879	19.176.080	16.282.968	22.209.193	18.388.879	19.176.080
	Kawasan Barat	1.334.416.111	1.403.282.340	1.482.387.667	1.569.102.802	1.233.587.422	1.305.626.226	1.384.656.773	1.474.512.561
	Kawasan Timur	269.619.977	286.947.072	295.606.819	308.915.983	215.978.561	233.484.463	244.793.160	261.346.056
	Jumlah 33 Provinsi	1.604.036.088	1.690.229.412	1.777.994.485	1.878.018.785	1.449.565.982	1.539.110.689	1.629.449.934	1.735.858.617
	Indonesia	1.656.516.800	1.750.815.200	1.847.292.900	1.963.974.300	1.506.296.600	1.605.261.800	1.703.588.600	1.821.439.400

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2008

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2007 (Rupiah)

No	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto				Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			
		2004	2005	2006 ^x	2007 ^{xx}	2004	2005	2006 ^x	2007 ^{xx}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh D.	12.315.041	14.126.344	17.380.603	17.329.348	7.373.227	8.792.891	11.024.312	12.268.734
2	Sumatera Utara	9.741.566	11.213.502	12.684.532	14.166.626	9.670.724	11.128.206	12.590.503	14.054.089
3	Sumatera Barat	8.237.021	9.783.911	11.448.154	12.729.257	8.237.021	9.783.911	11.448.154	12.729.257
4	Riau	25.277.950	30.358.669	35.078.808	41.412.847	14.277.323	17.266.126	19.908.148	23.079.490
5	Jambi	7.042.173	8.530.836	9.712.623	11.697.441	5.967.350	6.981.859	8.228.765	9.552.067
6	Sumatera Selatan	9.703.582	12.021.149	13.902.937	15.654.739	6.859.975	7.774.114	9.203.052	10.670.321
7	Bengkulu	5.231.840	6.408.024	7.119.875	7.930.113	5.231.840	6.408.024	7.119.875	7.930.113
8	Lampung	5.098.641	5.748.422	6.811.122	8.357.190	4.936.818	5.537.703	6.615.241	8.160.135
9	Kep. Bangka Belitung	11.522.398	13.581.435	14.812.895	16.170.337	11.031.733	12.971.753	14.235.209	15.695.377
10	Kep. Riau	30.818.150	32.148.725	34.544.700	37.206.980	28.198.793	29.348.317	31.356.359	34.043.905
11	DKI Jakarta	42.922.396	48.966.320	55.981.204	62.490.337	42.766.826	48.745.186	55.711.476	62.199.525
12	Jawa Barat	7.917.547	9.989.484	11.934.520	13.048.168	7.571.135	9.513.400	11.305.576	12.433.846
13	Jawa Tengah	5.944.029	7.331.151	8.763.269	9.648.737	5.395.505	6.351.178	7.552.711	8.419.159
14	DI. Yogyakarta	6.832.258	7.577.825	8.680.929	9.584.047	6.832.258	7.577.825	8.680.929	9.584.047
15	Jawa Timur	9.348.913	11.114.488	12.861.333	14.498.199	9.328.666	11.089.836	12.830.630	14.456.127
16	Banten	8.074.880	9.372.525	10.610.241	11.400.592	8.074.880	9.372.525	10.610.241	11.400.592
17	Bali	8.532.323	10.032.731	10.895.398	12.166.391	8.532.323	10.032.731	10.895.398	12.166.391
18	Nusa Tenggara Barat	5.422.892	6.137.704	6.716.363	7.808.657	5.422.892	6.137.704	6.716.363	7.808.657
19	Nusa Tenggara Timur	3.129.110	3.476.397	3.881.424	4.301.535	3.129.110	3.476.397	3.881.424	4.301.535
20	Kalimantan Barat	7.376.271	8.357.992	9.158.071	10.165.998	7.376.271	8.357.992	9.158.071	10.165.998
21	Kalimantan Tengah	9.783.026	10.957.841	12.633.202	13.765.224	9.783.026	10.957.841	12.633.202	13.765.224
22	Kalimantan Selatan	8.685.660	9.687.427	10.362.442	11.610.975	8.527.613	9.531.669	10.204.574	11.438.453
23	Kalimantan Timur	48.344.364	63.286.021	67.970.624	70.120.040	19.382.953	23.907.098	28.005.295	31.014.068
24	Sulawesi Utara	7.286.098	8.814.194	9.840.920	11.100.201	7.275.888	8.805.287	9.830.151	11.088.752
25	Sulawesi Tengah	6.507.480	7.458.722	8.219.235	9.074.112	6.507.480	7.431.158	8.116.237	8.880.669
26	Sulawesi Selatan	5.804.709	6.895.138	7.982.347	8.996.056	5.794.603	6.877.848	7.963.158	8.974.653
27	Sulawaeasi Tenggara	5.340.428	6.612.777	7.628.241	8.837.210	5.340.428	6.612.777	7.628.241	8.837.210
28	Gorontalo	3.122.194	3.774.298	4.314.951	4.957.328	3.122.194	3.774.298	4.314.951	4.957.328
29	Sulawesi Barat	-	4.562.424	5.162.733	6.091.286	-	4.562.424	5.162.733	6.091.286
30	Maluku	3.254.396	3.652.035	3.996.615	4.377.086	3.239.707	3.636.719	3.980.722	4.364.695
31	Maluku Utara	2.714.198	2.921.591	3.066.296	3.346.523	2.714.198	2.921.591	3.066.296	3.346.523
32	Papua Barat	10.236.301	12.307.355	12.994.588	14.483.032	7.267.914	8.441.298	9.249.748	10.408.120
33	Papua	13.257.949	23.256.691	23.761.847	27.468.415	13.257.949	23.256.691	23.761.847	27.468.415
	Kawasan Barat	10.344.624	12.339.058	14.351.004	16.026.886	9.609.076	11.361.890	13.189.514	14.760.202
	Kawasan Timur	9.284.403	11.581.297	12.694.430	13.916.280	7.237.320	8.765.350	9.807.687	11.044.292
	Jumlah 33 Provinsi	10.148.160	12.197.182	14.038.824	15.628.047	9.169.579	10.875.740	12.552.210	14.058.010
	Indonesia	10.610.081	12.675.545	15.029.733	17.581.380	9.626.872	11.213.533	13.354.680	15.731.194

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2008

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.14
Sektor Unggulan Provinsi (PDRB Terhadap Lapangan Usaha)
Tahun 2005*/ 2006

No.	Provinsi	Lapangan Usaha**								
		Pertan.	Pertamb.	Industri	L, G, AM	Konstruksi	Perd, H, R	Peng. Kom	Keu, RE, Jper	Jasa2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nanggroe Aceh D.	2	1	3	9	7	4	6	8	5
2	Sumatera Utara	2	8	1	9	7	3	5	6	4
3	Sumatera Barat	1	8	5	9	6	2	4	7	3
4	Riau	2	1	3	9	5	8	6	7	4
5	Jambi	1	2	4	9	7	3	6	8	5
6	Sumatera Selatan	3	1	2	9	6	4	7	8	5
7	Bengkulu	1	7	6	9	8	2	4	5	3
8	Lampung	1	8	3	9	7	2	5	6	4
9	Kep. Bangka Belitung	3	2	1	9	6	4	7	8	5
10	Kep. Riau	5	2	1	9	6	3	7	4	8
11	DKI Jakarta	9	8	3	7	5	2	6	1	4
12	Jawa Barat	3	7	1	9	6	2	5	8	4
13	Jawa Tengah	2	9	1	8	6	3	5	7	4
14	DI. Yogyakarta	3	9	4	8	6	2	5	7	1
15	Jawa Timur	2	8	1	9	7	3	6	5	4
16	Banten	5	9	1	7	8	3	4	2	6
17	Bali	2	9	5	8	7	1	4	6	3
18	Nusa Tenggara Barat	2	1	8	9	6	3	5	7	4
19	Nusa Tenggara Timur	1	8	7	9	4	3	5	6	2
20	Kalimantan Barat	1	8	3	9	5	2	6	7	4
21	Kalimantan Tengah	1	6	5	9	7	2	4	8	3
22	Kalimantan Selatan	1	2	4	9	7	3	6	8	5
23	Kalimantan Timur	4	1	2	9	7	3	5	8	6
24	Sulawesi Utara	1	8	6	9	4	3	5	7	2
25	Sulawesi Tengah	1	8	4	9	5	3	6	7	2
26	Sulawesi Selatan	1	5	3	9	8	2	6	7	4
27	Sulaweasi Tenggara	1	8	6	9	5	2	4	7	3
28	Gorontalo	1	8	6	9	7	3	5	4	2
29	Sulawesi Barat	1	8	4	9	6	3	7	5	2
30	Maluku	1	8	6	9	7	2	4	5	3
31	Maluku Utara	1	6	3	9	8	2	4	7	5
32	Papua	2	1	7	9	5	4	6	8	3
33	Papua Barat	1	3	2	9	6	4	7	8	5
Lap. Usaha Unggulan (Prov.)		17	6	7			1		1	1

Sumber : Daerah Dalam Angka 2008 (Diolah oleh Pusdata)

BAB III

INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1 Konstruksi

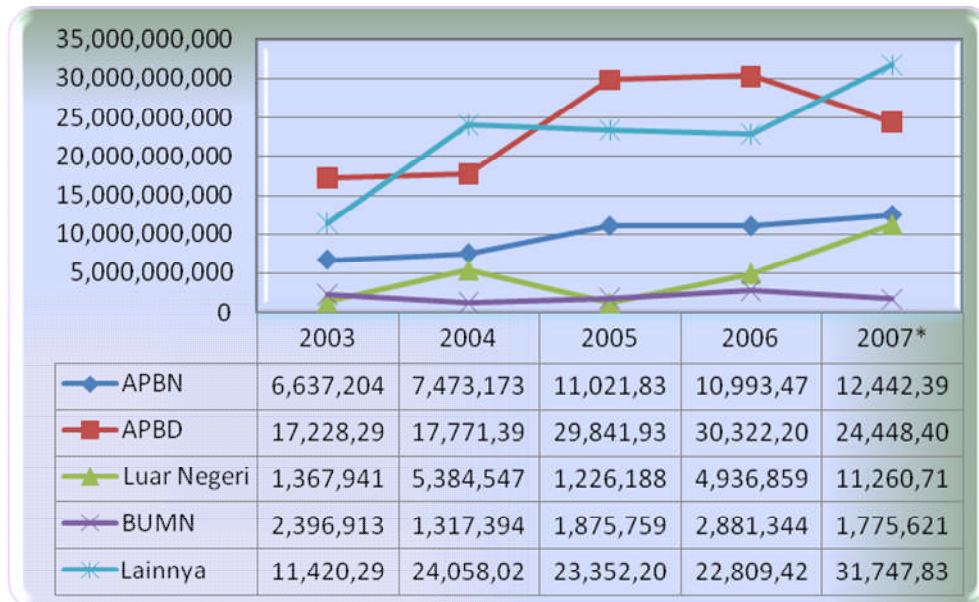
Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan antara lain : gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, dan lain-lain. Sektor Konstruksi memiliki peranan yang amat signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena Sektor Konstruksi memiliki keterkaitan sangat erat terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dari sisi lapangan pekerjaan, peranan Sektor Konstruksi mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Indonesia dari tahun 2003-2007 mengalami penurunan, yaitu dari 79.867 perusahaan tahun 2003 menjadi 76.790 perusahaan tahun 2007 (Tabel 3.1).

Nilai konstruksi yang diselesaikan merupakan komponen utama dalam struktur output perusahaan konstruksi. Jika pada tahun 2003 nilai konstruksi mencapai sebesar 39,1 triliun rupiah, pada tahun 2006 mencapai 71,9 triliun rupiah atau naik 19,4 persen per tahun, dan tahun 2007 naik 10,4% menjadi 79,4 triliun rupiah (Tabel 3.2 dan Tabel 3.3).

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, proyek konstruksi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tabel 3.2 menunjukkan pada tahun 2006 dan 2007 sekitar 59% dan 59,6% dari total nilai konstruksi berada di Pulau Jawa, dan sejak tahun 2005 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Struktur persentase nilai konstruksi antar kelompok pulau cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 3.1 Nilai Konstruksi yang diselesaikan dari berbagai sumber dana (000 rupiah)

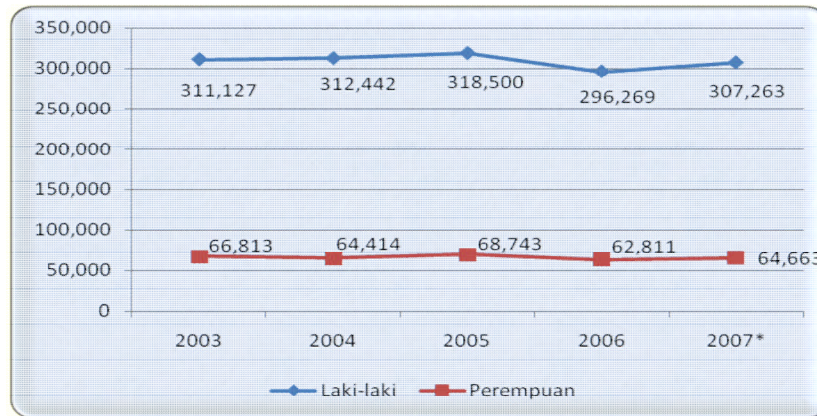


Sumber : Statistik Konstruksi 2007
 Catatan : * Angka Sementara

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sejak tahun 2003 proyek-proyek konstruksi yang dibiayai dari APBD cenderung meningkat (Gambar 3.1). Pada tahun 2003 APBD berkontribusi sebesar 44,1% dan pada tahun 2007 menurun menjadi 29,9%. Fakta ini menunjukkan, bahwa salah satu fungsi Departemen PU sebagai pembina penyelenggaraan pembangunan dan telah menjalankan kebijakan otonomi daerah dengan baik.

Sektor konstruksi merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Sebagai gambaran, jumlah karyawan tetap yang diserap mulai tahun 2003 meningkat khususnya karyawan tetap laki-laki, tahun 2006 diperkirakan jumlah karyawan tetap turun dari tahun 2005 sebesar 7%. Pada Gambar 3.2 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tetap laki-laki lebih besar dibanding dengan perempuan. Untuk tenaga kerja tetap perempuan mengalami penurunan jumlah dua kali, yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2006, diperkirakan akan naik kembali di tahun 2007.

Gambar 3.2 Jumlah karyawan bidang konstruksi tetap menurut gender



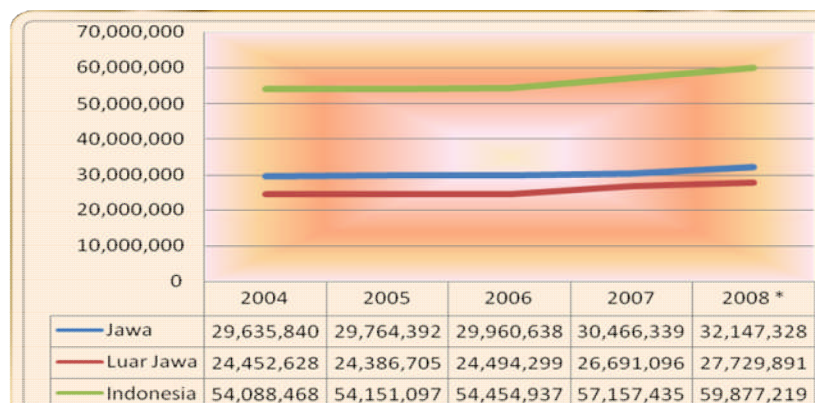
Sumber : Statistik Konstruksi 2007

Catatan : * Angka Sementara

3.2 Potensi Lahan Sawah

Angka perkiraan produksi padi tahun 2008 sebesar 59,9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan dengan produksi tahun 2007 terjadi kenaikan sebanyak 2,72 juta ton (4,76%) (Gambar 3.3). Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan luas panen 237,6 ribu hektar (1,96%) (Tabel 3.4). Kenaikan produksi padi tahun 2008 ini terjadi di Luar Jawa sebesar 1,04 juta ton (3,89%) dan di Jawa sebesar 1,68 juta ton (5,52%) (Gambar 3.3).

Gambar 3.3 Produksi Padi¹ menurut Provinsi (ton), 2004-2008



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2008

Catatan : 1) Bentuk produksi gabah kering giling

*) Angka Ramalan II

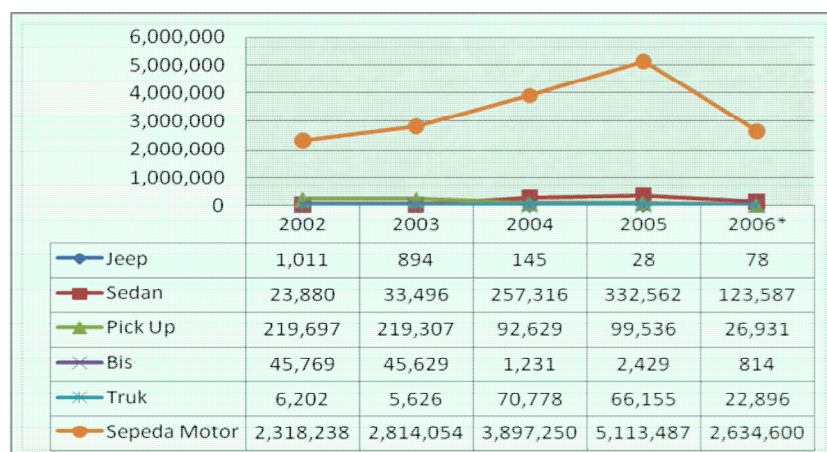
3.3 Angkutan Darat (Transportasi)

Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara. Pembahasan lebih lanjut hanya dibatasi angkutan umum di darat saja.

Pada tahun 2006 jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kepolisian RI diperkirakan sebanyak 45,08 juta unit. Komposisinya pada tahun 2006 terdiri atas : 74,12% sepeda motor, 14,67% mobil penumpang, 7,86% truk, serta 3,35% bis (Tabel 3.5). Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor terbanyak berada di provinsi DKI Jakarta.

Jumlah kendaraan bermotor rakitan dalam negeri tahun 2005 naik 29,98% dibandingkan tahun 2004 menjadi 5,61 juta unit. Komposisi kendaraan bermotor rakitan dalam negeri pada tahun 2005 adalah 91,08% jenis sepeda motor, 1,77% jenis pick up, 0,04% bis, 5,92% sedan, 1,18% truk, dan 0,005% jeep (Gambar 3.4).

Gambar 3.4 Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam Negeri (unit) Tahun 2002-2006*



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2008

Catatan : * Angka Sementara

3.4 Perumahan dan Lingkungan Permukiman

3.4.1 Perumahan

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perlu mendapat perhatian penting dalam penyediaannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagi *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)* yang sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses bagi kelompok tersebut agar dapat terpenuhi hak dasarnya.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk (rumah tangga) yang semakin naik maka kebutuhan rumah/ tempat tinggal yang layak hunipun diperkirakan akan bertambah. Sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tiap tahun (*backlog*) yang secara kumulatif akan bertambah terus, maka muncul berbagai jenis permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh :

1. Banyak rumah tidak layak huni
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet
3. Penduduk/ bangunan sangat padat
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban
5. Biasanya berada di areal marginal (tepi sungai, pinggir rel kereta api)

Permukiman kumuh biasanya terdapat di daerah perkotaan.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/ sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dan sebagainya) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman.

Jika dilihat dari permukiman kumuh di Indonesia, maka jumlah tempat permukiman kumuh di Indonesia tahun 2008 lebih sedikit (3.881 desa/ kelurahan) dibandingkan dengan tahun 2005 (6.190 desa/ kelurahan). Secara otomatis jumlah tempat permukiman tidak kumuh meningkat pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2005. Provinsi yang banyak terdapat permukiman kumuh tahun 2005 adalah Jawa Barat (777 desa/ kelurahan), dan makin meningkat tahun 2008 menjadi 831 desa/ kelurahan.

Pada Tabel yang sama seperti di atas, yaitu Tabel 3.6 terlihat, bahwa lokasi permukiman kumuh di Indonesia turun di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2005, yakni sebesar 15.739 lokasi menjadi 10.578 lokasi. Adapun jumlah bangunan rumah di permukiman kumuh juga turun pada tahun 2008, yakni sebesar 399.638 unit dengan jumlah keluarga yang tinggal ada 548.539 keluarga, dari tahun 2005 sebesar 649.492 lokasi yang dihuni sebanyak 854.906 keluarga.

Selain itu ada tempat lain yang dijadikan tempat tinggal oleh warga, walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan. Hal ini bisa dilihat pada jumlah keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/ tepi sungai dan atau sempadan sungai, serta tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi.

Bantaran sungai adalah lahan yang berada di dekat tepi sungai, berjarak sekitar 5-10 meter dari tepi sungai. Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai :

1. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman ;
2. Untuk sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter.

Jumlah keluarga yang tinggal di bantaran/ tepi sungai meningkat dari tahun 2005 sebesar 931.576 keluarga menjadi 1.209.645 keluarga di tahun 2008. Demikian pula jumlah bangunan rumah bertambah dari tahun 2005 ada 801.840 unit menjadi 1.026.319 unit di tahun 2008. Selain itu ada 14.955 desa/ kelurahan di tahun 2005, yang masih ada keluarga yang tinggal di bantaran/ tepi sungai, dan meningkat jumlahnya di tahun 2008 menjadi 21.539 desa/ kelurahan (Tabel 3.7).

Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dengan radius lebih 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No.1.P/47/MTE/1992).

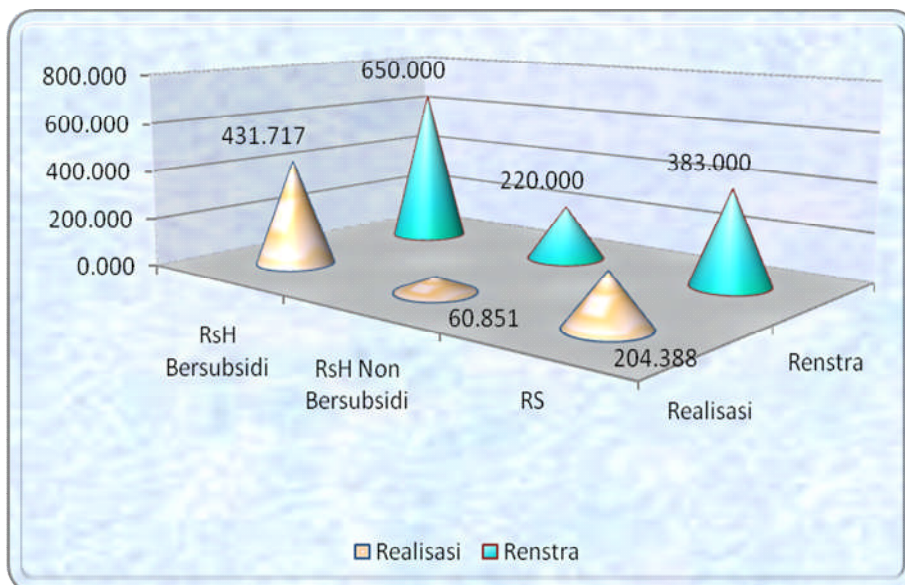
Jumlah desa/ kelurahan yang tidak ada listrik tegangan tinggi meningkat dari tahun 2005 ada 45.956 menjadi 57.368 desa/ kelurahan di tahun 2008. Demikian pula tempat yang ada listrik tegangan tinggi meningkat dari tahun 2005 sebanyak 3.378 desa/ kelurahan menjadi 3.621 desa/ kelurahan di tahun 2008. Dari jumlah tersebut terdapat 106.746 unit bangunan rumah yang dihuni oleh 122.292 keluarga di tahun 2005, serta ada 113.673 unit bangunan rumah dimana dihuni oleh 133.509 keluarga di tahun 2008. Jumlah keluarga yang tidak tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi tahun 2005 sebanyak 20.623 desa/ kelurahan, dan menurun di tahun 2008 menjadi 13.885 desa/ kelurahan (Tabel 3.8).

Dalam menyikapi kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, maka pemerintah selalu membuka kawasan Perumahan Sederhana (RS) dan Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang bisa dibeli masyarakat di seluruh

kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam hal ini diharapkan Pemerintah Daerah berperan aktif membantu pengembangan dan pembangunan rumah sederhana dan layak huni di daerahnya, sehingga terjangkau daya beli masyarakat. Pada Gambar 3.5 terlihat realisasi pembangunan RS dan RsH dari tahun 2005-2008 masih relatif jauh dari renstra yang dibuat.

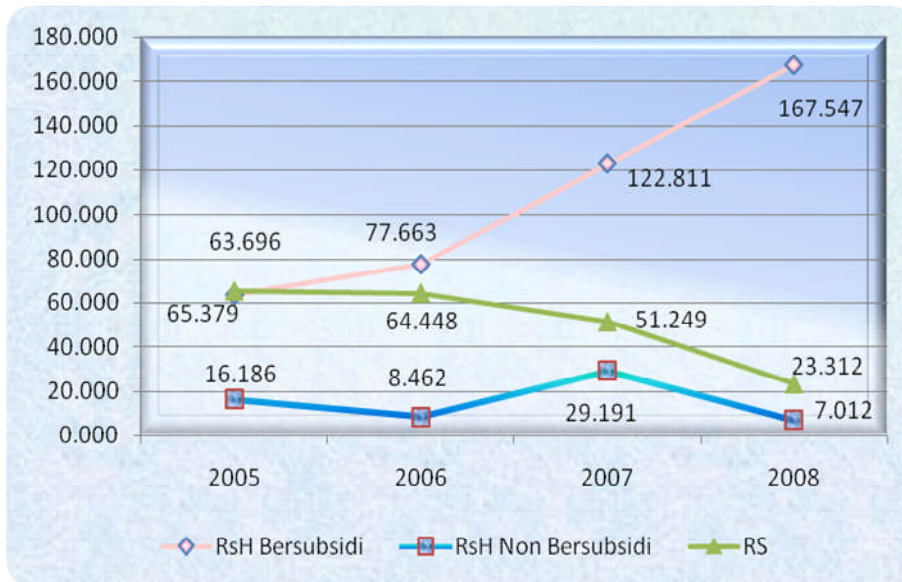
Jika dilihat per tahun dari 2005 sampai 2008 pada Gambar 3.6, maka untuk realisasi pembangunan RsH Bersubsidi selalu mengalami kenaikan tiap tahun dibandingkan RsH Non Bersubsidi dan RS. Realisasi pembangunan RS mengalami penurunan tiap tahun, sedangkan RsH Non Bersubsidi ada kenaikan tahun 2007 walaupun setelah itu terjadi penurunan di tahun 2008. Bila hal tersebut dibandingkan dengan Gambar 3.7, yaitu untuk Renstra pembangunan RS dan RsH dari tahun 2005-2008, maka terlihat untuk RsH baik yang bersubsidi maupun yang tidak dan RS tiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali Renstra RS tahun 2007 mengalami sedikit penurunan.

Gambar 3.5 Realisasi dan Rencana Pembangunan RS dan RsH (unit) Tahun 2005-2008



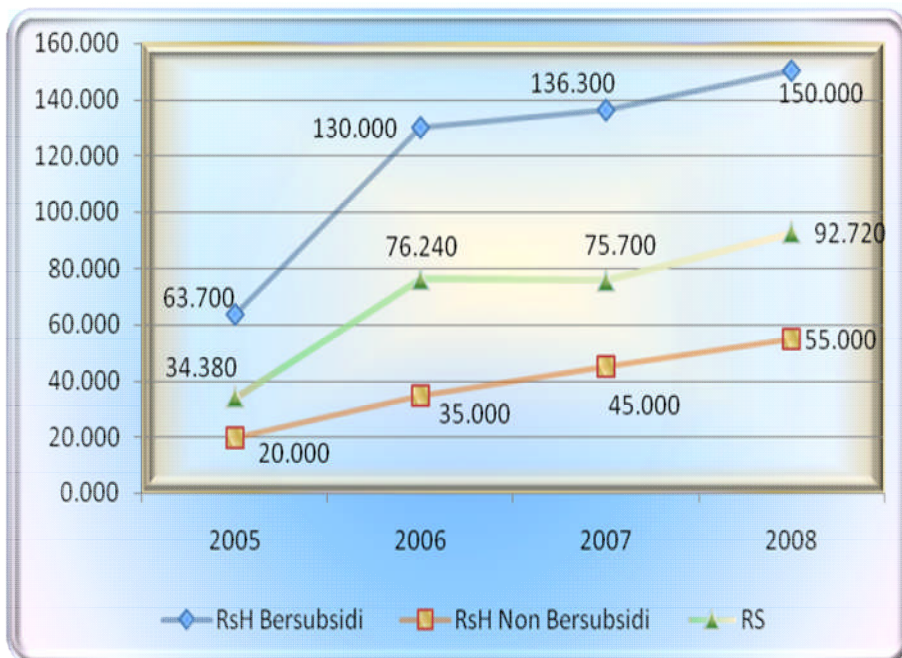
Sumber : Kedeputan Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Gambar 3.6 Realisasi Pembangunan RS dan RsH (unit) Tahun 2005-2008



Sumber : Kedepuyan Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Gambar 3.7 Rencana Pembangunan RS dan RsH (unit) Tahun 2005-2008



Sumber : Kedepuyan Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Upaya penyediaan perumahan yang telah dilakukan Pemerintah selaku *fasilitator* dan *stimulator* sejak tahun 2005 hingga sekarang ini, antara lain dengan terealisasinya pembangunan stimulan Rusunawa yang tersebar di beberapa lokasi di hampir semua Provinsi dengan dana APBN maupun APBD. Tabel 3.9 menunjukkan jumlah Twin Block (TB), jumlah lantai (Lt), jumlah unit serta type rusunawa yang tersebar di berbagai lokasi dan kota di Indonesia dari tahun 2005-2009 yang dibangun oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

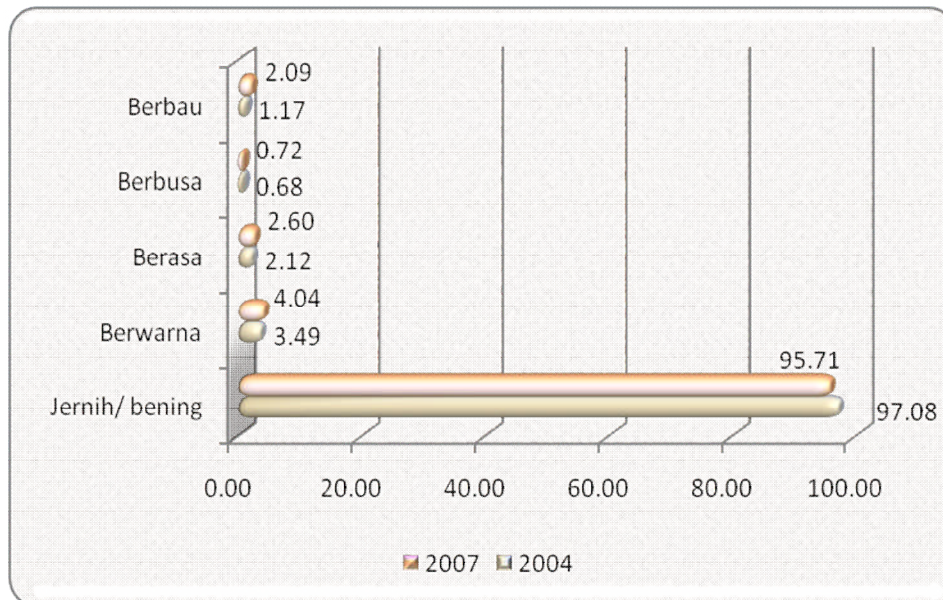
Dalam penyelenggaraan pembangunan Rusunawa, Departemen PU juga turut mengembangkannya melalui Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun status pembangunan Rusunawa tahun anggaran 2003-2008 dari Departemen PU terdapat pada Tabel 3.10, dimana jumlah Twin Block yang terbangun ada 154 TB dengan 14.314 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia.

3.4.2 Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman yang bersih memberikan kenyamanan pada penghuninya. Lingkungan yang tidak bersih merupakan sumber penyakit seperti demam berdarah, malaria, penyakit perut, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan dapat bergotong royong membersihkan selokan, pekarangan rumah, lingkungan sekitar rumah dan permukimannya.

Dari Gambar 3.8 terlihat lebih dari 95% rumah tangga mengkonsumsi air minum dengan kualitas yang jernih/ bening (2004 dan 2007). Bila dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, pemakaian air minum dengan kualitas jernih yang digunakan masyarakat menunjukkan penurunan, sebaliknya mengalami sedikit kenaikan untuk kualitas berwarna, berasa, berbusa, dan berbau.

Gambar 3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Air Minum, Tahun 2004 dan 2007



Sumber : Statistik Perumahan dan Permukiman, BPS, 2007

Sumber air untuk minum/ memasak mencakup sumber air bersih untuk keperluan minum/ masak sebagian besar penduduk. Sumber air yang baik untuk minum/ memasak berasal dari PAM/ Air kemasan. Perusahaan Air Minum (PAM) adalah perusahaan yang menyalurkan air minum yang telah mengalami proses penjernihan, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Dinas Air Minum (DAM). Adapun air dalam kemasan adalah air yang diproduksi oleh suatu perusahaan melalui proses yang higienis dan terdaftar di Depkes.

Jika dibandingkan tahun 2005 untuk kondisi sumber air minum/ masak di Indonesia di tahun 2008 mengalami kenaikan jumlah desa/ kelurahan yang mengkonsumsi sumber dari PAM/ Air Kemasan, Pompa Listrik/ Tangan, Sumur, Mata Air, Air Hujan, dan Lainnya. Sumber air yang berkurang peminatnya adalah Sungai/ Danau, yaitu dari 5,926 desa/ kelurahan tahun 2005 menjadi 5,787 desa/ kelurahan di tahun 2008.

3.5 Bencana Alam

Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup, dimana air, tanah, udara, flora dan fauna akan berubah baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, dan biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu perubahan lingkungan hidup bisa terjadi karena adanya polusi atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana alam juga dapat menimbulkan masalah sosial. Gangguan seperti ini bisa terjadi dengan sendirinya (alami) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Banjir merupakan jenis bencana alam yang paling besar menelan korban manusia, baik yang luka dan menderitanya, maupun yang meninggal dunia. Persentase total kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi) masing-masing relatif kecil. Namun demikian bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama gempa bumi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah serta Tsunami di pantai selatan Jawa tahun 2006.

Pada Tabel 3.12.1 sampai dengan Tabel 3.12.3 menunjukkan rekapitulasi kejadian bencana alam dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Untuk hal kejadian (frekuensi terjadi bencana alam), jumlah orang meninggal, hilang, dan mengungsi tiap tahunnya mengalami penurunan. Sedangkan lokasi yang tergenang, seperti permukiman, rumah, fasum, jalan, jembatan, sawah, perkebunan, dan perikanan, telah mengalami naik turun dari tahun 2006-2008. Demikian halnya untuk bangunan yang rusak/ roboh/ hanyut, yang meliputi rumah, fasum, jalan, jembatan, bendung, saluran, tanggul, dan bangunan SDA juga mengalami naik turun dari tahun 2006-2008. Dari kedua hal tersebut, maka bencana alam dan akibat yang ditimbulkan dari kejadian itu paling banyak terjadi tahun 2006.

Tabel 3.1
Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi
Tahun 2003 - 2007

No.	Provinsi	2003	2004	2005	2006 ^x	2007 ^e
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3.859	3.710	3.866	4.071	4.148
2	Sumatera Utara	3.962	3.890	3.807	3.936	3.929
3	Sumatera Barat	2.882	2.837	2.435	2.664	2.608
4	Riau	2.010	1.973	1.652	1.773	1.709
5	Jambi	1.845	1.807	1.931	2.302	2.486
6	Sumatera Selatan	2.552	2.548	2.629	2.394	2.347
7	Bengkulu	657	657	804	693	713
8	Lampung	3.955	3.857	3.636	4.033	4.069
9	Bangka Belitung	332	325	294	388	414
10	Kep Riau	-	-	332	502	559
11	DKI Jakarta	4.417	4.417	5.015	4.690	4.800
12	Jawa Barat	6.268	6.268	6.500	6.438	6.497
13	Jawa Tengah	7.619	7.619	7.203	5.535	5.535
14	DI. Yogyakarta	1.239	1.239	1.155	1.081	1.033
15	Jawa Timur	8.356	8.356	7.958	7.303	6.987
16	Banten	1.285	1.285	1.749	1.182	1.197
17	Bali	1.731	1.731	1.615	1.571	1.522
18	Nusa Tenggara Barat	1.213	1.213	1.253	1.198	1.194
19	Nusa Tenggara Timur	1.780	1.780	1.660	1.553	1.485
20	Kalimantan Barat	2.994	2.994	2.171	2.023	2.023
21	Kalimantan Tengah	173	178	202	218	236
22	Kalimantan Selatan	4.613	4.613	4.783	4.101	3.956
23	Kalimantan Timur	1.454	1.454	1.671	1.678	1.764
24	Sulawesi Utara	191	191	214	242	262
25	Sulawesi Tengah	2.217	2.217	2.554	2.128	2.118
26	Sulawesi Selatan	5.728	5.728	4.965	4.960	4.738
27	Sulawesi Tenggara	1.026	1.026	1.056	1.246	1.333
28	Gorontalo	1.132	1.132	1.288	1.612	1.821
29	Sulawesi Barat	-	-	576	655	745
30	Maluku	1.197	1.197	1.028	1.136	1.122
31	Maluku Utara	989	989	1.149	1.132	1.187
32	Papua	2.191	2.191	1.246	926	863
33	Papua Barat	-	-	994	1.503	1.390
Jumlah/ Total		79.867	79.422	79.391	72.796	72.642

Sumber : Statistik Indonesia 2008

Catatan : ^e Angka Perkiraan

^x Angka Sementara

Tabel 3.2
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi (ribu rupiah)
Tahun 2003 - 2007

No.	Provinsi	2003	2004	2005	2006 ^x	2007 ^e
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	433.603.311	340.215.438	1.601.441.065	1.119.651.224	1.426.991.323
2	Sumatera Utara	1.852.577.739	3.430.316.940	3.845.946.561	4.022.747.789	4.207.676.710
3	Sumatera Barat	844.516.928	956.619.300	1.315.105.562	1.324.786.176	1.334.538.050
4	Riau	1.215.410.433	1.833.328.809	2.243.743.274	2.292.379.072	2.342.069.109
5	Jambi	302.720.464	839.472.780	976.398.039	1.001.312.431	1.026.862.554
6	Sumatera Selatan	1.320.870.084	1.395.898.329	1.849.403.179	1.927.593.528	2.009.089.663
7	Bengkulu	124.432.376	206.460.594	217.160.957	229.764.270	243.099.038
8	Lampung	440.410.225	1.029.280.128	1.214.793.553	1.222.124.389	1.229.499.464
9	Bangka Belitung	114.749.098	128.214.093	340.891.376	238.223.882	355.345.551
10	Kep Riau	0	0	757.523.262	943.595.942	1.175.374.205
11	DKI Jakarta	8.860.729.984	10.644.368.420	14.157.681.465	15.276.572.859	16.483.891.017
12	Jawa Barat	5.774.085.846	13.971.851.161	12.825.404.970	13.491.149.640	14.191.451.969
13	Jawa Tengah	4.191.497.672	4.107.492.710	3.978.874.466	5.226.542.060	6.865.444.522
14	DI. Yogyakarta	468.882.880	887.692.122	1.184.257.860	1.081.631.011	987.897.724
15	Jawa Timur	3.855.730.086	4.201.379.286	4.434.593.683	5.746.749.477	7.447.160.194
16	Banten	804.106.146	1.278.948.640	2.009.283.640	1.648.541.703	1.352.566.503
17	Bali	545.531.196	658.605.438	720.400.799	817.435.157	927.539.554
18	Nusa Tenggara Barat	245.289.935	298.692.233	313.190.208	350.014.121	391.167.673
19	Nusa Tenggara Timur	282.843.994	357.363.593	834.054.556	569.547.104	756.523.343
20	Kalimantan Barat	659.001.234	1.105.817.334	1.156.209.421	1.195.999.013	1.237.157.917
21	Kalimantan Tengah	202.438.040	228.940.514	305.701.219	311.356.488	317.116.376
22	Kalimantan Selatan	740.242.888	865.597.327	1.395.342.543	1.352.959.731	1.311.864.275
23	Kalimantan Timur	2.670.955.369	3.365.850.628	3.328.886.195	3.918.779.389	4.613.204.237
24	Sulawesi Utara	230.203.179	324.054.056	225.135.549	336.088.735	501.722.799
25	Sulawesi Tengah	205.410.245	366.832.324	549.166.599	449.118.292	367.296.993
26	Sulawesi Selatan	1.082.003.277	1.154.461.713	1.831.794.175	2.047.974.112	2.289.666.612
27	Sulawesi Tenggara	141.113.195	398.565.836	525.550.970	435.778.240	361.340.165
28	Gorontalo	160.748.172	259.175.589	579.034.707	474.781.325	391.580.437
29	Sulawesi Barat	0	0	169.858.268	223.413.900	293.855.408
30	Maluku	312.952.955	336.519.111	422.771.459	424.733.807	426.705.263
31	Maluku Utara	234.379.049	274.177.721	298.168.847	345.410.808	400.137.799
32	Papua	733.209.893	758.345.828	1.086.042.923	785.884.348	989.597.302
33	Irian Jaya Barat	0	0	624106601	1.110.668.716	1.135.852.894
JUMLAH/TOTAL		39.050.645.893	56.004.537.995	67.317.917.951	71.943.308.739	79.391.286.643

Sumber : Statistik Indonesia 2008

Catatan : ^e Angka Perkiraan

^x Angka Sementara

Tabel 3.3
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan (juta rupiah)
Tahun 2003 - 2007

No.	Jenis Pekerjaan	2003	2004	2005	2006 ^x	2007 ^e
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan tempat tinggal	6.155.685	4.795.995	7.495.904	9.305.172	11.551.139
2	Bangunan bukan tempat tinggal	10.547.568	18.581.659	20.701.163	22.069.558	23.528.407
3	Pemasangan instalasi listrik	1.099.642	3.825.819	3.174.567	3.363.393	3.563.451
4	Pemasangan pipa air minum dan gas	103.114	114.635	431.511	371.544	319.911
5	Pemasangan sanitasi	186.489	69.988	206.000	194.926	184.447
6	Pekerjaan pondasi	294.075	353.875	1.155.892	850.095	625.198
7	Sound system, AC, lift, dll	73.855	2.038.887	1.090.505	1.268.817	1.476.285
8	Jaringan air minum	269.802	447.877	487.919	512.374	538.055
9	Jaringan pipa gas dan minyak bumi	314.169	759.422	650.974	648.546	646.127
10	Jaringan listrik	1.679.716	1.559.105	439.088	1.027.867	2.406.148
11	Pekerjaan jalan dan jembatan	10.460.761	15.083.795	18.844.750	19.897.065	21.008.143
12	Pengairan/ drainase	2.106.474	4.975.447	3.845.006	4.553.470	5.392.472
13	Pembangkit tenaga listrik dan jaringan	110.385	20.973	2.823.137	1.137.230	458.105
14	Pekerjaan lapangan terbang, pelabuhan, terminal, dsb	637.340	1.440.669	1.688.968	1.598.572	1.513.014
15	Konstruksi lainnya	5.011.568	1.936.391	4.282.534	5.144.678	6.180.386
JUMLAH/TOTAL		39.050.643	56.004.537	67.317.918	71.943.307	79.391.288

Sumber : Statistik Indonesia 2008

Catatan : ^e Angka Perkiraan

^x Angka Sementara

Tabel 3.4
Luas Panen Padi Menurut Provinsi
Tahun 2004-2008, (Ha)

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008 ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	370.966	337.893	320.789	360.717	362.489
2	Sumatera Utara	826.091	822.073	705.023	750.232	748.448
3	Sumatera Barat	422.582	426.950	417.846	423.655	435.778
4	Riau	145.239	134.418	136.177	147.167	140.592
5	Jambi	156.803	154.941	140.613	149.888	150.043
6	Sumatera Selatan	625.013	626.849	646.927	691.467	684.455
7	Bengkulu	110.929	116.818	100.991	123.853	120.781
8	Lampung	495.519	496.538	494.102	524.955	511.159
9	Kepulauan Bangka Belitung	7.402	6.691	5.741	9.010	9.554
10	Kepulauan Riau	-	107	116	117	131
11	D.K.I. Jakarta	2.941	2.668	1.323	1.544	1.433
12	Jawa Barat	1.880.142	1.894.796	1.798.260	1.829.085	1.855.584
13	Jawa Tengah	1.635.922	1.611.107	1.672.315	1.614.098	1.659.965
14	D.I Yogyakarta	132.869	130.973	132.374	133.369	142.122
15	Jawa Timur	1.697.024	1.693.651	1.750.903	1.736.048	1.796.185
16	Banten	364.721	374.755	348.414	356.803	370.652
17	Bali	144.146	142.356	150.557	145.030	141.815
18	Nusa Tenggara Barat	325.984	300.394	341.418	331.916	353.364
19	Nusa Tenggara Timur	183.728	162.539	173.208	166.753	187.835
20	Kalimantan Barat	365.218	352.305	378.042	399.832	425.044
21	Kalimantan Tengah	229.003	203.595	202.664	229.665	202.505
22	Kalimantan Selatan	443.508	459.541	462.672	505.846	506.580
23	Kalimantan Timur	141.348	140.996	150.549	155.484	159.974
24	Sulawesi Utara	92.439	94.944	94.717	103.189	111.143
25	Sulawesi Tengah	181.705	175.489	179.078	204.342	218.401
26	Sulawesi Selatan	772.773	730.611	719.846	770.733	802.128
27	Sulawesi Tenggara	84.888	91.585	93.826	110.498	110.323
28	Gorontalo	37.741	39.110	43.953	44.548	44.646
29	Sulawesi Barat	-	59.767	64.462	66.630	66.887
30	Maluku	11.160	11.341	13.866	15.352	18.353
31	Maluku Utara	15.216	16.953	17.355	14.497	13.164
32	Papua Barat	-	7.823	8.405	8.357	9.089
33	Papua	19.954	18.483	19.898	22.957	24.620
	Jawa	5.713.619	5.707.950	5.703.589	5.670.947	5.825.941
	Luar Jawa	6.209.355	6.131.110	6.082.841	6.476.690	6.559.301
	Indonesia	11.922.974	11.839.060	11.786.430	12.147.637	12.385.242

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2008

Catatan : 1) Angka Ramalan II

Tabel 3.5
Kendaraan Bermotor menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan
Tahun 2004 - 2006, (Unit)

No	Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh D	2004	57.352	28.872	51.517	592.810	730.551
		2005	63.254	33.884	54.371	634.188	785.697
		2006	68.984	39.656	57.563	696.874	863.077
2	Sumatera Utara	2004	326.015	27.011	146.703	1.461.760	1.961.489
		2005	367.452	32.340	157.031	1.729.262	2.286.085
		2006	406.101	37.420	166.879	2.014.975	2.625.375
3	Sumatera Barat	2004	33.354	61.518	59.441	366.445	520.758
		2005	35.765	69.245	75.520	501.920	682.450
		2006	39.975	73.116	75.520	653.487	842.098
4	Riau	2004	139.689	41.029	69.520	704.423	954.661
		2005	208.877	42.297	90.147	828.824	1.170.145
		2006	292.082	43.399	111.523	950.473	1.397.477
5	Jambi	2004	34.280	9.678	30.394	344.585	418.937
		2005	45.829	14.419	49.022	516.671	625.941
		2006	57.989	19.851	72.047	719.461	869.348
6	Sumatera Selatan	2004	94.866	19.747	69.120	364.998	548.731
		2005	150.733	28.477	76.599	508.150	763.959
		2006	218.782	38.223	83.312	663.154	1.003.471
7	Bengkulu	2004	13.554	1.141	15.381	98.014	128.090
		2005	16.609	1.248	20.810	146.943	185.610
		2006	19.891	2.265	26.940	203.289	252.385
8	Lampung	2004	54.411	3.961	52.366	415.449	526.187
		2005	61.501	6.356	56.477	549.514	673.848
		2006	68.055	9.943	60.610	687.563	826.171
9	Kep. Bangka Belitung	2004	8.127	14.833	13.777	190.535	227.272
		2005	8.432	16.951	14.312	199.813	239.508
		2006	8.623	18.144	14.312	204.712	245.791
10	Kep. Riau	2004	-	-	-	-	-
		2005	38.360	8.065	18.439	313.307	378.171
		2006	75.199	11.976	25.591	344.578	457.344
11	DKI Jakarta	2004	1.747.921	389.311	495.464	3.894.457	6.527.153
		2005	1.937.396	490.532	644.054	5.343.211	8.415.193
		2006	2.127.535	590.384	802.198	6.250.670	9.770.787
12	Jawa Barat	2004	411.250	103.385	264.767	1.343.902	2.123.304
		2005	438.310	117.177	319.494	1.415.801	2.290.782
		2006	466.117	129.547	373.703	1.481.789	2.451.156
13	Jawa Tengah	2004	153.550	31.761	284.313	4.091.542	4.561.166
		2005	205.404	37.751	330.628	5.069.421	5.643.204
		2006	259.422	43.388	373.750	6.022.584	6.699.144
14	DI Yogyakarta	2004	80.960	9.785	37.447	762.517	890.709
		2005	104.584	14.505	50.059	949.715	1.118.863
		2006	128.702	19.991	65.462	1.132.314	1.346.469
15	Jawa Timur	2004	556.595	14.010	284.915	4.326.336	5.181.856
		2005	721.013	17.084	330.929	4.729.983	5.799.009
		2006	887.000	20.098	373.647	5.183.133	6.463.878

Lanjutan Tabel 3.5

No	Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Banten	2004	25.146	15.516	17.988	187.705	246.355
		2005	25.452	15.670	17.420	282.193	340.735
		2006	26.364	17.044	17.420	357.867	418.695
17	Bali	2004	239.587	10.307	69.580	1.018.230	1.337.704
		2005	340.333	13.216	99.729	1.117.609	1.570.887
		2006	451.782	16.164	133.344	1.245.717	1.847.007
18	Nusa Tenggara Barat	2004	19.366	5.516	19.469	245.606	289.957
		2005	30.538	10.407	26.034	305.804	372.783
		2006	43.987	18.059	33.282	407.142	502.470
19	Nusa Tenggara Timur	2004	19.348	11.989	6.528	71.169	109.034
		2005	34.260	18.794	9.878	110.511	173.443
		2006	54.453	26.948	13.802	157.192	252.395
20	Kalimantan Barat	2004	43.563	4.856	28.735	410.041	487.195
		2005	82.704	8.253	44.370	535.309	670.636
		2006	138.549	12.644	63.270	664.921	879.384
21	Kalimantan Tengah	2004	29.111	7.507	13.534	183.244	233.396
		2005	52.979	8.894	23.812	234.882	320.567
		2006	87.757	21.317	37.471	286.974	433.519
22	Kalimantan Selatan	2004	57.728	16.552	44.272	476.203	594.755
		2005	79.930	20.243	63.539	586.206	749.918
		2006	104.387	38.278	85.179	692.724	920.568
23	Kalimantan Timur	2004	62.998	11.776	73.846	489.981	638.601
		2005	89.489	21.770	114.255	642.953	868.467
		2006	119.986	48.229	162.645	800.908	1.131.768
24	Sulawesi Utara	2004	27.540	21.825	23.073	103.746	176.184
		2005	33.599	24.527	26.739	162.113	246.978
		2006	39.738	42.958	30.192	231.795	344.683
25	Sulawesi Tengah	2004	58.547	15.466	38.292	321.824	434.129
		2005	85.678	22.228	49.561	398.418	555.885
		2006	118.684	30.032	63.981	512.835	725.532
26	Sulawesi Selatan ¹	2004	123.609	26.778	66.191	311.514	528.092
		2005	175.055	46.974	108.143	364.471	694.643
		2006	231.979	73.668	160.874	413.297	879.818
27	Sulawesi Tenggara	2004	5.246	14.652	9.917	66.632	96.447
		2005	7.575	26.522	14.893	72.449	121.439
		2006	10.260	42.765	20.724	72.449	146.198
28	Gorontalo	2004	320	22	633	5.676	6.651
		2005	4.492	652	4.904	55.141	65.189
		2006	4.892	6.576	5.201	55.141	71.810
29	Maluku	2004	27.102	3.316	15.590	77.835	123.843
		2005	28.072	4.141	15.855	101.870	149.938
		2006	28.983	4.141	15.855	126.595	175.574
30	Maluku Utara	2004	69	17	129	538	753
		2005	75	21	136	553	785
		2006	88	26	208	648	970
31	Papua ²	2004	13.077	11.059	12.879	128.115	165.130
		2005	20.285	12.275	13.668	149.292	195.520
		2006	29.760	14.879	15.295	177.961	237.895

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2008

Catatan : ¹⁾ Termasuk Sulawesi Barat

²⁾ Termasuk Papua Barat

Tabel 3.6
Permukiman Kumuh di Indonesia
Tahun 2005 dan 2008

No	Provinsi	Kualitas Permukiman (desa/kelurahan)				Jumlah Permukiman Kumuh					
		Kumuh	Tidak Kumuh	Kumuh	Tidak Kumuh	Lokasi (Lokasi)		Bangunan Rumah (Unit)		Keluarga (Keluarga)	
		2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh Darussalam	360	5.608	144	6.280	710	299	14.934	4.959	17.854	5.857
2	Sumatera Utara	459	4.456	357	5.410	1.072	898	40.063	46.570	45.394	51.287
3	Sumatera Barat	51	850	34	890	127	79	6.115	2.575	6.566	2.972
4	Riau	187	1.290	60	1.544	488	143	15.504	7.543	19.066	8.438
5	Jambi	136	1.099	48	1.255	312	128	8.826	3.600	11.000	3.771
6	Sumatera Selatan	264	2.514	202	2.877	639	619	23.291	21.958	31.500	31.523
7	Bengkulu	45	1.179	26	1.325	62	123	1.468	3.837	1.718	4.233
8	Lampung	232	1.959	77	2.262	566	155	23.197	8.809	25.332	11.986
9	Kep. Bangka Belitung	25	296	8	336	41	16	977	563	1.140	590
10	Kep. Riau	90	165	56	270	239	118	9.480	7.741	16.712	8.981
	Sumatera	1.849	19.416	1.012	22.449	4.256	2.578	143.855	108.155	176.282	129.638
11	D.K.I Jakarta	186	81	175	92	750	580	124.166	86.417	199.603	121.884
12	Jawa Barat	777	5.031	831	5.040	2.541	2.848	86.616	88.879	111.521	109.716
13	Jawa Tengah	273	8.291	381	8.193	682	1.048	18.263	31.076	22.714	38.553
14	D.I Yogyakarta	15	423	16	422	35	37	828	398	1.147	565
15	Jawa Timur	297	8.180	201	8.304	903	496	27.618	15.867	38.015	19.414
16	Banten	326	1.156	180	1.324	984	596	34.600	19.748	42.840	21.220
17	Bali	22	679	33	679	45	65	813	1.357	1.515	2.248
	Jawa dan Bali	1.896	23.841	1.817	24.054	5.940	5.670	292.904	243.742	417.355	313.600
18	Nusa Tenggara Barat	263	557	60	853	1.095	166	56.480	9.083	62.575	10.527
19	Nusa Tenggara Timur	68	2.670	45	2.758	164	109	5.648	3.403	6.286	4.447
	Nusa Tenggara	331	3.227	105	3.611	1.259	275	62.128	12.486	68.861	14.974

Lanjutan Tabel 3.6

No	Provinsi	Kualitas Permukiman (desa/kelurahan)				Jumlah Permukiman Kumuh					
		Kumuh		Tidak Kumuh		Lokasi (Lokasi)		Bangunan Rumah (Unit)		Keluarga (Keluarga)	
		2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Kalimantan Barat	256	1.274	171	1.620	656	345	14.944	10.432	22.426	12.241
21	Kalimantan Tengah	104	1.247	60	1.388	230	111	9.522	6.195	12.056	9.380
22	Kalimantan Selatan	144	1.815	6	1.968	351	8	12.413	157	16.544	246
23	Kalimantan Timur	169	1.175	129	1.288	308	312	22.521	12.041	28.905	15.622
	Kalimantan	673	5.511	366	6.264	1.545	776	59.400	28.825	79.931	37.489
24	Sulawesi Utara	164	1.105	102	1.392	240	159	8.373	4.951	11.254	5.533
25	Sulawesi Tengah	186	1.344	11	1.675	308	24	13.474	614	14.638	860
26	Sulawesi Selatan	393	2.893	326	2.620	909	797	35.106	27.287	45.163	35.726
27	Sulawesi Tenggara	148	1.537	0	2.028	286	0	8.274	0	9.485	0
28	Gorontalo	53	397	0	584	106	0	2.095	0	2.395	0
29	Sulawesi Barat			18	518		60		1.316		1.574
	Sulawesi	944	7.276	457	8.817	1.849	1.040	67.322		82.935	43.693
30	Maluku	53	820	30	876	124	92	4.728	1.382	5.338	1.842
31	Maluku Utara	63	718	19	1017	84	26	3.167	574	3.493	651
	Maluku	116	1.538	49	1.893	208	118	7.895	1.956	8.831	2.493
32	Papua Barat	381	2.958	13	1192	682	21	15.988	673	20.711	944
33	Papua			62	3249		100		3.801		5.708
	Papua	381	2.958	75	4.441	682	121	15.988	4.474	20.711	6.652
	Indonesia	6.190	63.767	3.881	71.529	15.739	10.578	649.492	399.638	854.906	548.539

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

BPS, Potensi Desa 2008

Tabel 3.7 :
Tempat Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai di Indonesia
Tahun 2005 dan 2008

No.	Provinsi	Keluarga yang Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai							
		Keluarga		Bangunan Rumah		Ada (desa/kelurahan)		Tidak Ada (desa/kelurahan)	
		2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	26.947	34.634	24.687	30.068	951	1.468	1.929	1.732
2	Sumatera Utara	50.196	57.800	46.355	53.283	1.004	1.401	2.464	2.804
3	Sumatera Barat	13.276	19.796	12.047	16.618	246	333	431	372
4	Riau	49.114	47.443	43.217	41.488	514	630	576	556
5	Jambi	46.728	51.380	40.780	42.737	549	705	463	362
6	Sumatera Selatan	84.586	112.628	73.104	90.564	898	1.100	1.252	1.127
7	Bengkulu	6.182	7.574	5.781	6.874	222	283	594	755
8	Lampung	34.811	27.030	31.445	22.225	453	466	1.019	1.191
9	Kep.Bangka Belitung	1.802	1.739	1.632	1.375	41	41	155	208
10	Kep.Riau	3.246	2.863	2.878	2.636	57	64	28	42
	Sumatera	316.888	362.887	281.926	307.868	4.935	6.491	8.911	9.149
11	DKI Jakarta	22.654	21.332	16.790	15.396	102	94	112	102
12	Jawa Barat	80.691	104.596	66.210	88.697	1.143	1.670	3.706	3.185
13	Jawa Tengah	41.719	81.029	36.568	70.608	1.013	1.932	6.117	5.251
14	DI Yogyakarta	5.553	6.660	4.500	5.257	86	131	241	212
15	Jawa Timur	59.096	93.193	52.031	80.885	906	1.729	5.968	5.092
16	Banten	27.338	34.089	24.437	29.297	416	563	660	525
17	Bali	4.326	5.869	3.840	5.148	122	204	443	411
	Jawa dan Bali	241.377	346.768	204.376	295.288	3.788	6.323	17.247	14.778
18	Nusa Tenggara Barat	14.697	25.776	13.796	23.759	243	479	468	345
19	Nusa Tenggara Timur	16.213	15.843	15.205	14.807	453	521	1.073	1.053
	Nusa Tenggara	30.910	41.619	29.001	38.566	696	1.000	1.541	1.398

Lanjutan Tabel 3.7

No.	Provinsi	Keluarga yang Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai							
		Keluarga		Bangunan Rumah		Ada (desa/kelurahan)		Tidak Ada (desa/kelurahan)	
		2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Kalimantan Barat	46.531	83.377	37.729	71.731	561	783	782	857
21	Kalimantan Tengah	64.566	89.625	51.478	71.081	748	917	501	418
22	Kalimantan Selatan	73.281	98.224	63.109	87.600	1.030	1.174	566	429
23	Kalimantan Timur	57.939	66.512	46.312	53.632	534	758	556	435
	Kalimantan	242.317	337.738	198.628	284.044	2.873	3.632	2.405	2.139
24	Sulawesi Utara	13.614	18.620	11.506	14.856	400	543	461	373
25	Sulawesi Tengah	14.375	17.733	13.171	16.031	383	605	592	562
26	Sulawesi Selatan	43.188	45.827	40.632	39.837	897	1.113	1.374	1.082
27	Sulawesi Tenggara	5.543	7.652	4.982	6.913	258	386	617	665
28	Gorontalo	5.566	8.274	4.034	6.142	142	267	222	167
29	Sulawesi Barat		9.773		9.029		238		213
	Sulawesi	82.286	98.106	74.325	83.779	2.080	3.152	3.266	3.062
30	Maluku	2.459	3.426	2.198	2.992	92	125	196	240
31	Maluku Utara	2.952	3.136	2.698	2.862	152	206	151	253
	Maluku	5.411	6.562	4.896	5.854	244	331	347	493
32	Papua Barat	12.387	4.979	8.688	3.640	339	191	1811	495
33	Papua		10.986		7.280		419		1.510
		12.387	15.965	8.688	10.920	339	610	1811	2.005
	Indonesia	931.576	1.209.645	801.840	1.026.319	14.955	21.539	35.528	33.024

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

BPS, Potensi Desa 2008

Tabel 3.8 :
Tempat Tinggal di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV) di Indonesia
Tahun 2005 dan 2008

No.	Provinsi	Jumlah Yang Tinggal dibawah Jar. Listrik Tegangan Tinggi						Jmlh Yg Tdk Tgl dibwh Jar. Lis Teg. Tng		Tdk Ada Lstrk Teg. Tinggi	
		Keluarga		Bangunan Rumah		Desa/kelurahan		(desa/kelurahan)		(desa/kelurahan)	
		2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.382	1.048	1.435	961	140	128	2.153	1.724	3.675	4.572
2	Sumatera Utara	3.452	4.522	3.415	3.671	131	147	1.840	1.182	2.944	4.438
3	Sumatera Barat	3.115	2.567	3.087	1.946	82	101	296	269	523	554
4	Riau	7.730	2.582	6.887	2.407	122	57	643	278	712	1.269
5	Jambi	2.599	1.509	2.386	1.430	41	58	322	222	872	1.023
6	Sumatera Selatan	2.538	3.104	2.690	2.650	74	83	1.171	650	1.533	2.346
7	Bengkulu	744	282	724	251	23	25	260	161	941	1.165
8	Lampung	1.159	1.448	1.358	1.240	50	88	726	494	1.415	1.757
9	Kep.Bangka Belitung	233	0	231	0	6	0	101	11	214	333
10	Kep.Riau	74	180	93	180	4	4	79	76	172	246
	Sumatera	23.026	17.242	22.306	14.736	673	691	7.591	5.067	13.001	17.703
11	DKI Jakarta	14.338	16.999	10.547	11.312	58	59	123	83	86	125
12	Jawa Barat	29.921	39.144	24.148	34.278	700	819	1.831	1.287	3.277	3.765
13	Jawa Tengah	19.827	22.040	17.332	19.685	707	724	2.038	1.389	5.819	6.461
14	DI Yogyakarta	634	898	600	883	26	28	94	38	318	372
15	Jawa Timur	14.644	18.022	13.918	16.441	656	719	2.627	1.810	5.194	5.976
16	Banten	6.958	10.449	5.438	8.956	162	211	501	293	819	1.000
17	Bali	1.278	964	2.252	832	50	60	202	142	449	510
	Jawa dan Bali	87.600	108.516	74.235	92.387	2.359	2.620	7.416	5.042	15.962	18.209
18	Nusa Tenggara Barat	158	0	157	0	9	0	92	44	719	869
19	Nusa Tenggara Timur	-	157	-	140	0	2	519	419	2.219	2.382
	Nusa Tenggara	158	157	157	140	9	2	611	463	2.938	3.251

Lanjutan Tabel 3.8

No.	Provinsi	Jumlah Yang Tinggal dibawah Jar. Listrik Tegangan Tinggi						Jmlh Yg Tdk Tgl dibwh Jar. Lis Teg. Tng		Tdk Ada Lstrk Teg. Tinggi	
		Keluarga		Bangunan Rumah		Desa/kelurahan		(desa/kelurahan)		(desa/kelurahan)	
		2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Kalimantan Barat	542	1.073	300	987	23	22	353	249	1.154	1.520
21	Kalimantan Tengah	1.728	265	1.667	230	16	15	501	239	834	1.194
22	Kalimantan Selatan	558	696	520	641	42	43	397	260	1.520	1.671
23	Kalimantan Timur	3.129	586	2.711	404	40	17	411	314	893	1.086
	Kalimantan	5.957	2.620	5.198	2.262	121	97	1.662	1.062	4.401	5.471
24	Sulawesi Utara	3.104	1.247	2.769	1.054	111	49	609	325	549	1.120
25	Sulawesi Tengah	-	6	-	6	0	1	47	84	1.483	1.601
26	Sulawesi Selatan	1.402	2.592	1.319	2.414	88	149	855	572	2.343	2.225
27	Sulawesi Tenggara	15	0	15	0	1	0	17	145	1.667	1.883
28	Gorontalo	-	0	-	0	0	0	58	28	392	556
29	Sulawesi Barat		177		177		6		31		499
	Sulawesi	4.521	3.845	4.103	3.474	200	199	1.586	1.154	6.434	7.385
30	Maluku	936	0	656	0	4	0	207	57	662	849
31	Maluku Utara	12	18	10	16	1	2	68	138	712	896
	Maluku	948	18	666	16	5	2	275	195	1.374	1.745
32	Papua Barat	82	0	81	0	11	0	1.482	446	1.846	759
33	Papua		1.111		658		10		456		2.845
	Papua	82	1111	81	658	11	10	1482	902	1846	3604
	Indonesia	122.292	133.509	106.746	113.673	3.378	3.621	20.623	13.885	45.956	57.368

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

BPS, Potensi Desa 2008

Tabel 3.9
Data Pembangunan Rumah Susun (Konstruksi)
Tahun Anggaran 2005 - 2009

No	Tahun	Kota	Lokasi	Jmlh Twin Block (TB)	Jmlh Lantai (Lt)	Jumlah Unit	Type
1	2	3	4	5	6	7	8
2005-2006							
1		Medan	Martubung	2	4	192	21
2		Batam	Tanjung Piayu	1	4	96	21
			Muka Kuning	1	5	80	27
3		Bandung	Cingised	1	5	96	21
4		Semarang	Univ. Diponegoro	1	4	84	21
5		Yogyakarta	Univ. Islam I	1	4	84	21
6		Surabaya	Siwalankerto	2	5	186	18/21/36
7		Makassar	UMI	1	4	84	21
8		Manado	Univ. Sam R	1	4	84	21
9		Nunukan	Sedadap	1	4	96	21
<i>Sub Total A</i>				12	43	1.082	
2006-2007							
1		Bogor	IPB	1	5	96	18
2		Depok	UI	1	4	116	18
3		Tangerang	UNMUH Jakarta	1	5	96	18
4		Lampung	Univ. Lampung	1	5	96	18
5		Kupang	Univ. Nusa C	1	5	96	18
<i>Sub Total B</i>				5	24	500	
2007							
1		Padang	Univ. Andalas	1	5	98	21
2		Jambi	Univ. Jambi	1	5	98	21
3		Gresik	Kebomas	1	4	98	21
4		Palu	Univ. Tadulako	1	4	98	21
5		Makassar	Yayasan Athirah	1	4	79	27
6		Bau-Bau	Pemda	1	4	98	21
<i>Sub Total C1</i>				6	26	569	
2007-2008							
7		Jakarta	Marunda-TB 2	1	6	102	30
8		Jakarta	Marunda-TB 3	1	6	102	30
9		Jakarta	Marunda-TB 4	1	6	102	30
10		Jakarta	Marunda-TB 5	1	6	102	30
11		Yogyakarta	UGM	1		98	21
12		Jombang	Inst. Keislaman HA	1		98	21
13		Denpasar	Univ. Udayana	1		98	21
14		Makassar	Univ. Hasanuddin	1		98	21
15		Medan	Univ. Medan Area	1		98	21
16		Jakarta	Marunda-TB 1	1	6	102	30
17		Jakarta	UHAMKA	1		98	21
18		Bogor	Univ. Ibn Khaldun	1		98	21
19		Malang	UnMuH Malang	1		98	21
20		Semarang	Unisula	1		98	21
21		Palangkaraya	Univ. Palangkaraya	1		98	21
22		Tarakan	Univ. Borneo	1		98	21
<i>Sub Total C2</i>				16	30	1.588	
2008							
1		Padang	Univ. Andalas (Lanjutan)	1	5	98	21
2		Jambi	Univ. Jambi (Lanjutan)	1	5	98	21
3		Palu	Univ. Tadulako (Lanjutan)	1	4	98	21
4		Bau-Bau	Pemda (Lanjutan)	1	4	98	21
5		Banda Aceh	Univ. Syiah Kuala	1	4	98	21
<i>Sub Total D</i>				5	22	490	

Lanjutan Tabel 3.9

No	Tahun	Kota	Lokasi	Jmlh Twin Block (TB)	Jmlh Lantai (Lt)	Jumlah Unit	Type
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-2009							
1		Jakarta	Institut Ilmu Al Quran	0,5			
2		Jakarta	Univ. Negeri Jakarta	1			
<i>Sub Total DKI Jakarta</i>				1,5			
1		Bogor	Univ. Juanda	0,5			
2		Tasikmalaya	Univ. Siliwangi	1			
3		Garut	Univ. Garut	0,5			
4		Cirebon	STAIN Cirebon	1			
5		Bandung	Univ. Pasundan	1			
6		Yogyakarta	Univ. Islam Indonesia	1			
7		Yogyakarta	Univ. Negeri Jakarta	1			
8		Yogyakarta	Univ. STS Yogyakarta	1			
9		Purwokerto	Univ. Jend. Sudirman	1			
10		Surakarta	Univ. Negeri 11 Maret	1			
11		Surakarta	Univ. Muhamadiyah	1			
12		Semarang	Univ. Negeri Semarang	1			
13		Semarang	Univ. Wahid Hasyim	0,5			
14		Malang	Univ. Islam Malang	1			
15		Surabaya	Univ. Negeri Surabaya	1			
16		Surabaya	Univ. Airlangga	1			
17		Surabaya	IAIN Sunan Ampel	1			
<i>Sub Total Wilayah Jawa</i>				15,5			
1		Lhokseumawe	Univ. Malikul Saleh	1			
2		Medan	Univ. Muh Sumut	1			
3		Medan	Univ. Islam Neg Medan	1			
4		Padang	Univ. Andalas Padang	1			
5		Padang	Univ. Negeri Padang	1			
6		Pekanbaru	Univ. Islam Riau	1			
7		Pekanbaru	Univ. Negeri Riau	1			
8		Batam	Mega Kuning-1	1			
9		Batam	Mega Kuning-2	1			
10		Jambi	IAIN Sultan Thaha S	1			
11		Lampung	IAIN Raden Intan	1			
<i>Sub Total Wilayah Sumatera</i>				11			
1		Pontianak	Poltek Negeri Pontianak	1			
2		Banjarmasin	IAIN Antasari	1			
3		Samarinda	Univ. Mulawarman	1			
4		Makassar	Univ. Hasanuddin	1			
5		Makassar	Univ. Muh Makassar	1			
6		Makassar	Univ. Islam Neg Alauddin	1			
7		Gorontalo	Univ. Negeri Gorontalo	1			
8		Palu	Pekerja Palu	1			
9		Mataram	Univ. Mataram	1			
10		Jayapura	Yumasis	0,5			
11		Manokwari	Univ. Papua Manokwari	1			
12		Kupang	Univ. Muh Kupang	1			
<i>Sub Total Wilayah Luar Jawa dan Sumatera</i>				11,5			
1		Kendari	Kendari	1			
2		Ambon	Univ. Patimura Ambon	1			
3		Gorontalo	Univ. Sultan Amay Gorontalo	1			
<i>Sub Total Wilayah Timur</i>				3			
Total 2008-2009				42,5			
Grand Total				86,5			

Sumber : Kedepuyan Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Tabel 3.10
Status Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Tahun Anggaran 2003 - 2008

No	Tahun	Kab./ Kota	Lokasi	Jmlh Twin Block (TB)	Jumlah Unit	Type
1	2	3	4	5	6	7
1	2003/2004	Makasar	Makasar, Daya 1	1	96	21
2	2003/2004	Batam	Muka kuning	2	180	27
3	2003/2004	Cimahi	Cigugur tengah	2	192	21
4	2003/2004	Yogyakarta	Cokrodirjan	1	72	21
5	2003/2004	Surakarta	Bagalon 1	1	90	21
6	2003/2004	Surabaya	Penjaringan sari	3	384	21
7	2003/2004	Surabaya	Wonorejo 1	1	96	21
8	2003/2004	Gresik	Karang turi	1	96	21
Sub Total 2003/ 2004				12	1.206	
1	2004/2005	Medan	Belawan 1	1	96	21
2	2004/2005	Jakarta utara	Marunda	3	300	30
3	2004/2005	Karawang	Karawang, Jln.Taruno	1	96	21
4	2004/2005	Bogor	Menteng asri 1	1	80	27
5	2004/2005	Depok	Cimanggis 1	1	96	21
6	2004/2005	Bekasi	Bekasi jaya	1	96	21
7	2004/2005	Yogyakarta	Sleman 1	1	96	21
Sub Total 2004/ 2005				9	860	
1	2005/2006	Medan	Medan USU (Putra)	1	96	21
2	2005/2006	Tanjung balai	Kel.Sel.raja	1	96	21
3	2005/2006	Palembang	Jln.Kasnaryansyah	1	96	21
4	2005/2006	Nunukan	Nunukan, Kws Sedadap	1	96	21
5	2005/2006	Makasar	Makasar, Mariso	3	288	27
6	2005/2006	Jayapura	Jayapura, Dok 9	1	96	21
7	2005/2006	Jayapura	Jayapura, UNCEN	1	96	21
8	2005/2006	Jakarta Utara	Marunda	2	200	30
9	2005/2006	Bandung	Cingised 1	1	96	21
10	2005/2006	Karawang	Menteng asri 2	1	80	27
11	2005/2006	Yogyakarta	UGM 1	1	96	21
12	2005/2006	Semarang	Kaligawe 1	1	96	21
13	2005/2006	Semarang	UNDIP 1	1	96	21
14	2005/2006	Surabaya	Wonorejo 2	2	192	21
15	2005/2006	Entikong	Kec.Sanggau Entikong	1	96	21
16	2005/2006	Nunukan	Nunukan, Kws Sedadap	1	96	21
17	2005/2006	Makasar	Makasar, Mariso	3	288	27
18	2005/2006	Jayapura	Jayapura, Dok 9	1	96	21
19	2005/2006	Jayapura	Jayapura, UNCEN	1	96	21
20	2005/2006	Sidoarjo	Tambak sawah 1	1	96	21
Sub Total 2005/ 2006				26	2.488	
1	2006/2007	Medan	Belawan 2	1	96	21
2	2006/2007	Medan	Medan USU (Putri)	1	96	21
3	2006/2007	Tanjung balai	Kel.Sel.raja	1	96	21
4	2006/2007	Palembang	Asrama, UNSRI	1	96	21
5	2006/2007	Banjarmasin	Kelayan Selatan	1	96	21
6	2006/2007	Bitung	Bitung	1	96	21
7	2006/2007	Makasar	Makasar, Daya 2	1	96	21
8	2006/2007	Makasar	Makasar, UNHAS	2	192	21
9	2006/2007	Jayapura	Jayapura, UNCEN	1	96	21
10	2006/2007	Bandung	ITB Kampus	1	96	21
11	2006/2007	Bandung	Cingsised 2	1	96	21
12	2006/2007	Sumedang	UNPAD, Asrama	2	192	21
13	2006/2007	Yogyakarta	UGM 2	1	93	21
14	2006/2007	Yogyakarta	UMY	3	96	21
15	2006/2007	Yogyakarta	Gowongan 1	1	96	21
16	2006/2007	Surakarta	Begalon 2	1	96	21
17	2006/2007	Semarang	Kaligawe 2	2	192	21
18	2006/2007	Semarang	UNDIP 2	1	96	21
19	2006/2007	Sukoharjo	Sukoharjo 1	1	96	21
20	2006/2007	Cilacap	Tg.Kemulyaan 1	1	96	21
21	2006/2007	Karang anyar	Sroyo 1	1	96	21

Lanjutan Tabel 3.10

No	Tahun	Kab./ Kota	Lokasi	Jmlh Twin Block (TB)	Jumlah Unit	Type
1	2	3	4	5	6	7
22	2006/2007	Surabaya	ITS Sukolilo	4	384	21
23	2006/2007	Surabaya	Sidotopo	3	288	21
24	2006/2007	Gresik	Gulomantung	1	192	21
25	2006/2007	Sidoarjo	Tambak sawah 2	2	192	21
26	2006/2007	Banjarmasin	Kelayan Selatan	1	96	21
27	2006/2007	Bitung	Bitung	1	96	21
28	2006/2007	Makasar	Makasar, Daya 2	1	96	21
29	2006/2007	Makasar	Makasar, UNHAS	2	192	21
30	2006/2007	Jayapura	Jayapura, UNCEN	1	96	21
31	2006/2007	Padang	Asrama, UNAND	1	96	21
32	2006/2007	Depok	Cimanggis 2	1	96	21
Sub Total 2006/ 2007				49	4.131	
1	2007	Lampung	Kel.Keteguhan	1	96	21
2	2007	Yogyakarta	Sleman 2	1	96	21
3	2007	Surakarta	UNS	1	96	21
4	2007	Pekalongan	Krapyak 1	1	96	21
5	2007	Wonosobo	UNSIQ	1	96	21
Sub Total 2007				5	480	
1	2007/2008	Medan	Belawan 3	1	96	21
2	2007/2008	Palangkaraya	Kota palangkaraya	1	96	21
3	2007/2008	Samarinda	Samarinda	1	96	21
4	2007/2008	Tarakan	Boom panjang	1	96	21
5	2007/2008	Manado	Manado mapanget	1	96	21
6	2007/2008	Kendari	Kendari	1	96	21
7	2007/2008	Bau Bau	Bau bau barataguru	1	192	21
8	2007/2008	Makasar	Makasar, UNISMU	2	192	21
9	2007/2008	Luwu timur	Luwu Timur, Malili	1	96	21
10	2007/2008	Kupang	Kupang	1	96	21
11	2007/2008	Batam	Sekupang 1	2	192	24
12	2007/2008	Batam	Sekupang 1	2	192	24
13	2007/2008	Bengkulu	Kota Bengkulu	1	96	21
14	2007/2008	Lampung	Kel.Keteguhan	1	96	21
15	2007/2008	Jakarta timur	Komarudin 1	2	200	30
16	2007/2008	Jakarta timur	Cipinang besar selatan	2	192	30
17	2007/2008	Jakarta timur	Cakung barat	2	160	36
18	2007/2008	Jakarta timur	Pinus elok 1	2	200	30
19	2007/2008	Jakarta timur	Pinus elok 2	2	200	30
20	2007/2008	Bandung	Cingised 3	1	96	21
21	2007/2008	Yogyakarta	Gowongan 2	1	96	21
22	2007/2008	Yogyakarta	Tg.Panggung	1	96	21
23	2007/2008	Surakarta	Univ.Muhammadiyah Surakarta	1	96	21
24	2007/2008	Semarang	Kaligawe 3	2	192	24
25	2007/2008	Semarang	Kaligawe 4	2	192	24
26	2007/2008	Sukoharjo	Sukoharjo 2	2	192	24
27	2007/2008	Cilacap	Tg.Kemulyaan	1	96	21
28	2007/2008	Pekalongan	Krapyak 2	2	192	21
29	2007/2008	Karang anyar	Sroyo 2	1	96	21
30	2007/2008	Surabaya	Kali kedinding	2	192	21
31	2007/2008	Sidoarjo	Tambak sawah 3	2	192	21
32	2007/2008	Palangkaraya	Kota palangkaraya	1	96	21
33	2007/2008	Samarinda	Samarinda	1	96	21
34	2007/2008	Tarakan	Boom panjang	1	96	21
35	2007/2008	Bitung	Manado mapanget	1	96	21
36	2007/2008	Kendari	Kendari	1	96	21
37	2007/2008	Bau Bau	Bau bau barataguru	2	192	21
38	2007/2008	Kupang	Kupang	1	96	21
Sub Total 2007/ 2008				53	5.176	
Total 2003 - 2008				154	14.341	

Sumber : Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman, Ditjend. Cipta Karya, Dep. PU

Tabel 3.11.1
Sumber Air untuk Minum/ Memasak (Desa/ Kelurahan)
Tahun 2005

No.	Provinsi	PAM/ Air Kemasan	Pompa Listrik/ Tangan	Sumur	Mata Air	Sungai/ Danau	Air Hujan	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nangroe Aceh Darussalam	360	71	4.686	347	358	51	95
2	Sumatera Utara	578	280	2.134	1.233	558	89	43
3	Sumatera Barat	261	17	345	227	25	18	8
4	R i a u	20	14	860	24	135	418	6
5	J a m b i	223	7	650	45	206	103	1
6	Sumatera Selatan	218	34	1.728	102	491	192	13
7	Bengkulu	125	16	943	92	42	2	4
8	Lampung	79	15	1.829	155	52	56	5
9	Bangka Belitung	8	10	287	10	5	1	0
10	Kepulauan Riau	40	1	165	26	12	8	3
11	DKI Jakarta	125	134	0	0	0	6	2
12	Jawa Barat	506	1.118	2.956	1.159	41	12	16
13	Jawa Tengah	931	426	5.152	1.916	40	73	26
14	DI Yogyakarta	49	10	313	31	0	34	1
15	Jawa Timur	996	1.299	4.583	1.302	66	107	124
16	Banten	96	310	802	182	59	14	19
17	B a l i	352	16	99	186	8	37	3
18	Nusa Tenggara Barat	100	68	500	146	5	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	219	12	628	1.590	159	101	29
20	Kalimantan Barat	89	4	231	134	674	383	15
21	Kalimantan Tengah	75	60	236	24	877	79	0
22	Kalimantan Selatan	401	249	582	59	605	58	5
23	Kalimantan Timur	202	26	270	183	515	136	12
24	Sulawesi Utara	292	27	498	392	12	45	3
25	Sulawesi Tengah	170	111	571	501	136	31	10
26	Sulawesi Selatan	436	235	1.598	857	122	23	15
27	Sulawesi Tenggara	176	18	943	420	67	37	24
28	Gorontalo	38	3	357	31	15	1	5
29	Maluku	56	10	527	228	30	7	15
30	Maluku Utara	91	5	535	68	59	23	0
31	Papua	104	29	728	1.588	552	316	22
	Indonesia	7.416	4.635	35.736	13.258	5.926	2.461	525

Sumber : Podes 2005, BPS

Tabel 3.11.2
Sumber Air untuk Minum/ Memasak (Desa/ Kelurahan)
Tahun 2008

No.	Provinsi	PAM/ Air Kemasan	Pompa Listrik/ Tangan	Sumur	Mata Air	Sungai/ Danau	Air Hujan	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nangroe Aceh Darussalam	531	110	4.575	649	415	68	76
2	Sumatera Utara	613	481	2.328	1.656	492	150	47
3	Sumatera Barat	273	18	383	201	24	21	4
4	R i a u	39	34	951	17	131	424	8
5	J a m b i	237	5	711	64	165	113	8
6	Sumatera Selatan	252	30	1.987	154	420	226	10
7	Bengkulu	143	10	1.013	114	69	1	1
8	Lampung	66	32	1.965	162	60	43	11
9	Bangka Belitung	7	22	306	8	0	1	0
10	Kepulauan Riau	58	4	180	65	4	9	6
11	DKI Jakarta	144	117	0	0	0	6	0
12	Jawa Barat	579	1.217	2.753	1.227	57	11	27
13	Jawa Tengah	958	517	5.030	1.935	49	83	2
14	DI Yogyakarta	37	15	313	35	0	34	4
15	Jawa Timur	1.079	1.417	4.322	1.354	89	86	158
16	Banten	110	382	726	198	50	19	19
17	B a l i	368	16	91	187	10	38	2
18	Nusa Tenggara Barat	150	87	482	176	13	2	3
19	Nusa Tenggara Timur	198	15	664	1.646	128	115	37
20	Kalimantan Barat	87	23	318	268	685	402	8
21	Kalimantan Tengah	82	84	353	50	797	71	11
22	Kalimantan Selatan	382	251	642	70	558	67	4
23	Kalimantan Timur	244	28	265	256	471	128	25
24	Sulawesi Utara	327	28	603	450	17	42	27
25	Sulawesi Tengah	214	118	600	570	136	27	21
26	Sulawesi Selatan	445	335	1.300	725	94	15	32
27	Sulawesi Tenggara	194	33	1.108	563	60	51	19
28	Gorontalo	75	3	415	71	15	4	1
29	Sulawesi Barat	31	4	200	253	41	7	0
30	Maluku	49	20	471	300	23	30	13
31	Maluku Utara	111	7	687	109	80	42	0
32	Irian Jaya Barat	41	15	255	429	267	181	17
33	Papua	68	42	445	1.945	367	378	63
	Indonesia	8.192	5.520	36.442	15.907	5.787	2.895	664

Sumber : Podes 2008, BPS

Tabel 3.12.1 :
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam
Memasuki Musim Hujan 2006 - 2007
(Status per 31 Desember 2006)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergenang								Rusak/Roboh/Hanyut							
						Permukiman	Rumah	Fasum	Jalan	Jembatan	Sawah	Perkebunan	Perikanan	Rumah	Fasum	Jalan	Jembatan	Bendung	Saluran	Tanggul	Bang SDA
						(Ha)	(Buah)	(Buah)	(Km)	(Buah)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Buah)	(Buah)	(Km)	(Buah)	(Buah)	(m)	(m)	(Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wilayah Barat		207	142	234	264.293	16.578	19.590	22	144	153	63.316	4.960	376	29.125	210	756	36	1	13.506	24.330	51
1	N A D	60	102	192	225.448	40	1.380	2	3	0	10.911	130	0	17.681	155	67	18	1	13.256	18.825	1
2	Sumatera Utara	48	11	34	15.921	52	2.890	7	13	150	740	500	60	1.175	4	0	1	0	0	5	50
3	Sumatera Barat	32	23	3	765	806	5.905	10	52	3	3.486	4.030	316	425	2	674	16	0	250	1.000	0
4	Sumatera Selatan	6	0	0	50	0	250	3	0	0	701	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
5	Riau	19	6	5	21.934	15.330	8.065	0	73	0	47.478	300	0	8.960	47	15	0	0	0	4.500	0
6	Kepulauan Riau	3	0	0	0	350	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jambi	6	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	674	2	0	0	0	0	0	0
8	Bengkulu	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	19	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	141	0	0	1	0	0	0	0
10	Bangka Belitung	1	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		391	6.777	716	546.779	7.520	66.837	89	1.313	12	95.913	1.200	7.110	620.066	3.273	185	135	52	5.225	14.590	3
11	DKI Jakarta	9	3	0	1.210	0	500	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	75	0
12	Banten	17	1	0	0	17	3.311	0	1	0	1.743	192	0	775	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Barat	77	511	162	44.973	2.972	12.962	39	6	1	48.250	0	5.150	2.761	21	7	8	0	0	480	3
14	Jawa Tengah	104	1.337	262	206.612	2.232	9.551	10	564	4	6.622	305	1.230	202.965	579	121	62	10	0	6.073	0
15	D.I.Y.	27	4.776	241	215.408	40	1.356	0	0	0	1.790	0	0	410.561	2.615	4	34	5	35	2.100	0
16	Jawa Timur	122	134	25	27.346	1.529	28.535	39	667	7	28.328	603	730	2.822	57	49	24	37	5.190	5.862	0
17	Kalimantan Timur	12	0	0	8.200	0	2.022	0	2	0	3.080	0	0	106	0	2	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	6	6	0	4.000	730	4.450	1	67	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	16	9	26	39.030	0	4.150	0	6	0	3.100	100	0	63	1	3	7	0	0	0	0
Wilayah Timur		242	384	190	90.283	945	23.589	210	39	2	62.858	10.109	530	8.348	108	350	57	24	75.389	15.085	3
21	Bali	5	1	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	25	10	0	8.989	200	2.827	13	12	1	30.220	211	330	4.428	31	308	19	8	51.972	0	3
23	NTT	24	14	0	772	0	2.562	33	0	0	5.035	47	0	152	0	4	1	10	600	0	0
24	Sulawesi Selatan	26	222	170	12.115	200	5.960	4	5	0	21.768	4.650	200	1.255	1	20	13	4	1.907	1.450	0
25	Sulawesi Tengah	15	0	0	3.400	45	1.200	0	1	0	470	4.700	0	420	0	0	0	0	2.410	0	0
26	Sulawesi Tenggara	9	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	189	3	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	9	0	1	8.000	500	3.723	0	0	0	0	101	0	0	53	1	5	0	0	0	0
28	Sulawesi Utara	31	33	15	48.043	0	5.526	23	21	0	4.965	0	0	1.425	12	16	18	2	18.500	13.335	0
29	Sulawesi Barat	3	0	0	0	0	300	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Maluku	53	3	2	4.400	0	191	2	0	0	400	0	0	284	1	0	1	0	0	0	0
31	Maluku Utara	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	108	7	1	0	0	0	0	0
32	Papua	23	98	2	4.364	0	700	5	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Irian Jaya Barat	7	3	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
TOTAL INDONESIA		840	7.303	1.140	901.355	25.043	110.016	321	1.496	167	222.086	16.269	8.016	657.539	3.591	1.291	228	77	94.120	54.005	57

Sumber : Posko Bencana Dep. PU

Tabel 3.12.2 :
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam
Memasuki Musim Hujan 2007 - 2008
(Status 01 Nopember - 31 Desember 2007)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergenang							Rusak/Roboh/Hanyut								
						Permukiman (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jmbtn (Buah)	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perikanan (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jmbtn (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bang SDA (Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wilayah Barat		93	4	0	8.450	0	12.520	32	0	0	1.430	20	0	23	5	1	4	0	0	0	0
1	N A D	26	3	0	8.150	0	2.506	22	0	0	120	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	18	0	0	0	0	3.450	8	0	0	410	10	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	9	0	0	0	0	3.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sumatera Selatan	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Riau	8	0	0	300	0	2.343	1	0	0	800	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
6	Kepulauan Riau	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jambi	6	1	0	0	0	1.000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Bengkulu	23	0	0	0	0	10	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
10	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		206	111	39	70.336	191	57.314	130	140	25	38.595	1.921	635	2.717	66	53	50	18	1.294	983	102
11	DKI Jakarta	27	1	0	46	0	3.217	12	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
12	Banten	17	0	0	0	0	1.710	0	0	0	1.100	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Barat	38	2	0	420	0	6.208	5	60	0	130	0	400	815	8	0	1	1	0	610	0
14	Jawa Tengah	44	52	0	34.420	0	20.776	48	0	1	17.943	153	235	626	3	6	3	1	25	203	42
15	D.I.Y.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	40	0
16	Jawa Timur	71	56	39	35.200	191	22.798	42	80	23	19.302	1.768	0	1.096	55	47	43	16	1.269	130	60
17	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	1	0	0	250	0	200	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	5	0	0	0	0	2.405	20	0	0	120	0	0	29	0	0	3	0	0	0	0
Wilayah Timur		66	7	0	5.578	0	2.332	35	10	0	1.559	0	0	647	0	0	0	0	0	50	1
21	Bali	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	7	6	0	2.000	0	240	6	0	0	1.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
23	NTT	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Selatan	10	0	0	0	0	10	0	0	0	100	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	3	0	0	3.488	0	972	19	10	0	459	0	0	109	0	0	0	0	0	50	1
28	Sulawesi Utara	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	5	1	0	90	0	1.110	10	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
30	Maluku	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Irian Jaya Barat	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INDONESIA		365	122	39	84.364	191	72.166	197	150	25	41.584	1.941	635	3.387	71	54	54	18	1.294	1.033	103

Sumber : Posko Bencana Dep. PU

Tabel 3.12.3
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam
Musim Hujan 2008 - 2009
(Status 01 November - 31 Desember 2008)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergenang							Rusak/Roboh/Hanyut								
						Peremukiman (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perikanan (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bang SDA (Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wilayah Barat		60	9	3	7.650	126	13.705	41	70	13	8.331	2.130	450	3.195	26	37	12	0	0	10	0
1	N A D	15	0	0	6.250	67	6.700	19	15	2	5.500	1.030	0	1.793	13	5	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	13	8	2	800	11	1.125	7	5	1	200	0	0	338	3	2	3	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	7	1	0	500	22	3.270	9	20	2	1.756	0	0	590	8	6	1	0	0	0	0
4	Sumatera Selatan	1	0	0	0	1	100	2	10	1	0	0	0	25	2	3	0	0	0	0	0
5	Riau	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kepulauan Riau	1	0	0	0	1	100	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
7	Jambi	9	0	0	0	6	600	0	0	0	150	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
8	Bengkulu	12	0	1	100	18	1.800	4	10	7	725	1.100	450	433	0	17	8	0	0	10	0
9	Lampung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
10	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		156	20	5	16.410	565	58.585	90	195	19	4.413	65	460	12.582	39	59	7	0	2.840	779	6
11	DKI Jakarta	10	0	0	0	27	2.820	0	0	0	210	0	200	658	0	0	0	0	0	0	2
12	Banten	41	15	5	11.910	233	23.196	38	85	7	2.320	0	260	5.648	7	29	0	0	740	0	1
13	Jawa Barat	28	2	0	0	30	3.000	1	5	5	490	10	0	929	2	1	5	0	0	101	1
14	Jawa Tengah	9	0	0	0	11	1.100	0	0	0	0	0	0	287	11	0	0	0	100	0	0
15	D.I.Y.	43	2	0	0	39	4.007	17	15	0	593	55	0	1.100	7	5	0	0	2.000	678	2
16	Jawa Timur	11	1	0	0	143	14.322	8	35	2	300	0	0	1.839	4	10	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Timur	1	0	0	0	3	300	2	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	9	0	0	4.500	66	8.540	11	35	3	400	0	0	1.721	4	10	1	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	4	0	0	0	13	1.300	13	20	2	100	0	0	325	4	4	1	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Timur		83	9	1	21.085	28	2.920	26	60	7	500	380	10	2.623	28	20	9	1	150	310	2
21	Bali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	4	0	0	0	2	200	2	0	0	100	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
23	NTT	12	1	0	0	5	530	7	10	3	170	300	10	269	4	3	3	1	150	0	2
24	Sulawesi Selatan	13	3	0	15.000	11	1.100	6	20	1	30	30	0	1.750	5	7	4	0	0	300	0
25	Sulawesi Tengah	3	0	0	0	1	100	2	0	1	100	0	0	40	3	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	7	2	0	6.085	4	400	0	0	0	0	0	0	379	13	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	7	0	0	0	1	170	4	5	0	0	0	0	50	0	1	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Utara	6	3	1	0	3	320	5	15	2	100	50	0	75	3	5	2	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	11	0	0	0	1	100	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
30	Maluku	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INDONESIA		299	38	9	45.145	719	75.210	157	325	39	13.244	2.575	920	18.400	93	116	28	1	2.990	1.099	8

Sumber : Posko Bencana Dep. PU

BAB IV

INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

4.1 Infrastruktur Sumber Daya Air

Air merupakan unsur utama bagi kehidupan di planet bumi ini serta bagian dari pembangunan berkelanjutan. Hal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Air seharusnya diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga terhadap pencemaran. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya air yang dimulai dari kebijakan pemerintah tentang air, seperti bagaimana menyediakan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sistem irigasi yang memiliki asas adil dan merata atau perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem. Pengelolaan sumber daya air seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Ada tiga permasalahan air yaitu terlalu sedikit menimbulkan kekeringan, terlalu banyak menimbulkan banjir dan terlalu kotor menimbulkan pencemaran lingkungan. Sejalan dengan UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA, pengelolaan SDA harus melalui tiga aspek, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

4.1.1 Wilayah Sungai

Faktor kontribusi penyebab banjir adalah luas daerah aliran sungai, curah hujan, dan tata guna lahan. Tiga variabel tersebut berlaku pada daerah aliran sungai. Sedangkan besarnya aliran

(debit) banjir di sungai dipengaruhi empat faktor : lebar, kedalaman air, jenis material di sungai, dan kemiringan memanjang sungai. Dari tujuh faktor tersebut, luas daerah aliran sungai dapat dikatakan relatif tetap. Enam faktor lainnya dapat berubah (hanya curah hujan yang bisa dikatakan faktor alam). Lima faktor lainnya, yaitu tata guna lahan, lebar sungai, kedalaman sungai, jenis material dan kemiringan sungai, dapat berubah akibat tindakan manusia. Pada Tabel 4.1 disajikan data wilayah sungai berikut jumlah DAS, sungai, dan DI beserta status wilayah sungainya (WS). Dari data wilayah sungai (WS) di Indonesia tersebut cukup menunjukkan kerawanan terjadinya banjir, untuk itu penanganan WS ini perlu mendapat perhatian penting.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan penetapan wilayah sungai. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Permen PU No.11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, meliputi :

- (a) Wilayah Sungai Lintas Negara (Tabel 4.2.1)
- (b) Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Tabel 4.2.2)
- (c) Wilayah Sungai Strategis Nasional (Tabel 4.2.3)
- (d) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota (Tabel 4.2.4)
- (e) Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota (Tabel 4.2.5)

Penetapan Wilayah Sungai memerlukan data yang lengkap dan akurat tentang keberadaan daerah aliran sungai (DAS) dan/ atau wilayah sungai (WS) yang secara utuh berada di wilayah kabupaten/ kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Wilayah Sungai didasarkan pada pertimbangan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Efektivitas pengelolaan sumber daya air
- b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air
- c. Tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif

Untuk kriteria penetapan Wilayah Sungai strategis nasional yang disajikan pada Tabel 4.2.3 juga seharusnya memenuhi parameter sebagai berikut :

- a. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%
- b. Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk pada provinsi
- c. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional, yang meliputi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi
- d. Besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi

4.1.2 Danau

Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendali banjir (nilai ekologis), wisata olahraga air, seperti perahu dayung, kano, memancing (nilai ekonomi), habitat satwa liar (nilai edukatif), dan menambah keindahan kota (nilai estetis).

Pemanfaatan situ-situ (danau) sebagai sistem pengendalian banjir memang belum begitu besar. Sejauh ini pemanfaatan situ lebih banyak untuk keperluan pertanian, irigasi serta konservasi sumber daya air. Namun demikian sesuai

dengan fungsinya, situ mampu memberikan kontribusi dalam pengendalian banjir. Tabel 4.3 menyebutkan bahwa jumlah situ lebih banyak dibandingkan dengan danau, yakni 1.164 banding 545. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki situ terbanyak, yaitu 555 buah dengan volume tampung 72,33 juta m³ dan Provinsi Sumatera Barat memiliki danau terbanyak, yakni 59 buah dengan Daerah Tangkapan Airnya 1.393 Km².

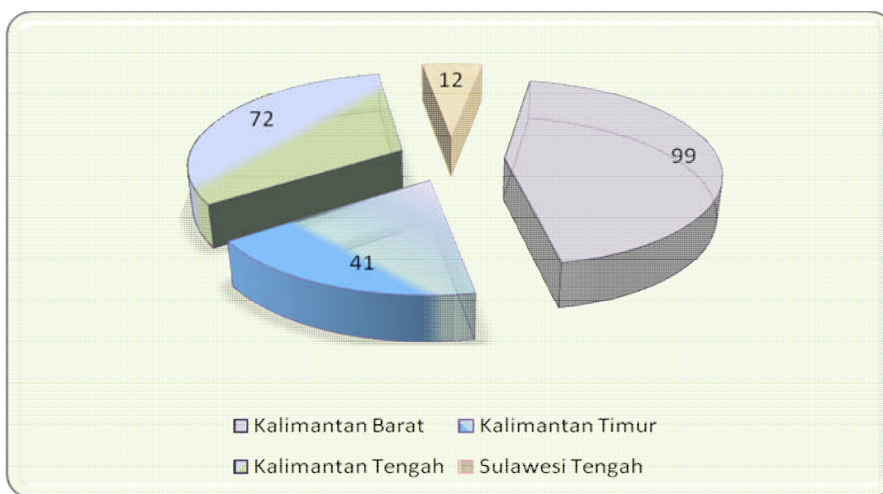
4.1.3 Rawa

Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (2007) menyebutkan bahwa luas rawa di Indonesia sebesar 33,4 juta ha atau 26,56 % dari total luas daratan. Dari jumlah tersebut, 20 juta ha (60%) diantaranya merupakan rawa pasang surut dan 13,4 juta ha (40%) rawa lebak. Data rawa di beberapa pulau di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dari data yang tersedia dalam tabel terlihat bahwa pulau yang memiliki lahan rawa terluas di Indonesia adalah Pulau Papua dengan luas total rawa mencapai hampir 5 juta ha yang berada di 84 lokasi. Sebagian besar rawa di Papua tergolong rawa lebak dan belum direklamasi. Di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sebagian besar lahan rawa telah di reklamasi.

Menurut jenisnya lahan rawa dibagi menjadi Rawa Pasang Surut (RPS) dan Rawa Non Pasang Surut (RNPS) atau rawa lebak. RNPS didefinisikan sebagai daerah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Tabel 4.5 menunjukkan data rawa di Indonesia, yang terdiri dari luas potensi (Ha), luas sudah reklamasi (Ha), dan luas belum reklamasi (Ha) untuk jenis rawa pasang surut dan rawa lebak. Dari hasil prosentase luas yang sudah direklamasi terhadap luas potensi, maka rawa di Provinsi Irian Jaya Barat telah 100% direklamasi. Sedangkan Tabel 4.6 menyajikan tentang pemanfaatan lahan rawa di Indonesia (Ha), yang terdiri dari sawah, kebun, tambak, lainnya, serta rawa yang belum dimanfaatkan (Ha). Adapun Gambar 4.1 menceritakan

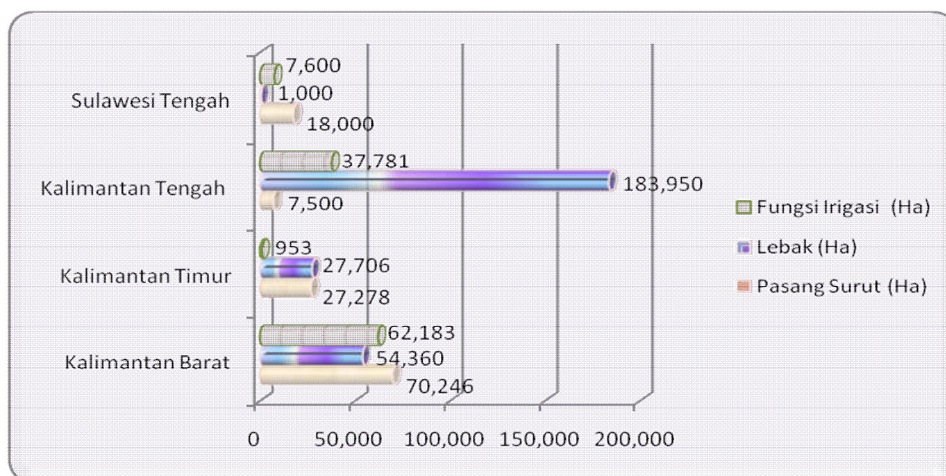
tentang jumlah rawa di beberapa tempat di Indonesia, yang menunjukkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki rawa terbanyak. Dari Gambar 4.2 terlihat, bahwa rawa jenis lebak yang paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan pasang surut, terutama Provinsi Kalimantan Tengah (183.950 Ha). Sedangkan yang berfungsi irigasi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Barat (62.183 Ha).

Gambar 4.1 Jumlah Rawa di Beberapa Tempat di Indonesia Tahun 2007



Sumber : http://sda.pu.go.id/rawa_list.php?admin=semua (Data Dioleh oleh Pusdata)

Gambar 4.2 Luas Rencana (Lebak dan Pasang Surut) dan Fungsi Irigasi (Ha) di Beberapa Tempat di Indonesia Tahun 2007



Sumber : http://sda.pu.go.id/rawa_list.php?admin=semua (Data Dioleh oleh Pusdata)

4.1.4 Irigasi

Program pembangunan irigasi terdiri dari beberapa kegiatan. Diantaranya adalah rehabilitasi prasarana air baku, pembangunan saluran air baku, pembangunan embung, pembangunan bendung karet/ waduk/ bendung. Jenis sarana air baku sendiri diantaranya adalah embung, mata air/ sungai, bendung/ bendungan, dan air tanah. Pemanfaatan air tanah untuk irigasi dilaksanakan secara selektif dan sedapat mungkin diupayakan memenuhi kriteria teknis maupun sosial ekonomis.

Rencana strategi irigasi (2005-2009) dibuat berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan luas areal tanam. Kebijakannya adalah memberi prioritas pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan secara optimum, rehabilitasi jaringan yang telah mengalami penurunan fungsi. Serta penyelesaian pembangunan jaringan irigasi agar berfungsi optimum (*full development*) dengan memperhatikan konsep pengelolaan sumber daya air yang komprehensif; terpadu dengan basis wilayah sungai, serta rencana tata ruang wilayah.

Daerah Irigasi Pada tahun 2003 telah mencapai 11,6 juta hektar. Rincian kondisi daerah irigasi pada tahun 2003 adalah daerah Irigasi Teknis seluas 3,99 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 1,96 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,89 juta hektar, Irigasi Desa seluas 1,35 juta hektar, Irigasi Tadah Hujan seluas 0,77 juta hektar, Rawa 2,01 juta hektar dan lahan kering 0,67 juta hektar.

Distribusi luas irigasi terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera yaitu sebesar 5.011.459,9 hektar (43 %) terdiri dari Irigasi Teknis seluas hampir 1 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 1,096 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,32 juta hektar, Irigasi Desa seluas 1,102 juta hektar, Irigasi Tadah Hujan dan lahan kering seluas 0 hektar, serta Rawa 1,495 juta hektar. Sedangkan untuk Jawa

adalah 3.142.933,1 hektar (27%) terdiri dari Irigasi Teknis seluas 1,904 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 0,381 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,328 juta hektar, Irigasi Desa seluas 0,195 juta hektar, Irigasi Tadah Hujan seluas 0,335 hektar, tidak ada Rawa dan lahan kering. Bali dan Nusa Tenggara sebesar 661.540,6 hektar (5,7%) terdiri dari Irigasi Teknis seluas 0,325 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 0,273 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,025 juta hektar, Irigasi Desa seluas 0,008 juta hektar, Irigasi Tadah Hujan seluas 0,013 juta hektar, tidak ada rawa dan lahan kering 0,018 juta hektar. Sedangkan Kalimantan sebesar 1.674.072,1 hektar (14,4%) terdiri dari Irigasi Teknis seluas 0,184 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 0,052 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,118 juta hektar, tidak ada Irigasi desa, Irigasi Tadah Hujan seluas 0,166 juta hektar, Rawa seluas 0,5 juta hektar dan lahan kering 0,654 juta hektar. Sulawesi sebesar 1.092.932,8 hektar (9,4 %) terdiri dari Irigasi Teknis seluas 0,545 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 0,149 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,079 juta hektar, Irigasi Desa seluas 0,43 juta hektar, Irigasi Tadah Hujan seluas 0,358 hektar, Rawa seluas 0,019 juta hektar dan tidak ada lahan kering. Maluku dan Papua sebesar 61.427 hektar (0,5%) terdiri dari Irigasi Teknis seluas 0,35 juta hektar, Irigasi Semi Teknis seluas 0,005 juta hektar, Irigasi Sederhana seluas 0,021 juta hektar, tidak ada Irigasi Desa, Irigasi Tadah Hujan, Rawa dan lahan kering (lihat tabel 4.7).

Pada Tabel 4.8 terlihat, bahwa jumlah irigasi terbanyak di Indonesia berada pada tingkat "Sederhana", yakni 9.167, disusul dengan tingkatan "Teknis" sebesar 7.520 dan tingkatan "Semi Teknis" sebesar 5.336. Sedangkan provinsi yang mempunyai luas rencana terbesar adalah Jawa Barat, yakni 1.301.283 Ha. Di provinsi yang sama juga mempunyai luas fungsional (ada jaringan utama) terbesar, yakni 1.096.022 Ha. Untuk yang belum ada jaringan utamanya, luas terbesar berada di provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni 212.615 Ha.

Jumlah irigasi terbanyak berada di provinsi Jawa Tengah, yakni ada 6.012. Untuk skala irigasi kecil (<1000 Ha), jumlah terbesar di provinsi Jawa Tengah, yakni 5.886 Ha dan yang terluas adalah provinsi Jawa Timur, 390.487 Ha. Jumlah terbesar untuk skala irigasi sedang (1000-3000 Ha) adalah di provinsi Jawa Timur, yakni 121 dengan luas 200.931 Ha. Adapun untuk skala irigasi besar (>3000 Ha), jumlah terbesar di provinsi Jawa Tengah, yakni 56 buah dan yang terluas ada di provinsi Jawa Barat sebesar 963.517 Ha (Tabel 4.9).

Luasan irigasi dan rawa <1000 Ha, jumlah paling banyak ada di provinsi Jawa Tengah, yakni ada 479.045. Untuk luasan irigasi dan rawa antara 1000-3000 Ha, jumlah terbanyak ada di provinsi Riau, yakni ada 168.315. Adapun luasan irigasi dan rawa >3000 Ha, jumlah paling banyak ada di provinsi Sumatera Selatan, yakni ada 539.153. Keterangan selengkapnya ada di Tabel 4.10.

Pada Tabel 4.11 terlihat, bahwa jumlah daerah irigasi terbanyak di Provinsi Jawa Timur, yakni 7.688, disusul dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 7.004 serta Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2.178. Total jumlah irigasi di Indonesia, yakni ada 25.016. Adapun di Provinsi Jawa Timur mempunyai luas fungsional (ada jaringan utama) terbesar, yakni 903.924 Ha.

Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah di luar irigasi rawa. Penetapan status daerah irigasi ini berdasarkan kriteria :

1. Daerah irigasi lintas negara merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara
2. Daerah irigasi lintas provinsi merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tapi masih dalam satu negara

3. Daerah irigasi lintas kabupaten/ kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/ kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi
4. Daerah irigasi pada satu kabupaten/ kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan, saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/ kota

Penetapan status daerah irigasi dimaksudkan untuk menegaskan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat (Tabel 4.12.1), Pemerintah Provinsi (Tabel 4.12.2), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Tabel 4.12.3) sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Sampai dengan tahun 2007 secara keseluruhan daerah irigasi yang terbangun di seluruh Indonesia meliputi luas potensial sekitar 7,4 juta Ha, dengan luas terbangun terdiri atas 7,04 juta Ha jaringan utama dan 6,8 juta Ha jaringan tersier. Prosentase luas terbangun untuk jaringan tersier terhadap luas potensial daerah irigasi (DI) Indonesia mencapai 92,33% (Tabel 4.13).

4.1.5 Bendungan/ Waduk

Bendungan adalah bangunan strategis. Hal ini disebabkan pembangunan dan pengelolaannya memerlukan teknologi tinggi, fungsi dan manfaat bendungan menyangkut masyarakat banyak (air minum, industri, pertanian, listrik), risiko yang besar apabila jebol, sehingga memerlukan pemeliharaan yang teliti. Dalam pengelolaan bendungan terus dilakukan *reservoir operation* dan monitoring setiap musimnya. Kedua hal tersebut bertujuan bagaimana mengoperasikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan air. Jika ketersediaan air karena curah hujan menurun maka pengeluarannya harus

dihemat, sehingga ketersediaan air akan tetap terjaga. Untuk itu keterlibatan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan bendungan ini sangat diperlukan.

Pembangunan bendungan tergantung dari topografi dari masing-masing daerah serta berapa besar air yang mengalir dalam skala tahunan. Data bendungan tahun 2007 menyebutkan, bahwa jumlah bendungan besar di Indonesia ($H_{\text{bend.}} \geq 15 \text{ m}$ atau $V_{\text{waduk}} \geq 500 \text{ ribu m}^3$) ada 107 buah. Tabel 4.14 adalah data daftar bendungan di Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 17.770 juta m^3 dan daerah tangkapan air sebesar 43.699,25 km^2 .

Waduk adalah tampungan buatan yang dibentuk akibat pembendungan aliran sungai. Peruntukkan waduk sebagai sumber air adalah untuk irigasi, PLTA, air minum, dan industri. Berdasarkan data dan informasi Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (2007), kondisi waduk utama di Indonesia per 25 Juni 2007 dalam kondisi waspada (diantara elevasi pola normal dan pola kering). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.15, yaitu adanya deviasi positif di beberapa provinsi yang cukup besar yang memberi informasi bahwa ketinggian air saat ini melebihi ketinggian air ideal.

Secara teknis ada tiga pola waduk, yaitu :

1. Waduk tahunan, dimana sepanjang tahun akan tetap terisi air dan pengaturannya tergantung musim tahunan, seperti Jatiluhur, Kedungombo
2. Waduk bulanan, adalah waduk-waduk kecil yang fungsinya hanya memperpanjang ketersediaan air dengan membangun embung-embung kecil atau reservoir, dimana ketersediaan airnya bisa diperpanjang. Misalnya di daerah-daerah pertanian seperti di Gunung Kidul dan Lombok, dimana musim hujannya kurang lebih empat bulan
3. Waduk harian, untuk penyediaan air minum

Data elevasi (ketinggian air) dan luas muka air waduk berdasarkan provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.16.1. Sedangkan inventarisasi bendungan hingga tahun 2009 berdasarkan provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.16.2. Jumlah bendungan terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu 85 unit dengan daerah tangkapan air seluas 8.296,75 Ha.

4.1.7 Embung

Salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air di lahan sawah tadah hujan adalah dengan membangun kolam penampung air atau embung. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian (pangan/ hortikultura), perkebunan dan peternakan. Embung yang bisa menampung genangan air yang luas diharapkan bisa menjaga kelestarian dan kelangsungan dari usia bendungan, ketersediaan / cadangan air untuk irigasi akan terpenuhi terutama pada musim kering dan meningkatkan pendapatan Sektor Pariwisata.

Informasi data embung potensi yang dapat disajikan adalah lokasi, jenis penanganan, serta proyeksi kapasitas tampung dari embung tersebut, yang dapat dilihat pada Tabel 4.17. Lokasi yang berpotensi untuk embung ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 17 kabupaten.

Data embung berdasarkan fisiknya tersebar di 15 Provinsi, dimana informasi lengkap datanya dapat dilihat pada Tabel 4.18, yang berisi informasi tentang lokasi, jumlah, jenis penanganan, dan fisik embung tiap provinsi. Jumlah embung terbanyak di provinsi Nusa Tenggara Barat (84 embung) dan paling sedikit di provinsi Jawa Timur (2 embung).

Untuk data embung berdasarkan manfaat embung sampai dengan tahun 2009 terdapat pada Tabel 4.19 yang tersebar di 14 Provinsi di Indonesia. Selain manfaat irigasi, tambahan ketersediaan air pada embung, dapat digunakan untuk menjamin air baku untuk air minum, perikanan dan meningkatkan pariwisata, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang harapan masyarakat. Peningkatan Tinggi Muka Air (TMA) menunjukkan kemampuan embung memasok air ke saluran irigasi dan dapat memenuhi kebutuhan air baku serta cukup untuk operasionalisasi pada musim kemarau.

4.1.8 Analisis Statistik Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan data pada Tabel 4.20 akan dilihat pengaruh Luas Potensial Daerah Irigasi dan Produksi Padi Tahun 2007. Dari hasil analisis regresi didapat hasil sebagai berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949 ^a	.901	.897	8.66367E5

a. Predictors: (Constant), Luas Irigasi 2007 (Ha)

b. Dependent Variable: Produksi Padi 2007 (Ton)

Hubungan luas irigasi dengan luas panen atau variasi data diterangkan model ini sebesar 90,1%. Dengan kata lain, besarnya pengaruh luas potensial daerah irigasi terhadap produksi padi sebesar 90,1% dan sisanya sebesar 9,9 dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya bibit, iklim, sumber daya manusia, pupuk, kondisi lahan, dan lain-lain. Mengingat faktor luas potensi daerah irigasi sangat besar pengaruhnya untuk produksi padi, maka pengoperasian dan pemeliharaan daerah irigasi perlu lebih ditingkatkan guna peningkatan ketahanan pangan di Indonesia.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	-438366.315	214973.053		-2.039	.051	-878718.651	1986.021
Luas Irigasi 2007 (Ha)	9.457	.593	.949	15.959	.000	8.243	10.671

a. Dependent Variable: Produksi Padi 2007 (Ton)

Pengaruh luas irigasi terhadap produksi padi pada tahun 2007 rata-rata sebesar 9.457 ton per Ha per Tahun. Jika diasumsikan bahwa per tahun terjadi 2 kali musim panen, maka secara umum dapat diperkirakan bahwa per musim panen untuk setiap hektar rata-rata dapat menghasilkan padi sebesar 4.728 ton. Banyak faktor yang mempengaruhi produksi padi seperti bibit, iklim, kondisi lahan yang digunakan, dan bencana alam. Oleh sebab itu hasil produksi padi per Hektar yang disebutkan di atas tentu saja tidak sama untuk setiap wilayah di Indonesia. Dengan mengakomodasikan faktor lain yang mempengaruhi produksi padi, secara statistik dapat diperkirakan produksi padi seluruh Indonesia dalam setahun berkisar antara 8.243 Ton/Ha hingga 10.671 Ton/Ha.

4.2 Infrastruktur Bina Marga

4.2.1 Jalan Tol

Disebabkan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan jalan baru, maka dibangun jalan tol yang pembangunan dan pemeliharaannya didanai oleh para pengguna jalan. Hal ini mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan tol dengan cara melibatkan partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sejak

Pemerintah mengenalkan kebijakan untuk menggali partisipasi Sektor Swasta dalam pengembangan infrastruktur, maka pembangunan jalan tol di Indonesia mulai meningkat. Nama ruas dan panjang jalan tol di Indonesia tahun 2004 terlihat di Tabel 4.21.1, sedangkan untuk ruas dan panjang jalan tol dalam tahap konstruksi pada saat itu ditampilkan pada Tabel 4.21.2.

Pemerintah berkeinginan untuk mempercepat pembangunan jalan tol guna mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, pembangunan jalan tol akan dilakukan sebagian besar di Pulau Jawa dan beberapa ruas di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi dan Bali (Tabel 4.22.1-Tabel 4.22.5). Dengan adanya KepMen PU Nomor: 360/KPTS/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas KepMen PU No: 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, maka ada beberapa perubahan panjang jalan tol, baik operasi maupun rencananya. Perubahan disini dapat dilihat pada Tabel 4.22.1B, Tabel 4.22.3B, dan Tabel 4.22.2B. KepMen PU yang baru ini diterbitkan sejak tanggal 24 Juni 2008.

Sejak *Infrastructure Summit* 2005, terdapat 3 ruas jalan tol yang sudah operasi dengan total panjang jalan 68,49 Km (Tabel 4.23.1). Sedangkan jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi pada saat tersebut hingga status Mei 2009 ada 5 ruas jalan tol dengan total panjang 97,70 Km (Tabel 4.23.2).

Penetapan Menteri PU tanggal 8 Juni 2006 dan Tanda Tangan PPJT tanggal 7 Juli 2006 tentang masa konsesi jalan tol, menghasilkan ruas jalan tol yang telah beroperasi (Tabel 4.24). Pengusahaan dan pengelola yang beroperasi terdiri dari PT. Jasa Marga dan PT. Jasa Marga dengan Badan Usaha lain.

Program percepatan pembangunan jalan tol dibagi menjadi dua, yaitu Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Non Trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa terdiri dari 13

ruas jalan tol dengan total panjang 763,24 km, sedangkan Jalan Tol Non Trans Jawa terdiri dari 19 ruas jalan tol sepanjang 335,84 km . Adapun data detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.25.1 dan Tabel 4.25.2.

Pembangunan jalan tol didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur yang menyeluruh, berkelanjutan secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan keuangan, dengan cara bersaing transparan serta mendorong terjadinya Alih Teknologi. Profil jalan tol Indonesia untuk beberapa ruas dapat dilihat di Tabel 4.26, yang terdiri dari panjang, kecepatan rencana, jumlah dan lebar jalur, lebar bahu luar dan dalam, serta lebar median dan damiija per ruas.

4.2.2 Jalan

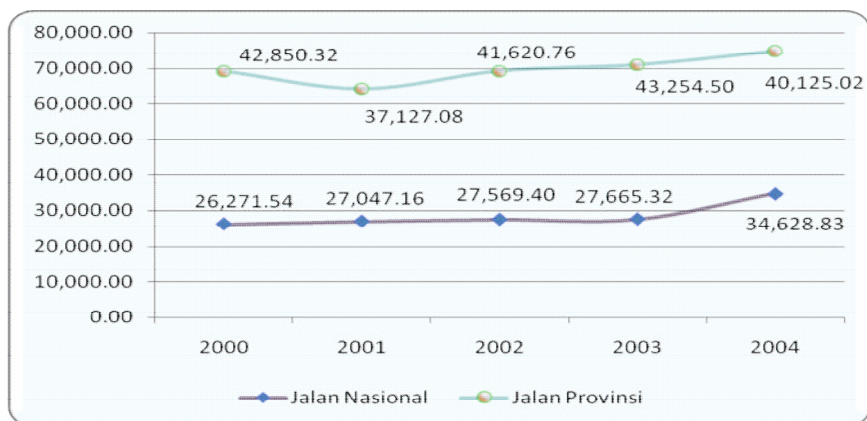
Jalan adalah prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas bisa meningkatkan usaha pembangunan terutama dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Informasi yang di sajikan di Tabel 4.27 adalah panjang jalan di seluruh wilayah Indonesia dari tahun 2000 hingga 2004, yang terdiri dari panjang Jalan Nasional 34.628,83 km, dan Jalan Provinsi 40.125,02 km. Dari seluruh panjang Jalan Nasional tersebut, Pulau Sumatera menduduki urutan pertama dengan panjang jalannya 10.588,92 km (30,58%), kemudian Kalimantan panjang jalan 5.705,97 km (16,48%) dan Sulawesi 7.092,50 km (20,48%). Sedangkan dari panjang Jalan Provinsi 40.125,02 km, menurun dibandingkan jalan provinsi tahun 2003 sepanjang 43.254,50 km, karena adanya sebagian jalan meningkat statusnya menjadi Jalan Nasional. Dari angka tersebut Pulau Sumatera memiliki panjang jalan 14.750,04 km (36,76%), kemudian Jawa dengan panjang jalan 8.317,63 km (20,73%) dan Sulawesi 4.976,87 km (12,40%).

Khusus untuk tahun 2004, kondisi jalan bukan jalan tol tetap sama dengan KepMen PU No: 360/KPTS/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas KepMen PU No: 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

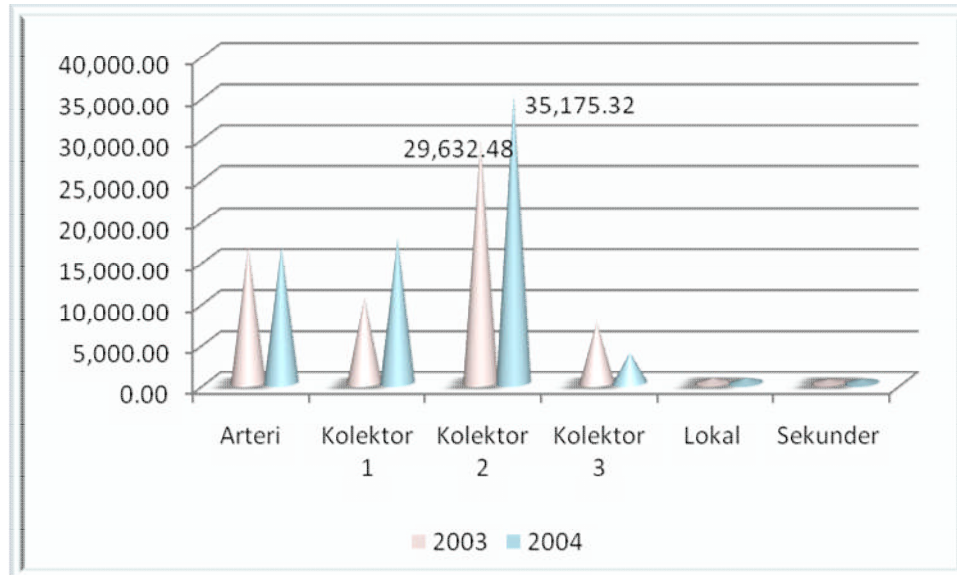
Bila dibandingkan Jalan Provinsi yang mengalami naik turun, maka Jalan Nasional selalu mengalami kenaikan dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Kenaikan tertinggi terjadi tahun 2004, yang sekaligus berdasarkan KepMen No. 376/KPTS/M/2004, dimana panjang Jalan Nasional sebesar 34.628,83 Km (Gambar 4.3).

Gambar 4.3 Panjang Jalan Nasional, Propinsi Per Wilayah tahun 2000-2004



Sumber : Ditjend Prasarana Wilayah, Dept. Kimpraswil
Untuk Panjang Jalan Nasional dan Provinsi Th. 2004, Berdasarkan Kepmen No. 376/KPTS/M/2004,
Tanggal 19-10-2004

Panjang jalan menurut fungsinya dari tahun 2003-2004 yang disajikan dalam Tabel 4.28 untuk tahun 2003 panjang Jalan Arteri 16.774,013 km, Jalan Kolektor 47.690,52 km, Jalan Lokal 580,55 km dan Jalan Sekunder 415,04 km, sedangkan untuk tahun 2004 ada perubahan yaitu Panjang jalan keseluruhannya menjadi 73.506,960 dari 67,874,431 km pada tahun 2003. Untuk tahun 2004, Jalan Arteri adalah 16.722,740 km, Kolektor 1 adalah 17.783,710 km, Kolektor 2 adalah 35.175,320 km serta Kolektor 3 adalah 3.825,190 km.

Gambar 4.4 Panjang Jalan Menurut Fungsi Jalan, Tahun 2003-2004

Sumber : Ditjen Bina Marga, Departemen PU

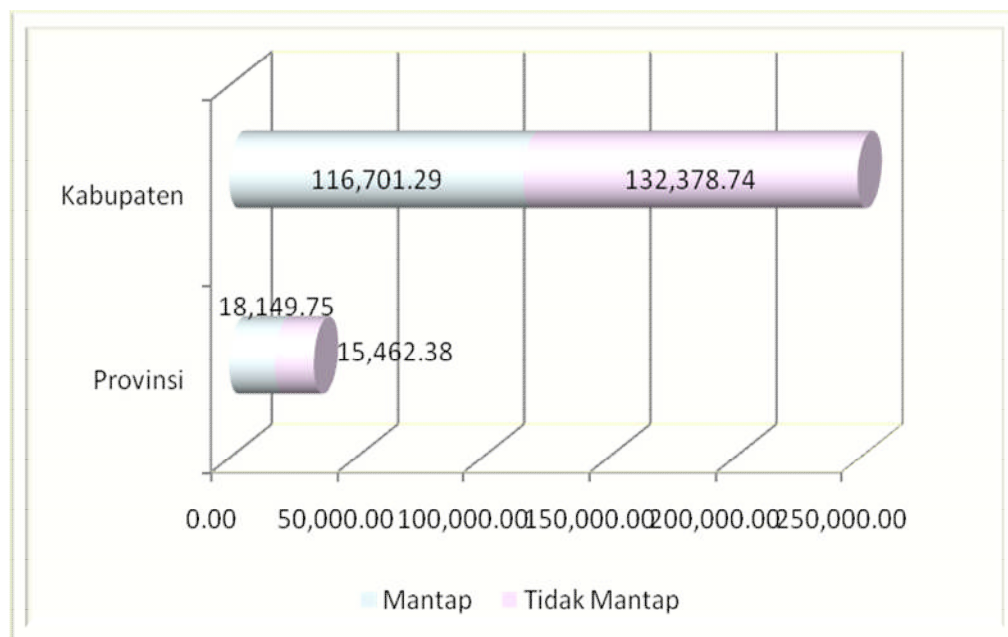
Jika dilihat dalam Gambar 4.4, maka fungsi jalan paling besar tahun 2003-2004 adalah Kolektor 2, disusul Arteri, Kolektor 1, dan Kolektor 3. Sedangkan fungsi Jalan Lokal dan Sekunder menempati urutan terakhir dari tahun 2003-2004.

Tabel 4.29 menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah panjang jalan nasional fungsi arteri dengan fungsi kolektor relatif setara. Disamping itu, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa di Provinsi Bangka Belitung dan Maluku Utara tidak terdapat Jalan Nasional dengan fungsi Arteri. Hal ini bisa dimengerti jika memperhatikan letak dua provinsi tersebut yang merupakan kepulauan yang tentunya tidak begitu mengandalkan jaringan lintas darat untuk komutasi dalam jumlah besar. Keadaan itu sangat berbeda bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan yang umumnya berada di pulau-pulau besar yang terdiri dari banyak provinsi dan pusat kegiatan sehingga komutasi lintas darat dalam jumlah besar dapat terjadi. Untuk itu diperlukan jaringan jalan yang dapat

melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh dan kecepatan rata-rata tinggi, dalam hal ini jalan dengan fungsi Arteri.

Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten tahun 2006 disajikan pada Gambar 4.5. Pada status 1 Maret tahun 2006 kondisi jalan mantap dan tidak mantap tingkat Kabupaten lebih besar dibandingkan Provinsi. Untuk kondisi mantap panjang Jalan Provinsi lebih besar dibandingkan kondisi tidak mantap, sebaliknya kondisi tidak mantap Jalan Kabupaten lebih besar dari kondisi mantap.

Gambar 4.5 Kondisi Jalan Provinsi dan Kabupaten Tahun 2006 (Status 1 Maret 2006) Berdasarkan Kriteria IRI



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU (31-08-2006)

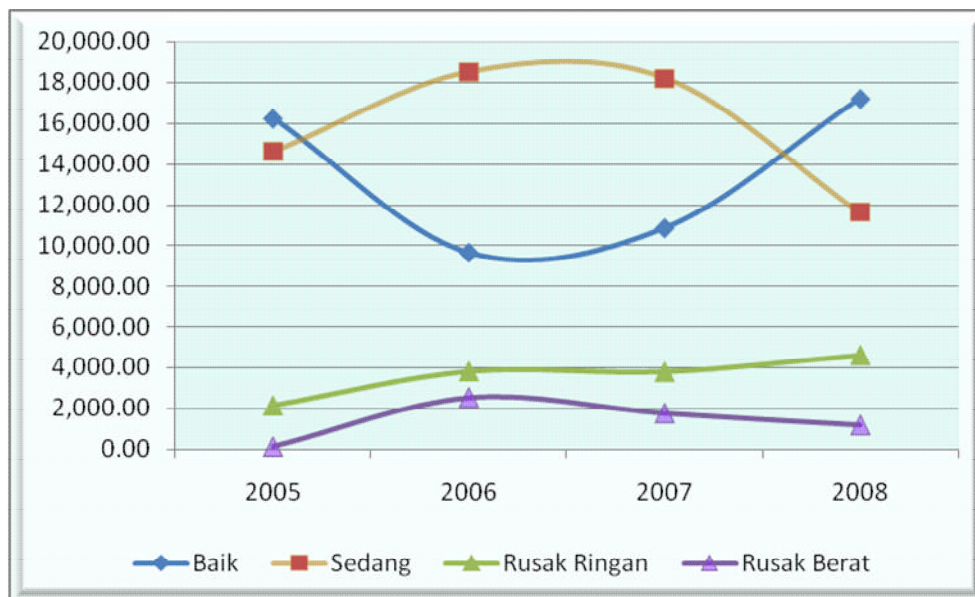
Untuk Jalan "Mantap" dan "Tidak Mantap", menggunakan kriteria yang sama dengan kondisi jalan secara fungsional, yaitu :

1. Mantap, jika kondisi jalan baik atau sedang
2. Tidak Mantap, jika kondisi jalan rusak ringan atau rusak berat

Dirinci menurut kondisi jalan, Tabel 4.30 sampai Tabel 4.33 menunjukkan data series dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Sedangkan untuk tampilan grafik, bisa dilihat di Gambar 4.6. Proporsi terkecil dimiliki oleh jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. Untuk kondisi jalan sedang relatif menurun dan jalan baik cenderung naik, terutama di tahun 2008.

Selanjutnya jika dirinci menurut kondisi jalan per tahun, panjang jalan baik di Indonesia berada dalam kondisi baik tahun 2005 adalah 16.233,13 km, 14.597,96 km dalam kondisi sedang, 2.156,95 km dalam kondisi rusak dan 142,12 km dalam kondisi rusak berat (lihat di Tabel 4.30). Disini menunjukkan bahwa kondisi jalan baik dan sedang masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat.

Gambar 4.6 Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 2005-2008



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Dari Tabel 4.31 dapat diketahui bahwa ruas jalan sepanjang 28.149,42 km atau 81,58 persen berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya sejumlah 6.357,03 km atau 18,42 persen dalam kondisi tidak mantap. Dari tabel yang

diambil tahun 2006 itu dapat diketahui, jalan di Provinsi Jambi, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Bangka Belitung seluruhnya dalam keadaan "Mantap".

Dilihat menurut kondisi jalan tahun 2007 secara umum berada pada kondisi baik, walaupun besarnya komposisi kondisi jalan sedang lebih besar dibandingkan yang lain (Tabel 4.32). Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa jalan yang memiliki kondisi baik mencapai 31,34%, kondisi sedang sebesar 52,56%, sedangkan sisanya sekitar 16,10% jalan rusak dan rusak berat.

Pada Tabel 4.33 terdapat data kondisi panjang jalan di beberapa provinsi Indonesia tahun 2008. Disini kondisi jalan baik sudah lebih besar dibandingkan dengan kondisi jalan sedang. Klasifikasi Jalan Nasional berdasarkan kondisi jalan tahun 2008 menunjukkan bahwa jalan mantap memiliki prosentase sebesar 83,23% dan jalan tidak mantap hanya 16,77%. Provinsi yang sudah memiliki kondisi jalan baik semua di daerahnya adalah DKI Jakarta. Secara umum prosentase kondisi jalan baik sebesar 49,67%, jalan sedang 33,56%, jalan rusak dan rusak berat masing-masing sebesar 13,34% dan 3,44%.

4.2.3 Jembatan

Jembatan merupakan salah satu prasarana perhubungan dan merupakan kesatuan sistem transportasi nasional yang terintegrasi untuk kelancaran transportasi barang dan jasa yang pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam mendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana Bidang Pekerjaan Umum, khususnya jembatan masih terus dilanjutkan mengingat penyediaan prasarana jalan dan jembatan penting dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan jembatan di Indonesia terbagi 5 dasa warsa. Pembangunan paling banyak berada pada dasa warsa keempat, yakni antara tahun 1990 -

2000, dimana pada saat itu mencapai 30,60% jumlah jembatan yang dibangun. Prosentase terkecil berada pada rentang diatas tahun 2000, karena baru ada 3,50% jumlah jembatan yang dibangun. Data selengkapnya terdapat pada Tabel 4.34.

Data series rekapitulasi kondisi jembatan dari tahun 2006 sampai tahun 2008 per provinsi dapat dilihat di Tabel 4.35 sampai dengan Tabel 4.37. Kondisi jembatan tersebut dirinci sebagai berikut : kondisi 0 adalah baik sekali, kondisi 1 dikatakan baik, kondisi 2 identik dengan rusak ringan, kondisi 3 adalah rusak berat, kondisi 4 dalam keadaan kritis, dan kondisi 5 berarti runtuh atau tidak ada jembatan. Adapun untuk kondisi 0 hingga 2 dikatakan mantap, dan kondisi 3 sampai 5 dikelompokkan menjadi tidak mantap.

Jika ditinjau dari penanganan jembatan, maka untuk kondisi 0 sampai 1 akan dilakukan pemeliharaan rutin, kondisi 2 masuk ke dalam pemeliharaan berkala, kondisi 3 sampai 4 dikelompokkan ke rehabilitasi/ perkuatan, dan kondisi 5 akan dibuat pembangunan jembatan baru atau penggantian. Dalam Tabel 4.35-4.37 tersebut, data di Provinsi Kepulauan Riau masih belum ada, karena Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri.

Dari rekapitulasi kondisi jembatan nasional menurut *Bridge Management System (BMS)*, maka jumlah jembatan di Indonesia tanpa Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 secara umum yang masih dalam kondisi baik sekali ada 7.980 unit dan kondisi baik ada 3.708 unit. Sedangkan jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan sebanyak 2.629 unit, rusak berat sebanyak 1.253 unit. Adapun kondisi jumlah jembatan kritis ada 619 unit dan yang runtuh/ tidak ada jembatan hanya ada 398 unit (Tabel 4.35).

Pada tahun 2007 kondisi jembatan mengalami perubahan baik jumlah maupun panjangnya, yang dapat dilihat di Tabel 4.36. Untuk jumlah jembatan yang

dalam kondisi baik sekali ada 7.832 unit, kondisi baik ada 3.844 unit, kondisi rusak ringan ada 2.971 unit, kondisi rusak berat ada 1.272 unit, kondisi kritis ada 646 unit, dan kondisi runtuh/ tidak ada jembatan ada 396 unit.

Di tahun 2008 kondisi jembatan juga mengalami perubahan baik jumlah maupun panjangnya, yang dapat dilihat di Tabel 4.37. Prosentase kondisi jembatan mantap ada 86,95% dan kondisi tidak mantap sebesar 13,05%. Dari kondisi jumlah jembatan mantap ini, terbagi atas kondisi baik sekali sebesar 44,54%, baik 24,03%, dan rusak ringan 18,38%. Sedangkan kondisi jumlah jembatan tidak mantap, terdiri atas kondisi rusak berat 7,33%, kritis 3,48%, dan runtuh/ tidak ada jembatan 2,25%. Perubahan jumlah jembatan dari tahun 2006 sampai tahun 2008, terlihat ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa provinsi tersebut terlambat dalam pengiriman data ke pusat, jadi bukan berarti jembatan menjadi hilang.

4.2.4 Analisis Statistik Bidang Bina Marga

Pada Tabel 4.38 ingin dilihat tingkat kepadatan kendaraan tahun 2006 disetiap provinsi berdasarkan pada rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan di setiap provinsi yang ada. Dari hasil perhitungan didapat provinsi yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan diatas 1,000 kendaraan per KM adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Urutan Kepadatan per Provinsi yang menunjukkan bahwa kelima provinsi diatas menduduki peringkat 1 sampai 5 untuk kepadatannya.

Berdasarkan perubahan kondisi jalan nasional dari tahun 2005 ke tahun 2006 (Tabel 4.30 dan Tabel 4.31) tercatat ada 11 provinsi (36.6%) yang mengalami perbaikan kondisi dengan total panjang jalan yang diperbaiki 1,253.87 Km. Untuk kondisi jalan nasional yang mengalami penurunan kondisi terdapat di 16

provinsi (53.3%) dengan total panjang jalan yang menurun kondisinya 3,731.34 Km. Sedang ada 2 provinsi (6.6%) yang tercatat kondisinya tetap.

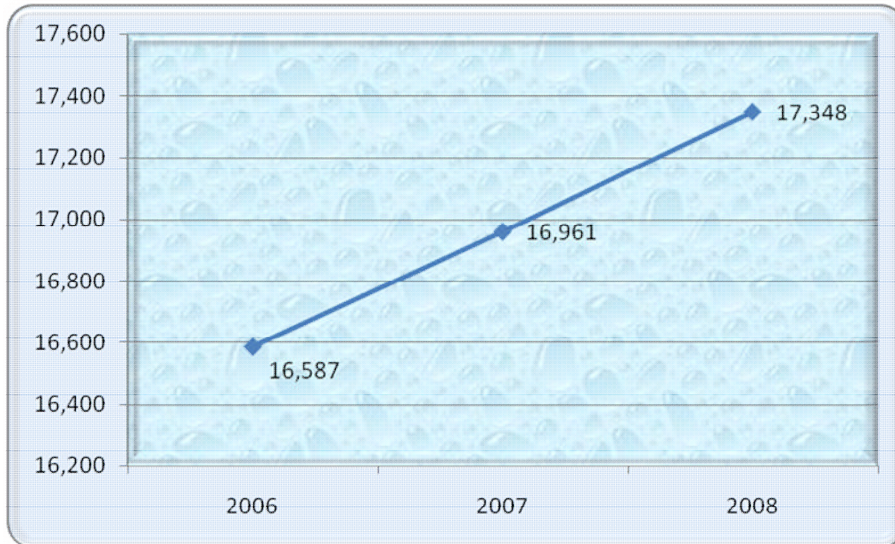
Untuk perubahan kondisi jalan nasional dari tahun 2006 ke tahun 2007 (Tabel 4.31 dan Tabel 4.32) tercatat ada 16 provinsi (53.3%) mengalami perbaikan kondisi dengan total panjang jalan yang diperbaiki 2,067.40 Km. Untuk kondisi jalan nasional yang mengalami penurunan kondisi terdapat di 7 provinsi (23.3%) dengan total panjang jalan yang menurun kondisinya 1,285.63 Km. Sedang ada 6 provinsi (20%) yang tercatat kondisinya tetap.

Sedangkan perubahan kondisi jalan nasional dari tahun 2007 ke tahun 2008 (Tabel 4.32 dan Tabel 4.33) tercatat sejumlah 10 provinsi (33.3%) mengalami perbaikan kondisi dengan total panjang jalan yang diperbaiki 2,256.63 Km. Untuk kondisi jalan nasional yang mengalami penurunan kondisi terdapat di 19 provinsi (63.3%) dengan total panjang jalan yang menurun kondisinya 2,489.12 Km. Adapun terdapat 1 provinsi (3.3%) yang tercatat kondisinya tetap.

Grafik dibawah menunjukkan pertambahan jumlah jembatan yang dilalui oleh jalan nasional. Terlihat ada kenaikan yang linier dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Kenaikan jumlah jembatan ini salah satu diantaranya karena di beberapa daerah melaporkan panjang jembatan yang kurang dari 5 meter (sebuah bangunan dikatakan jembatan jika panjangnya lebih dari 6 meter). Jembatan seperti ini dikenal dengan nama gorong-gorong.

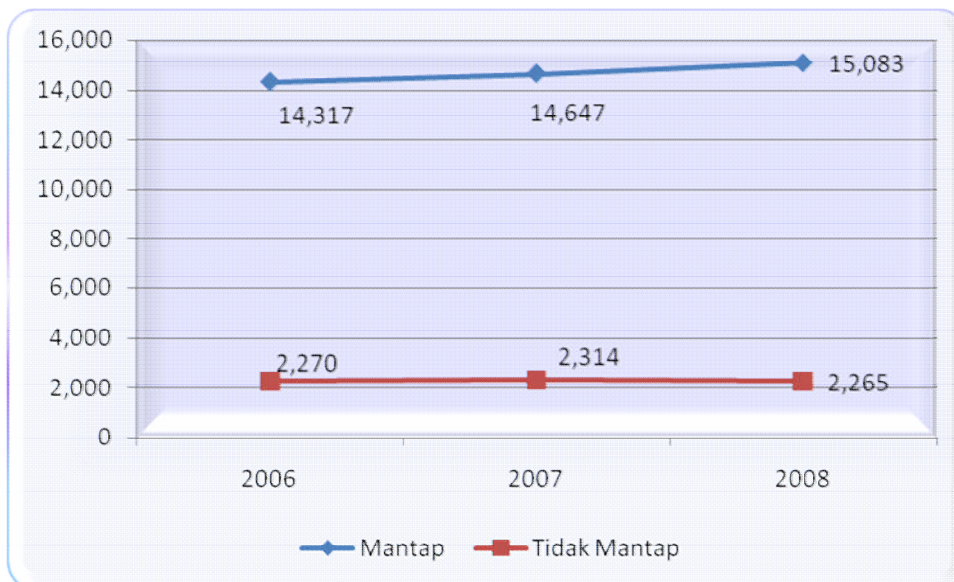
Untuk melihat kondisi dari jembatan yang ada, yaitu Mantap dan Tidak Mantap, ditampilkan oleh grafik berikutnya (Gambar 4.8). Perubahan kondisi jembatan Mantap dari tahun 2006 hingga tahun 2008 mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi jalan Tidak Mantap yang mengalami kenaikan dari tahun 2006 ke tahun 2007, tapi turun dari tahun 2007 ke tahun 2008.

Gambar 4.7 Jumlah Jembatan di Indonesia Menurut BMS Tahun 2006-2008



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Gambar 4.8 Jumlah Kondisi Jembatan di Indonesia Menurut BMS Tahun 2006-2008



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

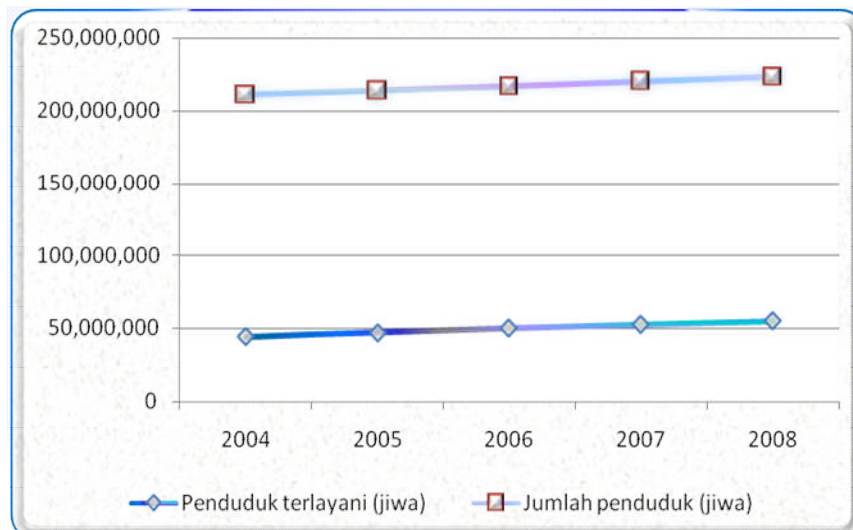
4.3 Infrastruktur Cipta Karya

4.3.1 Penyediaan Air Minum

Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut, jumlah air minum yang disalurkan ke konsumen tahun 2005 sampai 2008 juga cenderung meningkat.

Kebutuhan air minum saat ini sangat mendesak keberadaannya, sementara lokasinya tersebar di berbagai daerah dimana kebutuhan pelayanan tiap daerah bervariasi dengan kapasitas yang berbeda. Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum nasional melalui peningkatan kapasitas, dimana sasaran pelayanan air minum untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan. Pencapaian kinerja pengembangan air minum tahun 2005 hingga 2008 mengalami pasang surut, baik jiwa yang dilayani dan jumlah aliran air minum per liter/ detik (Tabel 4.39).

**Gambar 4.9 Pencapaian Kinerja Air Minum (Jiwa)
Tahun 2004-2008**

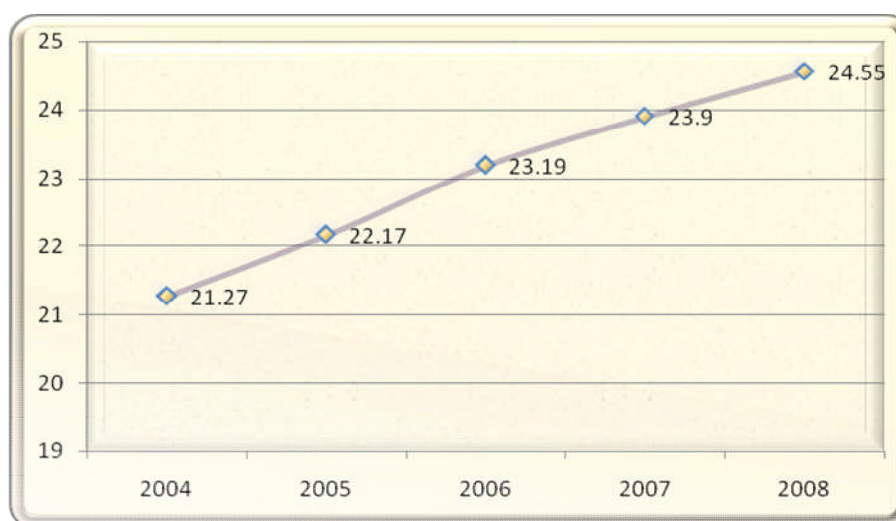


Sumber : Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Gambar 4.9 menunjukkan, bahwa penduduk yang terlayani air minum masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, selain itu penambahan penduduk yang terlayani dari tahun 2004 sampai 2008 relatif lambat. Hal ini dipertegas dengan Gambar 4.10, yang menunjukkan cakupan pelayanan air minum dari tahun ke tahun prosentase perkembangannya relatif kecil. Jika melihat trend ini maka prediksi cakupan pelayanan air minum tahun 2009 sekitar 25%.

Penyuplaian air bersih ke pelanggan tergantung pada pasokan air bakunya. Tabel 4.40 menunjukkan Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) hingga tahun 2007, dimana kapasitas terpasangnya sebesar 135.044 L/dt dan kapasitas produksi sebesar 106.380 L/dt. Disini terlihat bahwa jumlah kapasitas terpasang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas produksi. Kapasitas terpasang dan produksi terbanyak berada di provinsi Jawa Timur, sedangkan paling sedikit di provinsi Maluku Utara. Untuk itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan air bersih ini dengan meningkatkan kapasitas produksi IPA yang biasa melayani pelanggan untuk memproduksi air bersih.

**Gambar 4.10 Cakupan Pelayanan Air Minum (%)
Tahun 2004-2008**



Sumber : Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

4.3.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Tabel 4.41 memberikan gambaran fasilitas rumah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, yaitu Instalasi Pembuangan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, dan Tempat Pembuangan Akhir pada tahun 2007. Pembuatan IPLT dan IPAL sangat dibutuhkan untuk pemrosesan air limbah. Sekitar 429.993 M³/hari kapasitas pengolahan IPAL dari beberapa provinsi, sedangkan untuk kapasitas pengolahan IPLT sebesar 1.528,89 M³/hari. Tetapi, hal yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah luas TPA yang masih sekitar 1.886,99 Ha.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai kota banyak yang tidak berfungsi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu akses dan kualitas pengolahan yang rendah, kelembagaan yang belum efektif termasuk belum lengkapnya perangkat perundang-undangan yang ada, terbatasnya kapasitas pendanaan pembangunan di daerah, serta rendahnya peran serta masyarakat dan swasta.

Pengurangan sampah pada sumbernya dapat mengurangi beban sampah yang masuk dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu masalah utama pengelolaan persampahan di Indonesia adalah bertambahnya timbunan sampah akibat jumlah penduduk yang kian bertambah. Kegiatan penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang (reuse, reduce, recycle atau 3R) merupakan upaya pengurangan jumlah sampah mulai dari sumbernya. Tabel 4.41 menunjukkan lokasi TPA hingga tahun 2007 dari beberapa provinsi di Indonesia. Dari provinsi-provinsi yang ada, maka provinsi yang mempunyai lokasi TPA terluas adalah Jawa Barat (445,90 Ha).

Penggunaan fasilitas air limbah dan persampahan seyogyanya diperuntukkan permukiman penduduk agar bisa selalu terjaga kebersihannya.

Berdasarkan Tabel 4.42 tahun 2007, ada sebanyak 80 kabupaten/ kota yang mempunyai fasilitas air limbah dengan layanan 277.261 jiwa dan 82 kabupaten/ kota yang memiliki fasilitas persampahan dengan layanan 2.608.431 jiwa di Indonesia. Keberadaan drainase pada tahun 2007 tersebut ada seluas 834 Ha yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Tabel 4.42).

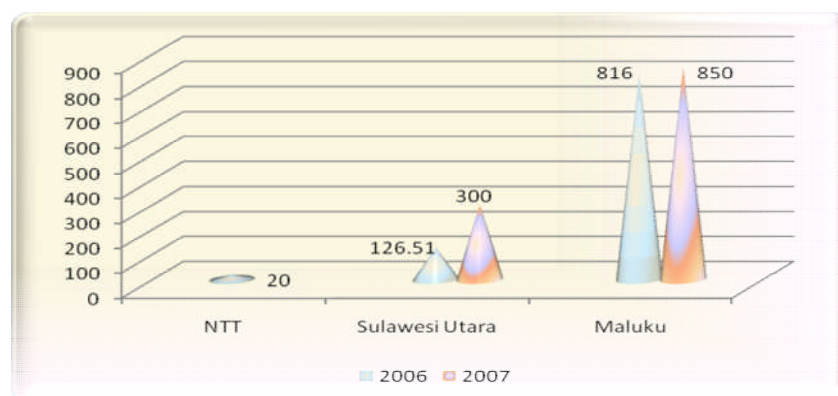
4.3.3 Pengembangan Permukiman

I. Pengembangan Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan

Kawasan yang dimaksudkan disini adalah kawasan yang berhubungan/ berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik darat maupun laut. RPJMN 2004-2009 menyebutkan pembangunan kawasan perbatasan ini menjadi beranda depan Negara Indonesia.

Pengembangan prasarana dan sarana permukiman untuk 12 provinsi di kawasan perbatasan dari tahun 2005-2008 dapat dilihat di Tabel 4.43. Dari tahun tersebut, prasarana dan sarana yang dibangun diantaranya jalan dan saluran lingkungan, jalan poros desa, pos jaga, dan kawasan.

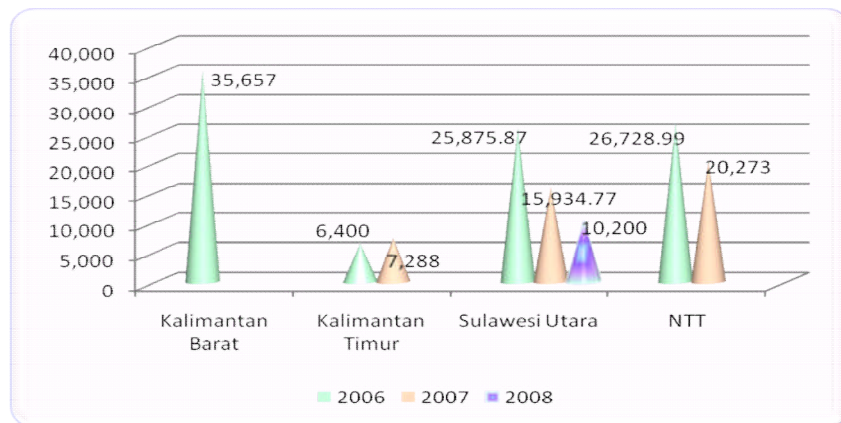
**Gambar 4.11 Pembangunan Talud (m)
Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan
Tahun 2006-2007**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

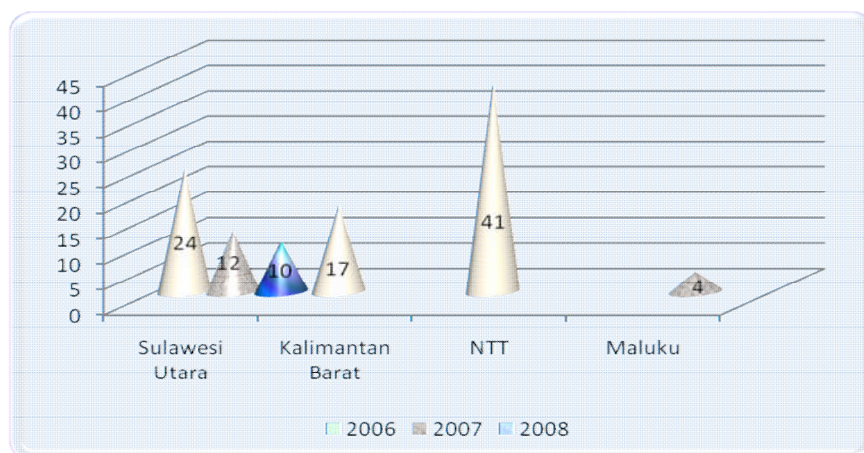
Pembangunan talud (penahan tanah) tahun 2006-2007 dilakukan di provinsi NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku (Gambar 4.11). Pembangunan pipa air bersih tahun 2006-2008 dilakukan di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan NTT (Gambar 4.12). Gambar 4.13 adalah pembangunan hidran umum untuk tahun 2006-2008 yang dilakukan di provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, NTT, dan Maluku.

**Gambar 4.12 Pembangunan Pipa Air Bersih (m)
Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan
Tahun 2006-2008**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

**Gambar 4.13 Pembangunan Hidran Umum (m)
Prasarana Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan
Tahun 2006-2008**



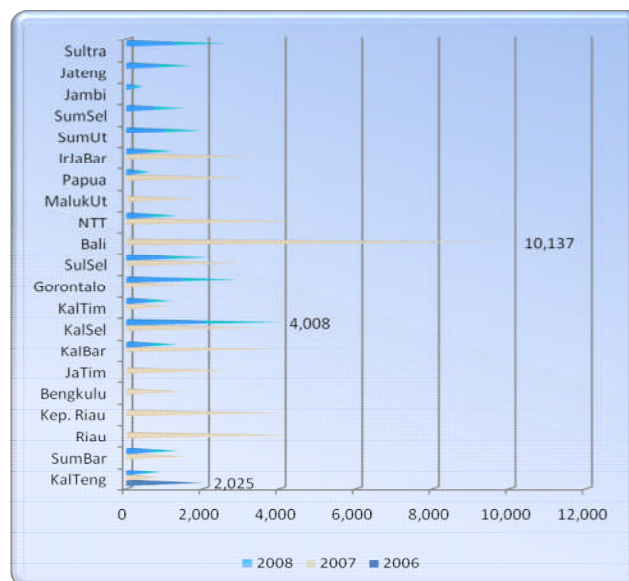
Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

II. Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Tertinggal

Pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, akan menjadi sumber pertumbuhan baru, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman di pulau-pulau kecil dan terpencil tahun 2005-2008 dapat dilihat pada Tabel 4.44. Untuk jalan dan saluran lingkungan terdapat di 27 provinsi, jalan setapak dan talud berada di 20 provinsi, sedangkan kawasan dan penduduk terlayani tersebar di 33 provinsi.

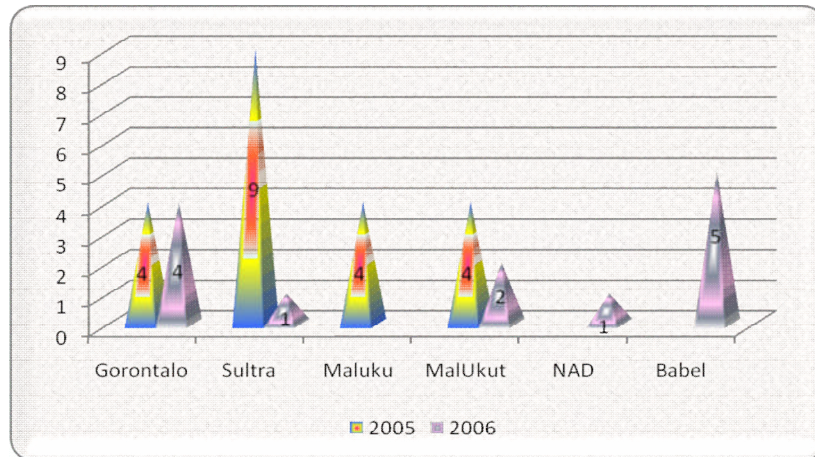
Gambar 4.14 adalah pembangunan jalan poros desa/ jalan utama desa tahun 2006-2008, dimana tahun 2007 pembangunan jalan itu terpanjang di provinsi Bali. Adapun pembangunan MCK (tahun 2005-2006) dan gorong-gorong (tahun 2005-2007) terdapat di Gambar 4.15 dan 4.16. Pembangunan MCK tahun 2005 banyak terdapat di Sulawesi Tenggara.

**Gambar 4.14 Pembangunan Jalan Poros Desa (m)
Prasarana Sarana Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil
Tahun 2006-2008**



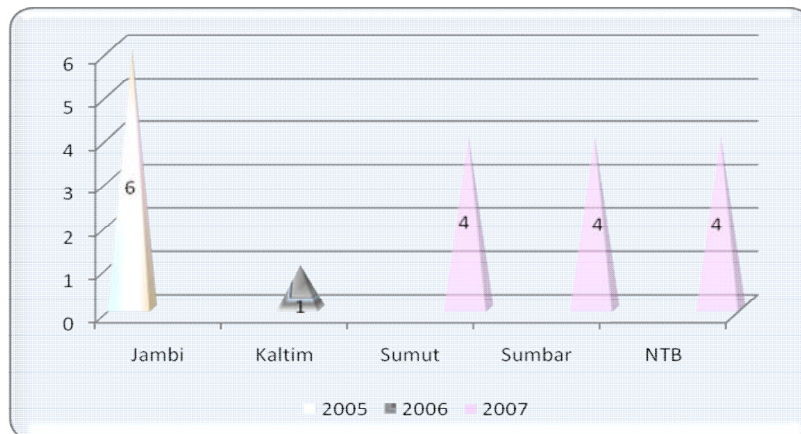
Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Dep.PU

**Gambar 4.15 Pembangunan MCK (unit)
Prasarana Sarana Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil
Tahun 2005-2006**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

**Gambar 4.16 Pembangunan Gorong-Gorong (unit)
Prasarana Sarana Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil
Tahun 2005-2007**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

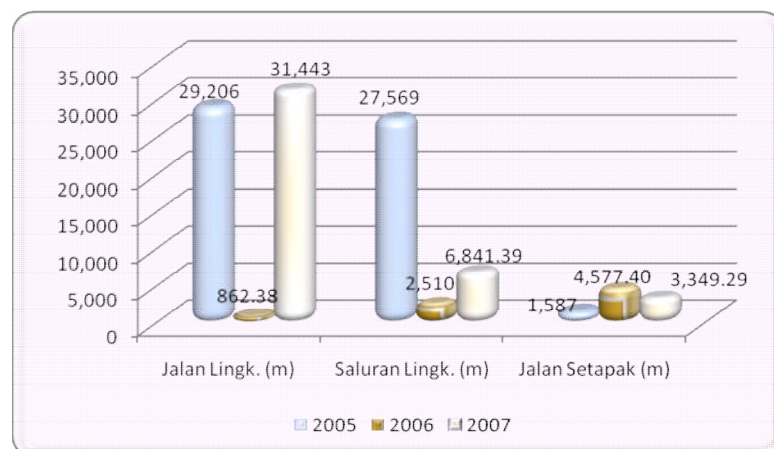
III. Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial

Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi untuk

memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. Selain itu, masih adanya sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana alam yang menghambat kelancaran penanganan bencana. Penanganan kerusakan sosial yang terjadi di berbagai daerah sebagai akibat dari kerusakan dan gejolak sosial berjumlah sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi, perlu terus diupayakan agar terjaga kelangsungan hidup penduduk sekitarnya.

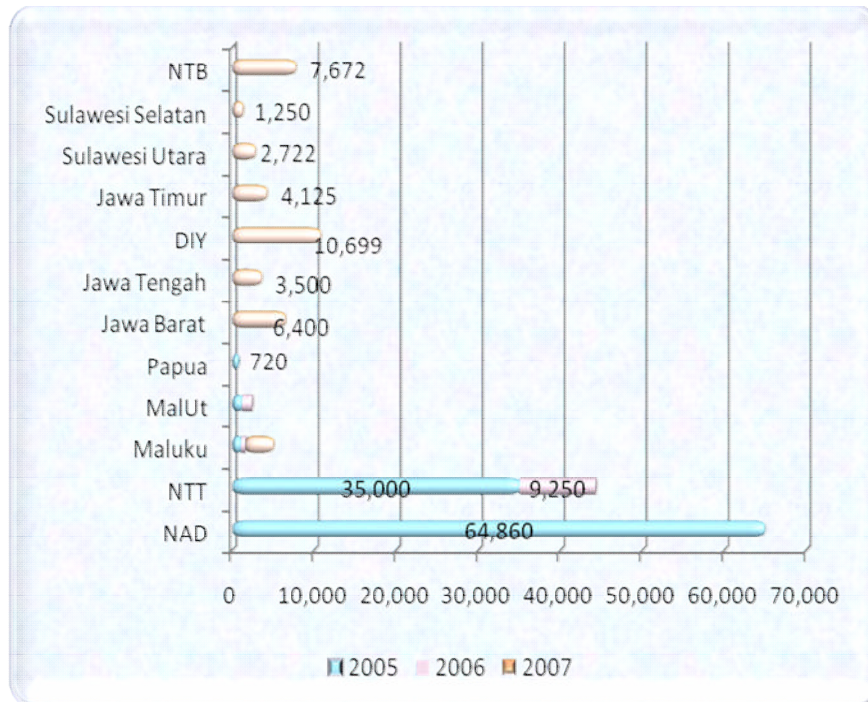
Indonesia adalah negeri yang sarat dengan bencana alam. Bencana terbesar adalah gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara 26 Desember 2004, gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006, lalu tsunami di pantai Selatan Jawa pada 17 Juli 2006. Penanganan bencana alam dan kerusakan sosial tahun 2005-2007 antara lain melalui pembangunan jalan dan saluran lingkungan, serta jalan setapak (Gambar 4.17). Sedangkan Gambar 4.18 menunjukkan penduduk yang terlayani dalam hal bencana alam dan kerusakan sosial, dimana tahun 2005 provinsi NAD paling banyak jiwa yang terlayani, yaitu 64.860 jiwa, disusul NTT dengan jumlah 35.000 jiwa.

Gambar 4.17 Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial Tahun 2005-2007



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

**Gambar 4.18 Penduduk Terlayani (Jiwa)
Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial
Tahun 2005-2007**

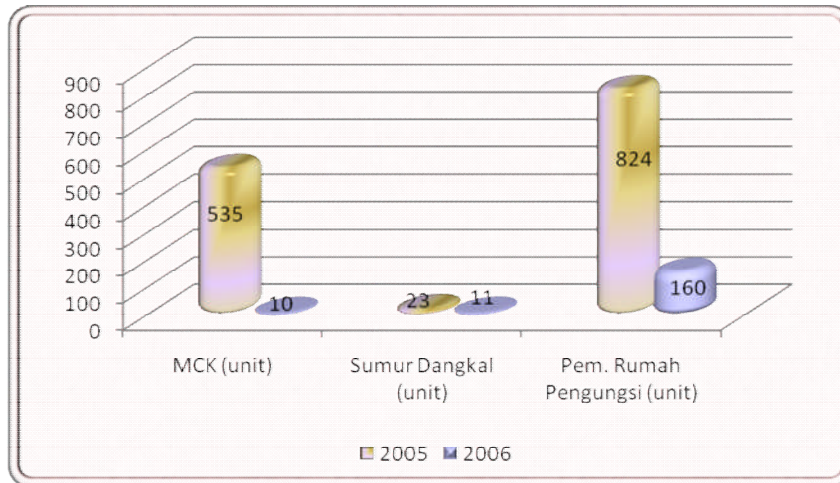


Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Situasi bencana alam (*natural disaster*) ataupun kerusakan sosial, tetap tidak bisa menghilangkan aspek pertanggungjawaban Negara. Salah satu penanganan yang dilakukan pemerintah untuk tahun 2005-2006 adalah pembangunan MCK, sumur dangkal, rumah pengungsi (Gambar 4.19). Pembangunan rumah pengungsi banyak dilakukan di tahun 2005-2006.

Dalam menanggulangi bencana dan kerusakan sosial penanganan masalah kawasan juga sangat penting disamping masalah lainnya. Untuk tahun 2006-2007 kawasan yang paling banyak dibangun ada di provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah kawasan 28 (tahun 2007), sedangkan untuk tahun 2006 hanya sedikit yang ditangani, dan provinsi NTT yang banyak dibangun, yaitu 5 kawasan (Gambar 4.20).

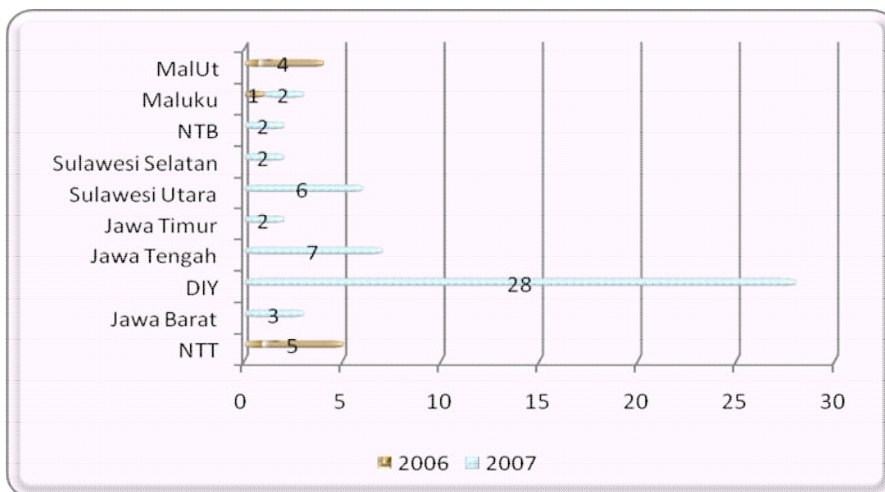
Gambar 4.19 Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial Tahun 2005-2006



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

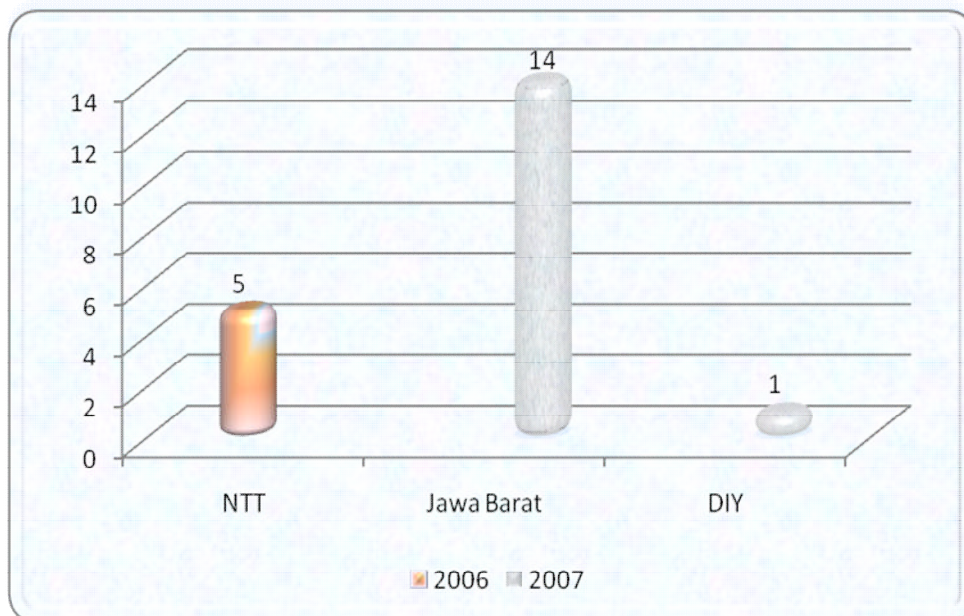
Pembangunan gorong-gorong dalam penanganan bencana alam dan kerusakan sosial tahun 2006-2007 dapat dilihat di Gambar 4.21. Tahun 2006 sejumlah 5 unit dibangun di provinsi NTT, dan tahun 2007 di provinsi Jawa Barat dibangun sebanyak 14 unit serta DI Yogyakarta 1 unit.

Gambar 4.20 Kawasan Penanganan Bencana Alam dan Kerusakan Sosial Tahun 2006-2007



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

**Gambar 4.21 Pembangunan Gorong-Gorong (Unit)
Kawasan Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial
Tahun 2006-2007**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

IV. Penyehatan dan Pengembangan Permukiman

Program Penyehatan dan Pengembangan Permukiman ditujukan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, juga diarahkan kepada sasaran lebih memeratakan hasil-hasil pembangunan dan menunjang pembangunan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja. Tabel 4.45 menunjukkan kawasan yang dikembangkan tahun 2005 di 32 provinsi di Indonesia adalah Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/ Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), Kawasan Pasca Bencana, dan Kawasan Pulau-Pulau Kecil/ Terpencil. Sedangkan kawasan yang dikembangkan tahun 2006 di 33 provinsi di Indonesia adalah Rumah Sederhana Bersih (RSH), Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), Kawasan Pasca Bencana, dan Kawasan Pulau-Pulau Kecil/ Terpencil.

V. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

KTP2D sebagai salah satu cara dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman dengan menangani simpul-simpul strategis di perdesaan. Program ini menyangkut pengembangan kawasan desa pusat jasa dan pelayanan lokal, desa wisata, desa industri, desa pusat perdagangan dan desa pertanian/ agrobisnis. Pengembangan lingkungan perumahan di kawasan ini tahun 2005-2006 meliputi pembangunan jalan dan saluran lingkungan, jalan setapak, plat duiker, mck, gorong-gorong, jembatan, talud, tambatan perahu, dan kawasan itu sendiri (Tabel 4.46).

KTP2D sebagai program Departemen PU, dalam implementasinya lebih terlihat sebagai program bantuan finansial Pemerintah Pusat dalam pembangunan daerah baik untuk kegiatan pembangunan infrastruktur maupun yang sifatnya pemberdayaan masyarakat (terutama kegiatan ekonomi). Dengan demikian KTP2D, implementasinya adalah program pembangunan di tingkat Kabupaten.

VI. Peningkatan Kualitas Permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)

Untuk peningkatan prasarana dan sarana perdesaan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan meliputi pembangunan prasarana desa pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas). Kegiatan pokok prasarana dan sarana di desa pusat pertumbuhan adalah pembangunan jalan poros desa. Selain itu untuk tahun 2005-2006 plat duiker dan pasar desa dibangun di beberapa provinsi terpilih. Pada rentang tahun yang sama untuk meningkatkan kualitas permukiman di desa pusat pertumbuhan, dibangun pula jalan dan saluran lingkungan, jalan setapak, gorong-gorong dan talud (Tabel 4.47). Pada tabel tersebut diperlihatkan jumlah penduduk yang terlayani di desa pusat pertumbuhan ini, dimana yang terbanyak di provinsi Banten (2005) dan Jawa Timur (2006).

VII. Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan

Pada Tahun 2025 diperkirakan 68,3% penduduk Indonesia mendiami kawasan perkotaan. Terkonsentrasinya pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa. Konsekuensi dari hal ini adalah kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan mengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian. Akibatnya tidak seimbang kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan.

Pengembangan fungsi kawasan Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan tahun 2007-2008 dapat di lihat di Tabel 4.48. Program yang tersebar di 21 provinsi ini terdiri dari pembangunan saluran, kawasan, rumah terlayani, dan jumlah jiwa yang terlayani.

VIII. Penyediaan Prasarana dan Sarana bagi Kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH)

Potensi kebutuhan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di daerah relatif masih sangat besar. Untuk itu penyediaan prasarana dan sarana bagi kawasan RSH ini juga cukup berpotensi untuk dikembangkan. Sarana dan prasarana tersebut di tahun 2007-2008 terbangun menyebar di 32 provinsi di Indonesia, yang antara lain terdiri dari saluran, jalan poros/ akses, talud, gorong-gorong, plat duiker, kawasan, dan rumah terlayani (Tabel 4.49). Dari tahun 2007-2008 penyediaan sarana dan prasarana bagi kawasan RSH yang hampir dibangun di seluruh provinsi adalah saluran, jalan poros/ akses, kawasan, dan rumah terlayani.

IX. Pengembangan KASIBA/ LISIBA

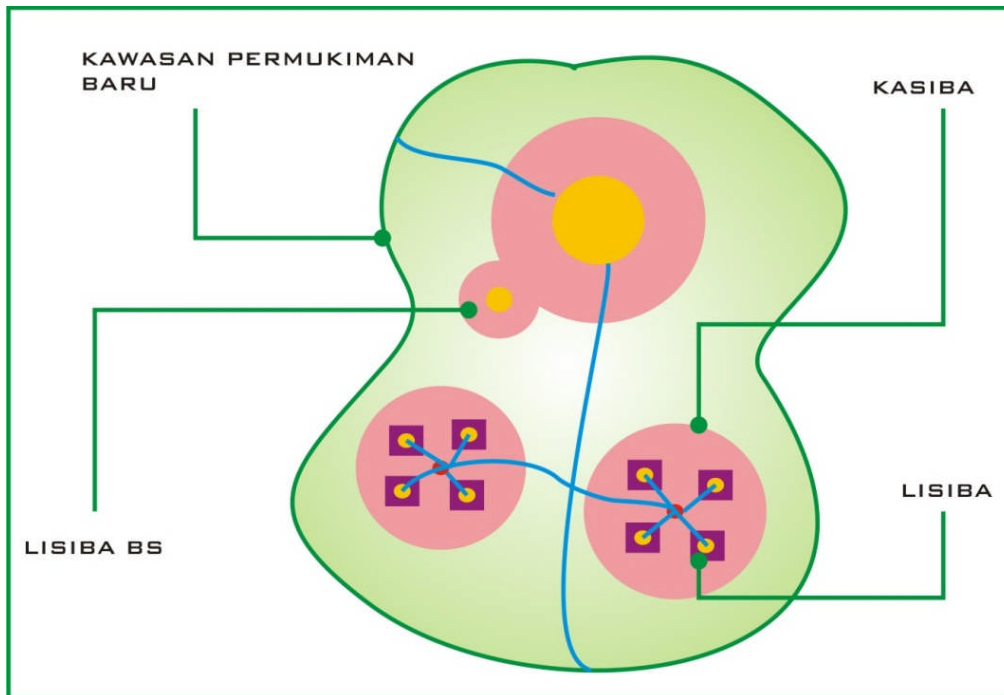
Dalam PP Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) disebutkan bahwa Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar (antara 3.000 - 10.000 unit rumah) yang terbagi dalam satu Lisiba atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi jaringan primer dan sekunder prasarana dan sarana lingkungan sesuai rencana tata ruang lingkungan dan memenuhi syarat pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

Pengertian dari Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri (kapasitas antara 1.000 - 3.000 unit rumah) yang telah dipersiapkan dan telah dilengkapi dengan prasarana lingkungan serta sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan. Selain itu PP No. 80/1999 ini juga mengatur beberapa hal yang terkait dengan pengembangan permukiman skala besar termasuk aspek pengelolanya. Pembangunan kawasan permukiman skala besar melalui Kasiba dan Lisiba merupakan upaya untuk menyediakan perumahan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Pengembangan kawasan permukiman melalui Kasiba dan Lisiba-BS (Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri : adalah Lisiba yang bukan bagian dari Kasiba yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh fungsi-fungsi lain) diharapkan menciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman melalui iklim pembangunan yang kondusif yang didukung

sinergi peran antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ilustrasi KASIBA/LISIBA dapat dilihat di Gambar 4.22.

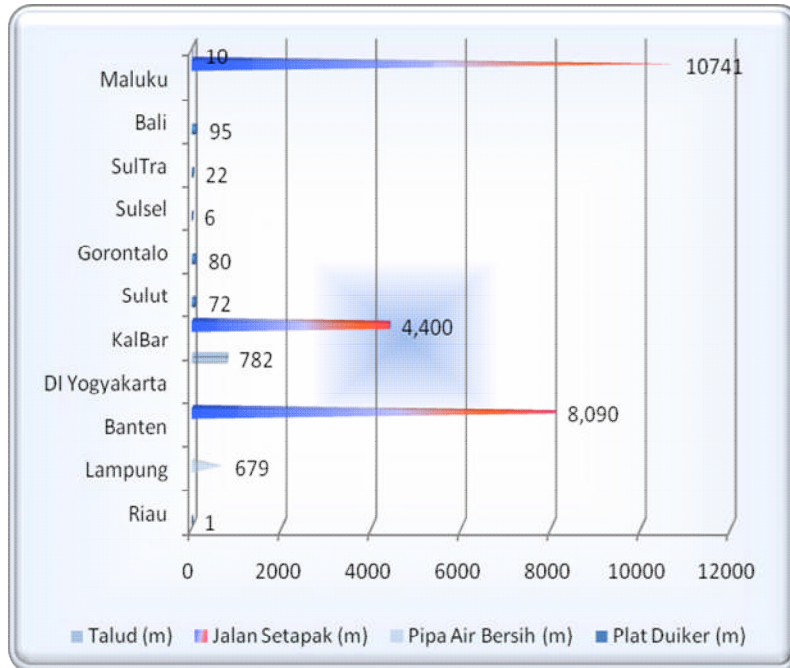
Gambar 4.22 Ilustrasi Kawasan Permukiman Baru serta KASIBA dan LISIBA



Sumber : images.rikania09.multiply.com/.../KASIBA%20LISIBA%20BS.doc?...

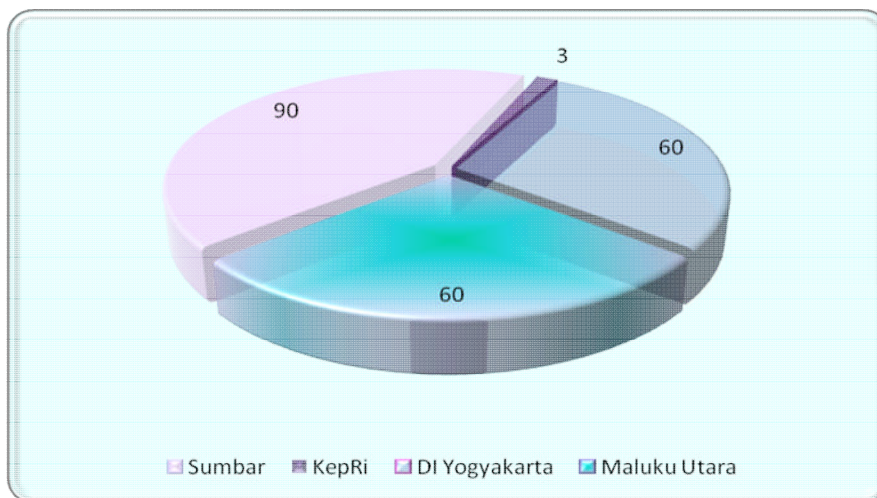
Tersedianya dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman pada KASIBA/ LISIBA tahun 2005 telah tersebar di 30 provinsi (Tabel 4.50). Prasarana dan Sarana Dasar tersebut antara lain jalan dan saluran lingkungan, serta rumah terhuni. Gambar 4.21 dan 4.22 menunjukkan beberapa prasarana dan sarana dasar yang dibangun pada KASIBA/ LISIBA yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia tahun 2005. Jalan setapak dibangun cukup panjang di 3 provinsi, yaitu Maluku, Banten, dan Kalimantan Barat (Gambar 4.23). Sedangkan pembangunan gorong-gorong terbanyak di provinsi Sumatra Barat, dibandingkan Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Maluku Utara (Gambar 4.24).

**Gambar 4.23 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
Pengembangan KASIBA/ LISIBA
Indikator Kinerja Output T.A. 2005**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

**Gambar 4.24 Pembangunan Gorong-Gorong (Unit)
Pengembangan KASIBA/ LISIBA
Indikator Kinerja Output T.A. 2005**

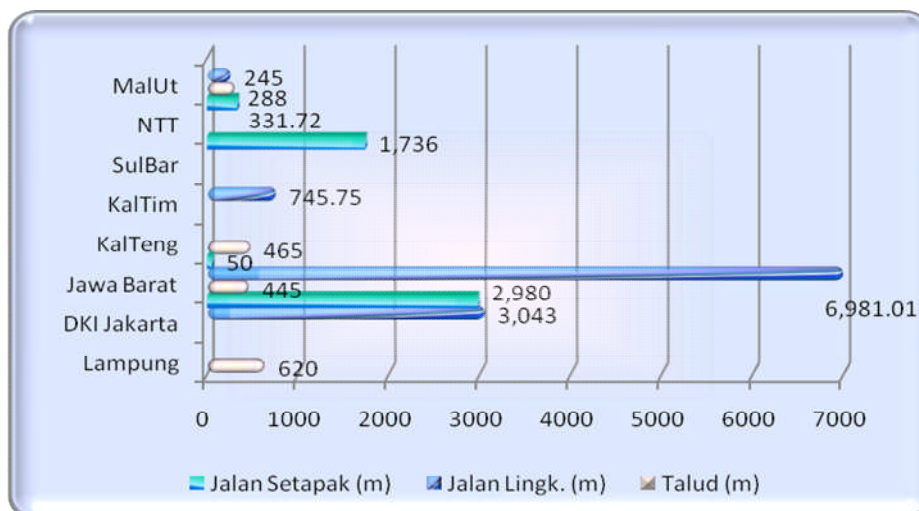


Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

X. Bantuan Sarana dan Prasarana

Pembangunan prasarana dan sarana harus terus dilanjutkan, guna memelihara prasarana dan sarana yang telah dibangun dan mengejar ketinggalan maupun kekurangan, serta memenuhi kebutuhan yang meningkat karena penambahan penduduk dan kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan prasarana dan sarana, selama ini masih ada sedikit bantuan Pemerintah Pusat. Dukungan pemerintah pusat tersebut dapat dilihat di Tabel 4.51 untuk tahun 2006.

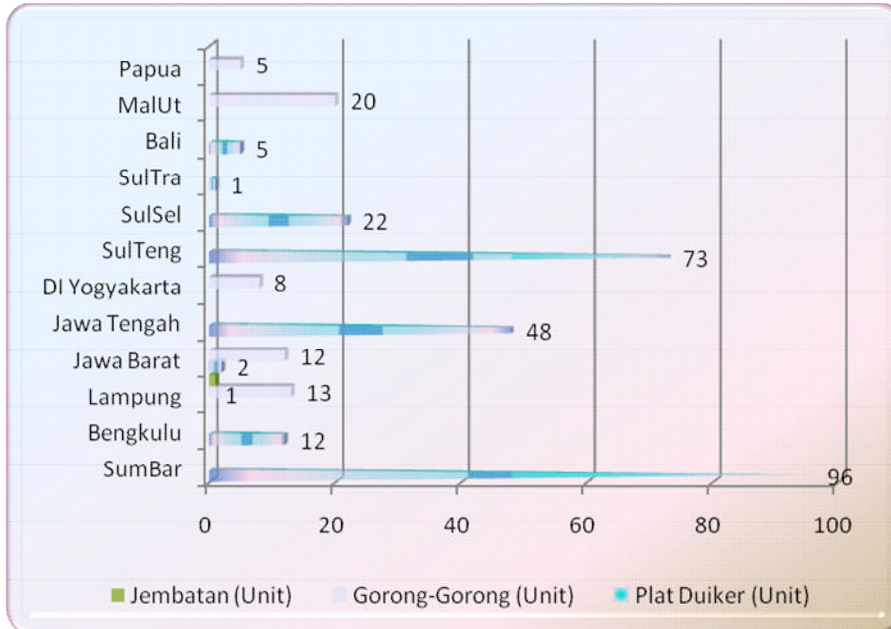
Gambar 4.25 Bantuan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Output T.A. 2006



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

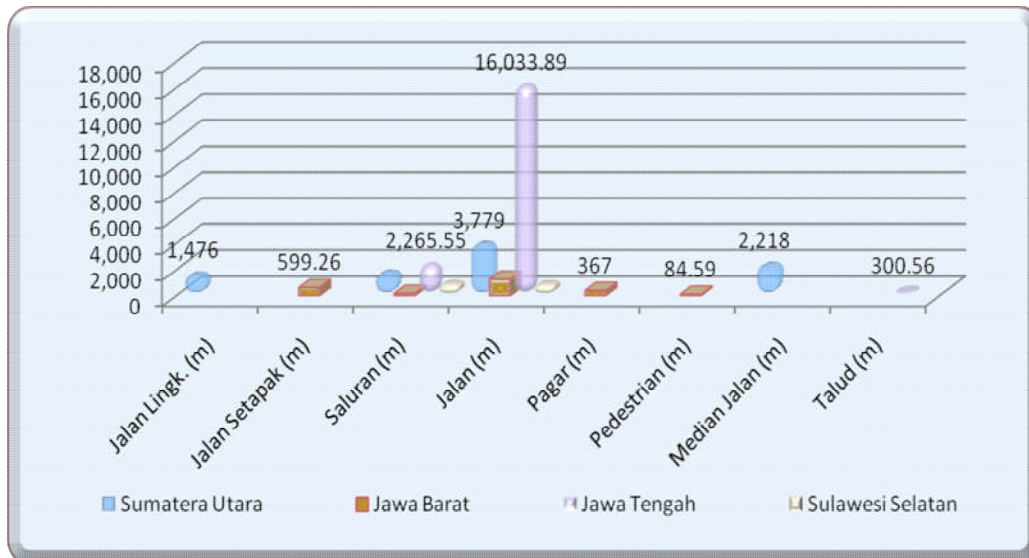
Dukungan perbaikan prasarana dan sarana lain tahun 2006, seperti jalan setapak, jalan lingkungan, dan talud tersebar di 8 provinsi dapat dilihat di Gambar 4.25. Jalan lingkungan terpanjang tahun ini dibangun di provinsi Jawa Barat (6.981.01 m). Untuk pembangunan jembatan, gorong-gorong, dan plat duiker di tahun yang sama dilaksanakan di 12 provinsi. Di sini pembangunan plat duiker paling banyak dilakukan di tahun 2006 yang menyebar di 8 provinsi (Gambar 4.26).

Gambar 4.26 Bantuan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Output T.A. 2006



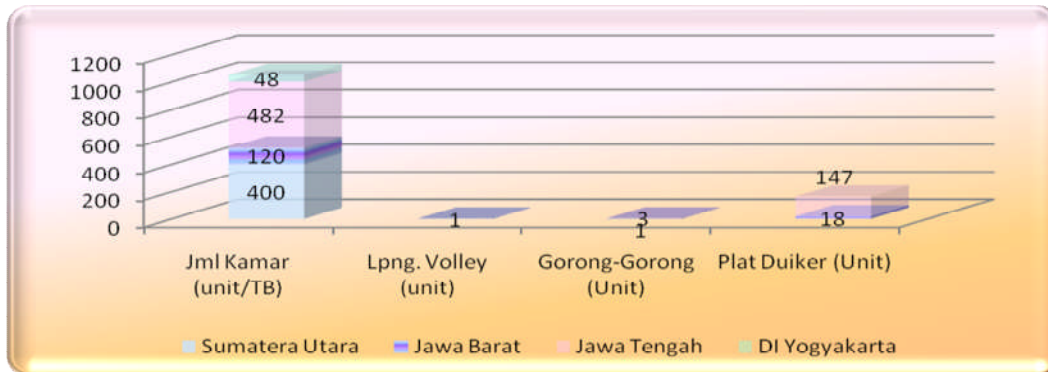
Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Gambar 4.27 Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan Rusuna Indikator Kinerja Output T.A. 2008



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

**Gambar 4.28 Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan Rusuna
Indikator Kinerja Output T.A. 2008**



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk Rusuna pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Dengan demikian bantuan sarana dan prasarana bagi kawasan Rusuna dari Pemerintah merupakan suatu stimulus untuk bisa dikembangkan oleh pihak swasta dan masyarakat. Gambar 4.27 dan Gambar 4.28 menunjukkan beberapa bantuan sarana dan prasarana bagi kawasan Rusuna tahun 2008.

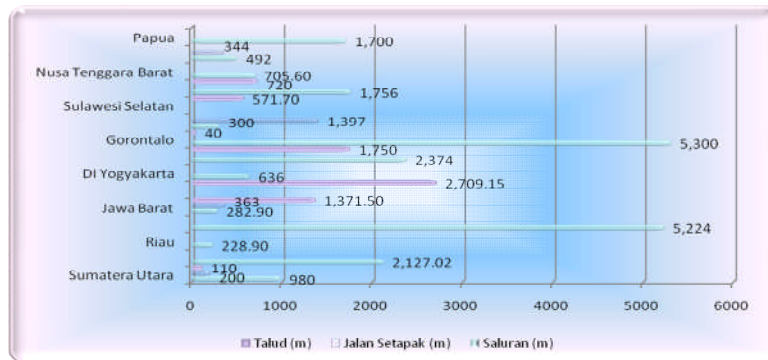
XI. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan

Peningkatan prasarana dan sarana perdesaan yang ditangani oleh Departemen PU tahun 2007 terdapat di 32 provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.52. Peningkatan infrastruktur kawasan ini banyak dilakukan di provinsi Jawa Tengah dengan adanya 79 desa yang menjadi sasaran.

Program peningkatan infrastruktur perdesaan pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana di desa yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan

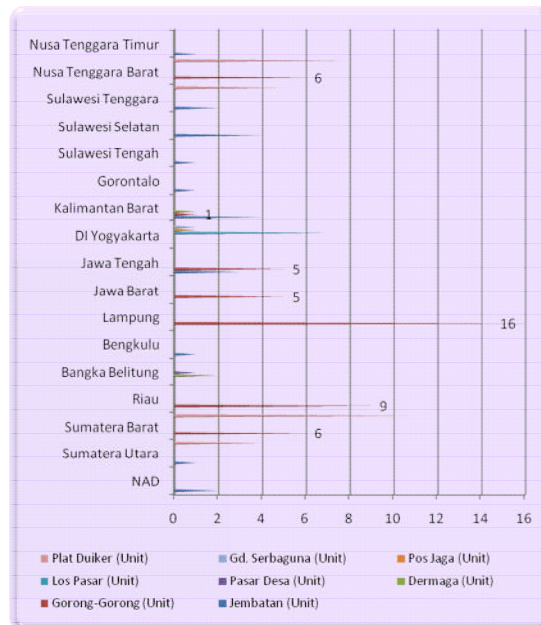
sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Pembangunan ini dilakukan di beberapa provinsi yang dapat dilihat pada Gambar 4.29 dan Gambar 4.30 di bawah.

Gambar 4.29 Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Indikator Kinerja Output T.A. 2007



Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Gambar 4.30 Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Indikator Kinerja Output T.A. 2007

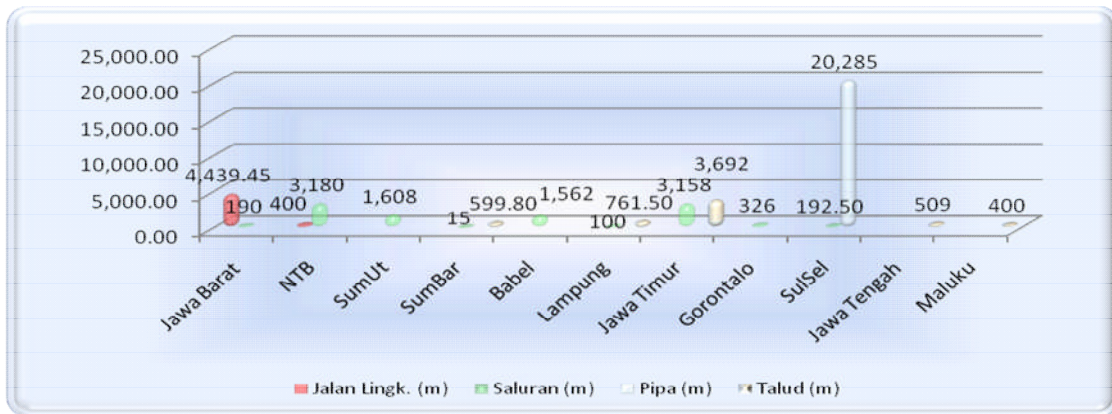


Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

XII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan

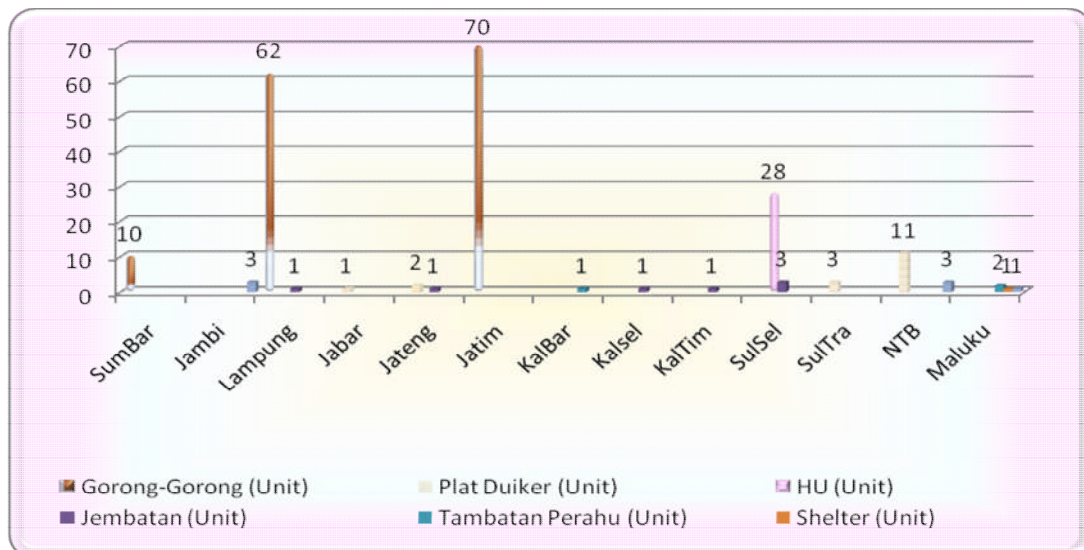
Pada tahun 2008 dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk skala kawasan (termasuk eks-transmigrasi) di beberapa provinsi di Indonesia yang hasilnya dapat dilihat di Gambar 4.31 dan Gambar 4.32.

Gambar 4.31 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan (Termasuk eks-Transmigrasi) Indikator Kinerja Output T.A. 2008



Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Gambar 4.32 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan (Termasuk eks-Transmigrasi) Indikator Kinerja Output T.A. 2008

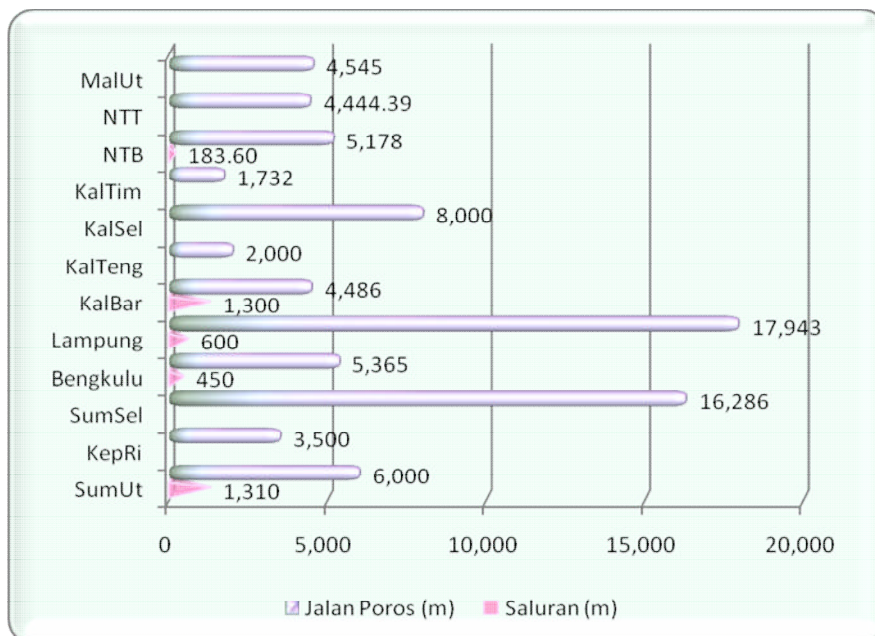


Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Pembangunan infrastruktur desa dikelola untuk merespons secara dekat dan langsung berbagai kebutuhan masyarakat desa serta diproses secara partisipatif. Hasil pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tahun 2008 di 32 provinsi di Indonesia ini dapat dilihat pada Tabel 4.53.

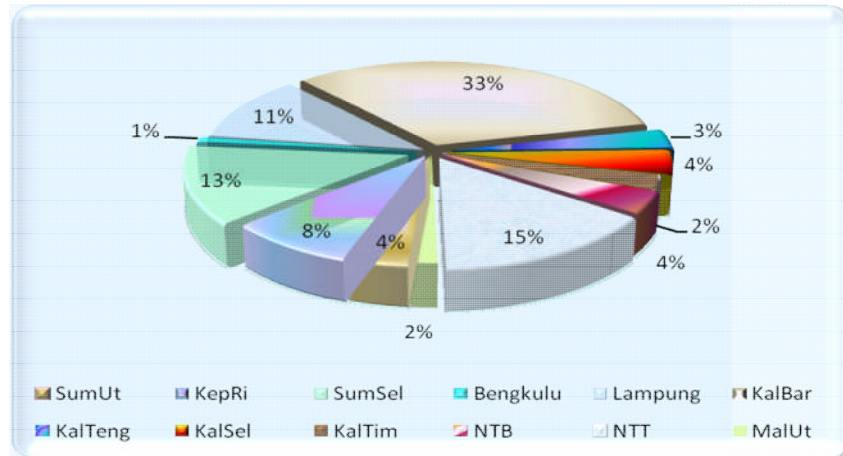
Salah satu program pemberdayaan komunitas perumahan tahun 2007 adalah pengembangan kawasan eks. Transmigrasi. Program yang akan meningkatkan kualitas perumahan ini, diantaranya telah terbangun jalan poros dan saluran di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, seperti tertera di Gambar 4.33 di bawah. Sedangkan jiwa yang terlayani di kawasan itu dapat dilihat di Gambar 4.34. Prosentase penduduk yang banyak terlayani adalah di Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 4.33 Pengembangan Kawasan Eks. Transmigrasi Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Indikator Kinerja Output T.A. 2007



Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

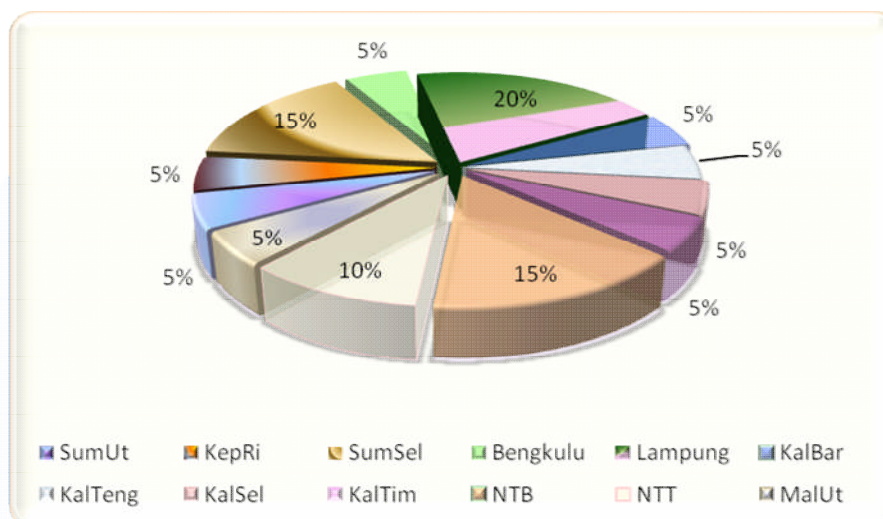
Gambar 4.34 Jumlah Jiwa Terlayani (Jiwa) Di Kawasan Eks. Transmigrasi Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Indikator Kinerja Output T.A. 2007



Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Prosentase kawasan yang tertangani dalam program pemberdayaan komunitas perumahan tahun 2007 ini dapat dilihat di Gambar 4.35.

Gambar 4.35 Jumlah Kawasan (Kws.) Di Kawasan Eks. Transmigrasi Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Indikator Kinerja Output T.A. 2007



Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

4.3.4 Analisis Statistik Bidang Cipta Karya

Produktivitas air minum dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan kapasitas. Jumlah produksi total air minum tahun 2007 untuk 32 provinsi mencapai angka 10.445 lt/det dan di tahun 2008 menjadi 7.630 lt/det yang berarti turun sebesar 26,95%. Jumlah jiwa yang terlayani juga mengalami penurunan dari 2.311.590 jiwa pada tahun 2007 menjadi 1.702.130 jiwa pada tahun 2008, turun sebesar 26,37%. Analisis tersebut dapat dilihat di Tabel 4.54, dimana untuk mengetahui apakah besarnya perubahan jiwa yang dilayani sama dengan perubahan pencapaian produksi, digunakan nilai persentase perubahan. Penggunaan nilai persentase ini bertujuan untuk menyamakan besaran antara jiwa yang dilayani (dalam juta) dengan angka pencapaian yang dihasilkan (dalam puluhan dan ratusan).

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Persentase perubahan pencapaian (2007-2008) - Persentase perubahan jumlah jiwa yg dilayani (2007-2008)	-3.42994E1	133.72887	23.64015	-82.51376	13.91504	-1.451	31	.157

Berdasarkan uji statistik didapat bahwa rata-rata persentase perubahan pencapaian produksi air minum relatif sama dengan rata-rata perubahan jiwa yang dilayani dengan nilai P-value 0.157. Namun jika dilihat dari hasil uji korelasi dengan nilai korelasi 0.165 dan nilai p-value 0.366 menunjukkan besar kecilnya rasio perubahan jiwa yang dilayani berbeda dengan besar kecilnya rasio pencapaian produksi yang dihasilkan disetiap provinsi, yang berarti bahwa besarnya persentase perubahan antara pencapaian produksi yang dihasilkan dengan jiwa yang dilayani cenderung berbeda disetiap provinsi. Sebagai contoh untuk provinsi NAD jumlah jiwa yang dilayani naik (positif) begitu pula dengan pencapaian yang dihasilkan ikut naik (positif), tetapi di provinsi Sumatera Barat jumlah jiwa yang dilayani naik (positif) namun pencapaian yang dihasilkan menurun (negatif).

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Persentase perubahan pencapaian (2007-2008) & Persentase perubahan jumlah jiwa yg dilayani (2007-2008)	32	.165	.366

Jika dihitung berdasarkan rasio jiwa yang dilayani dengan kapasitas yang dicapai ditahun 2007 sebesar 221.31 jiwa untuk setiap lt/detik dan ditahun 2008 sebesar 223.08 jiwa untuk setiap lt/detik. Apakah naik-turunnya rasio jiwa yang dilayani dengan kapasitas yang dicapai disetiap provinsi adalah sama antara tahun 2007 dengan tahun 2008 akan dilihat berdasarkan uji korelasi. Dari uji korelasi didapat nilai korelasi 0.000 dengan p-value 0.997 yang artinya tidak ada korelasi antara rasio jiwa yang dilayani dengan kapasitas yang dicapai ditahun 2007 dengan tahun 2008, artinya naik turunnya angka rasio di tahun 2007 antar provinsi tidak sama dengan naik turunnya

angka rasio di tahun 2008 atau naik turunnya angka rasio ditahun 2007 tidak mempengaruhi naik turunnya angka rasio di tahun 2008. Sebagai contoh untuk provinsi Banten di tahun 2007 rasionya sebesar 122.27 jiwa per lt/det dan di tahun 2008 meningkat menjadi 1,285.71 jiwa per lt/det namun untuk provinsi Bengkulu di tahun 2007 rasionya 1,838.29 jiwa per lt/det turun menjadi 206 jiwa per lt/det. Jika dihitung apakah ada perbedaan rata-rata rasio jiwa yang dilayani dengan kapasita yang dicapai di tahun 2007 dengan tahun 2008 maka menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dengan P-value 0.511.

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Rasio Jiwa yg dilayani dengan kapasitas yg dicapai tahun 2007 & Rasio Jiwa yg dilayani dengan kapasitas yg dicapai tahun 2008	32	.000	.997

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Rasio Jiwa yg dilayani dengan kapasitas yg dicapai tahun 2007 - Rasio Jiwa yg dilayani dengan kapasitas yg dicapai tahun 2008	5.04392E1	428.83658	75.80831	-104.17286	205.05129	.665	31	.511

4.4 Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI (Penjelasan Pasal 20 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2007). Dengan demikian penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi rencana tata ruang harus melibatkan semua pelaku pembangunan pada setiap tahap pembangunan dan tercipta sinergis antara pengembangan wilayah dan penataan ruang.

Penataan ruang diharapkan :

- i. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- ii. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;
- iii. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem, yang selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas ruang.

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan :

❖ Perencanaan Tata Ruang

Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR

❖ Pemanfaatan Ruang

Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya

❖ Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi

Pengembangan wilayah adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam wadah NKRI. Pengembangan wilayah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pembangunan wilayah perlu mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang, didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya, dan dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Pengembangan wilayah dilakukan dalam payung "penataan ruang" untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi :

- i. Infrastruktur jalan sebagai prasarana pembentuk struktur ruang, infrastruktur sumber daya air sebagai prasarana pendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun pengendalian daya rusak air
- ii. Infrastruktur cipta karya pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang mencakup pelayanan transportasi lokal, pelayanan air minum dan sanitasi

lingkungan, termasuk penanganan persampahan, penyediaan drainase untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir, penanganan air limbah domestik serta penataan ruang dalam menata struktur ruang dan pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional adalah perencanaan makro strategis Nasional yang menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketataruangan yang memuat antara lain infrastruktur nasional seperti jalan nasional, pelabuhan samudera maupun bandara internasional. Adapun RTRW Provinsi merupakan perencanaan regional yang menjabarkan RTRWN dalam konteks ruang wilayah Provinsi secara lebih rinci termasuk memuat rencana pengembangan infrastruktur jalan provinsi, terminal maupun pelabuhan regional. RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik pengembangan kawasan yang ada.

Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2005 di bidang penataan ruang mencakup sosialisasi perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; pembahasan RTR Pulau Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi; penyusunan Rapermendagri tentang penyelenggaraan penataan ruang daerah; penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) penyusunan rencana tata ruang; penyusunan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional di Jawa dan Sulawesi; penyusunan rencana tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 8 lokasi; peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelaksanaan bantuan teknis dan pembinaan teknis di beberapa kabupaten/ kota hasil pemekaran dan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) di Kalimantan; pelaksanaan koordinasi penataan ruang melalui Rakernas BKTRN dan Raker Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali dan Sumatra;

dan pembentukan kerjasama antar kawasan laut di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah.

Raperpres RTR Perbatasan Kalimantan 2005 berisi tentang perihal Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Draft ke-14 – 18 Agustus 2005). Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan menjadi acuan bagi penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta Kabupaten-kabupaten pada Provinsi-provinsi tersebut yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

RTR Kawasan Kalimantan-Serawak-Sabah (KASABA) ini meliputi sebagian wilayah pada 5 kabupaten yang terdiri dari 15 wilayah kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi kecamatan Paloh dan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Kecamatan Jagoi Babang dan Siding di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Entikong dan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Kecamatan Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin di Kabupaten Kapuas Hulu, dan sebagian wilayah pada 3 kabupaten yang terdiri dari 11 wilayah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau, Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sungai Krayan, Sebatik, dan Nunukan di Kabupaten Nunukan.

Pada tahun 2006 diperoleh hasil-hasil berupa finalisasi perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelaksanaan bantuan teknis dan pembinaan teknis, antara lain penyiapan *zoning regulation*, penyusunan rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; tersusunnya norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk ruang laut,

pesisir, dan pulau-pulau kecil; penyusunan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional di Sumatra; tersusunnya rencana tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 6 lokasi; tersusunnya rencana aksi pemanfaatan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 11 lokasi; meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelaksanaan bantuan teknis dan pembinaan teknis di beberapa kabupaten/ kota hasil pemekaran; terbentuknya kerjasama pemanfaatan ruang laut; dan sosialisasi penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di 12 lokasi.

Pada 11 Januari 2006 diterbitkan beberapa Raperpres RTR yang masih berupa Draft, antara lain :

1. Raperpres RTR Pulau Jawa Bali 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa – Bali (Draft 11 Januari 2006)
2. Raperpres RTR Kepulauan Nusa Tenggara 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Nusa Tenggara (Draft 11 Januari 2006)
3. Raperpres RTR Pulau Papua 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Papua (Draft 11 Januari 2006)
4. Raperpres RTR Kepulauan Maluku 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku (Draft 11 Januari 2006)
5. Raperpres RTR Pulau Sumatera 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera (Draft 11 Januari 2006)
6. Raperpres RTR Pulau Kalimantan 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan (Draft 11 Januari 2006)
7. Raperpres RTR Pulau Sulawesi 2006, berisi perihal Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi (Draft 11 Januari 2006)

Peraturan Menteri PU yang diterbitkan tahun 2006 antara lain :

1. Permen PU No. 31 2006 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

2. Permen PU No. 32 2006 Perihal Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
3. Permen PU No. 33 2006 Perihal Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

Untuk penataan ruang arah kebijakan tahun 2007 adalah (1) Percepatan penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan revisi UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, serta (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan yang mampu melaksanakan koordinasi dan membentuk kesepakatan dan kerjasama antarsektor dan antarwilayah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan bidang pertanahan adalah (1) Pengembangan sistem pendaftaran tanah yang dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah, dan (2) Menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

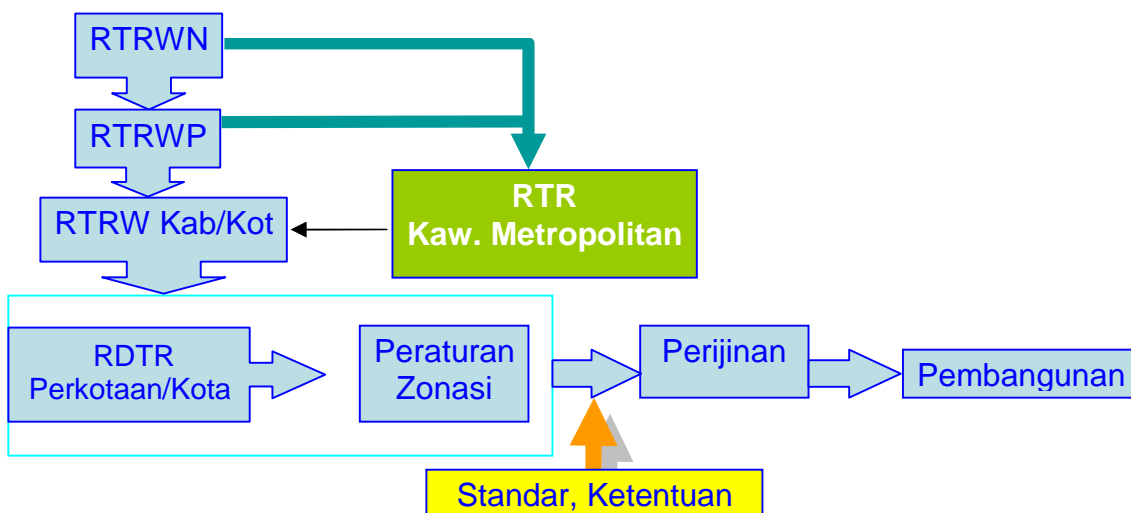
Peraturan perundangan yang dikeluarkan tahun 2007 terdiri dari 2, yaitu UU dan Permen PU. Untuk Undang-Undang, terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007 berisi perihal Penataan Ruang, serta UU No. 27 Tahun 2007 berisi perihal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan untuk Permen PU terdiri atas :

1. Permen PU No. 20/PRT/M Tahun 2007, perihal Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
2. Permen PU No. 21/PRT/M Tahun 2007, perihal Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Rawan Gempa Bumi
3. Permen PU No. 22/PRT/M Tahun 2007, perihal Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor

4. Permen PU No. 40/PRT/M Tahun 2007, perihal Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
5. Permen PU No. 41/PRT/M Tahun 2007, perihal Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

Adanya pengaruh pengembangan jalan tol sesuai siklus pembangunan jalan tol yang dimulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan paska konstruksi terhadap pemanfaatan ruang yang ditimbulkan, sedikitnya mencakup Pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, Pengaruh terhadap ekonomi, Pengaruh terhadap pembiayaan, Pengaruh terhadap perencanaan, Pengaruh preferensi masyarakat. Berikut adalah gambar Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Gambar 4.36 Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah



Sumber : Sosialisasi UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pada tahun 2008 Peraturan Perundangan yang dibuat adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PU. UU yang terbentuk adalah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan

Pemerintah (PP) di bidang tata ruang adalah PP No. 26 Tahun 2008 perihal Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Presiden yang terbentuk adalah Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (JABODETABEKPUNJUR). Selanjutnya Peraturan Menteri PU tahun 2008 adalah Permen PU No.05/PRT/ M Tahun 2008, yaitu perihal Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Tahun 2009 beberapa peraturan perundangan untuk penataan ruang juga telah diterbitkan, diantaranya Undang-Undang, RPP, Keppres, Permen PU. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 berisi perihal Pertambangan Mineral dan Batubara, RPP 2009 perihal Penyelenggaraan Penataan Ruang, Keppres No. 4 Tahun 2009 perihal Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Permen PU No. 11/PRT/M Tahun 2009 perihal Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, beserta Rencana Rinciannya.

Dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), maka diterbitkan Kepres No.120 tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI). Sebagai tindak lanjut dikeluarkan Kepres No.89 tahun 1996 yang lalu disempurnakan dengan Kepres No.9 tahun 1998 tentang pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Berdasarkan Kepres tersebut, KAPET meliputi beberapa Kawasan, antara lain :

1. Sanggau (Kalbar)
2. Batulicin (Kalsel)
3. Kakab (Kalteng)
4. Sasamba (Kaltim)

5. Manado – Bitung (Sulut)
6. Batui (Sulteng)
7. Pare-pare (Sulsel)
8. Bukari (Sultra)
9. Seram (Maluku)
10. Biak (Papua)
11. Bima (NTB)
12. Mbay (NTT)
13. Sabang (NAD)

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi beberapa kemungkinan kawasan:

- Kawasan Lindung (hutan lindung, lindung erosi, lindung longsor, lindung geologi, lindung resapan, lindung fauna, dsb)
- Kawasan Permukiman (desa, desa-kota, kota)
- Kawasan Pertambangan (tambang permukaan, bawah permukaan, logam, non logam, bahan galian, dsb)
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkebunan (pertanian, peternakan, dsb)
- Kawasan Sumber Daya Laut dan Pantai
- Kawasan Sarana dan Prasarana (bendungan, pembangkit listrik, jalan dan transportasi, air baku, dan tempat pembuangan sampah, dll)
- Kawasan Pariwisata (wisata alam, wisata agro, wisata pertambangan, dan industri, wisata bahari, wisata geologi, wisata budaya, wisata sejarah, dsb)

Untuk kawasan perbatasan laut, provinsi Irian Jaya Barat, Papua, dan Maluku Utara berdekatan dengan negara Palau. Provinsi Maluku dan NTT lebih ke Timor Leste, selain itu NTT juga berdekatan dengan Australia.

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di

sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Kawasan andalan merupakan kawasan yang mempunyai sejumlah sektor unggulan potensi untuk dikembangkan. Sektor-sektor tersebut berupa agroindustri, industri pertambangan, peternakan dan perikanan atau industri pariwisata. Dalam kawasan pengembangan baru di provinsi NTT, terdapat kawasan cepat tumbuh, yang meliputi :

- a) Pantai Utara Mumere (Kab. Sikka)
- b) Taman Wisata Danau Kalimutu (Kab. Ende)
- c) Zona Industri Maumere (Kab. Sikka)
- d) Zona Industri Kupang (Kab. Kupang Barat)
- e) Perairan Laut dan Kota Labuhan Bajo (Kab. Manggarai)
- f) Dataran Rendah Lasiana (Kab. Kupang)

Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) merupakan kawasan strategis nasional dan akan dikembangkan tahap awal tiga daerah yakni Batam, Bintan, dan Karimun. Batam, Bintan, dan Karimun memiliki keunggulan karena letaknya yang strategis berada di alur laut kepulauan Indonesia yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka, sehingga dengan diberi dukungan infrastruktur sedikit saja sudah bisa dikembangkan.

Dalam RUU Penataan Ruang yang tengah dibahas KEKI dimasukkan sebagai kawasan strategis nasional yang ditetapkan karena memiliki sektor unggulan, kesiapan infrastruktur serta tersedianya sumber daya manusia. Pada dasarnya RUU Penataan Ruang mendukung potensi-potensi yang dimiliki daerah seperti adanya sektor unggulan untuk terus dikembangkan. Hal tersebut salah satunya direalisasikan melalui penetapan kawasan andalan.

Keberadaan KEKI diharapkan mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan investasi serta dapat menjadi pendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. Pengembangan KEKI merupakan upaya peningkatan daya saing Indonesia,

dimana sebelumnya pemerintah juga mempunyai 13 lokasi Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Adapun KEKI ini meliputi daerah-daerah seperti :

1. Banda Aceh
2. Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang)
3. Duri – Dumai
4. Batam – Tanjung Pinang
5. Bojonegara – Merak – Cilegon
6. Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbang Kertasusila)
7. Pontianak
8. Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam (Bonsamtebajam)
9. Manado – Bitung
10. Makasar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Maminasata)
11. Ternate – Tidore
12. Sorong

Timbulnya Kerjasama Sub-regional (KESR) sangat erat sekali kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi dari masing-masing negara yang bersifat "*komplementaritas*" untuk mempercepat arus masuk investasi dengan kekuatan pendorong utamanya adalah sektor swasta dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor. Komplementaritas pada dasarnya adalah saling melengkapi apa yang kita miliki kita berikan kepada negara lain, demikian juga yang kita butuhkan kita dapatkan dari negara lain, namun demikian dalam komplementaritas juga terkandung kompetisi bebas. Dalam kaitan ini pemerintah masing-masing negara berlaku sebagai fasilitator.

Pada tahun 1994 dibentuk kawasan sub-regional Indonesia, *Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, tahun 1995 dibentuk kawasan sub-regional

Indonesia, *Malaysia, Singapore Growth Triangle (IMS-GT)*, tahun 1996 dibentuk kawasan pengembangan sub-regional *Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*, dan tahun 1997 dibentuk kawasan pengembangan sub-regional *Australia, Indonesia Development Area (AIDA)*.

Kerjasama Ekonomi Sub Regional di Wilayah IV (Kawasan Pengembangan Baru) sebagai berikut :

1. BIMP-EAGA :

Brunei Darussalam

Indonesia: Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sulawesi, Provinsi Maluku dan Papua

Malaysia : Negara Bagian Serawak dan Sabah

Philipina : Provinsi Mindanao terdiri dari Region IX Western Mindanao (3 provinsi), Region X Northern Mindanao (4 provinsi), Region XI Southern Mindanao (6 provinsi), Region XII Central Mindanao (5 provinsi), Autonomous Region in Muslim Mindao/ ARMM (4 provinsi) dan Caraga (4 provinsi) serta Provinsi (Pulau) Palawan

2. AIDA :

Australia

Indonesia: Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sulawesi

Tabel : 4.1
Data Wilayah Sungai (WS) di Indonesia

No.	Nama Wilayah Sungai (WS)	Status	Jumlah	Jumlah	Jumlah
			DAS	Sungai	DI
1	2	3	4	5	6
1	Krueng Aceh	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	4	21	0
2	Meureudu - Baro	WS Strategis Nasional	1	18	0
3	Pase - Peusangan	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	30	91
4	Jambo Aye	WS Strategis Nasional	1	19	135
5	Toba - Asahan	WS Strategis Nasional	1	127	43
6	Tamiang Langsa	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	5	11	161
7	Teunom - Lambesoi	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	7	0	248
8	Woyla - Seunagan	WS Strategis Nasional	1	26	0
9	Tripa - Bateue	WS Strategis Nasional	1	32	108
10	Krueng Baru - Kluet	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	292
11	Pulau Simeulue	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	65
12	Alas - Singkil	WS Lintas Provinsi	5	57	0
13	Wampu - Besitang	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	7	88	321
14	Belawan - Ular - Padang	WS Strategis Nasional	1	81	0
15	Bah - Bolon	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	8	22	186
16	Barumun - Kualuh	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	4	33	94
17	Pulau Nias	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	16	0	121
18	Sibundong - Batang Toru	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	5	0	156
19	Batang Angkola - Batang Gadis	WS Strategis Nasional	1	204	53
20	Batang Natal - Batang Batahan	WS Lintas Provinsi	2	0	0
21	Rokan	WS Lintas Provinsi	13	168	0
22	Siak	WS Strategis Nasional	1	158	92
23	Bengkalis Rupat	WS Dalam Kabupaten/ Kota	2	96	0
24	Kampar	WS Lintas Provinsi	5	258	0
25	Indragiri	WS Lintas Provinsi	8	156	78
26	Reteh	WS Strategis Nasional	1	0	14
27	Kepulauan Natuna - Anambas	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	14
28	Kepulauan Karimun	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	25
29	Pulau Batam - Pulau Bintan	WS Strategis Nasional	1	0	0
30	Kepulauan Lingga - Singkep	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	0
31	Silaut - Tarusan	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	23	216
32	Pulau Siberut-Pagai-Sipora (Kep.Mentawai)	WS Dalam Kabupaten/ Kota	11	0	6
33	Masang - Pasaman	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	13	0	309
34	Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan	WS Strategis Nasional	1	12	568
35	Pangabuan - Lagan	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	78
36	Batanghari	WS Lintas Provinsi	19	65	124
37	Sugihan	WS Strategis Nasional	1	37	1
38	Musi	WS Lintas Provinsi	6	21	105
39	Banyuasin	WS Strategis Nasional	1	0	10
40	Pulau Bangka	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	1	0	34
41	Pulau Belitung	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	1	0	11
42	Mesuji - Tulang Bawang	WS Lintas Provinsi	8	75	0
43	Way Seputih - Way Sekampung	WS Strategis Nasional	1	61	762
44	Semangka	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	7	44	14
45	Air Bengkulu - Alas Talo	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	9	27	286
46	Sebelat - Ketahun - Lais	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	16	21	156
47	Teramang - Ipuh	WS Lintas Provinsi	8	22	0
48	Nasal - Padang Guci	WS Lintas Provinsi	10	0	0
49	Ciliman - Cibungur	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	366	759
50	Cibaliung - Cisawarna	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	0
51	Kepulauan Seribu	WS Lintas Provinsi	1	0	0
52	Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum	WS Lintas Provinsi	6	227	912
53	Cisadea - Cibareno	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	4	29	58
54	Ciwulan - Cilaki	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	9	0	8

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Nama Wilayah Sungai (WS)	Status	Jumlah	Jumlah	Jumlah
			DAS	Sungai	DI
1	2	3	4	5	6
55	Citanduy	WS Lintas Provinsi	10	137	2
56	Cimanuk - Cisanggarung	WS Lintas Provinsi	9	40	286
57	Pemali - Comal	WS Strategis Nasional	1	0	1202
58	Jratunseluna	WS Strategis Nasional	1	81	2299
59	Bodri - Kuto	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	10	0	0
60	Wiso - Gelis	WS Dalam Kabupaten/ Kota	11	0	0
61	Kepulauan Karimunjawa	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	0
62	Serayu - Bogowonto	WS Strategis Nasional	1	83	3256
63	Progo - Opak - Serang	WS Lintas Provinsi	6	21	131
64	Bengawan Solo	WS Lintas Provinsi	12	206	5535
65	Brantas	WS Strategis Nasional	1	0	5402
66	Welang - Rejoso	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	33
67	Pekalen - Sampean	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	301
68	Baru - Bajulmati	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	1541
69	Bondoyudo - Bedadung	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	0
70	Kepulauan Madura	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	10	0	235
71	Bali - Penida	WS Strategis Nasional	1	399	886
72	Pulau Lombok	WS Strategis Nasional	1	32	242
73	Sumbawa	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	10	44	0
74	Bima Dompu	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	0	111
75	Pulau Sumba	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	5	31	200
76	Aesesa	WS Strategis Nasional	1	0	384
77	Wae Jamal	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	4	0	117
78	Flotim - Lembata - Alor	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	181	89
79	Benanain	WS Lintas Negara	2	0	36
80	Noel - Mina	WS Lintas Negara	5	0	437
81	Mempawah	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	1	62	171
82	Sambas	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	1	0	0
83	Kapuas	WS Strategis Nasional	1	327	115
84	Pawan	WS Strategis Nasional	1	169	172
85	Jelai - Kendawangan	WS Lintas Provinsi	2	0	15
86	Seruyan	WS Strategis Nasional	1	0	4
87	Mentaya	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	0
88	Katingan	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	38
89	Kahayan	WS Strategis Nasional	1	31	0
90	Barito - Kapuas	WS Lintas Provinsi	11	153	440
91	Cengal - Batulicin	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	5	136	0
92	Pulau Laut	WS Dalam Kabupaten/ Kota	11	0	0
93	Sesayap	WS Lintas Negara	13	255	0
94	Kayan	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	7	147	292
95	Berau - Kelai	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	92	0
96	Mahakam	WS Strategis Nasional	1	494	60
97	Karangan	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	5	52	49
98	Kendilo	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	5	0	0
99	Sangihe Talaud	WS Strategis Nasional	1	0	11
100	Tondano - Likupang	WS Strategis Nasional	1	147	111
101	Poigar - Ranoyapo	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	0
102	Dumoga - Sangkup	WS Lintas Provinsi	7	0	114
103	Limboto - Bulango - Bone	WS Lintas Provinsi	3	31	3
104	Paguyaman	WS Strategis Nasional	1	34	39
105	Randangan	WS Lintas Provinsi	5	0	0
106	Lambunu - buol	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	9	78	5
107	Palu - Lariang	WS Lintas Provinsi	8	96	0
108	Parigi - Poso	WS Strategis Nasional	1	72	161
109	Bongka - Mantawa	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	88	28

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Nama Wilayah Sungai (WS)	Status	Jumlah DAS	Jumlah Sungai	Jumlah DI
1	2	3	4	5	6
110	Kepulauan Banggai	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	8
111	Laa - Tambalako	WS Strategis Nasional	1	35	88
112	Kaluku - Karama	WS Lintas Provinsi	5	47	218
113	Pompengan - Larona	WS Lintas Provinsi	11	102	0
114	Sadang	WS Lintas Provinsi	15	55	0
115	Walanae - Cenranae	WS Strategis Nasional	1	36	664
116	Jeneberang	WS Strategis Nasional	1	48	728
117	Lasolo - Sampara	WS Lintas Provinsi	8	9	0
118	Poleang - Roraya	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	13	5	25
119	Towari - Lasusua	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	8	10	21
120	Pulau Buton	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	0	36
121	Pulau Muna	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	6	0	0
122	Halmahera Utara	WS Dalam Kabupaten/ Kota	1	0	0
123	Halmahera Selatan	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	1	0	52
124	Kepulauan Sula - Obi	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	2	0	2
125	Pulau buru	WS Strategis Nasional	1	0	14
126	Pulau Ambon - Pulau Seram	WS Strategis Nasional	1	0	19
127	Kepulauan Kei - Aru	WS Strategis Nasional	1	0	29
128	Kepulauan Yamdena - Wetar	WS Strategis Nasional	1	0	2
129	Kamundan - Sebyar	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	14	0	18
130	Wapoga - Mimika	WS Lintas Kabupaten/ Kota, Dalam Provinsi	17	0	2
131	Omba	WS Lintas Provinsi	5	137	7
132	Mamberamo - Tami - Apauvar	WS Lintas Negara	17	136	10
133	Einlanden - Digul - Bikuma	WS Lintas Negara	8	245	14

Sumber : <http://sda.pu.go.id/list.php?page=ws>

Tabel : 4.2.1
Wilayah Sungai Lintas Negara

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	A1 - 1	Benanain	NTT - <i>Timor Leste</i>	Benanain; Mena
2	A1 - 2	Noel Mina	NTT - <i>Timor Leste</i>	Noel Mina; N.Termanu; Nungkurus; (P.Rote); (P.Sabu)
3	A1 - 3	Sesayap	Kaltim - <i>Serawak; Mala ysia</i>	Sesayap; Sebakung; Sebakis; Sebuku; Sembaleun; Simenggaris; Noteh; Sinualan; Itai; Sekata; Linuang Kayan; Ansam; Belayau
4	A1 - 4	Mamberamo - Tami - Apauvar	Papua - <i>Papua Nugini</i>	Mamberamo; Gesa; Bigabu; Sobger; Tariku; Nawa; Taritatu; Van Dalen; Tami; Apauvar; Verkume; Tor; Biri; Wiru; Sermo; Grime; Sentani
5	A1 - 5	Einlanden - Digul - Bikuma	Papua - <i>Papua Nugini</i>	Einlanden; Digul; Maro; Kumbe; Bulaka; Bian; Dolak; Digul; Cemara

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>
(Lampiran I : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 11A / PRT / M / 2006
Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.2.2
Wilayah Sungai Lintas Provinsi

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	A2 - 1	Alas - Singkil	N A D - Sumatera Utara	Lae Pardomuan; Lae Silabuhan; Lae Siragian; Lae Singkil; L.Kuala Baru
2	A2 - 2	Batang Natal - Btg.Batahan	Sumut - Sumbar	Btg. Batahan; Btg. Natal
3	A2 - 3	Rokan	Riau - Sumatera Barat - Sumatera Utara	Rokan; Bangko; Rokan Kiri; Rokan Kanan; Kubu; Sumpur; Sontang; Asik; Air Pesut; Sibinail; Pagang; Pincuran Panjang; Timbawan
4	A2 - 4	Kampar	Riau - Sumatera Barat	Kampar; Kampar Kiri; Kampar Kanan; Bt.Kapur; Bt.Mahat
5	A2 - 5	Indragiri	Riau - Sumatera Barat	Kuantan; Indragiri;Gaung Anak Serka; Guntung; Pateman; Palangki; Ombilin; Sinamar
6	A2 - 6	Batanghari	Jambi - Sumatera Barat	Btg.Hari; Tungkal; Bentaro; Mandahara; Lagan; Air Hutan; Jujuhan; Siat; Timpeh; Kuko; Pangean; Momong; Sipotar; Sangir; Talantam; Bangko; Gumanti; Pinti Kayu; Pkl.Duri Besar
7	A2 - 7	Musi	Sumsel-Bengkulu-Lampung	Musi; Lakitan; Kelingi; Rawas; Semangus; Batang Hari Leko;
8	A2 - 8	Mesuji - Tulang Bawang	Lampung - Sumsel	Mesuji; Tlg. Bawang; Tjg. Pasir; Randam Bsr; Sibur Besar; Tawar; Bati Dalam Kecil; Randam Besar; Meham Kecil
9	A2 - 9	Teramang-Ipuh	Bengkulu-Jambi	Teramang; Ipuh; Retak; Buluh; Selagan; Bantal; Dikit; Manjuto
10	A2 - 10	Nasal - Padang Guci	Bengkulu - Lampung	Air Nasal; Air Sambat; Air Tetap; Air Luas; Air Kinal; Air Padang Guci; Air Sulau; Air Kedurang; Air Bengkenang; Air Manna (Kepulauan Seribu)
11	A2 - 11	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta - Banten	Cisadane; Ciliwung; Citarum;
12	A2 - 12	Cidanau-Ciujung-Cidurian- Cisadane-Ciliwung-Citarum	Banten-DKI Jakarta-Jabar	Cidanau; Ciujung; Cidurian
13	A2 - 13	Citanduy	Jawa Barat - Jawa Tengah	Citanduy, Cibeureum; Cimeneng; Kadalmeteng; Ciputra Pinggan; Sapuregel; Kawungaten; Cikonde; Cikembulan; Cihaur
14	A2 - 14	Cimanuk - Cisanggarung	Jawa Barat - Jawa Tengah	Cimanuk; Cisanggarung; Cipanas; Ciwaringin;Cikondang; Kasuncang; Babakan; Kabuyutan; Kluwut
15	A2 - 15	Progo - Opak - Serang	DI Yogyakarta - Jateng	Progo; Opak; Serang; Tangsi; Elo; Oyo
16	A2 - 16	Bengawan Solo	Jawa Timur - Jawa Tengah	Keduwang; Jurang Gempal; B. Solo/Jurug Solo; Grindulu; Lorong; Lamong; K. Gondang; K. Sragen; Semawon; Wungu; Semawun; Geneng; Sondang
17	A2 - 17	Jelai-Kendawangan	Kalteng - Kalbar	Jelai; Kendawangan

Lanjutan Tabel 4.2.2

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
18	A2 - 18	Barito - Kapuas	Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah	Barito; Kapuas; Murung, Martapura; Riam Kanan; Riam Kiwa; Negara; Ambawang; Kubu; Landak; Tapin
19	A2 - 19	Dumoga - Sangkup	Sulawesi Utara - Gorontalo	Dumoga; Sangkup; Buyat; Lomboit; Andagile; Bulawa; Tuliawa
20	A2 - 20	Limboto - Bulango - Bone	Gorontalo - Sulawesi Utara	Limboto; Bulango; Bone
21	A2 - 21	Randangan	Gorontalo-Sulawesi Tengah	Randangan;
22	A2 - 22	Palu - Lariang	Sulteng - Sulsel - Sulbar	Palu; Lariang; Watutela; Pasangkayu; Mesangka; Surumba; Sibayu; Tambu
23	A2 - 23	Kaluku - Karama	Sulbar - Sulsel	Kaluku; Karama; Babbalalang; Malunda; Mandar
24	A2 - 24	Pompengan - Larona	Sulsel - Sultra	Pompengan; Larona; Kalaena; Latuppa; Bua; Lamasi; Makawa; Bungadidi; Kebo; Rongkong; Balease
25	A2 - 25	Sadang	Sulsel - Sulbar	Sadang; Mamasa; Rapang; Libukasi; Galang-galang; Lissu; Barru; Lakepo; Lampoko; Kariango; Pangkajene; Bone-bone; Segeri; Karajae; Malipi;
26	A2 - 26	Lasolo - Sampara	Sul.Tenggara-Sulsel-Sulteng	Lasolo; Sampara; Lalindu; Aopa; Tinobu; Luhumbuti; Landawe; Amesi
27	A2 - 27	Omba	Papua - Irian Jaya Barat	Omba; Lengguru; Madefa; Bedidi; Bomberai

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran II : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.2.3
Wilayah Sungai Strategis Nasional

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	A3 - 1	Meureudu - Baro	N A D	Meureudu; Baro; Tiro; Pante Raja; Utue; Putu; Trienggadeng; Pangwa; Beuracan; Batee
2	A3 - 2	Jambo Aye	N A D	Jambo Aye; Geuruntang; Reungget; Lueng; Simpang Ulim; Malehan; Julok Rayeu; Keumuning; Gading; Idi Rayeuk; Lancang; Jeungki; Peundawa Rayeuk; Peureulak; Peundawa Puntong; Leugo Rayeuk;
3	A3 - 3	Woyla - Seunagan	N A D	Woyla; Seunagan;
4	A3 - 4	Tripa - Bateue	N A D	Tripa; Bateue;
5	A3 - 5	Belawan - Ular - Padang	Sumatera Utara	Belawan; Ular; Deli; Belumai; Padang; Martebing; Kenang; Serdang; Percut; Bedagai; Belutu
6	A3 - 6	Toba-Asahan	Sumatera Utara	Danau Toba; Sei Asahan; Silau; Tanjung; Suka
7	A3 - 7	Batang Angkola-Batang Gadis	Sumatera Utara	Batang Angkola; Batang Gadis
8	A3 - 8	Siak	Riau	Siak; Siak Kecil; Bukit Batu; Palentung; Tapung Kanan; Tapung Kiri; Masigit; Bulu Kala; Mandau; Dumai
9	A3 - 9	Reteh	Riau	Reteh; Gangsal
10	A3 - 10	Pulau Batam - Pulau Bintan	Kepulauan Riau	(Pulau Batam; Pulau Bintan)
11	A3 - 11	Anai-Kuranji-Arau-Mangau; Antokan;	Sumatera Barat	Anai; Kuranji; Arau; Mangau; Antokan; Air Dingin; Tapakis; Ulakan; Andaman; Pariaman; Manggung; Naras; Limau; Kamumuan; Paingan; Tiku; Bungus
12	A3 - 12	Sugihan	Sumatera Selatan	Burung; Gaja Mati; Pelimbangan; Beberi; Olok; Daras; Medang; Padang
13	A3 - 13	Banyuasin	Sumatera Selatan	Banyuasin; Senda; Limau; Ibul; Puntian; Pangkalan Balai; Buluain; Kepayang; Mangsang; Kedawang; Titikan; Mendes; Tungal; Keluang; Lalan; Supat; Lilin
14	A3 - 14	Way Seputih-Way Sekampung	Lampung	Seputih; Sekampung; Wako; Kambas; Penet; Kuripan; Sabu; Sukamaju
15	A3 - 15	Pemali - Comal	Jawa Tengah	Pemali; Pemali Notog; Comal; Cacaban; Waluh; Sengkarang; Sambong; Sragi
16	A3 - 16	Jratunseluna	Jawa Tengah	Jragung, Tuntang; Serang; Lusi; Juwana; Bodri; Anyar; Klampok; Semarang; Garang; Randuguntini
17	A3 - 17	Serayu - Bogowonto	Jawa Tengah	Serayu; Bogowonto; Bengawan; Ijo; Luk Ulo; Cokroyasan; Sempor; Padegolan; Tipar; Wawar; Telomoyo; Watugemulung; Pasir; Tuk; Yasa; Sрати; Donan
18	A3 - 18	Brantas	Jawa Timur	Brantas; Santun; Punyu; Bango; Putih; Widas; Konto
19	A3 - 19	Bali - Penida	Bali	Ayung; Ho; Balian; Daya; Sabah; Panarukan; Sangiang Gede
20	A3 - 20	Pulau Lombok	N.T.B.	Dodokan; Jangkok; Babak; Renggung; Palung; Blimbing; Segara; Pemining; Meninting; Sidutan

Lanjutan Tabel 4.2.3

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
21	A3 - 21	Aesesa	N.T.T.	Aesesa; Wae Mokol; Naggaroro; Mautenda; Wolowona; Waiwajo; Nebe
22	A3 - 22	Kapuas	Kalimantan Barat	Kapuas; Ambawang; Kubu; Landak; Nipah; Paduan; Peniti; Kapar; Mancar; Kerawang; Melendang; Satai
23	A3 - 23	Pawan	Kalimantan Barat	Pawan; Simpang; Semandang; Semanai
24	A3 - 24	Seruyan	Kalimantan Tengah	Seruyan
25	A3 - 25	Kahayan	Kalimantan Tengah	Kahayan; Sebangau
26	A3 - 26	Mahakam	Kalimantan Timur	Mahakam; Semboja; Senipah; Semoi
27	A3 - 27	Sangihe Talaud	Sulawesi Utara	(Sangihe Talaud)
28	A3 - 28	Tondano - Likupang	Sulawesi Utara	Ranawangko; Ranopaso; Nimanga; Marondor; Sosongae; Tondano; Likupang
29	A3 - 29	Paguyaman	Gorontalo	Paguyaman; Bola; Dulupi; Buntaya; Marisa
30	A3 - 30	Parigi - Poso	Sulawesi Tengah	Parigi; Poso; Tompis; Bambalemo; Podi; Dolago; Tindaki
31	A3 - 31	Laa - Tambalako	Sulawesi Tengah	Laa; Tambalako; Tirongan; Salato; Morowali; Sumare; Bahonbelu; Bahodopi
32	A3 - 32	Walanae - Cenranae	Sulawesi Selatan	Walanae; Cenranae; Paremang; Bajo; Awo; Peneki; Keera; Ranang; Larompong; Gilirang; Noling; Suli; Suto;
33	A3 - 33	Jeneberang	Sulawesi Selatan	Jeneberang; Jeneponto; Maros; Matulu; Salangketo; Tangka; Aparang; Pamukulu
34	A3 - 34	Pulau Buru	Maluku	(Pulau Buru)
35	A3 - 35	Pulau Ambon - Pulau Seram	Maluku	(Pulau Ambon; Pulau Seram)
36	A3 - 36	Kepulauan Kei - Aru	Maluku	(Kepulauan Kei - Aru)
37	A3 - 37	Kepulauan Yamdena-Wetar	Maluku	(Kepulauan Yamdena-Wetar)

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran III : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.2.4
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
1	B - 1	Krueng Aceh	N A D	Aceh; Raya; Tengku; Batee
2	B - 2	Pase - Peusangan	N A D	Pase; Peusangan; Peudada; Keureuteu; Mane; Mane; Geukeuh
3	B - 3	Tamiang - Langsa	N A D	Tamiang; Langsa; Raya; Telaga Muku; Bayeueun
4	B - 4	Teunom - Lambesoi	N A D	Teunom; Lambesoi; Bubon; Woyla; Sabe; Masen; Inong
5	B - 5	Krueng Baru - Kluet	N A D	Krueng Baru; Kluet
6	B - 6	Wampu - Besitang	Sumatera Utara	Wampu; Besitang; Babalan; Lapan; Gebang; Karang Gading; Btg. Serangan
7	B - 7	Bah Bolon	Sumatera Utara	Bah Bolon; Pare-pare/Gambus; Napal; Kiri; Tanjung; Pagurawan; Perupuk; Balai
8	B - 8	Barumon - Kualuh	Sumatera Utara	Barumon; Kualuh; Bilah; Panai
9	B - 9	Pulau Nias	Sumatera Utara	Inou; Matawa; Afia; Gido Zebua; Idano Zala; Bol; Erfi; Otua; No Awu; Tulang baho; Manliho; Lae Huwa; Oyo; Nalawo; Idanogowo; Mola
10	B - 10	Sibundong - Btg.Toru	Sumatera Utara	Sibundong; Batang Toru; Sirahar; Sitio-tio; Goman
11	B - 11	Silaut - Tarusan	Sumatera Barat	Silaut; Tarusan; Sindang; Lunang; Indrapura; Bantayan
12	B - 12	Masang - Pasaman	Sumatera Barat	Masang; Pasaman; Mandiangin; Ampu; Kapar; Sikilang; Air Bangis; Air Patibubur; Air Pigogah; Air Bakau; Air Pinang; Air Tamak; Air Parlantingan
13	B - 13	Pengabuan - Lagan	Jambi	Pengabuan; Lagan
14	B - 14	Pulau Bangka	Bangka Belitung	(Pulau Bangka)
15	B - 15	Pulau Belitung	Bangka Belitung	(Pulau Belitung)
16	B - 16	Semangka	Lampung	Semangka; Ngarip; Menanga; Canguk; Pemerihan; Bambang; Ngaras
17	B - 17	Air Bengkulu-Alas-Talo	Bengkulu	Air Bengkulu; Alas; Talo; Maras; Penago; Seluma; Kungkai; Air Hitam; Jenggalu
18	B - 18	Sebelat-Ketahun-Lais	Bengkulu	Ketahun; Lais; Bintunan; Lemau; Palik; Padang; Serangai; Bitunan; Urai; Kelingi; Kati; Beliti; Musi; Sebelat; Senaba; Sabai; Rami
19	B - 19	Ciliman - Cibungur	Banten	Ciliman; Cibungur
20	B - 20	Cibaliung - Cisawarna	Banten	Cibaliung; Cisawarna
21	B - 21	Cisadea - Cibareno	Jawa Barat	Cisadea; Cibareno; Cisolok; Cimandiri
22	B - 22	Ciwulan - Cilaki	Jawa Barat	Ciwulan; Cilaki; Cidadap; Cipatujah; Ciawi; Cimerak; Cikaso; Cimari; Cilayu
23	B - 23	Bodri - Kuto	Jawa Tengah	Bodri; Kuto; Damar; Bulanan; Blukar; Buntu; Kendal; Blorong; Aji; Glagah
24	B - 24	Welang - Rejoso	Jawa Timur	Welang; Rejoso
25	B - 25	Pekalen - Sampean	Jawa Timur	Pekalen; Sampean
26	B - 26	Baru - Bajulmati	Jawa Timur	Baru; Bajulmati
27	B - 27	Bondoyudo - Bedadung	Jawa Timur	Bondoyudo; Bedadung

Lanjutan Tabel 4.2.4

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5
28	B - 28	Kepulauan Madura	Jawa Timur	Rangkah; Ubak; Tamberu; Sumberabat; Semajid; Sampang; Keteleng;
29	B - 29	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Baliga; Sasak; Pasian
30	B - 30	Bima Dompu	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa; Beh; Sekongkang; Rea; Moyo; Lamang; Empang; Jiram; Batu Bulan; Banggo
31	B - 31	Pulau Sumba	Nusa Tenggara Timur	Sambana; Jatanga; Kwangko; Solo; Jatibaru; Parado
32	B - 32	Wae Jamal	Nusa Tenggara Timur	Baing; Kambaniru; Memboro; Polapare; Wanakoka
33	B - 33	Flotim - Lembata - Alor	Nusa Tenggara Timur	Wae Jamal; Wae Raho/Lembor; Wae Pesi; (P.Komodo)
34	B - 34	Mempawah	Kalimantan Barat	Konga; (P. Adonara); (P. Solor); (P. Lomblen); (P. Alor); (P. Pantar)
35	B - 35	Sambas	Kalimantan Barat	Mempawah;
36	B - 36	Cengal-Batulicin	Kalimantan Selatan	Sambas;
37	B - 37	Kayan	Kalimantan Timur	Cengal; Batulicin; Sampanahan; Kusan; Kintap
38	B - 38	Berau-Kelai	Kalimantan Timur	Kayan; Bulungan; Bengara; Berasan; Malimpung; Selor; Ansam
39	B - 39	Karangan	Kalimantan Timur	Berau; Kuning; Bakau; Pangkung; Kasal; Pantai
40	B - 40	Kendilo	Kalimantan Timur	Karangan; Sangata; Bengalon; Marangkayu; Santan
41	B - 41	Poigar - Ranoyapo	Sulawesi Utara	Kendilo; Segendang; Janggeru; Kerang; Tunan
42	B - 42	Lambunu-Buol	Sulawesi Tengah	Poigar; Ranoyapo
43	B - 43	Bongka - Mentawa	Sulawesi Tengah	Lambunu; Buol; Lobu; Salumpaga; Bangkir; Ogoamas; Silambo; Siraurang; Sioyong
44	B - 44	Poleang - Roraya	Sulawesi Tenggara	Bongka; Mantawa;
45	B - 45	Towari - Lasusua	Sulawesi Tenggara	Poleang; Roraya; Langkowala; Asole; Bogora; Muna; Lausu; Kasipute; Toburi; Laeya; Wolasi; Baito; Benua
46	B - 46	Pulau Buton	Sulawesi Tenggara	Towari; Lasusua; Welulu; Oko-oko; Mekongga; Tamboli; Woimenda; Simbune
47	B - 47	Pulau Muna	Sulawesi Tenggara	Bungi; Ambe; Wonco; Bau-bau; Kabongka; Winto
48	B - 48	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Tiworo; Kancintala; Bone; Ronta; Jompi; Kontu (Halmahera Selatan)
49	B - 49	Kepulauan Sula - Obi	Maluku Utara	(Kepulauan Sula); (Kepulauan Obi)
50	B - 50	Kamundan - Sebyar	Irian Jaya Barat	Kamundan; Kais; Karabra; Kladuk; Warsamson; Mega; Koor; Sebyar; Arumasa; Muturi; Wasian; Mangopi; Prafi; Wariagar
51	B - 51	Wapoga - Mimika	Papua	Wapoga; Aikimuga; Otokwa; Minarjerwi; Kamura; Mimika; Yawe; Parongga; Aidoma; Wanggar; Siriwo; Rombak; Nadubuai; Yapen; Biak; Supiori; Kemabu

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran IV : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.2.5
Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Kabupaten	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
1	2	3	4	5	6
1	C - 1	Pulau Simelue	N A D	Simeulue	(Pulau Simelue)
2	C - 2	Bengkalis - Rupat	Riau	Bengkalis	(P. Bengkalis) (P. Rupat)
3	C - 3	Kepulauan Natuna - Anambas	Kepulauan Riau	Natuna	(Kepulauan Natuna - Anambas)
4	C - 4	Kepulauan Karimun	Kepulauan Riau	Karimun	(Kepulauan Karimun)
5	C - 5	Kepulauan Lingga - Singkep	Kepulauan Riau	Lingga	(Kepulauan Lingga - Singkep)
6	C - 6	Pulau Siberut - Pagai - Sipora (Kepulauan Mentawai)	Sumatera Barat	Mentawai	Siberut; Sikabalu; Saibi; Simalegi; Takungan; Sibulelek; Sigep; Koilo; Kuioinan; Sigei; Sikako
7	C - 7	Wiso - Gelis	Jawa Tengah	Jejara	Pecangaan; Tukabul; Sirahan; Wiso; Gelis; Gung; Mlonggo; Balong; Wangkang; Telon; Banjaran; (Kepulauan Karimunjawa)
8	C - 8	Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah	Jejara	
9	C - 9	Mentaya	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Timur	Mentaya
10	C - 10	Katingan	Kalimantan Tengah	Katingan	Katingan
11	C - 11	Pulau Laut	Kalimantan Selatan	Kota Baru	Senakin; Sigam; Taih; Paring; Sebelimbangan; Pasir; Limau; Oka-oka; Buah; Kapis; Serantak (Kepulauan Banggai)
12	C - 12	Kepulauan Banggai	Sulawesi Tengah	Bangkep	(Kepulauan Banggai)
13	C - 13	Halmahera Utara	Maluku Utara	Halmahera Utara	(Halmahera Utara)

Sumber : <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/lampiranpermen11A.asp>

(Lampiran V : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 11A / PRT / M / 2006

Tanggal : 26 Juni 2006)

Tabel : 4.3
Daftar Danau dan Situ Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009

No.	Provinsi	Jenis		Luas (Km ²)		Volume Tampung
		Danau	Situ	Danau	DTA*	(juta m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8	-	5.798,00	127,80	242.000,00
2	Sumatera Utara	8	95	736,00	0,00	3.350.900,00
3	Sumatera Barat	59	-	408,11	1.393,00	6.069.356,00
4	Riau	32	-	137,00	0,00	0,00
5	Jambi	14	-	5.000,00	0,00	0,00
6	Sumatera Selatan	16	1	21.432,00	0,00	262,00
7	Bengkulu	7	-	309,00	1.500,00	2.100.000,00
8	Kepulauan Bangka Belitung	-	555	28,08	0,00	72,33
9	Lampung	45	-	97,00	0,00	5.884.790,00
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	1	47	25,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	10	163	3.526,60	0,00	0,00
13	Jawa Tengah	2	33	0,00	0,00	1,71
14	DI Yogyakarta	-	135	1,20	0,00	7,05
15	Jawa Timur	11	1	-	-	-
16	Bali	5	14	25,72	62,98	1.024,35
17	Banten	26	85	21.538,73	1.563,14	2.902,00
18	Nusa Tenggara Barat	11	-	30,65	8.008,00	25,00
19	Nusa Tenggara Timur	34	27	26,00	0,00	995.612,00
20	Kalimantan Barat	55	-	305,80	15.821,75	0,00
21	Kalimantan Tengah	48	-	195,43	0,00	0,00
22	Kalimantan Selatan	3	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	23	-	59.250,00	0,00	1.300,00
24	Sulawesi Utara	28	7	5,00	0,00	100.000,00
25	Sulawesi Tengah	20	-	418,77	0,00	0,00
26	Sulawesi Selatan	16	-	881,71	0,00	40.424,90
27	Sulawesi Tenggara	15	-	262,00	0,00	747.880,00
28	Gorontalo	2	-	0,00	47,00	0,00
29	Sulawesi Barat	16	-	881,71	0,00	40.424,90
30	Maluku	3	-	-	-	-
31	Maluku Utara	1	-	-	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-
33	Papua	26	1	2.449,78	0,00	0,00
Indonesia		545,00	1.164,00	123.769,30	28.523,67	19.576.982,24

Sumber : Direktorat Bina Program, Ditjen SDA

Cat. : *) DTA = Daerah Tangkapan Air

Tabel : 4.4
Data Rawa di Beberapa Pulau di Indonesia
Tahun 2007

No.	Pulau	Jenis Rawa	Jumlah Rawa	Luas Potensi (Ha)	Luas Reklamasi (Ha)	Luas Belum Direklamasi (Ha)
1		2	3	4	5	6
1	Sumatera	Rawa Pasang Surut	458	1.997.465	1.423.393	478.799
		Rawa Lebak	454	970.584	464.561	551.538
		Rawa	912	2.968.049	1.887.954	1.030.337
2	Jawa	Rawa Pasang Surut	5	166.490	150.977	15.513
		Rawa Lebak	13	18.461	18.461	0
		Rawa	18	184.951	169.438	15.513
3	Kalimantan	Rawa Pasang Surut	390	1.539.615	1.090.708	448.907
		Rawa Lebak	213	424.407	400.379	24.028
		Rawa	603	1.964.022	1.491.087	472.935
4	Sulawesi	Rawa Pasang Surut	172	524.374	279.437	244.937
		Rawa Lebak	72	227.815	78.403	149.412
		Rawa	244	752.189	357.840	394.349
5	Papua	Rawa Pasang Surut	1	4.216.950	8.655	4.208.295
		Rawa Lebak	83	715.971	44.402	671.569
		Rawa	84	4.932.921	53.057	4.879.864

Sumber : Direkap dari Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Tabel : 4.5
Data Rawa di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Luas Potensi (Ha)	Luas Sudah Reklamasi (Ha)			Luas Blm Reklamasi (Ha)	L.Sdh Reklam./L.Potensi (%)*
				Pemerintah	Swasta	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	Rawa Pasang Surut	120.309	14.951	37.209	52.160	68.149	28,50
		Rawa Lebak	96.049	9.500	-	9.500	86.549	
		Rawa	216.358	24.451	37.209	61.660	154.698	
2	SumUt	Rawa Pasang Surut	247.293	28.489	119.011	147.500	99.793	60,23
		Rawa Lebak	70.382	11.637	32.192	43.829	26.553	
		Rawa	317.675	40.126	151.203	191.329	126.346	
3	SumBar	Rawa Pasang Surut	40.181	-	425	425	39.756	27,52
		Rawa Lebak	326.113	30.584	69.798	100.382	224.931	
		Rawa	366.294	30.584	70.223	100.807	264.687	
4	Riau	Rawa Pasang Surut	640.693	217.748	274.279	492.027	148.666	76,27
		Rawa Lebak	50.198	13.630	21.284	34.914	15.284	
		Rawa	690.891	231.378	295.563	526.941	163.950	
5	Jambi	Rawa Pasang Surut	233.033	-	154.552	154.552	78.481	62,37
		Rawa Lebak	38.321	-	14.696	14.696	23.625	
		Rawa	271.354	-	169.248	169.248	102.106	
6	Bengkulu	Rawa Pasang Surut	3.072	-	572	572	2.500	35,50
		Rawa Lebak	87.500	25.600	5.980	31.580	55.920	
		Rawa	90.572	25.600	6.552	32.152	58.420	
7	SumSel	Rawa Pasang Surut	455.949	384.334	45.787	430.121	25.828	89,74
		Rawa Lebak	157.846	13.900	106.785	120.685	37.161	
		Rawa	613.795	398.234	152.572	550.806	62.989	
8	Lampung	Rawa Pasang Surut	201.851	65.655	78.556	144.211	57.640	70,28
		Rawa Lebak	72.825	48.825	-	48.825	24.000	
		Rawa	274.676	114.480	78.556	193.036	81.640	
9	BaBel	Rawa Pasang Surut	55.084	-	1.825	1.825	53.259	48,38
		Rawa Lebak	71.350	6.952	52.398	59.350	12.000	
		Rawa	126.434	6.952	54.223	61.175	65.259	
10	Banten	Rawa Pasang Surut	19.511	-	14.511	14.511	5.000	74,37
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-	
		Rawa	19.511	0	14.511	14.511	5.000	
11	JaTeng	Rawa Pasang Surut	32.028	14.916	16.112	31.028	1.000	96,88
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-	
		Rawa	32.028	14.916	16.112	31.028	1.000	
12	JaTim	Rawa Pasang Surut	62.207	13.793	44.181	57.974	4.233	94,75
		Rawa Lebak	18.461	18.461	-	18.461	-	
		Rawa	80.668	32.254	44.181	76.435	4.233	
13	JaBar	Rawa Pasang Surut	52.069	7.660	39.779	47.439	4.630	91,11
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-	
		Rawa	52.069	7.660	39.779	47.439	4.630	
14	DIY	Rawa Pasang Surut	675	-	25	25	650	3,70
		Rawa Lebak	-	-	-	0	-	
		Rawa	675	0	25	25	650	
15	Bali	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	
		Rawa	0	0	0	0	0	
16	NTB	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	
		Rawa	0	0	0	0	0	
17	NTT	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	
		Rawa	0	0	0	0	0	
18	SulSel	Rawa Pasang Surut	370.555	43.227	86.777	130.004	254.100	32,62
		Rawa Lebak	54.700	8.726	-	8.726	31.575	
		Rawa	425.255	51.953	86.777	138.730	285.675	
19	Gorontalo	Rawa Pasang Surut	11.675	-	1.000	1.000	10.675	2,93
		Rawa Lebak	22.507	-	-	0	22.057	
		Rawa	34.182	0	1.000	1.000	32.732	
20	SulTeng	Rawa Pasang Surut	74.124	3.550	762	4.312	69.812	21,99
		Rawa Lebak	22.800	17.000	-	17.000	5.800	
		Rawa	96.924	20.550	762	21.312	75.612	
21	SulTra	Rawa Pasang Surut	125.352	34.145	12.166	46.311	79.041	28,81
		Rawa Lebak	116.620	20.940	2.450	23.390	93.230	
		Rawa	241.972	55.085	14.616	69.701	172.271	

Lanjutan Tabel 4.5

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Luas Potensi (Ha)	Luas Sudah Reklamasi (Ha)			Luas Blm Reklamasi (Ha)	L.Sdh Reklam./L.Potensi (%)*
				Pemerintah	Swasta	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	SulUt	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
23	SulBar	Rawa Pasang Surut	61.887	1.000	1.000	2.000	59.887	-
		Rawa Lebak	10.814	-	-	0	10.814	-
		Rawa	72.701	1.000	1.000	2.000	70.701	2,75
24	KalBar	Rawa Pasang Surut	239.541	122.886	80.422	203.308	36.233	-
		Rawa Lebak	1.585	-	1.585	1.585	-	-
		Rawa	241.126	122.886	82.007	204.893	36.233	84,97
25	KalTim	Rawa Pasang Surut	497.371	6.650	394.884	401.534	95.837	-
		Rawa Lebak	239.637	25.693	213.944	239.637	-	-
		Rawa	737.008	32.343	608.828	641.171	95.837	87,00
26	KalSel	Rawa Pasang Surut	144.700	81.623	7.077	88.700	56.000	-
		Rawa Lebak	105.124	95.566	9.558	105.124	-	-
		Rawa	249.824	177.189	16.635	193.824	56.000	77,58
27	KalTeng	Rawa Pasang Surut	658.003	292.371	104.795	397.166	260.837	-
		Rawa Lebak	78.061	11.910	42.123	54.033	24.028	-
		Rawa	736.064	304.281	146.918	451.199	284.865	61,30
28	Maluku	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
29	MalUt	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
30	Papua	Rawa Pasang Surut	4.216.950	-	8.655	8.655	4.208.295	-
		Rawa Lebak	714.771	43.202	-	43.202	671.569	-
		Rawa	4.931.721	43.202	8.655	51.857	4.879.864	1,05
31	IrJaBar	Rawa Pasang Surut	-	-	-	0	-	-
		Rawa Lebak	1.200	1.200	-	1.200	-	-
		Rawa	1.200	1.200	0	1.200	0	100,00

Sumber : Direkap dari Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Catatan : * Hasil Pengolahan dari Pusdata

Tabel : 4.6
Pemanfaatan Lahan Rawa di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Pemanfaatan Lahan Rawa (Ha)				Jumlah	Belum Dimanfaatkan (Ha)
			Sawah	Kebun	Tambak	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	Rawa Pasang Surut	-	-	51.854	-	51.854	306
		Rawa Lebak	5.452	705	-	956	7.113	2.387
		Rawa	5.452	705	51.854	956	58.967	2.693
2	Sumatera Utara	Rawa Pasang Surut	93.990	50.180	3.130	99.343	246.643	650
		Rawa Lebak	36.527	7.530	20	26.305	70.382	-
		Rawa	130.517	57.710	3.150	125.648	317.025	650
3	Sumatera Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	425	-	425	-
		Rawa Lebak	14.370	73.820	-	1.330	89.520	11.912
		Rawa	14.370	73.820	425	1.330	89.945	11.912
4	Riau	Rawa Pasang Surut	75.173	223.585	462	24.938	324.158	167.869
		Rawa Lebak	9.205	11.621	-	2.688	23.514	11.400
		Rawa	84.378	235.206	462	27.626	347.672	179.269
5	Jambi	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	154.552
		Rawa Lebak	8.342	2.665	-	170	11.177	3.519
		Rawa	8.342	2.665	0	170	11.177	158.071
6	Bengkulu	Rawa Pasang Surut	-	-	572	-	572	-
		Rawa Lebak	11.118	4.378	-	588	16.084	15.496
		Rawa	11.118	4.378	572	588	16.656	15.496
7	Sumatera Selatan	Rawa Pasang Surut	182.763	56.934	7.946	95.504	343.147	86.974
		Rawa Lebak	48.782	1.500	-	23.339	73.621	47.064
		Rawa	231.545	58.434	7.946	118.843	416.768	134.038
8	Lampung	Rawa Pasang Surut	40.949	-	98.735	2.000	141.684	2.527
		Rawa Lebak	33.438	1.615	-	3.472	38.525	10.300
		Rawa	74.387	1.615	98.735	5.472	180.209	12.827
9	Bangka Belitung	Rawa Pasang Surut	-	-	1.825	-	1.825	-
		Rawa Lebak	25.950	8.800	-	14.785	49.535	9.815
		Rawa	25.950	8.800	1.825	14.785	51.360	9.815
10	Banten	Rawa Pasang Surut	-	-	150.977	-	150.977	-
		Rawa Lebak	18.461	-	-	-	18.461	-
		Rawa	18.461	0	150.977	0	169.438	-
11	Jawa Tengah	Rawa Pasang Surut	-	-	31.028	-	31.028	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	31.028	0	31.028	-
12	Jawa Timur	Rawa Pasang Surut	-	-	57.974	-	57.974	-
		Rawa Lebak	18.461	-	-	-	18.461	-
		Rawa	18.461	0	57.974	0	76.435	-
13	Jawa Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	47.439	-	47.439	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	47.439	0	47.439	-
14	Yogyakarta	Rawa Pasang Surut	-	-	150.977	-	150.977	-
		Rawa Lebak	18.461	-	-	-	18.461	-
		Rawa	18.461	0	150.977	0	169.438	-
15	Bali	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
16	NTB	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
17	NTT	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	-
18	Sulawesi Selatan	Rawa Pasang Surut	-	-	103.688	3.209	106.897	13.491
		Rawa Lebak	2.528	-	-	1.300	3.828	657
		Rawa	2.528	0	103.688	4.509	110.725	14.148
19	Gorontalo	Rawa Pasang Surut	-	-	1.000	-	1.000	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	1.000	0	1.000	-

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Provinsi	Jenis Rawa	Pemanfaatan Lahan Rawa (Ha)				Jumlah	Belum Dimanfaatkan (Ha)
			Sawah	Kebun	Tambak	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Sulawesi Tengah	Rawa Pasang Surut	400	-	3.812	-	4.212	100
		Rawa Lebak	6.600	1.900	-	865	9.365	7.635
		Rawa	7.000	1.900	104.688	865	13.577	7.735
21	Sulawesi Tenggara	Rawa Pasang Surut	2.104	250	29.276	7.521	39.151	7.160
		Rawa Lebak	11.690	-	-	4.623	16.313	7.077
		Rawa	13.794	250	29.276	12.144	55.464	14.237
22	Sulawesi Utara	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
		Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
		Rawa	0	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	1.280	80	1.360	640
		Rawa Lebak	-	-	-	-	0	-
		Rawa	0	0	1.280	80	1.360	640
24	Kalimantan Barat	Rawa Pasang Surut	117.313	-	3.646	654	121.613	81.695
		Rawa Lebak	1.585	-	-	-	1.585	-
		Rawa	118.898	0	3.646	654	123.198	81.695
25	Kalimantan Timur	Rawa Pasang Surut	10.098	18.165	23.279	10.435	61.977	339.557
		Rawa Lebak	12.954	18.163	-	12.000	43.117	196.500
		Rawa	23.052	36.328	23.279	22.435	105.094	536.057
26	Kalimantan Selatan	Rawa Pasang Surut	52.985	7.593	2.364	11.558	74.500	14.200
		Rawa Lebak	77.026	-	-	-	77.026	28.098
		Rawa	130.011	7.593	2.364	11.558	151.526	42.298
27	Kalimantan Tengah	Rawa Pasang Surut	163.884	16.046	4.772	57.849	242.551	154.615
		Rawa Lebak	24.890	14.449	-	10.282	49.621	4.412
		Rawa	188.774	30.495	4.772	68.131	292.172	159.027
28	Papua	Rawa Pasang Surut	8.655	-	-	-	8.655	-
		Rawa Lebak	14.305	-	-	1.480	-	27.417
		Rawa	22.960	0	0	1.480	8.655	27.417
29	Irian Jaya Barat	Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	0	-
		Rawa Lebak	250	-	-	850	1.100	100
		Rawa	250	0	0	850	1.100	100

Sumber : Direkap dari Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Tabel : 4.7
Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Jaringan Irigasi
Tahun 2003

No.	Provinsi	Irigasi (Ha)				Rawa (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Total (Ha)
		Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Desa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAD	160.812,00	53.711,00	152.599,00	64.902,00	0,00			432.024,00
2	Sumatera Utara	165.670,00	191.354,00	11.308,00	917.300,00	0,00			1.285.632,00
3	Sumatera Barat	118.945,00	606.154,00	77.398,00	74.755,90	0,00			877.252,90
4	Riau	5.242,00	31.818,00	3.962,00	9.605,00	1.071.021,00			1.121.648,00
5	Jambi	84.621,00	11.588,00	7.629,00	27.034,00	139.309,00			270.181,00
6	Sumatera Selatan	93.830,00	67.659,00	32.619,00		59.830,00			253.938,00
7	Bengkulu	65.973,00	53.743,00	27.091,00	8.880,00	0,00			155.687,00
8	Lampung	304.444,00	76.950,00	4.755,00		178.567,00			564.716,00
9	Bangka Belitung	0,00	3.881,00	0,00		46.500,00			50.381,00
	SUMATERA	999.537,00	1.096.858,00	317.361,00	1.102.476,90	1.495.227,00	0,00	0,00	5.011.459,90
10	DKI Jakarta	75,00	6.692,00	252,00		0,00			7.019,00
11	Jawa Barat	500.329,00	88.704,00	53.680,00	97.395,00	0,00	45.867,00		785.975,00
12	Jawa Tengah	692.899,30	65.193,30	176.625,30	13.159,20	0,00	84.960,00		1.032.837,10
13	DI. Yogyakarta	30.230,00	21.142,00	12.412,00	6.918,00	0,00			70.702,00
14	Jawa Timur	634.716,00	148.576,00	79.335,00	20.933,00	0,00	194.826,00		1.078.386,00
15	Banten	45.677,00	51.017,00	5.457,00	56.229,00	0,00	9.634,00		168.014,00
	JAWA	1.903.926,30	381.324,30	327.761,30	194.634,20	0,00	335.287,00	0,00	3.142.933,10
16	Bali	33.594,00	56.106,00	0,00		0,00			89.700,00
17	Nusa Tenggara Barat	230.425,00	191.345,00	3.782,00	7.692,60	0,00	13.005,00	17.954,00	464.203,60
18	Nusa Tenggara Timur	60.839,00	25.403,00	21.395,00		0,00			107.637,00
	BALI + NUSA TENGGARA	324.858,00	272.854,00	25.177,00	7.692,60	0,00	13.005,00	17.954,00	661.540,60
19	Kalimantan Barat	14.697,00	39.385,00	39.953,10		236.307,00	64.405,00	653.707,00	1.048.454,10
20	Kalimantan Tengah	18.467,00	891,00	11.763,00		191.450,00	6.064,00		228.635,00
21	Kalimantan Selatan	149.148,00	2.946,00	43.564,00		0,00	43.144,00		238.802,00
22	Kalimantan Timur	1.500,00	8.692,00	23.182,00		72.227,00	52.580,00		158.181,00
	KALIMANTAN	183.812,00	51.914,00	118.462,10	0,00	499.984,00	166.193,00	653.707,00	1.674.072,10
23	Sulawesi Utara	63.361,00	22.537,00	3.280,00		0,00			89.178,00
24	Sulawesi Tengah	164.729,00	30.973,00	14.499,00	4.252,00	19.000,00			233.453,00
25	Sulawesi Selatan	221.595,00	59.409,00	50.896,00	38.409,00	0,00	258.112,00		628.421,00
26	Sulawesi Tenggara	66.302,00	21.684,00	8.630,00		0,00			96.616,00
27	Gorontalo	29.197,00	14.872,80	1.195,00		0,00			45.264,80
	SULAWESI	545.184,00	149.475,80	78.500,00	42.661,00	19.000,00	258.112,00	0,00	1.092.932,80
28	Maluku	20.714,00	900,00	15.363,00		0,00			36.977,00
29	Maluku Utara	2.300,00	0,00	0,00		0,00			2.300,00
30	Papua	12.160,00	3.959,00	6.031,00		0,00			22.150,00
	MALUKU DAN PAPUA	35.174,00	4.859,00	21.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.427,00
	INDONESIA	3.992.491,30	1.957.285,10	888.655,40	1.347.464,70	2.014.211,00	772.597,00	671.661,00	11.644.365,50

Sumber : Ditjend. Sumber Daya Air (Data diambil Tahun 2004-2005)

Tabel 4.8
Luas dan Jumlah Irigasi dari Berbagai Tingkatan di Seluruh Provinsi di Indonesia
Tahun 2005

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Luas Fungsional (Ada Jaringan Utama) - Ha					Luas Belum Ada Jaringan Utama - Ha			
					Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		Jumlah	Sudah Sawah	Belum Sawah	Jumlah
					Optimal	Blm Optimal		Sawah	Blm Sawah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NAD	Teknis	254	229.859,00	209.612,00	4.550,00	1.570,00	0,00	0,00	215.732,00	11.159,00	1.651,00	12.810,00
		Semi Teknis	117	50.825,00	30.796,00	6.398,00	1.195,00	200,00	0,00	38.589,00	11.028,00	1.208,00	12.236,00
		Sederhana	302	142.323,00	44.478,00	25.440,00	4.811,00	265,00	0,00	74.994,00	25.427,00	41.995,00	67.422,00
		Total	673	423.007,00	284.886,00	36.388,00	7.576,00	465,00	0,00	329.315,00	47.614,00	44.854,00	92.468,00
2	SUMATERA UTARA	Teknis	251	202.470,00	176.032,00	9.550,00	8.504,00	1.484,00	0,00	195.570,00	1.395,00	5.505,00	6.900,00
		Semi Teknis	621	190.027,00	133.991,00	13.763,00	23.577,00	2.078,00	4,00	173.413,00	5.384,00	12.118,00	17.502,00
		Sederhana	36	11.308,00	2.744,00	741,00	580,00	73,00	0,00	4.138,00	769,00	6.401,00	7.170,00
		Total	908	403.805,00	312.767,00	24.054,00	32.661,00	3.635,00	4,00	373.121,00	7.548,00	24.024,00	31.572,00
3	SUMATERA BARAT	Teknis	884	252.674,59	226.387,59	3.632,00	10.884,00	439,00	152,00	241.494,59	4.293,00	6.147,00	10.440,00
		Semi Teknis	406	73.606,18	63.174,68	2.023,00	4.365,50	1.096,00	67,00	70.726,18	963,00	1.634,00	2.597,00
		Sederhana	470	75.102,62	60.207,62	545,00	1.168,00	236,00	11,00	62.167,62	5.563,00	7.372,00	12.935,00
		Total	1760	401.383,39	349.769,89	6.200,00	16.417,50	1.771,00	230,00	374.388,39	10.819,00	15.153,00	25.972,00
4	RIAU	Teknis	78	35.631,00	31.856,00	142,00	199,00	0,00	200,00	32.397,00	2.841,00	393,00	3.234,00
		Semi Teknis	83	40.600,00	11.620,00	3.107,00	16.209,00	1.146,00	779,00	32.861,00	3.187,00	4.552,00	7.739,00
		Sederhana	33	3.962,00	1.927,00	1.735,00	300,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00
		Total	194	80.193,00	45.403,00	4.984,00	16.708,00	1.146,00	979,00	69.220,00	6.028,00	4.945,00	10.973,00
5	JAMBI	Teknis	463	171.885,00	98.070,00	243,00	40,00	0,00	0,00	98.353,00	71.981,00	1.551,00	73.532,00
		Semi Teknis	48	10.424,00	10.045,00	132,00	247,00	0,00	0,00	10.424,00	0,00	0,00	0,00
		Sederhana	40	7.511,00	4.341,00	20,00	2.304,00	746,00	0,00	7.411,00	0,00	100,00	100,00
		Total	551	189.820,00	112.456,00	395,00	2.591,00	746,00	0,00	116.188,00	71.981,00	1.651,00	73.632,00
6	SUMATERA SELATAN	Teknis	174	393.569,00	362.392,00	0,00	110,00	0,00	0,00	362.502,00	22.022,00	9.045,00	31.067,00
		Semi Teknis	110	68.981,00	54.467,00	2.667,00	3.504,00	0,00	0,00	60.638,00	1.536,00	6.807,00	8.343,00
		Sederhana	107	28.464,00	10.956,00	350,00	1.806,00	0,00	0,00	13.112,00	4.331,00	11.021,00	15.352,00
		Total	391	491.014,00	427.815,00	3.017,00	5.420,00	0,00	0,00	436.252,00	27.889,00	26.873,00	54.762,00
7	BENGKULU	Teknis	38	78.868,00	54.846,00	3.813,00	10.682,00	1.395,00	0,00	70.736,00	7.114,00	504,00	7.618,00
		Semi Teknis	332	52.186,00	23.129,00	9.650,00	15.108,00	542,00	0,00	48.429,00	2.622,00	1.135,00	3.757,00
		Sederhana	221	27.606,00	6.735,00	7.785,00	9.606,00	90,00	0,00	24.216,00	2.839,00	525,00	3.364,00
		Total	591	158.660,00	84.710,00	21.248,00	35.396,00	2.027,00	0,00	143.381,00	12.575,00	2.164,00	14.739,00

Lanjutan Tabel 4.8

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Luas Fungsional (Ada Jaringan Utama) - Ha					Luas Belum Ada Jaringan Utama - Ha			
					Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		Jumlah	Sudah Sawah	Belum Sawah	Jumlah
					Optimal	Blm Optimal		Sawah	Blm Sawah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	LAMPUNG	Teknis	162	401.140,00	318.019,00	7.136,00	29.317,00	273,00	0,00	354.745,00	46.395,00	0,00	46.395,00
		Semi Teknis	89	66.590,00	48.399,00	200,00	12.421,00	191,00	0,00	61.211,00	5.379,00	0,00	5.379,00
		Sederhana	14	3.723,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	940,00	0,00	940,00
		Total	265	471.453,00	369.201,00	7.336,00	41.738,00	464,00	0,00	418.739,00	52.714,00	0,00	52.714,00
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Teknis	30	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00
		Semi Teknis	9	3.905,00	2.717,00	0,00	846,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00	342,00	342,00
		Sederhana								0,00			0,00
10	DKI JAKARTA	Total	39	22.961,00	21.773,00	0,00	846,00	0,00	0,00	22.619,00	0,00	342,00	342,00
		Teknis	1	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00
		Semi Teknis	23	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00
		Sederhana	4	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
11	JAWA BARAT	Total	28	8.412,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00
		Teknis	462	1.165.482,00	950.756,00	5.236,00	2.628,00	3.419,00	0,00	962.039,00	202.492,00	316,00	202.808,00
		Semi Teknis	262	82.238,00	75.542,00	2.837,00	1.488,00	1.565,00	0,00	81.432,00	806,00	0,00	806,00
		Sederhana	462	53.563,00	44.034,00	5.138,00	331,00	3.048,00	0,00	52.551,00	200,00	757,00	957,00
12	JAWA TENGAH	Total	1186	1.301.283,00	1.070.332,00	13.211,00	4.447,00	8.032,00	0,00	1.096.022,00	203.498,00	1.073,00	204.571,00
		Teknis	807	698.504,95	612.013,58	32.834,75	14.551,62	2.887,00	0,00	662.286,95	33.994,00	2.224,00	36.218,00
		Semi Teknis	767	72.989,46	62.411,26	962,00	7.730,20	336,00	0,00	71.439,46	0,00	1.550,00	1.550,00
		Sederhana	4438	178.377,33	152.218,52	23.180,82	401,99	392,00	0,00	176.193,33	2.025,00	159,00	2.184,00
13	DI YOGYAKARTA	Total	6012	949.871,74	826.643,36	56.977,57	22.683,81	3.615,00	0,00	909.919,74	36.019,00	3.933,00	39.952,00
		Teknis	300	40.811,50	40.542,50	16,00	0,00	163,00	0,00	40.721,50	90,00	0,00	90,00
		Semi Teknis	228	22.408,00	20.907,00	113,00	154,00	139,00	0,00	21.313,00	1.034,00	61,00	1.095,00
		Sederhana	94	12.368,00	10.037,00	489,00	1.811,00	31,00	0,00	12.368,00	0,00	0,00	0,00
14	JAWA TIMUR	Total	622	75.587,50	71.486,50	618,00	1.965,00	333,00	0,00	74.402,50	1.124,00	61,00	1.185,00
		Teknis	1962	634.755,00	554.359,00	755,00	195,00	20.122,00	0,00	575.431,00	59.236,00	88,00	59.324,00
		Semi Teknis	926	148.576,00	144.348,00	3.079,00	292,00	705,00	0,00	148.424,00	0,00	152,00	152,00
		Sederhana	1990	79.336,00	77.333,00	786,00	23,00	352,00	0,00	78.494,00	396,00	446,00	842,00
15	BANTEN	Total	4878	862.667,00	776.040,00	4.620,00	510,00	21.179,00	0,00	802.349,00	59.632,00	686,00	60.318,00
		Teknis	745	183.323,20	174.540,20	1.404,00	0,00	0,00	0,00	175.944,20	4.820,00	0,00	4.820,00
		Semi Teknis	52	50.279,00	47.474,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	50.279,00	0,00	0,00	0,00
		Sederhana	11	4.992,00	4.657,00	0,00	0,00	335,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00
Total	808	238.594,20	226.671,20	1.404,00	0,00	3.140,00	0,00	231.215,20	4.820,00	0,00	4.820,00		

Lanjutan Tabel 4.8

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Luas Fungsional (Ada Jaringan Utama) - Ha					Luas Belum Ada Jaringan Utama - Ha			
					Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		Jumlah	Sudah Sawah	Belum Sawah	Jumlah
					Optimal	Blm Optimal		Sawah	Blm Sawah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	BALI	Teknis	151	48.986,00	46.318,00	0,00	1.761,00	638,00	0,00	48.717,00	200,00	0,00	200,00
		Semi Teknis	309	62.289,37	54.109,37	67,00	3.707,00	966,00	0,00	58.849,37	901,00	0,00	901,00
		Sederhana								0,00			0,00
		Total	460	111.275,37	100.427,37	67,00	5.468,00	1.604,00	0,00	107.566,37	1.101,00	0,00	1.101,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	Teknis	122	230.425,00	101.907,00	2.191,00	4.673,00	5.152,00	0,00	113.923,00	116.502,00	0,00	116.502,00
		Semi Teknis	260	191.345,00	81.152,00	2.246,00	8.275,00	5.288,00	0,00	96.961,00	94.384,00	0,00	94.384,00
		Sederhana	11	3.782,00	827,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	2.053,00	733,00	996,00	1.729,00
		Total	393	425.552,00	183.886,00	4.437,00	14.174,00	10.440,00	0,00	212.937,00	211.619,00	996,00	212.615,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Teknis	113	73.196,00	15.977,00	762,00	941,00	70,00	0,00	17.750,00	50.736,00	4.710,00	55.446,00
		Semi Teknis	99	37.641,00	18.201,00	6.266,00	3.053,00	757,00	131,00	28.408,00	2.104,00	7.129,00	9.233,00
		Sederhana	203	47.118,00	15.096,00	6.275,00	2.064,00	102,00	90,00	23.627,00	4.753,00	18.738,00	23.491,00
		Total	415	157.955,00	49.274,00	13.303,00	6.058,00	929,00	221,00	69.785,00	57.593,00	30.577,00	88.170,00
19	KALIMANTAN BARAT	Teknis	29	14.697,00	3.024,00	2.820,00	2.082,00	0,00	0,00	7.926,00	6.771,00	0,00	6.771,00
		Semi Teknis	214	39.407,00	27.851,00	9.439,00	1.080,00	170,00	0,00	38.540,00	489,00	378,00	867,00
		Sederhana	358	40.365,06	35.445,00	3.741,06	873,00	16,00	0,00	40.075,06	290,00	0,00	290,00
		Total	601	94.469,06	66.320,00	16.000,06	4.035,00	186,00	0,00	86.541,06	7.550,00	378,00	7.928,00
20	KALIMANTAN TENGAH	Teknis	17	19.074,00	2.691,00	2.197,00	1.919,00	0,00	0,00	6.807,00	3.746,00	8.521,00	12.267,00
		Semi Teknis	3	891,00	370,00	50,00	171,00	0,00	0,00	591,00	55,00	245,00	300,00
		Sederhana	15	11.763,00	1.618,00	1.183,00	1.497,00	0,00	0,00	4.298,00	2.554,00	4.911,00	7.465,00
		Total	35	31.728,00	4.679,00	3.430,00	3.587,00	0,00	0,00	11.696,00	6.355,00	13.677,00	20.032,00
21	KALIMANTAN SELATAN	Teknis	29	149.148,00	118.975,00	5.961,00	846,00	0,00	0,00	125.782,00	23.366,00	0,00	23.366,00
		Semi Teknis	8	2.946,00	2.178,00	611,00	157,00	0,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00
		Sederhana	60	43.564,00	30.107,00	3.082,00	982,00	3,00	0,00	34.174,00	9.305,00	85,00	9.390,00
		Total	97	195.658,00	151.260,00	9.654,00	1.985,00	3,00	0,00	162.902,00	32.671,00	85,00	32.756,00
22	KALIMANTAN TIMUR	Teknis	4	1.500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		Semi Teknis	32	8.692,00	3.105,00	1.208,00	1.636,00	326,00	0,00	6.275,00	2.331,00	86,00	2.417,00
		Sederhana	84	23.182,00	3.378,00	4.965,00	4.148,00	503,00	0,00	12.994,00	8.297,00	1.891,00	10.188,00
		Total	120	33.374,00	6.683,00	6.373,00	5.784,00	829,00	0,00	19.669,00	10.628,00	3.077,00	13.705,00
23	SULAWESI UTARA	Teknis	105	63.361,00	21.032,54	296,41	5.380,22	1.502,86	0,00	28.212,03	35.148,98	0,00	35.148,98
		Semi Teknis	59	22.537,00	15.453,00	2.505,00	2.801,00	851,00	0,00	21.610,00	657,00	270,00	927,00
		Sederhana	32	3.280,00	1.544,00	772,00	220,00	18,00	0,00	2.554,00	432,00	294,00	726,00
		Total	196	89.178,00	38.029,54	3.573,41	8.401,22	2.371,86	0,00	52.376,03	36.237,98	564,00	36.801,98

Lanjutan Tabel 4.8

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Luas Fungsional (Ada Jaringan Utama) - Ha					Luas Belum Ada Jaringan Utama - Ha			
					Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		Jumlah	Sudah Sawah	Belum Sawah	Jumlah
					Optimal	Blm Optimal		Sawah	Blm Sawah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	SULAWESI TENGAH	Teknis	132	177.903,00	72.842,00	1.094,00	32.387,00	1.115,00	508,00	107.946,00	67.267,00	2.690,00	69.957,00
		Semi Teknis	64	31.700,00	19.164,00	0,00	9.474,00	127,00	75,00	28.840,00	87,00	2.773,00	2.860,00
		Sederhana	42	14.499,00	7.532,00	66,00	5.732,00	200,00	44,00	13.574,00	7,00	918,00	925,00
		Total	238	224.102,00	99.538,00	1.160,00	47.593,00	1.442,00	627,00	150.360,00	67.361,00	6.381,00	73.742,00
25	SULAWESI SELATAN	Teknis	64	221.595,00	180.872,00	15.778,00	2.384,00	14.596,00	0,00	213.630,00	6.401,00	1.564,00	7.965,00
		Semi Teknis	129	59.409,00	43.105,00	4.884,00	1.095,00	6.000,00	0,00	55.084,00	2.438,00	1.887,00	4.325,00
		Sederhana	41	50.896,00	9.562,00	431,00	928,00	854,00	0,00	11.775,00	31.131,00	7.990,00	39.121,00
		Total	234	331.900,00	233.539,00	21.093,00	4.407,00	21.450,00	0,00	280.489,00	39.970,00	11.441,00	51.411,00
26	SULAWESI TENGGARA	Teknis	109	128.816,00	57.478,00	13.299,00	2.227,00	3.921,00	0,00	76.925,00	19.637,00	786,00	20.423,00
		Semi Teknis	69	32.477,00	18.117,00	6.550,00	1.873,00	1.367,00	0,00	27.907,00	4.314,00	256,00	4.570,00
		Sederhana	75	9.690,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	5.460,00	0,00	5.460,00
		Total	253	170.983,00	78.625,00	19.849,00	4.100,00	5.288,00	0,00	107.862,00	29.411,00	1.042,00	30.453,00
27	GORONTALO	Teknis	14	29.197,00	7.705,00	0,00	2.195,50	1.040,50	0,00	10.941,00	18.256,00	0,00	18.256,00
		Semi Teknis	14	11.999,00	7.056,75	58,00	1.289,00	319,25	0,00	8.723,00	3.276,00	0,00	3.276,00
		Sederhana	1	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		Total	29	42.391,00	14.761,75	58,00	3.484,50	1.359,75	0,00	19.664,00	22.727,00	0,00	22.727,00
28	MALUKU	Teknis	13	20.714,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00	8.539,00	0,00	8.539,00
		Semi Teknis	1	900,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	530,00	0,00	530,00
		Sederhana	14	15.363,00	8.474,00	4.121,00	1.597,00	881,00	0,00	15.073,00	180,00	110,00	290,00
		Total	28	36.977,00	21.019,00	4.121,00	1.597,00	881,00	0,00	27.618,00	9.249,00	110,00	9.359,00
29	MALUKU UTARA	Teknis	3	4.325,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.075,00	0,00	2.075,00
		Semi Teknis								0,00			0,00
		Sederhana								0,00			0,00
		Total	3	4.325,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.075,00	0,00	2.075,00
30	PAPUA	Teknis	4	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
		Semi Teknis	2	3.959,00	550,00	850,00	1.259,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		Sederhana	9	6.031,00	1.572,00	0,00	809,00	0,00	0,00	2.381,00	3.650,00	0,00	3.650,00
		Total	15	22.150,00	2.122,00	850,00	2.068,00	0,00	0,00	5.040,00	15.810,00	1.300,00	17.110,00
Indonesia	Teknis	7.520	5.704.594,24	4.473.396,40	113.910,16	135.476,34	58.217,36	860,00	4.781.860,27	838.636,98	46.795,00	885.431,98	
	Semi Teknis	5.336	1.446.519,01	1.026.495,06	79.665,00	123.006,70	26.974,25	1.056,00	1.257.197,01	143.505,00	43.883,00	187.388,00	
	Sederhana	9.167	899.616,01	540.888,14	90.845,88	43.217,99	8.145,00	145,00	683.242,01	110.477,00	104.709,00	215.186,00	
	Total	22.023	8.050.729,26	6.040.779,60	284.421,04	301.701,03	93.336,61	2.061,00	6.722.299,28	1.092.618,98	195.387,00	1.288.005,98	

Sumber : Unit Data Sumber Daya Air (Data diambil tahun 2006)

Tabel 4.9
Skala Irigasi dari Berbagai Tingkatan di Seluruh Provinsi Indonesia
Tahun 2005

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Teknis	205	40.528,00	34	64.443,00	15	124.888,00	254	229.859,00
		Semi Teknis	106	26.192,00	10	14.753,00	1	9.880,00	117	50.825,00
		Sederhana	280	59.946,00	17	29.593,00	5	52.784,00	302	142.323,00
		Total	591	126.666,00	61	108.789,00	21	187.552,00	673	423.007,00
2	SUMATERA UTARA	Teknis	202	68.656,00	34	57.562,00	15	76.252,00	251	202.470,00
		Semi Teknis	597	144.924,00	20	29.773,00	4	15.330,00	621	190.027,00
		Sederhana	34	6.208,00	1	1.100,00	1	4.000,00	36	11.308,00
		Total	833	219.788,00	55	88.435,00	20	95.582,00	908	403.805,00
3	SUMATERA BARAT	Teknis	846	106.009,00	23	38.007,73	15	108.661,00	884	252.677,73
		Semi Teknis	400	66.315,00	6	7.291,00			406	73.606,00
		Sederhana	461	59.346,00	9	15.757,00			470	75.103,00
		Total	1707	231.670,00	38	61.055,73	15	108.661,00	1.760	401.386,73
4	RIAU	Teknis	69	16.716,00	8	13.552,00	1	5.363,00	78	35.631,00
		Semi Teknis	76	24.450,00	6	10.968,00	1	5.182,00	83	40.600,00
		Sederhana	33	3.962,00					33	3.962,00
		Total	178	45.128,00	14	24.520,00	2	10.545,00	194	80.193,00
5	JAMBI	Teknis	425	41.681,00	26	48.267,00	12	81.937,00	463	171.885,00
		Semi Teknis	47	9.388,00	1	1.036,00			48	10.424,00
		Sederhana	40	7.511,00					40	7.511,00
		Total	512	58.580,00	27	49.303,00	12	81.937,00	551	189.820,00
6	SUMATERA SELATAN	Teknis	128	21.761,00	14	25.028,00	32	346.780,00	174	393.569,00
		Semi Teknis	98	28.055,00	7	11.236,00	5	29.690,00	110	68.981,00
		Sederhana	103	14.406,00	2	4.000,00	2	10.058,00	107	28.464,00
		Total	329	64.222,00	23	40.264,00	39	386.528,00	391	491.014,00
7	BENGKULU	Teknis	19	6.461,00	10	15.988,00	9	56.419,00	38	78.868,00
		Semi Teknis	328	46.662,00	4	5.524,00			332	52.186,00
		Sederhana	218	22.006,00	3	5.600,00			221	27.606,00
		Total	565	75.129,00	17	27.112,00	9	56.419,00	591	158.660,00

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	LAMPUNG	Teknis	92	30.446,00	23	36.616,00	47	334.078,00	162	401.140,00
		Semi Teknis	80	17.179,00	5	10.484,00	4	38.927,00	89	66.590,00
		Sederhana	14	3.723,00					14	3.723,00
		Total	186	51.348,00	28	47.100,00	51	373.005,00	265	471.453,00
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Teknis	25	8.270,00	4	6.286,00	1	4.500,00	30	19.056,00
		Semi Teknis	8	1.888,00	1	2.017,00			9	3.905,00
		Sederhana							0	0,00
		Total	33	10.158,00	5	8.303,00	1	4.500,00	39	22.961,00
10	DKI JAKARTA	Teknis			1	1.468,00			1	1.468,00
		Semi Teknis	20	3.442,00	3	3.250,00			23	6.692,00
		Sederhana	4	252,00					4	252,00
		Total	24	3.694,00	4	4.718,00	0	0,00	28	8.412,00
11	JAWA BARAT	Teknis	365	115.156,00	57	94.352,00	40	955.974,00	462	1.165.482,00
		Semi Teknis	245	53.860,00	15	20.835,00	2	7.543,00	262	82.238,00
		Sederhana	459	49.951,00	3	3.612,00			462	53.563,00
		Total	1069	218.967,00	75	118.799,00	42	963.517,00	1.186	1.301.283,00
12	JAWA TENGAH	Teknis	692	164.676,00	61	99.318,00	54	434.511,00	807	698.505,00
		Semi Teknis	763	65.787,88	4	7.202,00			767	72.989,88
		Sederhana	4431	158.002,41	5	7.884,00	2	12.490,00	4.438	178.376,41
		Total	5886	388.466,29	70	114.404,00	56	447.001,00	6.012	949.871,29
13	DI YOGYAKARTA	Teknis	287	16.781,00	12	18.212,00	1	5.818,00	300	40.811,00
		Semi Teknis	225	17.798,00	3	4.610,00			228	22.408,00
		Sederhana	93	2.457,00			1	9.911,00	94	12.368,00
		Total	605	37.036,00	15	22.822,00	2	15.729,00	622	75.587,00
14	JAWA TIMUR	Teknis	1823	253.348,00	103	173.067,00	36	208.340,00	1.962	634.755,00
		Semi Teknis	911	76.723,00	13	19.392,00	2	52.461,00	926	148.576,00
		Sederhana	1984	60.416,00	5	8.472,00	1	10.448,00	1.990	79.336,00
		Total	4718	390.487,00	121	200.931,00	39	271.249,00	4.878	862.667,00
15	BANTEN	Teknis	724	80.590,00	14	24.141,00	7	78.592,00	745	183.323,00
		Semi Teknis	49	13.439,00	2	2.959,00	1	33.881,00	52	50.279,00
		Sederhana	10	2.880,00	1	2.112,00			11	4.992,00
		Total	783	96.909,00	17	29.212,00	8	112.473,00	808	238.594,00

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	BALI	Teknis	143	19.597,00	5	5.574,00	3	23.814,00	151	48.985,00
		Semi Teknis	299	43.088,00	9	13.237,00	1	5.964,00	309	62.289,00
		Sederhana							0	0,00
		Total	442	62.685,00	14	18.811,00	4	29.778,00	460	111.274,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	Teknis	57	25.320,00	42	71.049,00	23	134.056,00	122	230.425,00
		Semi Teknis	210	97.615,00	44	62.897,00	6	30.833,00	260	191.345,00
		Sederhana	10	2.632,00	1	1.150,00			11	3.782,00
		Total	277	125.567,00	87	135.096,00	29	164.889,00	393	425.552,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Teknis	92	30.500,00	19	32.409,00	2	10.287,00	113	73.196,00
		Semi Teknis	90	26.227,00	9	11.414,00			99	37.641,00
		Sederhana	198	40.456,00	5	6.662,00			203	47.118,00
		Total	380	97.183,00	33	50.485,00	2	10.287,00	415	157.955,00
19	KALIMANTAN BARAT	Teknis	24	7.150,00	5	7.547,00			29	14.697,00
		Semi Teknis	214	39.407,00					214	39.407,00
		Sederhana	357	39.365,00	1	1.000,00			358	40.365,00
		Total	595	85.922,00	6	8.547,00	0	0,00	601	94.469,00
20	KALIMANTAN TENGAH	Teknis	12	5.865,00	4	6.074,00	1	7.135,00	17	19.074,00
		Semi Teknis	3	891,00					3	891,00
		Sederhana	12	3.327,00	2	2.400,00	1	6.036,00	15	11.763,00
		Total	27	10.083,00	6	8.474,00	2	13.171,00	35	31.728,00
21	KALIMANTAN SELATAN	Teknis	4	2.039,00	10	20.298,00	15	126.811,00	29	149.148,00
		Semi Teknis	7	1.781,00	1	1.165,00			8	2.946,00
		Sederhana	46	14.063,00	12	20.735,00	2	8.766,00	60	43.564,00
		Total	57	17.883,00	23	42.198,00	17	135.577,00	97	195.658,00
22	KALIMANTAN TIMUR	Teknis	3	0,00	1	1.500,00			4	1.500,00
		Semi Teknis	31	7.525,00	1	1.167,00			32	8.692,00
		Sederhana	80	17.618,00	4	5.564,00			84	23.182,00
		Total	114	25.143,00	6	8.231,00	0	0,00	120	33.374,00
23	SULAWESI UTARA	Teknis	92	24.175,00	8	14.959,00	5	24.227,00	105	63.361,00
		Semi Teknis	56	17.321,00	3	5.216,00			59	22.537,00
		Sederhana	32	3.280,00					32	3.280,00
		Total	180	44.776,00	11	20.175,00	5	24.227,00	196	89.178,00

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	SULAWESI TENGAH	Teknis	79	35.841,00	40	69.725,00	13	72.337,00	132	177.903,00
		Semi Teknis	58	22.794,00	6	8.906,00			64	31.700,00
		Sederhana	42	14.499,00					42	14.499,00
		Total	179	73.134,00	46	78.631,00	13	72.337,00	238	224.102,00
25	SULAWESI SELATAN	Teknis	18	7.986,00	15	29.954,00	31	183.655,00	64	221.595,00
		Semi Teknis	120	44.052,00	8	10.327,00	1	5.030,00	129	59.409,00
		Sederhana	28	9.600,00	7	10.292,00	6	31.004,00	41	50.896,00
		Total	166	61.638,00	30	50.573,00	38	219.689,00	234	331.900,00
26	SULAWESI TENGGARA	Teknis	83	39.219,00	22	37.553,00	4	52.044,00	109	128.816,00
		Semi Teknis	64	23.958,00	5	8.519,00			69	32.477,00
		Sederhana	74	8.490,00	1	1.200,00			75	9.690,00
		Total	221	71.667,00	28	47.272,00	4	52.044,00	253	170.983,00
27	GORONTALO	Teknis	4	2.264,00	8	13.285,00	2	13.648,00	14	29.197,00
		Semi Teknis	10	4.057,00	3	4.572,00	1	3.370,00	14	11.999,00
		Sederhana			1	1.195,00			1	1.195,00
		Total	14	6.321,00	12	19.052,00	3	17.018,00	29	42.391,00
28	MALUKU	Teknis	6	4.336,00	6	12.378,00	1	4.000,00	13	20.714,00
		Semi Teknis	1	900,00					1	900,00
		Sederhana	8	4.014,00	5	6.423,00	1	4.926,00	14	15.363,00
		Total	15	9.250,00	11	18.801,00	2	8.926,00	28	36.977,00
29	MALUKU UTARA	Teknis	1	600,00	2	3.725,00			3	4.325,00
		Semi Teknis							0	0,00
		Sederhana							0	0,00
		Total	1	600,00	2	3.725,00	0	0,00	3	4.325,00
30	PAPUA	Teknis	1	210,00	1	2.500,00	2	9.450,00	4	12.160,00
		Semi Teknis	1	959,00	1	3.000,00			2	3.959,00
		Sederhana	7	1.531,00	2	4.500,00			9	6.031,00
		Total	9	2.700,00	4	10.000,00	2	9.450,00	15	22.150,00
Indonesia		Teknis	6.521	1.176.181,00	612	1.044.837,73	387	3.483.577,00	7.520	5.704.595,73
		Semi Teknis	5.117	926.677,88	190	281.750,00	29	238.091,00	5.336	1.446.518,88
		Sederhana	9.058	609.941,41	87	139.251,00	22	150.423,00	9.167	899.615,41
		Total	20.696	2.712.800,29	889	1.465.838,73	438	3.872.091,00	22.023	8.050.730,02

Sumber : Unit Data Sumber Daya Air (Data diambil tahun 2006)

Tabel 4.10
Resume Luasan Irigasi di Seluruh Indonesia
Tahun 2006

No.	Provinsi	< 1000 Ha				(1000 - 3000) Ha				>3000 Ha				Luas Total
		UTUH KAB/KOTA	LINTAS KAB/KOTA	LINTAS PROP	JUMLAH	UTUH KAB/KOTA	LINTAS KAB/KOTA	LINTAS PROP	JUMLAH	UTUH KAB/KOTA	LINTAS KAB/KOTA	LINTAS PROP	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NAD*	186.608,00	306,00	0,00	186.914,00	74.376,00	3.138,00	0,00	77.514,00	112.953,00	20.260,00	0	133.213,00	397.641,00
2	Sumatra Utara*	206.948,47	3.865,00	0,00	210.813,47	128.088,00	2.846,00	0,00	130.934,00	88.645,69	6.300,00	0	94.945,69	436.693,16
3	Sumatra Barat	157.205,91	6.275,00	0,00	163.480,91	32.633,00	0,00	0,00	32.633,00	74.570,00	3.193,00	0	77.763,00	273.876,91
4	Riau*	64.386,00	0	0	64.386,00	168.315,00	0	0	168.315,00	61.558,00	0	0	61.558,00	294.259,00
5	Jambi*	19.401,00	0,00	0,00	19.401,00	19.733,00	0,00	0,00	19.733,00	172.338,00	0,00	0	172.338,00	211.472,00
6	Sumatera Selatan*	53.159,00	0,00	0,00	53.159,00	85.091,00	0,00	0,00	85.091,00	539.153,00	0,00	0	539.153,00	677.403,00
7	Bengkulu	45.451,00	0,00	0,00	45.451,00	12.733,00	514,00	0,00	13.247,00	18.657,00	0,00	0	18.657,00	77.355,00
8	Lampung*	122.457,69	250,00	0,00	122.707,69	20.559,00	3.601,00	0,00	24.160,00	111.506,00	94.547,00	8.100	214.153,00	361.020,69
9	Kep. Bangka Belitung*	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	8.595,00	0,00	0,00	8.595,00	3.108,00	0,00	0	3.108,00	19.943,00
10	Jawa Barat*	97.339,00	6.964,00	947,00	105.250,00	64.339,00	8.720,00	0	73.059,00	47.701,00	114.136,00	242.523	404.360,00	582.669,00
11	Jawa Tengah*	456.069,00	21.786,85	1.189,00	479.044,85	61.552,93	25.681,69	61,00	87.295,62	131.430,86	145.885,18	49.204	326.520,04	892.860,51
12	DI Yogyakarta*	39.381,96	4.541,28	40,36	43.963,60	14.716,00	0,00	0,00	14.716,00	0,00	5.158,00	0	5.158,00	63.837,60
13	Jawa Timur*	434.401,00	22.271,00	537,00	457.209,00	144.833,00	20.341,00	0,00	165.174,00	142.870,00	142.094,00	39	285.003,00	907.386,00
14	Banten*	87.075,00	1.359,00	0,00	88.434,00	13.673,00	5.442,00	0,00	19.115,00	14.560,00	51.104,00	0	65.664,00	173.213,00
15	Bali	64.893,00	0,00	0,00	64.893,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0	0,00	72.343,00
16	Nusa Tenggara Barat	82.833,00	0,00	0,00	82.833,00	56.625,00	0,00	0,00	56.625,00	33.802,00	0,00	0	33.802,00	173.260,00
17	Nusa Tenggara Timur	29.631,00	0,00	0,00	29.631,00	37.353,00	0,00	0,00	37.353,00	36.071,00	0,00	0	36.071,00	103.055,00
18	Kalimantan Barat*	107.325,29	0,00	0,00	107.325,29	77.766,00	0,00	0,00	77.766,00	119.680,00	0,00	0	119.680,00	304.771,29
19	Kalimantan Tengah*	71.108,00	0,00	0,00	71.108,00	99.168,00	0,00	0,00	99.168,00	68.602,00	0,00	11.531	80.133,00	250.409,00
20	Kalimantan Selatan*	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00	93.425,00	0,00	0,00	93.425,00	115.063,00	0,00	0	115.063,00	328.538,00
21	Kalimantan Timur*	39.891,00	0,00	0,00	39.891,00	38.766,00	0,00	0,00	38.766,00	4.000,00	0,00	0	4.000,00	82.657,00
22	Sulawesi Utara*	31.532,00	0,00	824,00	32.356,00	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	13.181,00	0,00	0	13.181,00	57.403,00
23	Gorontalo	7.838,00	425,00	0,00	8.263,00	5.545,54	2.263,00	0,00	7.808,54	0,00	0,00	0	0,00	16.071,54
24	Sulawesi Tengah*	52.727,71	0,00	0,00	52.727,71	34.139,36	0,00	0,00	34.139,36	17.568,00	0,00	0	17.568,00	104.435,07
25	Sulawesi Tenggara*	27.768,00	0,00	0,00	27.768,00	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00	22.671,00	0,00	0	22.671,00	82.742,00
26	Sulawesi Selatan*	227.741,00	0,00	0,00	227.741,00	99.502,00	5.016,00	0,00	104.518,00	285.032,00	51.977,00	0	337.009,00	669.268,00
27	Sulawesi Barat*	28.210,00	0,00	5.500,00	33.710,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	40.082,00	0,00	0	40.082,00	76.592,00
28	Maluku*	7.499,00	0,00	0,00	7.499,00	37.157,00	0,00	0,00	37.157,00	12.500,00	0,00	0	12.500,00	57.156,00
29	Maluku Utara	4.802,43	0,00	0,00	4.802,43	3.708,40	0,00	0,00	3.708,40	0,00	0,00	0	0,00	8.510,83
30	Papua	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	3.450,00	0,00	0	3.450,00	9.850,00
	Indonesia	2.883.672,46	68.043,13	9.037,36	2.960.752,95	1.491.511,23	77.562,69	61,00	1.569.134,92	2.290.752,55	634.654,18	311.397	3.236.803,73	7.766.691,59

Sumber : Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air (Data diambil tahun 2007)

Catatan : * Data hasil revisi

Tabel 4.11
Rekapitulasi Daerah Irigasi
Tahun 2006

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha					Jumlah
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Teknis	101	97.676,00	28.665,00	103,00			126.444,00
		Semi Teknis	138	43.716,00	11.595,00	520,00			55.831,00
		Sederhana	455	42.768,00	45.337,00				88.105,00
		Total	694	184.160,00	85.597,00	623,00			270.380,00
2	SUMATERA UTARA	Teknis	639	292.952,00	70,00				292.952,00
		Semi Teknis	293	98.784,00					98.784,00
		Sederhana	159	45.203,00					45.203,00
		Total	1091	436.939,00	70,00				436.939,00
3	SUMATERA BARAT	Teknis	1126	256.261,00					256.260,99
		Semi Teknis	85	10.381,20	190,00	522,00			10.101,20
		Sederhana	70	7.237,00	240,00	339,00	20,00		5.817,00
		Total	1281	273.879,20	430,00	861,00	20,00		272.179,19
4	RIAU	Teknis	4	3.778,00	105,00	174,00		200,00	4.257,00
		Semi Teknis	94	49.846,00	569,00	3.586,00	260,00	300,00	54.561,00
		Sederhana	32	1.868,00	1.419,00	300,00			3.587,00
		Total	130	55.492,00	2.093,00	4.060,00	260,00	500,00	62.405,00
5	JAMBI	Teknis	482	102.906,00	243,00				103.149,00
		Semi Teknis	49	11.206,00	152,00	262,00			11.620,00
		Sederhana	40	4.273,00	20,00	2.304,00	746,00		7.343,00
		Total	571	118.385,00	415,00	2.566,00	746,00		122.112,00
6	SUMATERA SELATAN	Teknis	13	17.907,00	1.750,00	5.711,00			25.368,00
		Semi Teknis	109	72.265,00	6.909,00	1.833,00			81.007,00
		Sederhana	19	5.005,00	50,00	50,00			5.105,00
		Total	141	95.177,00	8.709,00	7.594,00			111.480,00
7	BENGKULU	Teknis	258	7.695,00	3.367,00	1.249,00	1.131,00		13.442,00
		Semi Teknis	212	5.189,00	2.186,00	2.599,00	35,00		10.009,00
		Sederhana	120	380,00		219,00	4,00		603,00
		Total	590	13.264,00	5.553,00	4.067,00	1.170,00		24.054,00

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha					Jumlah
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	LAMPUNG	Teknis	783	140.920,00	6.122,00	3.284,00		10,00	150.430,00
		Semi Teknis	21	15.339,00		7.702,00			23.153,00
		Sederhana	1						0,00
		Total	805	156.259,00	6.122,00	10.986,00		10,00	173.583,00
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Teknis	20						15.332,00
		Semi Teknis	4						1.978,00
		Sederhana	14						5.957,00
		Total	38						23.267,00
10	JAWA TENGAH	Teknis	710	582.002,00		0,00	0,00		582.002,00
		Semi Teknis	832	59.860,00		0,00			59.860,00
		Sederhana	5.462	227.113,00	34,00		0,00		227.147,00
		Total	7.004	868.975,00	34,00	0,00	0,00		869.009,00
11	DI YOGYAKARTA	Teknis	1981						50.725,49
		Semi Teknis	133						11.536,60
		Sederhana	64						1.521,55
		Total	2178						63.783,64
12	JAWA TIMUR	Teknis	5718	788.688,00					788.692,00
		Semi Teknis	620	62.134,00					62.137,00
		Sederhana	1350	53.089,00	6,00				53.095,00
		Total	7688	903.911,00	6,00				903.924,00
13	BANTEN	Teknis	772	149.088,00	10.894,00				160.331,00
		Semi Teknis	87	21.620,00					21.620,00
		Sederhana	195	21.553,00					21.553,00
		Total	1054	192.261,00	10.894,00				203.504,00
14	BALI	Teknis	89	27.349,70	6.282,30				33.632,00
		Semi Teknis	265	48.827,90	6.486,10				55.314,00
		Sederhana	0						0,00
		Total	354	76.177,60	12.768,40				88.946,00
15	NUSA TENGGARA BARAT	Teknis					5,00		115.015,00
		Semi Teknis							88.569,00
		Sederhana							1.808,00
		Total					5,00		205.392,00

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha					Jumlah
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	NUSA TENGGARA TIMUR	Teknis							120.094,00
		Semi Teknis							16.600,00
		Sederhana							8.163,00
		Total							144.857,00
17	KALIMANTAN BARAT	Teknis	8	50,00					50,00
		Semi Teknis	129	2.614,00					2.614,00
		Sederhana	385	4.637,00					4.637,00
		Total	522	7.301,00					7.301,00
18	KALIMANTAN TENGAH	Teknis	58	23.689,00	500,00				24.591,00
		Semi Teknis	1	40,00					40,00
		Sederhana	9	1.857,00	265,00				2.292,00
		Total	68	25.586,00	765,00				26.923,00
19	KALIMANTAN SELATAN	Teknis	121	50.147,00					50.147,00
		Semi Teknis	11						0,00
		Sederhana	23	1.037,00	63,00	63,00			1.100,00
		Total	155	51.184,00	63,00	63,00			51.247,00
20	KALIMANTAN TIMUR	Teknis	1	300,00					300,00
		Semi Teknis	429	153.774,00	314,00	342,00			154.713,00
		Sederhana	14	265,00	1.605,00	1.507,00			3.819,00
		Total	444	154.339,00	1.919,00	1.849,00			158.832,00
21	SULAWESI UTARA	Teknis	6	11.385,00	221,00	4.651,00			16.643,00
		Semi Teknis	106	26.544,00	1.067,00	11.432,80		9,00	39.430,75
		Sederhana	42	2.766,00	110,00	3.106,40			5.982,40
		Total	154	40.695,00	1.398,00	19.190,20		9,00	62.056,15
22	SULAWESI TENGAH	Teknis	116	68.107,20	998,00	40.724,80		395,00	111.384,99
		Semi Teknis	64	20.932,00		11.227,00		12,00	32.338,00
		Sederhana	54	8.744,00		3.186,00		4,00	11.938,00
		Total	234	97.783,20	998,00	55.137,80		411,00	155.660,99
23	SULAWESI SELATAN	Teknis	1.473	575.781,00	2.491,00	842,00	6.661,00		585.775,00
		Semi Teknis	111	51.968,00	772,00		938,00		53.678,00
		Sederhana	35	17.286,00	50,00	1.036,00	425,00		18.797,00
		Total	1.619	645.035,00	3.313,00	1.878,00	8.024,00		658.250,00

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha					Jumlah
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	SULAWESI TENGGARA	Teknis	65	31.037,00	12.560,00	853,00			44.450,00
		Semi Teknis	53	12.305,00	3.739,00	1.323,00	5,00	22,00	17.394,00
		Sederhana	27	1.320,00	20,00				1.340,00
		Total	145	44.662,00	16.319,00	2.176,00	5,00	22,00	63.184,00
25	GORONTALO	Teknis	12	7.438,00	58,00	3.802,00			11.240,00
		Semi Teknis	12	4.504,00		1.865,00			6.427,00
		Sederhana	0						0,00
		Total	24	11.942,00	58,00	5.667,00			17.667,00
26	MALUKU	Teknis	42	25.089,00	2.025,00	3.126,00	3.126,00		30.240,00
		Semi Teknis	5	692,00	645,00				1.337,00
		Sederhana	15	8.286,00	4.086,00	1.447,00	1.447,00		14.350,00
		Total	62	34.067,00	6.756,00	4.573,00	4.573,00		45.927,00
27	MALUKU UTARA	Teknis	34	4.797,30	5.471,00				10.268,30
		Semi Teknis	3	350,00	650,00				1.000,00
		Sederhana	13						0,00
		Total	50	5.147,30	6.121,00				11.268,30
Indonesia		Teknis	29.264	3.235.042,70	79.789,30	59.382,80	10.923,00	615,00	2.061.949,30
		Semi Teknis	9.814	772.891,10	35.274,10	42.429,80	1.238,00	343,00	690.899,00
		Sederhana	17.176	454.687,00	53.305,00	12.207,40	3.114,00	4,00	158.500,00
		Total	25.016	4.275.823,00	170.401,40	121.291,00	14.803,00	952,00	2.910.348,00

Dicetak oleh : Unit Data Sumber Daya Air, Tanggal/Jam : 24/04/2006 15:35:26 (Data diambil tahun 2007)

Tabel 4.12.1
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Tahun 2007

No.	Provinsi	Lintas Provinsi	Jumlah Daerah Irigasi	Lintas Kabupaten/ Kota	
		(ha)	(DI)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6
A LINTAS PROVINSI					
1	BBWS Sumatera VI (Jambi dan Sumatera Barat)	18.936			
2	UPT (Bengkulu dan Sumatera Barat)	6.600			
3	BBWS Sumatera VIII Sumatera Selatan	59.728			
	Lampung	8.100			
4	BBWS Citanduy Jawa Barat	5.052			
	Jawa Tengah	22.417			
5	BBWS Citanduy Jawa Barat	432			
	Jawa Tengah	563			
6	BBWS Serayu Opak Jawa Tengah	115			
	DI Yogyakarta	149			
7	BBWS Bengawan Solo Jawa Tengah	24.461			
	Jawa Timur	500			
8	BBWS Jratunseluna Jawa Tengah	564			
	Jawa Timur	365			
B LINTAS KABUPATEN/ KOTA					
1	Nanggroe Aceh Darussalam		1	19.360	
2	Sumatera Utara		2	10.650	
3	Sumatera Barat		1	4.200	
4	Sumatera Selatan		1	10.163	
5	Lampung		2	97.116	
6	Banten		3	51.104	
7	Jawa Barat		6	346.056	
8	Jawa Tengah		14	190.155	
9	DI Yogyakarta		1	5.159	
10	Jawa Timur		13	150.567	
11	Bali		2	9.598	
12	Nusa Tenggara Barat		7	28.101	
13	Nusa Tenggara Timur				
14	Sulawesi Tengah		1	7.922	
15	Kalimantan Selatan		1	6.000	
16	Sulawesi Selatan		9	113.763	
B UTUH KABUPATEN/ KOTA					
1	Nanggroe Aceh Darussalam		12		101.561,00
2	Sumatera Utara		10		43.849,00
3	Sumatera Barat		10		63.747,00
4	Jambi		2		9.429,00
5	Sumatera Selatan		13		113.461,00
6	Bengkulu		4		23.608,00
7	Bangka Belitung		2		8.868,00
8	Lampung		23		176.526,00
9	Banten		3		48.441,00
10	Jawa Barat		27		270.015,00
11	Jawa Tengah		17		108.723,34
12	DI Yogyakarta		1		7.152,00
13	Jawa Timur		22		156.612,00
14	Nusa Tenggara Barat		3		12.673,00
15	Nusa Tenggara Timur		23		87.994,00
16	Kalimantan Selatan		4		15.090,00
17	Sulawesi Utara		3		16.782,00
18	Sulawesi Barat		2		20.085,00
19	Sulawesi Tengah		6		32.142,00
20	Sulawesi Tenggara		2		19.471,00
21	Sulawesi Selatan		33		260.701,00
22	Maluku		7		34.034,84
23	Maluku Utara		2		7.500,00
24	Papua		2		10.200,00
25	Irian Jaya Barat		1		3.450,00

Sumber : Ditjen SDA Departemen PU, 2007 (Lampiran I Kepmen 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Tabel 4.12.2
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Tahun 2007

No.	Provinsi	Lintas Kabupaten/ Kota (ha)	Jumlah Daerah Irigasi	Utuh Kabupaten/ Kota (ha)	Jumlah Daerah Irigasi
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.344,00	2	72.303,00	42
2	Sumatera Utara	8.712,00	17	69.456,00	47
3	Sumatera Barat	14.305,21	31	36.830,73	24
4	Riau			104.784,00	57
5	Jambi			7.933,00	5
6	Sumatera Selatan			21.718,00	14
7	Bengkulu	514,00	1	13.689,00	8
8	Bangka Belitung			9.036,00	5
9	Lampung	3.851,00	4	22.386,00	14
10	Banten			23.203,00	13
11	Jawa Barat	16.424,00	34	119.625,00	75
12	Jawa Tengah	32.694,01	63	56.266,50	35
13	DI Yogyakarta	4.890,87	36	12.222,00	8
14	Jawa Timur	49.862,00	94	139.897,00	94
15	Bali	8.033,00	15	23.872,00	18
16	Nusa Tenggara Barat			65.984,00	39
17	Nusa Tenggara Timur	1.630,00	3	56.295,00	38
18	Kalimantan Barat			11.704,00	8
19	Kalimantan Tengah			38.051,00	25
20	Kalimantan Selatan			41.602,00	26
21	Kalimantan Timur			63.051,00	47
22	Sulawesi Utara	2.895,00	3	16.533,00	11
23	Gorontalo	2.688,00	2	15.623,00	10
24	Sulawesi Tengah			48.777,00	30
25	Sulawesi Tenggara	1.406,00	3	18.085,00	10
26	Sulawesi Selatan	5.016,00	3	56.488,00	32
27	Sulawesi Barat			2.800,00	2
28	Maluku			38.499,00	22
29	Maluku Utara			43.809,80	33
30	Papua			3.150,00	2
31	Irian Jaya Barat			12.285,00	9

2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang
dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Tabel 4.12.3
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
Tahun 2007

No.	Provinsi	Utuh Kabupaten/ Kota (ha)	Jumlah Daerah Irigasi
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	186.603,00	1.119,00
2	Sumatera Utara	182.723,00	932,00
3	Riau	55.848,00	165,00
4	Bengkulu	45.448,00	330,00
5	Jambi	15.886,00	86,00
6	Sumatera Barat	169.033,40	1.266,00
7	Sumatera Selatan	34.696,00	131,00
8	Lampung	122.825,29	762,00
9	Bangka Belitung	10.017,00	38,00
10	Banten	106.100,53	962,00
11	Jawa Barat	219.640,00	1.017,00
12	Jawa Tengah	481.055,18	8.982,00
13	DI Yogyakarta	46.480,74	2.468,00
14	Jawa Timur	459.436,46	7.701,00
15	Kalimantan Barat	68.229,00	514,00
16	Kalimantan Selatan	71.028,00	252,00
17	Kalimantan Tengah	35.930,00	103,00
18	Kalimantan Timur	129.635,00	438,00
19	Sulawesi Selatan	211.626,00	1.473,00
20	Sulawesi Barat	28.442,00	214,00
21	Sulawesi Tengah	61.157,49	162,00
22	Sulawesi Tenggara	28.268,00	73,00
23	Sulawesi Utara	38.631,00	216,00
24	Gorontalo	12.620,00	30,00
25	Bali	101.505,00	832,00
26	Nusa Tenggara Barat	102.723,00	304,00
27	Nusa Tenggara Timur	130.906,00	1.199,00
28	Maluku	21.474,00	35,00
29	Maluku Utara	7.169,00	19,00
30	Irian Jaya Barat	4.621,00	9,00
31	Papua	5.811,00	28,00

Sumber : Ditjen SDA Departemen PU, 2007 (Lampiran III Kepmen 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Tabel 4.13
Rekapitulasi Daerah Irigasi
Tahun 2007

No.	Provinsi	Luas Potensial (Ha)	Luas Terbangun (Ha)		J. Tersier/L.Potensial (%)*
			Jaringan Utama	Jaringan Tersier	
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	384.171,00	346.478,00	285.893,00	74,42
2	Sumatera Utara	308.491,00	308.491,00	308.426,00	99,98
3	Riau	149.347,00	147.549,00	144.058,00	96,46
4	Bengkulu	89.859,00	89.434,00	86.236,00	95,97
5	Jambi	52.184,00	52.184,00	51.030,00	97,79
6	Sumatera Barat	282.238,48	280.538,48	279.227,48	98,93
7	Sumatera Selatan	215.814,00	199.325,00	197.646,00	91,58
8	Lampung	430.785,20	425.552,20	408.391,20	94,80
9	Bangka Belitung	28.771,00	28.771,00	27.599,00	95,93
10	Banten	228.848,53	228.764,53	218.916,53	95,66
11	Jawa Barat	936.735,00	768.498,00	770.748,00	82,28
12	Jawa Tengah	917.473,53	917.151,53	917.151,53	99,96
13	DI Yogyakarta	76.053,52	76.053,52	76.053,52	100,00
14	Jawa Timur	951.706,46	951.326,46	951.321,46	99,96
15	Kalimantan Barat	79.933,00	79.933,00	79.933,00	100,00
16	Kalimantan Selatan	128.630,00	128.630,00	128.630,00	100,00
17	Kalimantan Tengah	73.981,00	73.356,00	72.064,00	97,41
18	Kalimantan Timur	192.686,00	192.261,00	189.672,00	98,44
19	Sulawesi Selatan	648.288,00	641.288,00	639.230,00	98,60
20	Sulawesi Tengah	149.998,49	149.998,49	113.344,72	75,56
21	Sulawesi Tenggara	65.835,00	61.268,00	46.945,00	71,31
22	Sulawesi Utara	74.841,00	74.841,00	63.039,00	84,23
23	Gorontalo	30.931,00	28.431,00	24.402,00	78,89
24	Sulawesi Barat	51.327,00	43.827,00	39.998,00	77,93
25	Bali	143.008,00	143.008,00	132.339,76	92,54
26	Nusa Tenggara Barat	209.481,00	209.081,00	178.572,00	85,24
27	Nusa Tenggara Timur	276.825,00	240.386,00	237.107,00	85,65
28	Maluku	94.007,84	66.709,84	58.184,84	61,89
29	Maluku Utara	58.478,80	44.679,00	39.163,50	66,97
30	Papua	39.517,00	39.517,00	39.517,00	100,00
Indonesia		7.370.245,85	7.037.340,05	6.804.839,54	92,33

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air

Catatan : * Hasil Pengolahan dari Pusdata

Tabel 4.14
Daftar Bendungan Indonesia Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Tinggi Bendungan		Volume Tubuh Bendungan			Total	
		< 15 m	≥ 15 m	< 100.000 m ³	100.000 ≤ x < 500.000 m ³	≥ 500.000 m ³	Kapasitas Tampung (juta m ³)	Daerah Tangkapan Air (km ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sumatera Utara	3	0	3	0	0	0	11.224,00
2	Riau	2	4	3	1	2	525	423,22
3	Bengkulu	0	1	1	0	0		
4	Lampung	2	2	2	0	2	777	882,00
5	Jawa Barat	22	6	20	4	4	9.482	11.120,00
6	Jawa Tengah	15	22	23	9	5	2.933	3.818,39
7	DI Yogyakarta	0	1	0	1	0	33	22,00
8	Jawa Timur	70	15	75	3	7	1.041	8.296,75
9	Bali	1	2	1	1	1	14	62,30
10	Nusa Tenggara Barat	23	16	34	2	3	1.809	785,19
11	Nusa Tenggara Timur	6	5	11	0	0		74,00
12	Kalimantan Selatan	0	1	0	0	1	600	1.043,00
13	Kalimantan Timur	4	1	4	1	0	4	77,00
14	Sulawesi Selatan	4	5	7	1	1	552	5.871,40
15	Maluku	1	0	1	0	0		
16	Gorontalo	3	0	3	0	0		
	Indonesia	156	81	188	23	26	17.770	43.699,25

Sumber : sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_summary.asp?pilih=WIL&prop=&kab=

Tabel 4.15
Kondisi Waduk Utama di Indonesia
Tahun 2007

No.	Provinsi	Waduk	Ketinggian Air Ideal (m)	Ketinggian Air Saat ini (m)	Deviasi (cm)
1	2	3	4	5	6
1	Jawa Barat	Djuanda/ Jatiluhur	101,60	101,21	-39
2	Jawa Tengah	Kedungombo	86,70	86,70	0
3	Jawa Tengah	Wonogiri	136,17	135,37	-80
4	Jawa Tengah	Sempor	57,35	66,72	+937
5	Jawa Tengah	Wadaslintang	160,01	172,00	+1199
6	Jawa Tengah	Sermo	128,00	129,10	+110
7	Jawa Timur	Sutami	272,50	272,41	-9
8	Jawa Timur	Selorejo	621,53	621,34	-19
9	Jawa Timur	Bening	106,51	106,51	0
10	Jawa Timur	Wonorejo	180,05	180,85	+80
11	Jawa Timur	Sangiran	126,00	120,00	-600
12	Lampung	Batuteji	257,00	256,74	-26
13	Sulawesi Selatan	Bili-Bili	94,97	94,55	-42
14	Nusa Tenggara Barat	Batujae	89,00	92,24	+324
15	Nusa Tenggara Barat	Penggo	46,50	56,50	+700

Sumber : Ditabulasi dari Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air,
Departemen Pekerjaan Umum, 25 Juni 2007

Tabel : 4.16.1
Data Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Elevasi & Luas Muka Air (MA) Waduk					
		MA Banjir		MA Normal		MA Minimum	
		m	Ha	m	Ha	m	Ha
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumatera Utara	905,5	-	2.146,4	1.118,4	2.133,6	-
2	Riau	-	-	85,0	1.240,0	73,5	-
3	Bengkulu	-	-	-	114	-	-
4	Lampung	376,4	2.150	364,5	2.116,1	281,7	287
5	Jawa Barat	5.102,35	14.762	5.088,4	19.792,77	4.454,35	2.816
6	Jawa Tengah	5.145,31	17.831,698	5.101,75	9.653,003	4.529,67	1.482,566
7	DI Yogyakarta	141,20	253	136,6	165	113,7	26,0
8	Jawa Timur	2.397,32	5.097,5	3.107,6	5.386,8	2.926,8	2.076,6
9	Bali	211,05	500	203	345	173	125,2
10	Nusa Tenggara Barat	752,82	2.698,96	170.345,8	1.066,28	153.816,8	242,70
11	Kalimantan Selatan	63	9.200	60	3.200	52	-
12	Kalimantan Timur	18,44	200	17,1	324	12,2	-
13	Sulawesi Selatan	2.085	20.862	2.113,1	18.529,85	2.059,6	9.199,12

Sumber : <http://sda.pu.go.id/bendungan.php>, Tanggal 08 Juli 2008, Jam 9:38 WIB

Tabel : 4.16.2
Inventarisasi Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2009

No.	Nama Provinsi	Jumlah Bendungan (Unit)	Daerah Tangkapan Air (Ha)	Luas Muka Air Normal (Ha)	Volume Waduk	
					Normal (Juta m ³)	Efektif
1	2	3	4	5	6	7
1	NAD	9	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	3	11.224,00	1.284,00	438,30	57,90
3	Riau	1	333,70	1.240	1,5	1,05
4	Kepulauan Riau	6	-	18	22,5	-
5	Bengkulu	1	-	114,00	2,20	-
6	Lampung	4	882,00	2.516,10	607,89	79,15
7	Jawa Barat	20	4.665,00	9.293	3.611,0	0,00
8	Jawa Tengah	39	3.818,39	15.962,943	1.901,43	1.358,244
9	DI Yogyakarta	1	21,50	159	25,0	-
10	Jawa Timur	85	8.296,75	5.428,7	971,2	602,0
11	Banten	8	22,00	0,0	10,3	0,0
12	Bali	3	62,30	345,00	11,75	8,75
13	Nusa Tenggara Barat	40	484,19	1.364,79	236,9	47,95
14	Nusa Tenggara Timur	10	69,00	19,30	81,18	0,00
15	Kalimantan Selatan	2	1.043	320	1.200	600
16	Kalimantan Timur	6	83,01	14,67	4,45	2,70
17	Sulawesi Selatan	12	13.671,40	1.746,20	437,03	364,60
18	Sulawesi Tenggara	6	-	-	-	-
19	Gorontalo	3	-	-	-	-
20	Maluku	1	-	-	0,50	-

Sumber : Unit Data Sumber Daya Air, Tanggal/Jam : 06/04/2009 11:48:46 AM

Tabel : 4.17
Data Embung Potensi Berdasarkan Nama Embung Potensi di Indonesia

No	Provinsi	No	Lokasi Embung Potensi (Kabupaten)	Jenis Penanganan	Proyeksi Kapasitas Tampung (m ³)
1	2	3	4	5	6
1	Sumatera Utara	1	Tapanuli Selatan	Embung Rakyat Rehabilitasi	692.000
		2	Nias		15.000
		3	Karo		160.992
		4	Dairi		223.825
		5	Tapanuli Utara		2.213.000
		6	Toba Simosir		925.000
		7	Kota Pematang Siantar		30.000
		8	Langkat		214.600
		9	Labuhan Batu		630.800
		10	Asahan		600.000
		11	Tapanuli Tengah		3.430.000
2	Riau	1	Indragiri Hilir	Embung Baru/Pemerintah	325.125
		2	Bengkalis	Embung Baru/Pemerintah	749.800
		3	Kota Pekanbaru	Embung Baru/Pemerintah	525.000
		4	Indragiri Hulu	Embung Baru/Pemerintah	356.000
3	Lampung	1	Lampung Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	2.435.419
		2	Lampung Tengah	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.575.000
		3	Lampung Selatan	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.600.000
		4	Lampung Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	525.000
4	Jawa Barat	1	Ciamis	Embung Desa Rehabilitasi	3.580.980
		2	Tasikmalaya	Embung Pemerintah Rehabilitasi	1.382.000
		3	Garut	Embung Pemerintah Rehabilitasi	2.850.000
		4	Tasikmalaya	Embung Pemerintah Rehabilitasi	1.300.000
		5	Bogor	Embung Rakyat Rehabilitasi	5.908.000
5	Jawa Tengah	1	Rembang	Embung Rakyat Rehabilitasi	5.013.500
		2	Blora	Embung Desa Rehabilitasi	29.044.000
		3	Wonogiri	Embung Desa Rehabilitasi	38.515.000
		4	Pekalongan	Embung Desa Rehabilitasi	75.000
6	Jawa Timur	1	Tuban	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.098.500
		2	Nganjuk	Embung Rakyat Rehabilitasi	134.918
		3	Sidoarjo	Embung Rakyat Rehabilitasi	237.386
		4	Ponorogo	Embung Rakyat Rehabilitasi	370.000
		5	Madiun	Embung Rakyat Rehabilitasi	114.000
		6	Bojonegoro	Embung Rakyat Rehabilitasi	10.134.750
		7	Bangkalan	Embung Pemerintah Rehabilitasi	235.310
		8	Lamongan	Embung Pemerintah Rehabilitasi	48.754.130
		9	Gresik	Embung Desa Rehabilitasi	6.910.530
7	Bali	1	Tabanan	Embung Rakyat Rehabilitasi	3.134.093
8	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Timur	Embung Baru/Pemerintah	6.547.554
		2	Lombok Tengah	Embung Baru/Pemerintah	14.395.170
		3	Dompu	Embung Rakyat Rehabilitasi	5.736.523

Lanjutan Tabel 4.17

No	Provinsi	No	Lokasi Embung Potensi (Kabupaten)	Jenis Penanganan	Proyeksi Kapasitas Tampung (m ³)
1	2	3	4	5	6
		4	Bima	Embung Rakyat Rehabilitasi	37.689.315
		5	Lombok Barat	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.287.367
		6	Sumbawa	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.881.113
9	Nusa Tenggara Timur	1	Kupang	Embung Rakyat Rehabilitasi	92.854.000
		2	Timor Tengah Selatan	Embung Rakyat Rehabilitasi	297.000
		3	Timor Tengah Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	189.000
		4	Belu	Embung Rakyat Rehabilitasi	378.000
		5	Alor	Embung Rakyat Rehabilitasi	5.026.437
		6	Flores Timur	Embung Rakyat Rehabilitasi	14.157.928
		7	Sikka	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.589.517
		8	Ende	Embung Rakyat Rehabilitasi	12.996.534
		9	Ngada	Embung Rakyat Rehabilitasi	13.484.697
		10	Manggarai	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.718.388
		11	Sumba Timur	Embung Rakyat Rehabilitasi	39.088.970
		12	Sumba Barat	Embung Rakyat Rehabilitasi	9.067.489
10	Sulawesi Tengah	1	Kota Palu	Embung Rakyat Rehabilitasi	130.000
		2	Donggala	Embung Rakyat Rehabilitasi	500.000
		3	Kota Palu	Embung Rakyat Rehabilitasi	250.000
		4	Donggala	Embung Rakyat Rehabilitasi	200.000
		5	Poso	Embung Rakyat Rehabilitasi	200.000
		6	Banggai	Embung Rakyat Rehabilitasi	170.000
		7	Buol	Embung Rakyat Rehabilitasi	110.000
11	Sulawesi Selatan	1	Wajo	Embung Rakyat Rehabilitasi	463.772
		2	Polewali Mamasa		126.403
		3	Tana Toraja		44.025
		4	Luwu Utara		10.950
		5	Luwu		310.267
		6	Soppeng	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.434.658
		7	Maros	Embung Rakyat Rehabilitasi	335.000
		8	Gowa	Embung Rakyat Rehabilitasi	585.000
		9	Takalar	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.140.000
		10	Jeneponto	Embung Rakyat Rehabilitasi	3.235.000
		11	Bantaeng	Embung Rakyat Rehabilitasi	644.000
		12	Bulukumba	Embung Rakyat Rehabilitasi	510.000
		13	Bone	Embung Rakyat Rehabilitasi	862.000
		14	Barru	Embung Rakyat Rehabilitasi	585.000
		15	Enrekang	Embung Rakyat Rehabilitasi	610.000
		16	Sidenreng Rappang	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.156.000
		17	Sinjai	Embung Rakyat Rehabilitasi	664.000
12	Sulawesi Tenggara	1	Kendari	Embung Desa Rehabilitasi	9.230.390
13	Maluku	1	Maluku Utara	Embung Rakyat Rehabilitasi	1.039.880
14	Papua	1	Paniai	Embung Rakyat Rehabilitasi	3.108.279
		2	Sorong	Embung Rakyat Rehabilitasi	171.813

Sumber : <http://sda.pu.go.id/embungp.php> (Hasil rekapan dari Pusdata)

Tabel : 4.18
Data Embung Berdasarkan Fisik Embung di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung			
					T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)	
					M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	Pidie	9	Belum Terdata	-	-	0,26	0,8
		Aceh Tenggara	1	Belum Terdata	-	-	0,04	0,13
		Kota Subulussalam	1	Belum Terdata	-	-	0,03	0,1
		Aceh Tengah	1	Belum Terdata	-	-	0,02	0,05
		Aceh Utara	2	Belum Terdata	-	-	0,04	0,11
		Bireuen	5	Belum Terdata	-	-	0,15	0,41
2	Lampung	Lampung Selatan	13	E. Baru/Pemerintah	-	58,62	-	914.931,0
		Lampung Tengah	7	E. Baru/Pemerintah	-	54,60	-	726.771,00
		Tulang Bawang	15	E. Baru/Pemerintah	-	69,38	-	798.727,60
		Lampung Utara	6	E. Baru/Pemerintah	-	15,90	-	476,00
		Waykanan	7	E. Baru/Pemerintah	-	9,90	-	1.456.200,00
		Lampung Barat	1	E. Baru/Pemerintah	-	10,00	-	320,00
3	Kep. Babel	Kota Pangkalpinang	1	Belum Terdata	-	-	-	724.500,00
4	Jawa Barat	Tasikmalaya	4	E. Baru/Rehabilitasi	-	11,50	1.223.000,00	1.522.000,00
		Bogor	4	E. Baru/Pemerintah	-	8,00	0,00	1.170.000,00
		Cianjur	3	E. Baru/Pemerintah	-	16,50	0,00	39.905,00
		Garut	4	E. Baru/Pemerintah	-	15,50	0,00	30.500,00
5	Jawa Tengah	Rembang	22	E. Baru/Pemerintah	-	-	1.540.000,00	
		Blora	5	E. Baru/Pemerintah	-	-	367.500,00	
		Wonogiri	46	E. Baru/Rehabilitasi	-	12,00	863.916,00	4.600,00
		Brebes	29	Belum Terdata	-	-	1.857.794,00	
		Banyumas	6	Belum Terdata	-	-	659.000,00	
		Boyolali	6	Belum Terdata	-	-	245.000,00	
		Pati	42	Belum Terdata	-	-	4.315.113,00	
		Tegal	22	Belum Terdata	-	-	159.335,00	
		Pemalang	34	Belum Terdata	-	-	5.569.683,00	
		Semarang	5	Belum Terdata	-	-	1.505,00	
		Demak	4	Belum Terdata	-	-	150.300,00	
		Cilacap	21	Belum Terdata	-	-	6.020.100,00	
		Karanganyar	1	Belum Terdata	-	-	50.000,00	
		Purworejo	26	Belum Terdata	-	-	2.493.174,00	
		Kebumen	1	Belum Terdata	-	-	24.000,00	
6	Jawa Timur	Pacitan	2	E. Baru/Rehabilitasi	-	6,00	8,00	2.150,00
7	DI Yogyakarta	Gunungkidul	2	Belum Terdata	-	-	-	-
8	Bali	Karangasem	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 4.18

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung			
					T.M.A (m)		Kapasitas (m ³)	
					M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	7	E. Pemerintah Rehabilitasi	-	-	21,20	-
		Lombok Tengah	31	E. Desa Rehabilitasi	-	-	183,87	-
		Lombok Tengah	7	E. Baru/Pemerintah	-	-	83,35	-
		Lombok Timur	6	E. Pemerintah Rehabilitasi	-	-	57,00	-
		Lombok Timur	14	E. Desa Rehabilitasi	-	-	72,34	-
		Lombok Timur	6	E. Baru/Pemerintah	-	-	56,70	-
		Lombok Barat	2	E. Pemerintah Rehabilitasi	-	-	12,00	-
		Lombok Barat	3	E. Baru/Pemerintah	-	-	41,25	-
		Sumbawa	8	E. Baru/Pemerintah	-	-	79,43	-
		Sumbawa	1	Belum Terdata	-	-	75.000,00	-
10	Nusa Tenggara Timur	Dompu	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	9,50	-
		Timor Tengah Utara	15	E. Baru/Pemerintah	-	91,00	0,00	172.440,00
		Timor Tengah Selatan	19	E. Baru/Pemerintah	-	114,00	0,00	182.660,00
11	Sulawesi Selatan	Gowa	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	2.900,00	1.440,00
		Jeneponto	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	37.165,00	29.732,00
		Jeneponto	8	Belum Terdata	-	-	704.380,00	1.116.726,00
		Takalar	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	2.675,00	2.140,00
		Takalar	7	Belum Terdata	-	-	222.353,00	293.082,00
		Wajo	2	E. Baru/Pemerintah	-	-	172.000,00	1.073.600,00
		Wajo	2	Belum Terdata	-	-	378.000,00	475.200,00
		Maros	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	8.175,00	9.540,00
		Maros	3	Belum Terdata	-	-	6.020,00	136.840,00
		Bantaeng	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	10.560,00	84.480,00
		Bantaeng	2	Belum Terdata	-	-	542.780,00	434.224,00
		Bulukumba	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	11.475,00	9.180,00
		Bulukumba	2	Belum Terdata	-	-	118.000,00	94.400,00
		Barru	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	11.685,00	93.348,00
		Barru	2	Belum Terdata	-	-	45.500,00	96.000,00
		Tator	1	Belum Terdata	-	-	120.000,00	48.000,00
		Pare-Pare	1	Belum Terdata	-	-	250.000,00	200.000,00
		Bone	2	Belum Terdata	-	-	83.000,00	664.000,00
		Polman	1	Belum Terdata	-	-	36.000,00	72.000,00
		Enrekang	4	Belum Terdata	-	-	60.700,00	485.616,00
Sidrap	5	Belum Terdata	-	-	98.682,00	789.456,00		
Luwu Timur	2	Belum Terdata	-	-	218.000,00	304.000,00		
Soppeng	2	Belum Terdata	-	-	426.000,00	528.000,00		
Selayar	3	Belum Terdata	-	-	41.863,00	267.683,00		

Lanjutan Tabel 4.18

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung	Jenis Penanganan	Fisik Embung			
					T.M.A (m)		Kapasitas (m ²)	
					M. Hujan	M. Kemarau	Irigasi (Ha)	D.M.I (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Sulawesi Tenggara	Kolaka	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	-	32.868,00
		Kolaka	1	E. Desa Rehabilitasi	-	4,5	4	809.875
		Konawe Selatan	9	E. Baru/Pemerintah	-	8,1	14	463.860
		Konawe Selatan	2	E. Desa Rehabilitasi	-	13,7	12	1.579.171
		Wakatobi	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	6	
		Bombana	1	E. Desa Rehabilitasi	-	6,8	6	746.918
13	Sulawesi Barat	Mamuju	8	Belum Terdata	-	-	704.380,00	1.116.726,00
		Mamuju	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	37.165,00	29.732
		Poliwalimamasa	1	Belum Terdata	-	-	118.000,00	94.000
		Majene	2	Belum Terdata	-	-	40.934,00	260.245,00
		Mamuju Utara	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	2.675,00	2.140
		Mamuju Utara	7	Belum Terdata	-	-	222.353,00	293.082
		Mamasa	1	E. Baru/Pemerintah	-	-	10.560,00	84.480
		Mamasa	2	Belum Terdata	-	-	542.780,00	434.224
14	Maluku	Maluku Tenggara Barat	8	E. Baru/Pemerintah	90	90	219.544.800,00	219.544.800
		Maluku Tenggara Barat	1	Belum Terdata	13	13	66,495	66,495
15	Papua	Supiori	2	Belum Terdata	-	-	18.040,000	
		Supiori	6	E. Baru/Pemerintah	-	-	30.575,440	
		Sorong	2	Belum Terdata	-	-		29.217,000
		Sorong	11	E. Baru/Pemerintah	-	-		846.849,000

Sumber : <http://sda.pu.go.id/embung.php>

Cat. : T.M.A = Tinggi Muka Air

D.M.I = Domestik, Municipal, dan Industri

Tabel : 4.19
Data Embung Berdasarkan Manfaat Embung di Indonesia
Tahun 2009

No	Provinsi	Jumlah Embung	Manfaat Sebelum				Manfaat Sesudah			
			T.M.A*) (m)	Kapasitas (m ³)	Irigasi (Ha)	DMI**) (m ³ /dtk)	T.M.A*) (m)	Kapasitas (m ³)	Irigasi (Ha)	DMI**) (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NAD	19	-	0,54	260,00	3,27	-	1,60	4.165,00	10,04
2	Lampung	49	-	-	-	-	171,63	6.907.541,60	765,00	8.490,00
3	Kep. Babel	1	-	-	-	-	-	724.500,00	-	-
4	Jawa Tengah	272	-	24.289.620,00	100.000,00	-	12,00	4.600,00	-	-
5	DI Yogyakarta	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jawa Timur	2	-	8,00	50.000,00	-	6,00	2.150,00	-	-
7	Bali	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nusa Tenggara Barat	84	-	75.683,24	18.472.390,00	18.499,00	-	-	7.670,00	-
9	Nusa Tenggara Timur	34	-	-	-	-	205,00	355.100,00	6,68	-
10	Sulawesi Selatan	57	-	3.607.913,00	1.322,00	1.836.640,00	-	7.308.687,00	-	-
11	Sulawesi Tenggara	16	-	42,00	0,00	1.284,00	37,60	3.632.692,00	2.701,00	-
12	Sulawesi Barat	57	-	3.607.913,00	1.322,00	1.836.640,00	-	7.308.687,00	-	-
13	Maluku	34	103,00	219.611.295,00	-	-	103,00	219.611.295,00	-	-
14	Papua	21	-	48.615,44	37,32	-	-	876.066,00	408,94	-

Sumber : Unit Data Sumber Daya Air, Tanggal/Jam : 06/04/2009 11:26:17 AM

Cat. : T.M.A = Tinggi Muka Air

D.M.I = Domestik, Municipal, dan Industri

Tabel : 4.20
Luas Potensial Daerah Irigasi dan Produksi Padi
Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2007

No	Provinsi	Luas Potensial (Ha) *	Produksi Padi (Ton) **
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	384.171,00	1.533.369,000
2	Sumatera Utara	308.491,00	3.265.834,000
3	Riau	149.347,00	490.409,154
4	Bengkulu	89.859,00	470,469
5	Jambi	52.184,00	586.661,632
6	Sumatera Barat	282.238,48	1.938.120,000
7	Sumatera Selatan	215.814,00	2.753.044,000
8	Lampung	430.785,20	2.308.404,000
9	Bangka Belitung	28.771,00	2.439,007
10	Banten	228.848,53	1.816.140,000
11	Jawa Barat	936.735,00	9.914.019,000
12	Jawa Tengah	917.473,53	8.616.855,000
13	DI Yogyakarta	76.053,52	709.294,000
14	Jawa Timur	951.706,46	9.402.029,000
15	Kalimantan Barat	79.933,00	1.225.259,000
16	Kalimantan Selatan	128.630,00	1.953.868,000
17	Kalimantan Tengah	73.981,00	562.473,000
18	Kalimantan Timur	192.686,00	567.501,000
19	Sulawesi Selatan	648.288,00	3.635.139,000
20	Sulawesi Tengah	149.998,49	857.508,000
21	Sulawesi Tenggara	65.835,00	423.316,000
22	Sulawesi Utara	74.841,00	494.997,633
23	Gorontalo	30.931,00	200.421,000
24	Sulawesi Barat	51.327,00	312.676,000
25	Bali	143.008,00	839.775,000
26	Nusa Tenggara Barat	209.481,00	1.526.347,000
27	Nusa Tenggara Timur	276.825,00	505.628,000
28	Maluku	94.007,84	57.132,000
29	Maluku Utara	58.478,80	48.531,000
30	Papua	39.517,00	109,882

Sumber : * Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air

Sumber : ** http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=53¬ab=4

Tabel 4.21.1 :
Nama Ruas Jalan Tol dan Panjang Jalan Tol di Indonesia, Tahun 2004

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)	Jasa Marga (Km)	Joint Venture (Km)	Cooperation Partner	Tahun Beroperasi
1	2	3	4	5	6	7
I Jakarta dan sekitarnya						
1	Prof. DR. Ir. Sedyatmo	14,3	14,3	-	Jasa Marga	1985
2	Dalam Kota Jakarta					
	a. Cawang-Tomang	16	16	-	Jasa Marga	1989
	b. Tomang-Grogol-Pluit	8,96	8,96	-	Jasa Marga	1996
	c. Ir. Wiyoto Wiyono, MSc (Cawang - Tj.Priok)	15,5	-	15,5	Citra Marga Nusaphala Persada	1990
	d. Tj. Priok-Jemb. Tiga	15,44	-	15,44	Citra Marga Nusaphala Persada	1995
3	Cakung-Cikunir	8,8	-	8,8	Citra Bhakti Margatama Persada	1990
4	Lingkar Luar Jakarta (JORR), Seksi S:					
	a. P. Pinang-L. Agung	8,8	-	8,8	Marga Nurindo Bhakti	1995
	b. L. Agung-Kp. Rambutan	6,03	-	6,03	Marga Nurindo Bhakti	1996
5	Taman Mini - Hankam Raya	4	4		Jasa Marga	2004
6	Pondok pinang - Veteran	2,4	2,4		Jasa Marga	2004
7	Pondok Aren - Bintaro - Ulujami	5,5	5,5		Jasa Marga	2004
II Jawa Barat						
1	Jagorawi	46	46	-	Jasa Marga	1978
2	Jakarta-Cikampek	72	72	-	Jasa Marga	1988
3	Jembatan Citarum	0,91	0,91	-	Jasa Marga	1979
4	Padalarang-Cileunyi	46,58	46,58	-	Jasa Marga	1991
5	Plumbon - Kanci (Cirebon)	20,3	20,3	-	Istaka Karya	1997
6	Palimanan - Plumbon	6	6		Jasa Marga	2003
7	Cikampek Padalarang tahap I	17,5	17,5		Jasa Marga	2004
III Banten						
1	Jakarta-Tangerang Barat	27	27	-	Jasa Marga	1984
2	Tangerang Barat - Merak					
	a. Tangerang Barat - Ciujung	34,12	-	34,12	Marga Mandala Sakti	1993
	b. Ciujung-Serang Timur	13,5	-	13,5	Marga Mandala Sakti	1994
	c. Serang Timur – Cilegon Timur	13,33	-	13,33	Marga Mandala Sakti	1995
	d. Cilegon Timur – Cilegon Barat	8	-	8	Marga Mandala Sakti	1996
	e. Cilegon Barat -Tg. Gerem	3,5	-	3,5	Marga Mandala Sakti	1996
3	Serpong – Pondok Aren	6,9	-	6,9	PT Bintaro Serpong Damai	1999
IV Jawa Tengah						
1	Semarang Arteri (seksi A & B)	14,75	14,75	-	Jasa Marga	1983
2	Semarang Arteri (seksi C)	9,8	9,8	-	Adhi Karya	1998
V Jawa Timur						
1	Jembatan Mojokerto	1,25	1,25	-	Jasa Marga	1982
2	Surabaya-Gempol	42	42	-	Jasa Marga	1986
3	Surabaya-Gresik					
	a. Dupak-Tandes	3,5	-	3,5	Marga Bumi Matraraya	1993
	b. Tandes-Kebomas	11,55	-	11,55	Marga Bumi Matraraya	1994
	c. Kebomas-Manyar	5	-	5	Marga Bumi Matraraya	1995
VI Sulawesi Selatan						
1	Jembatan Talo Lama	1	-	1	Bosowa Marga Nusantara	1981
2	Ujung Pandang (seksi 1 & 2)	5,95	-	5,95	Bosowa Marga Nusantara	1998
VII Sumatera Utara						
1	Belawan-Medan-Tj. Morawa (Belmera)	34,4	34,4	-	Jasa Marga	1986
Total (Km)		550,57	389,65	160,92		
Total (%)		100%	70,77%	29,23%		

Sumber : Ditjen Bina Marga, Departemen PU

Tabel 4.21.2 :
Nama Ruas Jalan Tol dan Panjang Jalan Tol tahap Konstruksi di Indonesia, Tahun 2004

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)	Jasa Marga (Km)	Joint Venture (Km)	Perusahaan	Jenis Kerjasama	Status Keppres 39/97
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jakarta dan sekitarnya							
1.	Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi S + E1 (Taman Mini - Cikunir)	13,40	-	13,40	Marga Nurindo Bhakti	Joint Venture	Diteruskan
2.	Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi E2 + E3 + N	10,40	-	10,40	Citra Bhakti Margatama	Joint Venture	Diteruskan
3.	Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi W2	11,20	-	11,20	Citra Mataram Satria Margatama Persada	Joint Venture	Diteruskan
4.	Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi W1	9,70	-	9,70	Jakarta Lingkar Barat Satu	Joint Operation	Dikaji Ulang
6.	Bekasi Timur - Kp. Melayu	22,40	-	22,40	Kresna Kusuma Dyandra Marga	Joint Venture	Diteruskan
Sub-Total (Km)		67,10		67,10			
Sub-Total (%)		100%		91,88%			
II. Jawa Barat							
1.	Cikampek - Padalarang tahap II	40,00	40,00		Jasa Marga		Diteruskan
Sub-Total (Km)		40,00	40,00	0,00			
Sub-Total (%)		100%	100%	0%			
III. Jawa Timur							
1	Waru - Tj.Perak	36,50	-	36,50	Citra Marga Surabaya	Joint Venture	Dikaji Ulang
Sub-Total (Km)		36,50	0,00	36,50			
Sub-Total (%)		100%	0%	100%			
IV. Sulawesi Selatan							
1.	Ujung Pandang (Section 3)	4,25	-	4,25	Bosowa Marga Nusantara	Joint Venture	Dikaji Ulang
Sub-Total (Km)		4,25	0,00	4,25			
Sub-Total (%)		100,0%	0%	100%			
Total (Km)		178,75	11,90	166,85			
Total (%)		100%	6,66%	93,34%			

Sumber : Ditjen Prasarana Wilayah, Dept. Kimpraswil (Data diambil tahun 2005)

Tabel 4.22.1A
Jalan Nasional Jalan Tol

No	Provinsi	Panjang	
		Operasi	Rencana
		(km)	(km)
1	2	3	4
1	Sumatera Utara	42,70	75,80
2	Riau	-	90,00
3	Sumatera Selatan	-	22,00
4	Lampung	-	150,00
5	DKI Jakarta		
6	Banten		
7	Jawa Barat		
8	Jawa Tengah	600,37	1.612,45
9	D.I. Yogyakarta		
10	Jawa Timur		
11	Bali	-	7,50
12	Sulawesi Utara	-	46,00
13	Sulawesi Selatan	6,05	11,60
Total Indonesia		649,12	2.015,35

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.22.1B
Jalan Nasional Jalan Tol

No	Provinsi	Panjang	
		Operasi (km)	Rencana (km)
1	2	3	4
1	Sumatera Utara	42,70	135,80
2	Sumatera Barat	-	55,00
3	Riau	-	135,00
4	Kepulauan Riau	-	25,00
5	Sumatera Selatan	-	22,00
6	Lampung	-	250,00
7	DKI Jakarta		
8	Banten		
9	Jawa Barat		
10	Jawa Tengah	627,52	1.723,71
11	D.I. Yogyakarta		
12	Jawa Timur		
13	Bali	-	7,50
14	Sulawesi Utara	-	46,00
15	Sulawesi Selatan	6,05	11,60
Total Indonesia		676,27	2.411,61

Sumber : Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 360 / KPTS. / M. / 2008

Tanggal : 16 Juni 2008

Tabel 4.22.2A
Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
1	Tangerang Merak	73,00		
2	Cilegon			8,80
3	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	
4	Jalan Tol Dalam Kota Jakarta			
	Tomang-Grogol-Pluit	7,55		
	Tomang-Cawang	16,00		
	Ir. Wiyoto Wiyono.Msc (Cawang - Tj.Priok)	15,50		
	Harbour Road (Tanjung Priok-Pluit)	11,55		
5	Prof. DR. Sedyanto	14,30		
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR) I			
	Seksi S (Pd. Pinang-Taman mini)	14,25		
	Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC - Hankam Raya)	4,00		
	Seksi E2 (Cikunir-Cakung)	9,07		
	Seksi W2 Selatan (Pd. Pinang - Ulujami)	3,70		
	Seksi W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk)			7,00
	Seksi E3 (Cakung-Cilincing)			3,10
	Seksi E1 Utara (Hankam raya-Cikunir)			8,40
	Seksi W1 (Kebun Jeruk-Penjaringan)			9,80
7	Pondok Aren-Serpong	7,25		
8	Pondok Aren-Ulujami	5,55		
9	Akses Tanjung Priok			12,10
10	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu			21,00
11	Depok Antasari			21,70
12	Jakarta Outer Ring Road (JORR) II			
	Tol Tangerang/Merak -Tangerang -Teluk Naga-Sedyatmo			25,00
	Tol Tangerang/Merak -Tol Serpong			24,81
	Tol Serpong - Cinere			12,39
	Tol Jagorawi - Cinere			14,70
	Tol Jagorawi - Tol Jakarta/Cikampek			27,10
	Cikarang - Tanjung Periok			34,00
13	Bogor Ring Road			11,00
14	Jagorawi	50,00	9,00	
15	Ciawi Sukabumi			54,00
16	Sukabumi - Ciranjang			31,00
17	Ciranjang - Padalarang			33,00
18	Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cilenyi			20,85
19	Ujung Berung - Gedebage - Majalaya			19,20
20	Soreang - Pasir Koja			15,00
21	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	
22	Cikampek - Padalarang	58,50		
23	PadangLarang - Cileunyi	35,63	28,77	
24	Cileunyi - Sumedang - Dawuan			58,50
25	Cikampek - Padalarang			114,00

Lanjutan Tabel 4.22.2A

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
26	Palimanan - Cirebon/Kanci	26,30		
27	Kanci - Pejagan			34,00
28	Pejagan - Pemalang			56,00
29	Pemalang - Batang			35,00
30	Semarang - Batang			75,00
31	Semarang - Seksi A, B, dan C	24,75		
32	Semarang - Demak			25,00
33	Semarang - Solo			75,70
34	Yogyakarta - Bawean			104,00
35	Yogyakarta - Solo			45,00
36	Solo - Mantingan			58,00
37	Mantingan - Ngawi			27,00
38	Ngawi - Kertosono			84,00
39	Kertosono - Mojokerto			38,00
40	Mojokerto - Surabaya			37,00
41	Waru (Aloha) - Wonokromo - Tj. Perak			18,40
42	SS Waru - Bandara Juanda			13,50
43	Bandara Juanda - Tj Perak			23,00
44	Surabaya - Gresik	20,70		
45	Surabaya - Madura			5,40
46	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	
47	Gempol - Pandaan			14,00
48	Pandaan - Malang			30,00
49	Gempol - Pasuruan			32,00
50	Pusuruan - Probolinggo			40,00
51	Probolinggo - Banyuwangi			156,00
		542,60	64,77	
	Total Pulau Jawa	607,37		1.612,45

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.22.2B
Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	
		Operasi	Rencana
1	2	3	4
1	Tangerang Merak	73,00	
2	Cilegon - Bojanagara		15,69
3	Jakarta - Tangerang	33,00	
4	Jalan Tol Dalam Kota Jakarta		
	Tomang - Grogol - Pluit	7,55	
	Tomang - Cawang	16,00	
	Ir. Wiyoto Wiyono, Msc (Cawang - Tj.Priok)	15,50	
	Harbour Road (Tanjung Priok - Pluit)	11,55	
5	Prof. DR. Sedyanto	14,30	
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR) I		
	Seksi S (Pd. Pinang-Taman Mini)	14,25	
	Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC - Hankam Raya)	4,00	
	Seksi E2 (Cikunir-Cakung)	9,07	
	Seksi W2 Selatan (Pd. Pinang - Ulujami)	6,20	
	Seksi W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk)		7,00
	Seksi E3 (Cakung-Cilincing)	3,75	
	Seksi E1 Utara (Hankam raya-Cikunir)	8,10	
	Seksi W1 (Kebun Jeruk-Penjaringan)		9,85
7	Jalan Tol Terdalam Kota Jakarta		
	Kemayoran - Kp Melayu		9,65
	Duri Pulo - Kp Melayu		11,38
	Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper		22,92
	Sunter - Pulo Gebang - Tambelang		25,73
	Pasar Minggu - Casablanca		9,56
	Ulujami - Tanah Abang		8,27
8	Pondok Aren-Serpong	7,25	
9	Pondok Aren-Ulujami	5,55	
10	Akses Tanjung Priok		12,10
11	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu		21,04
12	Depok Antasari		21,55
13	Jakarta Outer Ring Road (JORR) II		
	Kamal - Teluk Naga - Batu Ceper		32,00
	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran		15,22
	Kunciran - Serpong		11,19
	Serpong - Cinere		10,14
	Cinere - Jagorawi (Cimanggis)		14,70
	Cimanggis- Cibitung		25,39
	Cikarang (Cibitung) - Tanjung Priok		34,50
14	Bogor Ring Road		11,00
15	Jagorawi	59,00	
16	Ciawi - Sukabumi		54,00
17	Sukabumi - Ciranjang		28,00
18	Ciranjang - Padalarang		33,00
19	Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cilenyi		20,85
	Sub Total	288,07	464,73

Lanjutan Tabel 4.22.2B

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	
		Operasi	Rencana
1	2	3	4
20	Ujung Berung - Gedebage - Majalaya		19,20
21	Soreang - Pasir Koja		15,00
22	Jakarta - Cikampek	83,00	
23	Cikampek - Padalarang	58,50	
24	PadangLarang - Cileunyi	64,40	
25	Cileunyi - Sumedang - Dawuan		58,50
26	Cikampek - Palimanan		116,00
27	Palimanan - Cirebon/Kanci	26,30	
28	Kanci - Pejagan		35,00
29	Pejagan - Pemalang		57,50
30	Pemalang - Batang		39,00
31	Semarang - Batang		75,00
32	Semarang - Seksi A, B, dan C	24,75	
33	Semarang - Demak		23,99
34	Semarang - Solo		75,70
35	Yogyakarta - Bawen		104,00
36	Yogyakarta - Solo		40,49
37	Solo - Mantingan		56,10
38	Mantingan - Ngawi		34,00
39	Ngawi - Kertosono		87,02
40	Kertosono - Mojokerto		41,65
41	Mojokerto - Surabaya		34,05
42	Waru (Aloha) - Wonokromo - Tj. Perak		17,72
43	SS Waru - Bandara Juanda	12,80	
44	Bandara Juanda - Tj Perak		23,00
45	Surabaya - Gresik	20,70	
46	Surabaya - Madura		5,40
47	Surabaya - Gempol	49,00	
48	Gempol - Pandaan		13,61
49	Pandaan - Malang		37,62
50	Gempol - Pasuruan		33,75
51	Pusuruan - Probolinggo		45,32
52	Probolinggo - Banyuwangi		170,36
Sub Total		339,45	1.258,98
Total Pulau Jawa		627,52	1.723,71

Sumber : Lampiran I.2.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 360 / KPTS. / M. / 2008

Tanggal : 16 Juni 2008

Tabel 4.22.3A
Jalan Nasional Jalan Tol, Pulau Sumatera
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Antar Kota				
1	Binjai - Medan			15,80
2	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi			60,00
3	Pekanbaru-Dumai			90,00
4	Bakauheni-Terbanggi Besar			150,00
Sub Total				315,80
Dalam Kota				
5	Balmera (Belawan-Medan-Tj. Morawa)	33,70	9,00	
6	Palembang-Indralaya			22,00
Sub Total		33,70	9,00	22,00
Total Sumut,Riau,Sumsel dan Lampung		42,70		337,80

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.22.3B
Jalan Nasional Jalan Tol
Pulau Sumatera
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	
		Operasi	Rencana
		3	4
1	2	3	4
Antar Kota			
1	Binjai - Medan		15,80
2	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi		60,00
3	Kisaran - Tebing Tinggi		60,00
4	Pekanbaru - Dumai		135,00
5	Bukit Tinggi - Pd Panjang - Lbk Alung - Padang		55,00
6	Terbanggi Besar - Menggala - Pmtg Panggang		100,00
7	Bakauheni - Terbanggi Besar		150,00
8	Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim		25,00
Sub Total			600,80
Dalam Kota			
9	Balmera (Belawan - Medan - Tj. Morawa)	42,70	
10	Palembang - Indralaya		22,00
Sub Total		42,70	22,00
Total Sumut, Riau, Sumsel dan Lampung		42,70	622,80

Sumber : Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 360 / KPTS. / M. / 2008

Tanggal : 16 Juni 2008

Tabel 4.22.4
Jaringan Jalan Tol Pulau Sulawesi
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Antar Kota				
1	Menado			46,00
Sub Total				46,00
Dalam Kota				
2	Ujung Pandang I	6,05		
3	Makasar Seksi IV			11,60
Sub Total		6,05		11,60
Total Sulawesi Utara dan Sulawesi Sel:		6,05		57,60

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.22.5
Jaringan Jalan Tol Pulau Bali
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Dalam Kota				
1	Serangan-Tanjung Benoa			7,50
Sub Total		0	-	7,50
Total Pulau Bali		0		7,50

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 4.23.1
Jalan Tol Sudah Operasi
(Sejak Infrastructure Summit 2005)

No	Ruas / Kelompok	Panjang (Km)	Waktu Pelaksanaan	Investor	Status Mei 2009
1	2	3	4	5	6
1	Cikampek - Padalarang Tahap II	41,00	2004 - 2005	PT. Jasa Marga	Operasi
2	JORR E1-3, W2-S, E3, E1-4	14,69	2005 - 2007	PT. Jasa Marga	Operasi
3	SS Waru - Bandara Juanda	12,80	2006 - 2008	PT. Citra Margatama Surabaya	Operasi
Total		68,49			

Sumber : www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10313

Tabel 4.23.2
Jalan Tol Dalam Tahap Konstruksi
(Sejak Infrastructure Summit 2005)

No	Ruas / Kelompok	Panjang (Km)	Rencana Pelaksanaan	Investor	Status Mei 2009
1	2	3	4	5	6
1	Jembatan Suramadu	5,40	2004 - 2008	Dibangun Pemerintah	Konstruksi, Rencana Selesai 2009
2	Surabaya - Mojokerto	37,00	2006 - 2008	PT. Marga Nuyjasmo Agung	Konstruksi, TT PPJT 6/4/06, FC 24/1/07
3	JORR Seksi W1	9,70	2006 - 2008	PT. Jakarta Lingkar Baratsatu	Konstruksi, TT PPJT 2/2/07, FC 1/8/07, Rencana Operasi Akhir 2008
4	Makasar Seksi IV	11,60	2006 - 2007	PT. Jalan Tol Seksi Empat	Konstruksi, TT PPJT 29/5/06, FC 25/4/07, Rencana Operasi Agustus 2008
5	Kanci - Pejagaan	34,00	2006 - 2009	PT. Semesta Marga Raya	Konstruksi, TT PPJT 29/6/06, FC 9/3/07,
Total		97,70			

Sumber : www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10313

Tabel 4.24
Ruas Jalan Tol Yang Telah Beroperasi

Status 27 Juli 2006

No.	Ruas	Panjang (KM)			Pengelola	Masa Konsesi			Keterangan	
		Utama	Akses	Total		dari	- sampai	tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. PENGUSAHAAN OLEH PT. JASA MARGA										
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	50,00	9,00	59,00	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	Penetapan Men. PU ttg Masa Konsesi tgl 8 Juni 2006 dan Tanda Tangan PPJT tgl 7 Juli 2006
2	Cawang - Tomang	16,00	-	16,00	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
3	Tomang - Grogol - Pluit	7,55	-	7,55	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
4	Prof. Dr. Ir. Soedyatmo (Cengkareng)	14,30	-	14,30	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
5	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	83,00	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
6	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	33,00	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
7	Cikampek - Padalarang	58,50	-	58,50	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
8	Padalarang - Cileunyi	35,63	28,77	64,40	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
9	Palimanan - Cirebon/Kanci	26,30	-	26,30	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
10	Semarang Seksi A,B,C	24,75	-	24,75	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
11	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	49,00	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
12	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	33,70	9,00	42,70	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
13	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	-	5,55	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
14	JORR E2 (Cikunir - Cakung)	9,07	-	9,07	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
15	JORR E1 Selatan (Taman Mini IC - Hankam Raya)	4,00	-	4,00	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
16	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Ulujami)	3,70	-	3,70	PT. Jasa Marga	2005	-	2045	40	
TOTAL A		431,05	69,77	500,82						
B. PENGUSAHAAN OLEH PT. JASA MARGA dan BADAN USAHA										
1	Tangerang - Merak	73,00	-	73,00	PT. Marga Mandala Sakti					
	- Tangerang - Ciujung Tahap I	34,00	-	34,00		1990	-	2020	30	
	- Ciujung - Merak Tahap II	39,00	-	39,00		1993	-	2023	30	
2	Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc. (Cawang - Tg. Priok)	15,50	-	15,50	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1994	-	2023	29	
3	Harbour Road (Pluit - Ancol - Jembatan Tiga)	11,55	-	11,55	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1994	-	2023	29	
4	Surabaya - Gresik	20,70		20,70	PT. Margabumi Matraraya	1991	-	2016	25	
5	Ujung Pandang Tahap I	6,05		6,05	PT. Bosowa Marga Nusantara	1994	-	2024	30	
6	Serpong - Pondok Aren	7,25		7,25	PT. Bintaro Serpong Damai	1997	-	2024	27	
7	JORR S (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25	-	14,25	PT. Jalantol Lingkar Luar Jakarta					
TOTAL B		148,30	-	148,30						
TOTAL		579,35	69,77	649,12						

Sumber : Ditjen. Bina Marga, Dep. PU

Tabel 4.25.1
Prioritas Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

No.	Ruas	Panjang (km)	Waktu Pelaksanaan	Investor
1	2	3	4	5
1	Cikarang - Tj. Priok	33,92	2006 - 2009	MTD - Nusa Cipta
2	Cikampek - Palimanan	116,00	2006 - 2009	PT. Lintas Marga Sedaya
3	Kanci - Pejagan	34,00	2006 - 2009	PT. Semesta Marga Raya
4	Pejagan - Pemalang	57,50	2006 - 2009	PT. Pejagan Pemalang Toll Road
5	Pemalang - Batang	39,00	2006 - 2009	PT. Pemalang Batang Toll Road
6	Semarang - Batang	75,00	2006 - 2009	PT. Marga Setiapuritama
7	Semarang - Solo	75,70	2006 - 2009	PT. Jasa Marga
8	Solo - Mantingan - Ngawi	90,10	2006 - 2009	-
9	Ngawi - Kertosono	87,02	2006 - 2009	-
10	Kertosono - Mojokerto	41,00	2006 - 2009	PT. Marga Hanuratama Intrinsic
11	Surabaya - Mojokerto	37,00	2006 - 2008	PT. Marga Nujyasumo Agung
12	Gempol - Pasuruan	32,00	2006 - 2009	PT. Jasa Marga
13	Pasuruan - Probolinggo	45,00	2006 - 2009	PT. Bukaka Teknik Utama Tbk
Total		763,24		

Sumber : <http://www.bpjt.net/index.php?id=52>

Tabel 4.25.2
Prioritas Pembangunan Jalan Tol Non Trans Jawa

No.	Ruas	Panjang (km)	Waktu Pelaksanaan	Investor
1	2	3	4	5
1	JORR Seksi W2 Utara	7,00	2006 - 2008	PT. Jasa Marga
2	JORR Seksi E3	4,60	2005 - 2006	PT. Jasa Marga
3	JORR Seksi E1 Utara Seksi 4	4,05	2005 - 2006	PT. Jasa Marga
4	SS Waru - Bandara Juanda	13,50	2006 - 2007	PT. Citra Margatama Surabaya
5	Gempol - Pandaan	13,61	2006 - 2009	PT. Margabumi Adhikaraya
6	Bekasi - Cawang - Kp. Melayu	20,42	2006 - 2009	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
7	Ciranjang - Padalarang	33,30	2006 - 2009	Bina Puri Holding Bhd
8	Waru (Aloha) - Wonokromo - Tg. Perak	17,72	2006 - 2009	PT. Margaraya Jawa Tol
9	JORR Seksi W1	9,70	2006 - 2008	PT. Jalantol Lingkar Baratsatu
10	Bogor Ring Road	11,00	2006 - 2008	PT. Jasa Marga
11	Ciawi - Sukabumi	54,00	2006 - 2009	PT. Bukaka Teknik Utama
12	Pandaan - Malang	37,00	2006 - 2009	PT. Setdco Intrinsic Nusantara
13	Depok - Antasari	21,70	2006 - 2008	PT. Citra Wasphtowa
14	Cinere - Jagorawi	14,70	2006 - 2008	PT. Trans Lingkar Kita Jaya
15	Makasar Seksi IV	11,60	2006 - 2007	PT. Jalan Tol Seksi Empat
16	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	15,22	2006 - 2009	-
17	Kunciran - Serpong	11,19	2006 - 2009	-
18	Serpong - Cinere	10,14	2006 - 2009	-
19	Cimanggis - Cibitung	25,39	2006 - 2009	-
Total Non Trans Jawa		335,84		

Sumber : <http://www.bpjt.net/index.php?id=52>

Tabel 4.26
Profil Jalan Tol Indonesia

No.	Nama Ruas	Panjang (km)	Kecepatan Rencana (km/jam)	Jumlah Lajur (lajur)	Lebar Lajur (m)	Lebar Bahu Luar (m)	Lebar Bahu Dalam (m)	Lebar Median (m)	Lebar Damija (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bandara Juanda - Tanjung Perak	23,0	80,0	2x3	3,6	2,0	0,5	0,0	-
2	Cilegon - Bojanegara	15,7	100,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	40 - 60
3	Cileunyi - Sumedang	25,0	100,0	2x3	3,6	3,0	1,5	3,0	40,0
4	Jogja - Solo	40,5	120,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	60 - 70
5	Kandis - Dumai	50,0	80,0	2x3	3,6	3,0	1,5	0,0	0,0
6	Manado - Bitung	46,0	80,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	40,0
7	Medan - Binjai	15,8	100,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	40,0
8	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	60,0	100,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	40,0
9	Palembang - Indralaya	22,0	100,0	2x3	3,6	3,0	1,0	10,0	47,5
10	Pasirkoja - Soreang	15,0	80,0	2x3	3,5	2,0	0,5	3,0	-
11	Pekanbaru - Kandis	40,0	80,0	2x3	3,6	3,0	1,5	0,0	0,0
12	Probolinggo - Banyuwangi	170,4	120,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	60 - 100
13	Semarang - Demak	25,0	80 - 120	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	60 - 80
14	Serangan - Tanjung Benoa	7,5	100,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	40,0
15	Sukabumi - Ciranjang	31,0	80 - 100	2x3	3,6	3,0	1,5	9,7	60,0
16	Sumedang - Dawuan	33,5	80 - 100	2x3	3,6	3,0	1,5	13,0	60,0
17	Tegineneng - Babatan	51,0	100,0	2x3	3,6	3,0	1,5	5,5	40,0

Sumber : www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10313

Tabel 4.27
Panjang Jalan Nasional, Propinsi Per Wilayah tahun 2000-2004

No.	Provinsi	Jalan Nasional					Jalan Propinsi				
		2000	2001	2002	2003	2004*	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh D	1.144,02	1.144,02	1.181,06	1.181,06	1.782,78	1.942,68	1.942,68	1.963,76	1.963,72	1.701,82
2	Sumatera Utara	1.305,96	1.450,00	1.522,86	1.524,19	2.098,05	2.124,35	2.124,35	2.660,09	2.711,28	2.752,50
3	Sumatera Barat	871,96	855,11	929,38	929,80	1.200,09	1.389,40	1.389,40	1.453,29	1.477,57	1.130,73
4	Riau	838,56	908,64	943,94	944,32	1.126,11	1.709,52	1.709,52	1.655,53	1.678,59	1.795,92
5	Jambi	853,27	829,93	874,11	878,79	820,40	1.061,96	1.061,96	1.104,85	1.224,32	1.525,40
6	Bengkulu	750,43	737,72	750,17	750,20	736,44	839,11	839,11	860,75	866,82	1.356,57
7	Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00	530,65	912,59	934,36	1.008,03	1.008,03	511,48
8	Sumatera Selatan	1.006,95	1.006,15	1.006,74	1.070,15	1.290,24	2.623,86	1.495,32	1.717,23	1.871,52	1.621,33
9	Lampung	851,26	864,24	864,83	865,12	1.004,16	2369,97	1.830,96	1.923,21	2.289,79	2.355,09
		7.622,41	7.795,81	8.073,09	8.143,63	10.588,92	12.603,47	13.327,66	14.346,75	15.091,64	14.750,84
10	DKI Jakarta	153,50	153,50	153,50	153,50	122,38	1.534,99	1.534,99	1.534,99	1.534,99	1.124,51
11	Banten	0,00	103,18	103,18	103,18	490,40	456,43	456,43	727,86	750,85	372,25
12	Jawa Barat	1.062,22	965,58	969,90	969,90	1.140,69	1.994,41	1.666,01	1.827,59	2.119,92	2.141,23
13	Jawa Tengah	1.215,46	1.290,42	1.292,41	1.294,24	1.297,63	2.589,61	2.476,39	2.597,42	2.588,28	2.550,21
14	DI Yogyakarta	158,34	197,00	197,94	198,01	168,81	690,25	594,74	648,58	656,14	690,25
15	Jawa Timur	1.783,49	1.916,74	1.974,32	1.978,75	1.899,21	1.439,18	1.439,18	2.066,62	2.157,67	1.439,18
		4.373,01	4.626,41	4.691,25	4.697,58	5.119,12	8.704,87	8.167,74	9.403,06	9.807,85	8.317,63
16	Bali	405,93	411,88	422,53	422,78	501,64	846,89	813,21	822,33	822,67	839,88
17	Nusa Tenggara Barat	541,72	538,79	557,34	557,34	601,83	1.154,57	1.292,50	1.324,94	1.326,58	1.416,41
18	Nusa Tenggara Timur	1.121,85	1.195,67	1.195,67	1.195,69	1.273,02	2.901,05	2.572,37	2.753,56	2.757,13	2.626,92
		2.069,50	2.146,33	2.175,53	2.175,80	2.376,49	4.902,51	4.678,08	4.900,83	4.906,38	4.883,21
19	Kalimantan Barat	1.006,62	1.011,12	1.012,80	1.016,88	1.575,32	1.788,96	1.788,96	1.901,39	1.901,39	627,64
20	Kalimantan Tengah	1.707,53	1.683,68	1.685,00	1.690,10	1.714,95	1.059,26	660,14	760,29	760,29	771,56
21	Kalimantan Selatan	864,07	939,74	939,74	942,23	876,00	1.056,38	851,76	857,14	857,16	898,14
22	Kalimantan Timur	1.226,21	1.417,24	1.491,73	1.495,56	1.539,70	1.640,07	646,91	751,52	751,56	1.442,07
		4.804,43	5.051,78	5.129,27	5.144,77	5.705,97	5.544,67	3.947,77	4.270,34	4.270,40	3.739,41
23	Sulawesi Utara	1.360,39	841,16	841,16	842,13	1.267,39	1.310,25	506,30	1.058,33	1.061,33	740,57
24	Gorontalo	0,00	549,25	549,25	545,25	616,24	468,22	64,13	395,30	405,82	284,22
25	Sulawesi Tengah	1.592,99	1.567,23	1.624,04	1.629,67	1.806,46	2.037,06	1.235,52	1.453,98	1.454,26	1.976,81
26	Sulawesi Selatan	1.669,57	1.688,82	1.688,97	1.689,65	2.107,54	1.618,51	1.229,17	1.661,84	1.680,00	1.486,47
27	Sulawesi Tenggara	612,60	612,60	629,08	629,08	1.293,87	1.487,36	844,72	844,72	1.289,71	488,80
		5.235,55	5.259,06	5.332,49	5.335,76	7.091,50	6.921,40	3.879,83	5.414,16	5.891,12	4.976,87
28	Maluku	464,68	252,29	252,29	252,29	985,46	1.611,87	1.226,87	1.228,84	1.228,84	997,72
29	Maluku Utara	0,00	217,77	217,77	217,77	458,21	688,93	688,93	791,56	791,56	586,74
30	Irian Jaya	1.701,96	1.697,72	1.697,72	1.697,72	2.303,16	1.872,60	1.210,18	1.265,21	1.266,71	1.872,60
		2.166,64	2.167,78	2.167,78	2.167,78	3.746,83	4.173,40	3.125,98	3.285,61	3.287,12	3.457,06
	Jumlah	26.271,54	27.047,16	27.569,40	27.768,00	34.628,83	42.850,32	37.127,08	41.620,76	43.254,50	40.125,02

Sumber : Ditjen Prasarana Wilayah, Dept. Kimpraswil

Untuk Panjang Jalan Nasional dan Provinsi Th. 2004, Berdasarkan Kepmen No.376/KPTS/M/2004, Tanggal 19 Oktober 2004

* Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 360 / KPTS. / M. / 2008

Tanggal : 16 Juni 2008

Tabel 4.28
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi (Km), Tahun 2003 - 2004

No.	Propinsi	Panjang Jalan (Km)		Arteri (Km)		Kolektor 1 (Km)		Kolektor 2 (Km)	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D.I. Aceh	3.264,846	3.484,60	532,123	535,98	648,844	1.246,80	1.814,958	1.577,94
2	Sumatera Utara	4.510,773	4.850,55	1.325,370	1.043,70	331,849	1.054,35	2.223,446	2.594,23
3	Sumatera Barat	2.369,683	2.330,82	550,057	670,3	367,873	529,79	1.047,014	800,32
4	Riau	2.596,264	2.922,03	679,369	783,85	218,290	342,26	1.637,277	1.747,96
5	Jambi	2.001,223	2.345,80	754,498	716,7	101,970	103,7	866,367	1.516,27
6	Bengkulu	1.563,564	2.093,01	187,057	170,52	550,662	565,92	579,669	920,78
7	Sumatera Selatan	2.878,515	2.911,57	1.066,354	1.049,76	0	240,48	1.467,178	1.538,33
8	Bangka Belitung	941,232	1.042,13	0	0	0	530,65	812,293	457,01
9	Lampung	3.082,420	3.359,25	489,603	475,14	374,515	529,02	1.386,779	1.955,05
10	Jawa Barat	2.934,459	3.281,92	794,107	777,05	176,202	363,64	1.638,123	2.141,23
11	Banten	580,879	862,65	103,178	104,31	0,000	386,09	427,594	347,52
12	Jawa Tengah	3.904,956	3.847,84	1.009,234	947,98	287,054	349,65	1.997,471	2.458,75
13	D.I.Yogyakarta	850,963	859,06	124,963	100,27	73,055	68,54	335,100	535,57
14	Jawa Timur	4.110,946	3.338,39	1.044,099	905,62	902,442	993,59	1.222,846	1.288,04
15	Kalimantan Barat	2.951,116	2.202,96	703,263	698,41	326,834	876,91	1.260,043	627,64
16	Kalimantan Tengah	2.292,840	2.486,51	843,119	820,2	788,579	894,75	341,822	757,4
17	Kalimantan Timur	2.400,972	2.981,77	364,182	326,8	1.124,722	1.212,90	556,015	1.298,07
18	Kalimantan Selatan	1.790,450	1.774,14	406,889	336,44	531,778	539,56	648,137	757,97
19	Bali	1.310,302	1.341,52	254,197	201,06	195,542	300,58	488,127	474,32
20	Nusa Tenggara Barat	1.883,812	2.018,24	493,965	502,78	44,825	99,05	976,131	1.416,41
21	Nusa Tenggara Timur	3.951,821	3.899,94	1.014,773	998,54	180,915	274,48	2.226,831	2.193,50
22	Sulawesi Utara	1.290,713	2.007,96	377,100	393,23	407,316	874,16	304,815	734,17
23	Gorontalo	665,455	900,46	306,261	311,46	239,744	304,78	29,003	284,22
24	Sulawesi Tengah	2.951,304	3.783,27	677,562	684,34	843,239	1.122,12	1.136,038	1.932,63
25	Sulawesi Selatan	3.335,094	3.594,01	1.156,103	1.170,83	533,546	936,71	1.238,910	1.464,15
26	Sulawesi Tenggara	2.004,674	1.782,67	491,821	434,31	137,255	859,56	1.035,685	488,8
27	Maluku	1.481,103	1.983,18	37,867	43,45	214,393	942,01	744,150	753,51
28	Maluku Utara	1.009,333	1.044,95	0	0	217,770	458,21	370,293	446,19
29	Irian jaya	2.964,719	4.175,76	986,899	1.519,71	712,060	783,45	820,360	1.667,34
	Indonesia	67.874,431	73.506,960	16.774,013	16.722,740	10.531,274	17.783,710	29.632,475	35.175,320

Sumber : Ditjen Bina Marga, Departemen PU

Tabel 4.28 (Lanjutan)
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi (Km), Tahun 2003 - 2004

No.	Propinsi	Kolektor 3 (Km)		Lokal (Km)		Sekunder (Km)		Jumlah (Km)	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	D.I. Aceh	186,921	123,88	82	82	0	0	13.581,892	15.635,63
2	Sumatera Utara	551,786	158,27	0	0	56,55	56,55	18.702,874	22.122,26
3	Sumatera Barat	280,303	330,41	73,307	73,307	10,422	10,422	9.436,606	11.018,10
4	Riau	45,761	47,96	0	0	15,567	15,567	11.040,588	12.917,40
5	Jambi	122,703	9,13	0	0	29,034	29,034	8.572,395	10.283,57
6	Bengkulu	213,32	435,79	0	0	32,856	51,512	7.319,148	8.979,41
7	Sumatera Selatan	243,222	83	0	0	51,512	32,856	11.536,921	13.492,84
8	Bangka Belitung	128,939	54,47	0	53,134	0	27,735	4.027,858	4.757,15
9	Lampung	713,012	400,04	53,134	0	27,735	0	12.854,698	16.012,67
10	Jawa Barat	324,537	0	1,49	0	0	0	12.432,758	14.900,02
11	Banten	50,107	24,73	0	20,659	0	5,053	2.907,717	3.355,79
12	Jawa Tengah	602,152	91,46	0	0	7,045	7,045	15.503,592	18.670,04
13	D.I.Yogyakarta	266,503	154,68	0	0	0	0	3.368,704	4.325,46
14	Jawa Timur	750,734	151,14	0	0	44,79	44,79	14.752,637	17.032,13
15	Kalimantan Barat	360,254	0	20,659	0	5,053	46,118	10.033,142	11.092,87
16	Kalimantan Tengah	3,549	14,16	0	3,8	7,328	47,636	9.254,057	10.087,93
17	Kalimantan Timur	69,02	144	102,503	0	1,753	0	10.582,707	12.198,05
18	Kalimantan Selatan	132,373	140,17	0	0	0	0	7.057,907	8.088,42
19	Bali	203,991	365,56	0	0	46,118	7,328	5.181,317	6.278,63
20	Nusa Tenggara Barat	137,971	0	3,8	102,503	47,636	1,753	7.727,123	9.437,20
21	Nusa Tenggara Timur	520,345	433,42	0	0	0	0	15.694,565	18.841,83
22	Sulawesi Utara	201,482	6,4	0	64,622	0	0	6.661,968	7.668,64
23	Gorontalo	25,825	0	64,622	0	0	0	3.131,830	3.506,50
24	Sulawesi Tengah	197,827	44,18	63,881	63,881	30,888	30,888	13.531,160	15.895,34
25	Sulawesi Selatan	89,993	22,32	0	0	0,753	0,753	13.542,419	15.120,39
26	Sulawesi Tenggara	108,381	0	115,15	115,15	0	0	7.573,456	8.400,94
27	Maluku	394,593	244,21	0	0	0	0	6.838,466	8.230,78
28	Maluku Utara	155,77	140,55	0	0	0	0	3.843,066	4.585,58
29	Irian jaya	445,4	205,26	0	0	0	0	14.280,958	16.598,96
	Indonesia	7.526,774	3.825,190	580,546	579,056	415,040	415,040	280.972,529	329.534,495

Sumber : Ditjen Bina Marga, Departemen PU

Tabel 4.29
Panjang Jalan Nasional Menurut Fungsi dan Tipe Perkerasan Jalan Per Provinsi
Tahun 2005 (Km)

(Data Hasil Filterisasi IIRMS Dengan Kepmen No. 376/KPTS/M/2004)

No.	Provinsi	Fungsi Jalan dan Tipe Perkerasan				Total
		Arteri		Kolektor		
		Aspal	Non-Aspal	Aspal	Non-Aspal	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	496,45	-	1.033,22	135,00	1.664,67
2	Sumatera Utara	1.043,70	-	902,24	130,00	2.075,94
3	Sumatera Barat	670,30	-	529,79	-	1.200,09
4	Riau	783,85	-	273,64	68,62	1.126,11
5	Jambi	716,70	-	103,70	-	820,40
6	Bengkulu	164,62	-	565,92	-	730,54
7	Sumatera Selatan	1.049,76	-	232,48	-	1.282,24
8	Bangka Belitung	-	-	530,65	-	530,65
9	Lampung	475,14	-	494,02	30,00	999,16
10	Jawa Barat	755,90	-	333,22	-	1.089,12
11	Banten	104,31	-	386,09	-	490,40
12	Jawa Tengah	947,98	-	337,77	3,98	1.289,73
13	DI. Yogyakarta	100,27	-	68,54	-	168,81
14	Jawa Timur	932,51	-	922,96	-	1.855,47
15	Kalimantan Barat	425,22	273,19	815,91	60,40	1.574,72
16	Kalimantan Tengah	663,35	151,50	340,20	419,70	1.574,75
17	Kalimantan Timur	320,55	-	596,81	600,76	1.518,12
18	Kalimantan Selatan	333,84	-	536,81	-	870,65
19	Bali	204,35	-	291,63	-	495,98
20	Nusa Tenggara Barat	492,87	-	89,40	-	582,27
21	Nusa Tenggara Timur	943,95	-	269,60	-	1.213,55
22	Sulawesi Utara	393,23	-	873,34	-	1.266,57
23	Gorontalo	311,46	-	249,49	55,29	616,24
24	Sulawesi Tengah	653,64	-	989,01	-	1.642,65
25	Sulawesi Selatan	1.146,80	8,27	878,33	-	2.033,40
26	Sulawesi Tenggara	433,51	-	580,96	271,45	1.285,92
27	Maluku	36,89	-	530,55	238,46	805,90
28	Maluku Utara	-	-	381,61	68,00	449,61
29	Papua	697,38	450,00	269,54	459,58	1.876,50
30	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
	Indonesia	15.298,53	882,96	14.407,43	2.541,24	33.130,16

Sumber : Statistik Jalan Nasional Tahun 2005 (IIRMS, data hingga tahun 2005)

Tabel 4.30
Panjang Jalan Nasional Menurut Kondisi
Per Provinsi Tahun 2005
(Data Hasil Filterisasi IIRMS Dengan KEPMEN NO. 376/KPTS/M/2004)

No	Provinsi	Panjang (SK - Km)	KONDISI					No Data	Total
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	No Result		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.782,78	78,66	1.447,26	138,75	-	1.664,67	118,11	1782,78
2	Sumatera Utara	2.098,05	635,04	1.124,43	279,07	37,40	2075,94	22,11	2098,05
3	Sumatera Barat	1.200,09	751,80	442,79	5,50	-	1200,09	-	1200,09
4	Riau	1.126,11	535,85	589,64	-	0,62	1126,11	-	1126,11
5	Jambi	820,40	769,32	51,08	-	-	820,4	-	820,4
6	Bengkulu	736,44	493,14	230,95	-	6,45	730,54	5,90	736,44
7	Sumatera Selatan	1.290,24	439,34	685,16	157,74	-	1282,24	8,00	1290,24
8	Bangka Belitung	530,65	229,25	243,93	57,47	-	530,65	-	530,65
9	Lampung	1.004,16	460,00	497,31	41,85	-	999,16	5,00	1004,16
10	Jawa Barat	1.140,69	177,35	757,14	141,81	12,82	1089,12	51,57	1140,69
11	Banten	490,40	23,74	387,89	34,85	43,92	490,4	-	490,4
12	Jawa Tengah	1.297,63	213,54	1.012,73	51,14	12,32	1289,73	7,90	1297,63
13	DI Yogyakarta	168,81	53,15	115,66	-	-	168,81	-	168,81
14	Jawa Timur	1.899,21	771,05	1.040,95	35,16	8,31	1855,47	43,74	1899,21
15	Kalimantan Barat	1.575,32	790,40	616,12	168,20	-	1574,72	0,60	1575,32
16	Kalimantan Tengah	1.714,95	965,55	352,20	257,00	-	1574,75	140,20	1714,95
17	Kalimantan Timur	1.539,70	1.079,79	255,89	182,44	-	1518,12	21,58	1539,7
18	Kalimantan Selatan	876,00	528,27	340,19	1,79	0,40	870,65	5,35	876
19	Bali	501,64	188,43	306,02	0,73	0,80	495,98	5,66	501,64
20	Nusa Tenggara Barat	601,83	515,05	67,22	-	-	582,27	19,56	601,83
21	Nusa Tenggara Timur	1.273,02	511,84	583,19	105,99	12,53	1213,55	59,47	1273,02
22	Sulawesi Utara	1.267,39	557,45	708,72	0,40	-	1266,57	0,82	1267,39
23	Gorontalo	616,24	503,72	112,52	-	-	616,24	-	616,24
24	Sulawesi Tengah	1.806,46	1.006,22	626,83	3,05	6,55	1642,65	163,81	1806,46
25	Sulawesi Selatan	2.107,54	1.468,30	516,10	49,00	-	2033,4	74,14	2107,54
26	Sulawesi Tenggara	1.293,87	858,38	310,79	116,75	-	1285,92	7,95	1293,87
27	Maluku	985,46	586,49	219,41	-	-	805,9	179,56	985,46
28	Maluku Utara	458,21	186,27	195,34	68,00	-	449,61	8,60	458,21
29	Papua	2.303,16	855,74	760,50	260,26	-	1876,5	426,66	2303,16
30	DKI Jakarta	122,38	-	-	-	-	-	122,38	122,38
INDONESIA		34.628,83	16.233,13	14.597,96	2.156,95	142,12	33.130,16	1.498,67	34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Tabel 4.31
Kondisi Jalan Nasional Tiap Provinsi
Tahun 2006
(Data Hasil Filterisasi IIRMS Dengan KEPMEN NO. 376/KPTS/M/2004)

Status 15 April 2007

No.	Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Total
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	288,30	1.283,67	65,12	145,70	1.571,97	210,81	1.782,78
2	Sumatera Utara	662,63	1.336,28	99,13	-	1.998,92	99,13	2.098,05
3	Sumatera Barat	527,42	667,07	5,60	-	1.194,49	5,60	1.200,09
4	Riau	116,31	936,35	0,62	72,83	1.052,66	73,45	1.126,11
5	Kepulauan Riau ¹⁾							
6	Jambi	780,01	40,39	-	-	820,40	-	820,40
7	Bengkulu	225,79	510,65	-	-	736,44	-	736,44
8	Sumatera Selatan	519,71	743,52	27,01	-	1.263,23	27,01	1.290,24
9	Bangka Belitung	476,49	54,16	-	-	530,65	-	530,65
10	Lampung	289,20	610,22	104,74	-	899,42	104,74	1.004,16
11	DKI Jakarta ²⁾							
12	Jawa Barat	245,99	892,71	2,00	-	1.138,69	2,00	1.140,69
13	Banten	51,39	361,61	33,48	43,92	413,00	77,40	490,40
14	Jawa Tengah	476,71	805,02	8,33	7,57	1.281,72	15,91	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	47,84	120,97	-	-	168,81	-	168,81
16	Jawa Timur	511,11	1.328,34	55,90	3,85	1.839,46	59,75	1.899,21
17	Kalimantan Barat	613,53	189,43	612,83	159,52	802,97	772,35	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	308,38	659,74	417,09	329,75	968,12	746,83	1.714,95
19	Kalimantan Timur	453,80	839,14	145,99	100,76	1.292,95	246,75	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	125,57	443,47	206,46	100,50	569,04	306,96	876,00
21	Bali	409,49	90,60	0,74	0,81	500,09	1,55	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	412,43	167,12	22,29	-	579,54	22,29	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	177,06	958,77	137,19	-	1.135,83	137,19	1.273,02
24	Sulawesi Utara	332,61	709,17	97,00	128,61	1.041,78	225,61	1.267,39
25	Gorontalo	84,76	416,19	115,29	-	500,95	115,29	616,24
26	Sulawesi Tengah	390,41	1.075,33	199,78	140,94	1.465,74	340,72	1.806,46
27	Sulawesi Selatan	177,46	1.331,35	33,23	35,92	1.508,81	69,14	1.577,95
28	Sulawesi Barat	104,22	189,46	140,12	95,79	293,68	235,91	529,59
29	Sulawesi Tenggara	347,87	534,35	178,90	232,75	882,22	411,65	1.293,87
30	Maluku	241,75	146,64	297,78	299,30	388,38	597,08	985,46
31	Maluku Utara	221,54	143,08	-	93,59	364,62	93,59	458,21
32	Papua	30,58	674,41	553,47	536,49	704,99	1.089,96	1.794,95
33	Irian Jaya Barat	-	239,85	268,36	-	239,85	268,36	508,21
	Total Indonesia - DKI Jakarta	9.650,35	18.499,06	3.828,43	2.528,60	28.149,42	6.357,03	34.506,45
11	DKI Jakarta ²⁾							122,38
	Total Indonesia + DKI Jakarta							34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

¹⁾ Jalan nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

²⁾ DKI Jakarta menggunakan URMS

Tabel 4.32
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2007
(Data Hasil Filterisasi IIRMS Dengan KEPMEN NO. 376/KPTS/M/2004)

Status 11 Februari 2008

No.	Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Total (km)
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	228,03	1.418,32	116,43	20,00	1.646,35	136,43	1.782,78
2	Sumatera Utara	434,21	1.520,57	101,47	41,80	1.954,78	143,27	2.098,05
3	Sumatera Barat	610,85	589,24	-	-	1.200,09	-	1.200,09
4	Riau	116,31	936,35	0,62	72,83	1.052,66	73,45	1.126,11
5	Kepulauan Riau ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	818,66	1,74	-	-	820,40	-	820,40
7	Bengkulu	243,08	493,36	-	-	736,44	-	736,44
8	Sumatera Selatan	661,41	551,36	77,47	-	1.212,77	77,47	1.290,24
9	Bangka Belitung	476,49	54,16	-	-	530,65	-	530,65
10	Lampung	147,17	816,79	40,20	-	963,96	40,20	1.004,16
11	DKI Jakarta	122,38	-	-	-	122,38	-	122,38
12	Banten	51,39	361,61	33,48	43,92	413,00	77,40	490,40
13	Jawa Barat	548,70	584,40	7,59	-	1.133,10	7,59	1.140,69
14	Jawa Tengah	450,44	842,42	4,77	-	1.292,86	4,77	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	45,01	123,80	-	-	168,81	-	168,81
16	Jawa Timur	216,20	1.552,73	130,28	-	1.768,93	130,28	1.899,21
17	Kalimantan Barat	349,97	660,13	462,16	103,06	1.010,10	565,22	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	544,60	418,02	610,65	141,68	962,62	752,33	1.714,95
19	Kalimantan Timur	541,55	662,57	143,58	192,00	1.204,12	335,58	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	183,49	691,96	0,55	-	875,45	0,55	876,00
21	Bali	323,24	178,40	-	-	501,64	-	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	415,91	173,62	12,30	-	589,53	12,30	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	78,41	756,94	284,00	153,67	835,35	437,67	1.273,02
24	Sulawesi Utara	715,00	403,09	79,00	70,30	1.118,09	149,30	1.267,39
25	Gorontalo	195,80	420,44	-	-	616,24	-	616,24
26	Sulawesi Tengah	390,41	1.108,93	212,12	95,00	1.499,34	307,12	1.806,46
27	Sulawesi Barat	-	286,57	147,23	95,79	286,57	243,02	529,59
28	Sulawesi Selatan	1.375,10	202,85	-	-	1.577,95	-	1.577,95
29	Sulawesi Tenggara	328,08	601,64	203,90	160,25	929,72	364,15	1.293,87
30	Maluku	0,70	548,92	289,84	146,00	549,62	435,84	985,46
31	Maluku Utara	221,54	143,08	93,59	-	364,62	93,59	458,21
32	Papua	18,50	850,17	497,28	429,00	868,67	926,28	1.794,95
33	Irian Jaya Barat	-	246,76	261,45	-	246,76	261,45	508,21
Total Indonesia		10.852,63	18.200,94	3.809,96	1.765,30	29.053,57	5.575,26	34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

¹⁾ Jalan nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.33
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2008
(Berdasarkan Pengelompokan 4 Kondisi Menurut IRI Dalam Satu Ruas Jalan)
National Road Condition 2008

Status : 10 Desember 2008

No.	Pulau - Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Total (km)
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMATERA	5.817,04	3.705,42	652,46	413,99	9.522,46	1.066,46	10.588,92
1	Nanggroe Aceh Darussalam	743,53	662,62	70,05	306,57	1.406,16	376,62	1.782,78
2	Sumatera Utara	823,32	954,81	212,49	107,42	1.778,14	319,91	2.098,05
3	Sumatera Barat	463,75	683,49	52,86	-	1.147,23	52,86	1.200,09
4	Riau	926,23	116,07	83,81	-	1.042,30	83,81	1.126,11
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	271,84	492,93	55,63	-	764,77	55,63	820,40
7	Bengkulu	525,96	191,01	19,47	-	716,97	19,47	736,44
8	Sumatera Selatan	904,91	296,63	88,70	-	1.201,54	88,70	1.290,24
9	Bangka Belitung	481,72	46,87	2,06	-	528,59	2,06	530,65
10	Lampung	675,78	260,98	67,40	-	936,76	67,40	1.004,16
	JAWA	2.789,29	2.094,07	235,76	-	4.883,36	235,76	5.119,12
11	DKI Jakarta	122,38	-	-	-	122,38	-	122,38
12	Banten	188,40	224,97	77,03	-	413,37	77,03	490,40
13	Jawa Barat	695,84	411,67	33,18	-	1.107,51	33,18	1.140,69
14	Jawa Tengah	604,73	655,16	37,74	-	1.259,89	37,74	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	101,26	62,49	5,06	-	163,75	5,06	168,81
16	Jawa Timur	1.076,69	739,78	82,74	-	1.816,47	82,74	1.899,21
	KALIMANTAN	2.496,66	1.746,56	1.354,07	108,68	4.243,22	1.462,75	5.705,97
17	Kalimantan Barat	725,61	327,43	522,28	-	1.053,04	522,28	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	813,24	298,50	603,22	-	1.111,73	603,22	1.714,95
19	Kalimantan Timur	592,55	678,47	160,00	108,68	1.271,02	268,68	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	365,26	442,17	68,57	-	807,43	68,57	876,00
	BALI, MALUKU, NUSA TENGGARA	1.914,43	1.141,43	614,25	150,05	3.055,86	764,30	3.820,16
21	Bali	424,59	76,31	0,74	-	500,90	0,74	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	433,81	128,89	39,14	-	562,69	39,14	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	568,05	465,71	239,26	-	1.033,76	239,26	1.273,02
30	Maluku	268,67	324,20	242,54	150,05	592,88	392,58	985,46
31	Maluku Utara	219,31	146,32	92,58	-	365,63	92,58	458,21
	SULAWESI	3.937,20	2.012,54	1.078,27	63,49	5.949,74	1.141,76	7.091,50
24	Sulawesi Utara	893,45	196,97	176,97	-	1.090,42	176,97	1.267,39
25	Gorontalo	589,26	22,94	4,04	-	612,20	4,04	616,24
26	Sulawesi Tengah	1.174,40	360,70	207,87	63,49	1.535,10	271,36	1.806,46
27	Sulawesi Barat	13,55	366,65	149,39	-	380,20	149,39	529,59
28	Sulawesi Selatan	1.024,74	446,37	106,84	-	1.471,11	106,84	1.577,95
29	Sulawesi Tenggara	241,79	618,91	433,17	-	860,70	433,17	1.293,87
	PAPUA	246,26	920,18	683,08	453,64	1.166,44	1.136,72	2.303,16
32	Papua	102,78	737,75	661,61	292,81	840,53	954,42	1.794,95
33	Irian Jaya Barat	143,48	182,43	21,47	160,83	325,91	182,30	508,21
	Total Indonesia	17.200,88	11.620,20	4.617,90	1.189,85	28.821,08	5.807,75	34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.34
Rekapitulasi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2007
Berdasarkan Tahun Dibangun
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status 11 Februari 2008

No.	Provinsi	<1970		1970 - 1980		1980 - 1990		1990 - 2000		>2000		T o t a l	
		Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)	Jumlah (Jbt)	Panjang (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	69	1.812,00	351	4.117,00	251	5.638,80	310	9.351,60	23	992,10	1.004	21.911,50
2	Sumatera Utara	190	2.606,40	247	3.107,90	229	3.563,10	205	4.440,10	11	381,30	882	14.098,80
3	Sumatera Barat	82	1.316,90	155	2.042,70	201	4.674,20	177	4.698,90	2	92,00	617	12.824,70
4	Riau	8	668,00	14	659,40	123	2.908,10	205	5.563,60	21	950,60	371	10.749,70
5	Kepulauan Riau ¹⁾												
6	Jambi	20	731,80	132	1.572,50	112	3.574,20	42	907,50	1	60,00	307	6.846,00
7	Bengkulu	12	1.038,20	27	424,30	147	3.375,40	115	4.047,10	6	330,00	307	9.215,00
8	Sumatera Selatan	40	2.330,80	115	1.612,80	132	3.298,40	102	3.268,90	5	178,00	394	10.688,90
9	Bangka Belitung	25	334,10	26	620,30	34	318,80	12	203,50	-	-	97	1.476,70
10	Lampung	20	488,90	48	790,80	89	1.668,50	229	6.227,60	47	2.239,50	433	11.415,30
11	DKI Jakarta												
12	Banten	109	976,60	96	895,60	88	782,60	26	967,50	10	526,00	329	4.148,30
13	Jawa Barat	298	3.717,10	291	4.486,60	187	3.491,60	145	4.281,90	7	370,20	928	16.347,40
14	Jawa Tengah	466	5.063,70	225	4.167,70	331	4.367,00	229	5.800,70	38	1.571,00	1.289	20.970,10
15	D.I. Yogyakarta	13	714,20	21	669,20	30	827,10	41	1.865,00	38	2.888,80	143	6.964,30
16	Jawa Timur	911	6.805,00	133	2.057,90	247	3.379,40	234	5.755,40	18	660,30	1.543	18.658,00
17	Kalimantan Barat	210	3.362,30	41	1.022,80	326	6.543,00	73	3.560,10	30	599,30	680	15.087,50
18	Kalimantan Tengah	39	1.494,50	68	807,70	123	1.921,80	173	7.923,20	4	685,60	407	12.832,80
19	Kalimantan Timur	7	152,00	51	802,40	92	1.946,10	147	4.569,40	14	426,00	311	7.895,90
20	Kalimantan Selatan	18	486,10	80	1.431,80	92	1.937,40	335	7.635,00	99	2.074,40	624	13.564,70
21	Bali	87	971,60	132	2.322,70	70	1.830,70	61	1.363,30	-	-	350	6.488,30
22	Nusa Tenggara Barat	49	853,60	62	793,10	103	1.765,90	91	1.499,40	8	43,50	313	4.955,50
23	Nusa Tenggara Timur	105	1.275,30	191	1.738,10	58	1.023,00	247	4.478,40	47	1.261,70	648	9.776,50
24	Maluku	60	2.491,50	78	758,30	113	2.521,60	150	3.646,50	-	-	401	9.417,90
25	Maluku Utara	21	277,50	89	944,90	148	1.994,50	99	1.716,30	1	7,80	358	4.941,00
26	Sulawesi Utara	73	1.997,20	90	1.237,70	73	1.649,90	135	2.643,90	4	208,00	375	7.736,70
27	Gorontalo	38	769,00	33	250,60	32	756,00	177	3.100,50	10	368,50	290	5.244,60
28	Sulawesi Tengah	19	173,00	101	1.230,60	223	2.816,10	634	10.609,20	67	1.237,70	1.044	16.066,60
29	Sulawesi Barat	146	2.545,50	17	186,90	128	2.042,80	112	2.642,70	26	1.139,20	429	8.557,10
30	Sulawesi Selatan	207	1.579,10	229	3.401,90	322	4.105,80	137	4.278,40	16	717,90	911	14.083,10
31	Sulawesi Tenggara	113	1.954,20	53	782,70	149	2.013,00	246	4.119,80	12	509,20	573	9.378,90
32	Papua	31	1.303,30	7	137,00	99	1.684,70	194	3.781,70	17	546,00	348	7.452,70
33	Irian Jaya Barat	105	2.412,30	6	146,00	32	512,20	108	2.520,80	4	92,00	255	5.683,30
TOTAL		3.591	52.702	3.209	45.220	4.384	78.932	5.191	127.468	586	21.157	16.961	325.478

¹⁾ Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Ditjen Bina Marga Departemen PU

Tabel 4.35
Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2006
(Kondisi Jembatan Secara Umum)

Status 26 Desember 2006

No.	Provinsi	Kondisi 0		Kondisi 1		Kondisi 2		Kondisi 3		Kondisi 4		Kondisi 5		T o t a l	
		Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nanggroe Aceh Darussalam	9.686,40	445	6.737,10	286	1.587,60	102	1.857,80	83	1.058,10	70	696,00	11	21.623,00	997,00
2	Sumatera Utara	8.805,80	579	2.028,70	146	976,90	65	733,70	40	592,20	39	961,50	13	14.098,80	882,00
3	Sumatera Barat	7.869,10	340	1.728,20	121	1.212,90	68	1.021,60	29	541,40	48	451,50	11	12.824,70	617,00
4	Riau	4.655,10	184	1.965,30	70	1.759,00	43	951,30	46	693,00	20	726,00	8	10.749,70	371,00
5	Kepulauan Riau	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	Jambi	2.423,20	104	1.360,70	138	834,30	28	1.228,30	21	657,30	9	342,20	7	6.846,00	307,00
7	Bengkulu	4.196,60	171	1.001,10	31	2.254,80	69	545,70	15	103,50	10	1.021,90	9	9.123,60	305,00
8	Sumatera Selatan	5.716,70	231	1.386,00	65	1.795,20	56	523,20	24	317,20	6	950,60	12	10.688,90	394,00
9	Bangka Belitung	1.122,70	65	2,50	1	98,50	10	171,60	15	51,40	5	30,00	1	1.476,70	97,00
10	Lampung	3.696,30	154	3.550,00	153	1.590,50	74	755,10	30	200,10	4	240,00	4	10.032,00	419,00
11	DKI Jakarta	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Jawa Barat	8.942,80	370	2.576,40	282	2.634,40	156	1.024,80	50	372,40	7	796,60	63	16.347,40	928,00
13	Banten	2.390,10	174	390,30	62	631,00	53	435,90	29	249,70	10	60,30	2	4.157,30	330,00
14	Jawa Tengah	10.663,40	714	3.198,20	242	3.348,10	176	2.491,60	136	348,40	15	920,40	6	20.970,10	1.289,00
15	D.I. Yogyakarta	2.779,50	94	2.041,50	8	636,40	14	716,00	13	0,00	0	260,00	3	6.433,40	132,00
16	Jawa Timur	8.770,10	571	4.371,20	485	3.110,60	297	962,30	82	809,60	30	145,20	4	18.169,00	1.469,00
17	Kalimantan Barat	4.795,70	194	3.258,10	185	1.632,40	89	643,20	27	432,30	19	492,40	7	11.254,10	521,00
18	Kalimantan Tengah	7.275,30	237	2.138,50	44	586,40	42	1.558,60	48	437,50	23	753,50	10	12.749,80	404,00
19	Kalimantan Timur	3.705,60	157	1.286,50	43	1.304,30	59	1.362,50	37	212,00	14	25,00	1	7.895,90	311,00
20	Kalimantan Selatan	7.809,50	276	1.380,00	107	1.414,10	80	1.834,60	106	574,20	24	238,40	3	13.250,80	596,00
21	Bali	3.882,10	207	1.332,00	69	678,00	54	325,30	12	70,90	5	200,00	3	6.488,30	350,00
22	Nusa Tenggara Barat	3.769,00	199	655,30	64	515,10	47	16,10	3	0,00	0	0,00	0	4.955,50	313,00
23	Nusa Tenggara Timur	4.467,30	343	1.511,90	115	892,60	49	624,50	43	195,20	7	305,10	16	7.996,60	573,00
24	Sulawesi Utara	3.060,40	150	1.120,30	71	1.303,10	80	290,90	16	588,50	31	1.373,50	27	7.736,70	375,00
25	Gorontalo	4.443,10	256	414,80	16	178,30	10	0,00	0	0,00	0	57,00	3	5.093,20	285,00
26	Sulawesi Tengah	8.553,50	464	1.748,40	92	3.961,80	382	1.111,40	62	611,10	37	80,40	7	16.066,60	1.044,00
27	Sulawesi Selatan	7.570,20	457	3.095,40	258	2.678,90	151	566,50	45	228,80	17	125,00	1	14.264,80	929,00
28	Sulawesi Barat	4.775,00	233	1.372,50	78	914,80	49	242,10	22	735,50	37	518,00	10	8.557,90	429,00
29	Sulawesi Tenggara	2.821,10	126	2.574,50	190	804,70	52	1.023,50	99	698,10	31	1.457,00	75	9.378,90	573,00
30	Maluku	1.350,90	78	1.812,00	87	2.584,50	119	862,50	41	384,00	20	2.424,00	56	9.417,90	401,00
31	Maluku Utara	2.477,60	179	1.031,20	85	540,10	44	364,50	28	527,60	22	0,00	0	4.941,00	358,00
32	Papua	2.476,70	134	937,90	64	1.046,20	63	797,10	31	1.014,00	41	1.018,00	12	7.289,90	345,00
33	Irian Jaya Barat	2.091,00	94	863,70	50	705,80	48	309,00	20	515,00	18	811,00	13	5.295,50	243,00
Total (Indonesia) - DKI Jakarta		157.041,80	7.980,00	58.870,20	3.708,00	44.211,30	2.629,00	25.351,20	1.253,00	13.219,00	619,00	17.480,50	398	316.174,00	16.587,00

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Catatan :

Kondisi Keterangan

0 Baik Sekali

1 Baik

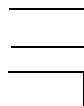
2 Rusak Ringan

3 Rusak Berat

4 Kritis

5¹ Runtuh atau Tidak ada Jembatan

¹) 398 Jembatan yang mempunyai kondisi 5 terdiri dari 362 lintasan basah, 3 lintasan kereta api, dan 33 jembatan struktur



MANTAP

TIDAK MANTAP

Tabel 4.36
Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2007
Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status 11 Februari 2008															
No.	Provinsi	Kondisi Baik Sekali		Kondisi Baik		Kondisi Rusak Ringan		Kondisi Rusak Berat		Kondisi Kritis		K. Runtuh/Tdk ada Jemb.		T o t a l	
		Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nanggroe Aceh Darussalam	359	7.544,50	305	6.704,30	178	4.133,90	96	1.975,70	55	857,10	11	696,00	1.004	21.911,50
2	Sumatera Utara	579	8.805,80	146	2.028,70	65	976,90	40	733,70	39	592,20	13	961,50	882	14.098,80
3	Sumatera Barat	340	7.869,10	121	1.728,20	68	1.212,90	29	1.021,60	48	541,40	11	451,50	617	12.824,70
4	Riau	184	4.655,10	70	1.965,30	43	1.759,00	46	951,30	20	693,00	8	726,00	371	10.749,70
5	Kepulauan Riau ¹⁾													-	-
6	Jambi	104	2.423,20	138	1.360,70	28	834,30	21	1.228,30	9	657,30	7	342,20	307	6.846,00
7	Bengkulu	142	3.985,60	42	1.191,80	74	2.116,80	28	881,00	15	197,90	6	841,90	307	9.215,00
8	Sumatera Selatan	231	5.716,70	65	1.386,00	56	1.795,20	24	523,20	6	317,20	12	950,60	394	10.688,90
9	Bangka Belitung	65	1.122,70	1	2,50	10	98,50	15	171,60	5	51,40	1	30,00	97	1.476,70
10	Lampung	163	3.775,00	167	4.776,80	84	2.039,80	13	497,10	4	136,60	2	190,00	433	11.415,30
11	DKI Jakarta	-												-	-
12	Banten	173	2.381,10	62	390,30	53	631,00	29	435,90	10	249,70	2	60,30	329	4.148,30
13	Jawa Barat	370	8.942,80	282	2.576,40	156	2.634,40	50	1.024,80	7	372,40	63	796,60	928	16.347,40
14	Jawa Tengah	714	10.663,40	242	3.198,20	176	3.348,10	136	2.491,60	15	348,40	6	920,40	1.289	20.970,10
15	D.I. Yogyakarta	100	3.305,70	11	2.171,40	15	638,30	13	528,90	-	-	4	320,00	143	6.964,30
16	Jawa Timur	487	7.891,40	616	5.203,70	331	3.789,30	81	956,20	24	672,20	4	145,20	1.543	18.658,00
17	Kalimantan Barat	230	5.964,50	105	2.621,20	257	4.590,20	70	1.201,50	12	227,70	6	482,40	680	15.087,50
18	Kalimantan Tengah	244	7.429,30	43	2.108,50	39	545,40	48	1.558,60	23	437,50	10	753,50	407	12.832,80
19	Kalimantan Timur	157	3.705,60	43	1.286,50	59	1.304,30	37	1.362,50	14	212,00	1	25,00	311	7.895,90
20	Kalimantan Selatan	373	6.907,80	63	2.394,80	67	1.674,50	68	1.365,60	51	987,00	2	235,00	624	13.564,70
21	Bali	207	3.882,10	69	1.332,00	54	678,00	12	325,30	5	70,90	3	200,00	350	6.488,30
22	Nusa Tenggara Barat	199	3.769,00	64	655,30	47	515,10	3	16,10	-	-	-	-	313	4.955,50
23	Nusa Tenggara Timur	240	3.525,80	209	3.777,40	134	1.558,20	48	561,20	7	166,80	10	187,10	648	9.776,50
24	Maluku	78	1.350,90	87	1.812,00	119	2.584,50	41	862,50	20	384,00	56	2.424,00	401	9.417,90
25	Maluku Utara	179	2.477,60	85	1.031,20	44	540,10	28	364,50	22	527,60	-	-	358	4.941,00
26	Sulawesi Utara	151	3.100,40	71	1.120,30	79	1.288,10	16	290,90	32	603,50	26	1.333,50	375	7.736,70
27	Gorontalo	260	4.587,50	16	414,80	10	178,30	1	7,00	-	-	3	57,00	290	5.244,60
28	Sulawesi Tengah	464	8.553,50	92	1.748,40	382	3.961,80	62	1.111,40	37	611,10	7	80,40	1.044	16.066,60
29	Sulawesi Barat	252	4.774,40	71	1.432,40	34	789,70	25	276,10	36	755,00	11	529,50	429	8.557,10
30	Sulawesi Selatan	443	7.417,30	257	3.093,40	149	2.666,10	44	552,50	17	228,80	1	125,00	911	14.083,10
31	Sulawesi Tenggara	126	2.821,10	190	2.574,50	52	804,70	99	1.023,50	31	698,10	75	1.457,00	573	9.378,90
32	Papua	123	2.206,40	62	820,40	59	1.012,20	28	910,70	62	1.385,00	14	1.118,00	348	7.452,70
33	Irian Jaya Barat	95	2.196,00	49	859,70	49	720,00	21	241,00	20	545,30	21	1.121,30	255	5.683,30
Total		7.832	153.751	3.844	63.767	2.971	51.420	1.272	25.452	646	13.527	396	17.561	16.961	325.478

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Ditjen Bina Marga Departemen PU

Catatan : ¹⁾ Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Kondisi Keterangan

- 0 Baik Sekali
- 1 Baik
- 2 Rusak Ringan
- 3 Rusak Berat
- 4 Kritis
- 5¹⁾ Runtuh atau Tidak ada Jembatan



¹⁾ 396 Jembatan yang mempunyai kondisi 5 terdiri dari 359 lintasan basah, 3 lintasan kereta api, dan 33 jembatan struktur

Tabel 4.37
Rekapitulasi Kondisi Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2008
Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status 10 Desember 2008															
No.	Provinsi	Kondisi Baik Sekali		Kondisi Baik		Kondisi Rusak Ringan		Kondisi Rusak Berat		Kondisi Kritis		K. Runtuh/Tdk ada Jemb.		T o t a l	
		Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)	Jumlah Jbt (Unit)	Panjang (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nanggroe Aceh Darussalam	327	6.379,20	281	6.024,40	225	5.430,40	113	2.777,00	53	835,10	11	696,00	1.010	22.142,10
2	Sumatera Utara	562	8.805,80	146	2.028,70	65	976,90	40	733,70	39	592,20	13	961,50	865	14.098,80
3	Sumatera Barat	340	7.869,10	121	1.728,20	68	1.212,90	29	1.021,60	48	541,40	11	451,50	617	12.824,70
4	Riau	184	4.655,10	70	1.965,30	43	1.759,00	46	951,30	20	693,00	8	726,00	371	10.749,70
5	Kepulauan Riau ¹⁾	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	149	3.314,80	124	1.536,10	32	846,80	11	1.276,50	1	40,00	7	342,20	324	7.356,40
7	Bengkulu	131	3.485,20	37	1.056,30	80	2.349,30	32	1.224,50	22	349,80	7	893,00	309	9.358,10
8	Sumatera Selatan	237	5.811,50	63	1.376,00	52	1.710,40	24	523,20	6	317,20	12	950,60	394	10.688,90
9	Bangka Belitung	17	196,70	22	349,40	54	934,60	14	371,10	2	22,40	1	30,00	110	1.904,20
10	Lampung	181	4.149,70	175	5.029,90	88	2.324,90	14	609,60	4	136,60	2	190,00	464	12.440,70
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
12	Banten	173	2.381,10	62	390,30	53	631,00	29	435,90	10	249,70	2	60,30	329	4.148,30
13	Jawa Barat	340	7.098,30	290	2.977,50	225	4.455,40	90	2.107,60	7	203,10	65	1.463,60	1.017	18.305,50
14	Jawa Tengah	782	12.259,30	260	4.176,40	142	2.799,60	89	1.201,30	8	66,60	2	406,50	1.283	20.909,70
15	D.I. Yogyakarta	103	3.578,00	11	2.339,10	15	638,30	13	528,90	-	-	3	100,00	145	7.184,30
16	Jawa Timur	487	7.891,40	616	5.203,70	331	3.789,30	81	956,20	24	672,20	4	145,20	1.543	18.658,00
17	Kalimantan Barat	215	5.567,40	98	2.471,90	253	4.491,00	80	1.287,80	12	227,70	6	482,40	664	14.528,20
18	Kalimantan Tengah	241	7.325,30	43	2.108,50	39	650,40	52	1.645,60	22	426,50	10	753,50	407	12.909,80
19	Kalimantan Timur	132	2.899,20	85	2.770,60	53	1.276,70	31	837,90	9	206,50	1	25,00	311	8.015,90
20	Kalimantan Selatan	373	6.907,80	63	2.394,80	66	1.674,50	68	1.365,60	51	987,00	2	235,00	623	13.564,70
21	Bali	207	3.882,10	69	1.332,00	54	678,00	12	325,30	5	70,90	3	200,00	350	6.488,30
22	Nusa Tenggara Barat	89	1.684,10	102	1.077,80	105	1.898,90	15	171,00	2	83,30	-	-	313	4.915,10
23	Nusa Tenggara Timur	235	3.525,80	209	3.777,40	134	1.558,20	48	561,20	7	166,80	10	187,10	643	9.776,50
24	Maluku	150	3.185,70	103	1.677,00	84	1.355,20	17	325,20	29	513,00	24	1.317,50	407	8.373,60
25	Maluku Utara	260	4.779,30	8	149,50	15	288,10	0	-	-	-	3	57,00	286	5.273,90
26	Sulawesi Utara	464	8.553,50	146	2.954,40	370	3.620,70	35	577,60	21	351,10	7	80,40	1.043	16.137,70
27	Gorontalo	270	4.231,90	238	2.446,20	71	1.015,80	29	352,40	29	608,90	10	518,00	647	9.173,20
28	Sulawesi Tengah	443	7.417,30	257	3.093,40	149	2.666,10	44	552,50	17	228,80	1	125,00	911	14.083,10
29	Sulawesi Barat	126	2.821,10	190	2.574,50	52	804,70	99	1.023,50	31	698,10	75	1.457,00	573	9.378,90
30	Sulawesi Selatan	78	1.350,90	87	1.812,00	119	2.584,50	41	862,50	20	384,00	56	2.424,00	401	9.417,90
31	Sulawesi Tenggara	178	2.477,60	85	1.031,20	44	540,10	28	364,50	22	527,60	-	-	357	4.941,00
32	Papua	118	2.206,40	62	820,40	59	1.012,20	28	910,70	62	1.385,00	14	1.118,00	343	7.452,70
33	Irian Jaya Barat	134	4.124,00	46	820,70	48	689,80	19	225,00	20	545,30	21	1.121,30	288	7.526,10
Total		7.726	150.815	4.169	69.494	3.188	56.664	1.271	26.107	603	12.130	391	17.518	17.348	332.726

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Ditjen Bina Marga Departemen PU

Catatan: *) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Kondisi Keterangan

- 0 Baik Sekali
 - 1 Baik
 - 2 Rusak Ringan
 - 3 Rusak Berat
 - 4 Kritis
 - 5¹⁾ Runtuh atau Tidak ada Jembatan
- | | |
|--|--------------|
| | MANTAP |
| | TIDAK MANTAP |

Tabel 4.38
Data Panjang Jalan (Km) dan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi
beserta Rasio dan Urutan Kepadatan

No.	Provinsi	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Kendaraan Bermotor	Rasio Jumlah Kendaraan	Urutan
		Tahun 2004 *	Tahun 2006 **	dan Panjang Jalan	Kepadatan
1	Nanggroe Aceh D	3.484,60	863.077	247,68	17
2	Sumatera Utara	4.850,55	2.625.375	541,25	8
3	Sumatera Barat	2.330,82	842.098	361,29	14
4	Riau	2.922,03	1.854.821	634,77	7
5	Jambi	2.345,80	869.348	370,6	13
6	Sumatera Selatan	2.911,57	1.003.471	344,65	15
7	Bengkulu	2.093,01	252.385	120,58	24
8	Lampung	3.359,25	826.171	245,94	18
9	Kep. Bangka Belitung	1.042,13	245.791	235,85	20
10	DKI Jakarta	1.246,89	9.770.787	7.836,13	1
11	Jawa Barat	3.281,92	2.451.156	746,87	6
12	Jawa Tengah	3.847,84	6.699.144	1.741,01	3
13	DI Yogyakarta	859,06	1.346.469	1.567,37	4
14	Jawa Timur	3.338,39	6.463.878	1.936,23	2
15	Banten	862,65	418.695	485,36	10
16	Bali	1.341,52	1.847.007	1.376,80	5
17	Nusa Tenggara Barat	2.018,24	502.470	248,96	16
18	Nusa Tenggara Timur	3.899,94	252.395	64,72	28
19	Kalimantan Barat	2.202,96	879.384	399,18	11
20	Kalimantan Tengah	2.486,51	433.519	174,35	22
21	Kalimantan Selatan	1.774,14	920.568	518,88	9
22	Kalimantan Timur	2.981,77	1.131.768	379,56	12
23	Sulawesi Utara	2.007,96	344.683	171,66	23
24	Sulawesi Tengah	3.783,27	725.532	191,77	21
25	Sulawesi Selatan ¹	3.594,01	879.818	244,8	19
26	Sulawesi Tenggara	1.782,67	146.198	82,01	26
27	Gorontalo	900,46	71.810	79,75	27
28	Maluku	1.983,18	175.574	88,53	25
29	Maluku Utara	1.044,95	970	0,93	30
30	Papua ²	4.175,76	237.895	56,97	29

Sumber : * Lampiran B : KepMen Kimpraswil No.375/KPTS/M/2004

** BPS, Statistik Indonesia, 2008

Catatan : ¹⁾ Termasuk Sulawesi Barat

²⁾ Termasuk Papua Barat

Tabel 4.39
Pencapaian Di Bidang Air Minum, 2005 - 2008

No.	Provinsi	Hasil Pencapaian 2005		Hasil Pencapaian 2006		Hasil Pencapaian 2007		Hasil Pelaksanaan 2008	
		Lt/detik	Jiwa	Lt/detik	Jiwa	Lt/detik	Jiwa	Lt/detik	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	223	127.157	188	80.151	53	28.650	181	36.660
2	Sumatera Utara	83	32.215	165	74.581	1.208	193.110	487	91.950
3	Sumatera Barat	47	27.300	218	78.859	284	14.750	142	20.220
4	Riau	67	291.831	43	81.390	145	52.700	106	26.370
5	Kepulauan Riau	12	7.983	43	24.217	59	14.980	83	16.890
6	Jambi	102	48.229	60	55.291	47	16.000	96	26.070
7	Bengkulu	39	35.530	73	46.272	118	29.635	172	37.000
8	Sumatera Selatan	58	75.360	77	97.536	326	599.284	220	45.320
9	Bangka Belitung	69	18.368	70	38.793	373	18.499	132	23.950
10	Lampung	71	28.619	278	79.779	258	35.920	101	12.130
11	Banten	65	53.006	53	32.570	633	77.400	245	315.000
12	Jawa Barat	12	4.600	133	57.587	548	130.800	505	118.110
13	Jawa Tengah	386	151.806	795	191.885	555	91.490	933	128.600
14	DI Yogyakarta	149	84.560	195	83.115	113	32.675	130	14.160
15	Jawa Timur	70	28.050	225	86.633	1.080	231.600	678	43.030
16	Kalimantan Barat	73	58.239	80	76.800	117	129.005	212	53.090
17	Kalimantan Tengah	60	54.617	50	20.000	464	43.920	162	53.120
18	Kalimantan Selatan	93	93.105	560	247.500	271	64.115	129	28.740
19	Kalimantan Timur	1.757	601.631	218	151.215	910	72.740	599	107.030
20	Sulawesi Utara	172	144.590	125	105.000	239	42.240	154	24.040
21	Gorontalo	33	39.507	123	102.500	65	10.500	51	4.000
22	Sulawesi Tengah	263	203.842	270	177.812	487	18.060	110	29.350
23	Sulawesi Selatan	307	132.727	230	172.897	543	99.845	409	21.510
24	Sulawesi Barat	30	20.879	33	31.000	43	24.555	77	18.490
25	Sulawesi Tenggara	53	22.347	225	139.410	115	11.935	195	50.900
26	Bali	54	27.161	51	14.500	153	28.590	150	52.520
27	Nusa Tenggara Barat	261	176.831	202	135.694	317	25.165	443	121.550
28	Nusa Tenggara Timur	105	42.045	160	99.454	307	25.530	132	61.710
29	Maluku	189	184.892	208	197.050	119	112.400	156	61.980
30	Maluku Utara	159	137.172	153	163.775	122	19.135	99	7.600
31	Papua	376	247.073	168	128.859	83	6.647	184	21.570
32	Irian Jaya Barat	86	26.799	131	258.700	290	9.715	157	29.470
Total		5.524	3.228.071	5.603	3.330.825	10.445	2.311.590	7.630	1.702.130

Sumber : Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.40
Lokasi IPA Hingga Tahun 2007 PDAM

No.	Provinsi	Kapasitas	
		Terpasang (L/dt)	Produksi (L/dt)
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.930	1.423
2	Sumatera Utara	9.666	7.910
3	Sumatera Barat	3.160	2.265
4	Riau	1.563	1.043
5	Kepulauan Riau	2.590	2.169
6	Jambi	2.291	1.727
7	Sumatera Selatan	4.432	4.157
8	Bangka Belitung	467	403
9	Bengkulu	1.394	1.253
10	Lampung	1.408	908
11	DKI Jakarta	16.275	14.482
12	Jawa Barat	14.514	10.991
13	Jawa Tengah	16.166	11.123
14	DI Yogyakarta	2.156	1.632
15	Jawa Timur	20.551	17.008
16	Banten	5.835	5.410
17	Bali	4.692	3.999
18	Nusa Tenggara Barat	3.293	1.113
19	Nusa Tenggara Timur	1.760	1.226
20	Kalimantan Barat	2.755	2.273
21	Kalimantan Tengah	1.116	815
22	Kalimantan Selatan	2.348	1.966
23	Kalimantan Timur	3.784	2.999
24	Sulawesi Utara	2.360	1.810
25	Sulawesi Tengah	755	512
26	Sulawesi Selatan	4.744	3.623
27	Sulawesi Tenggara	951	627
28	Gorontalo	473	291
29	Sulawesi Barat	237	206
30	Maluku	347	306
31	Maluku Utara	64	39
32	Papua	436	366
33	Irian Jaya Barat	534	308
Indonesia		135.044	106.380

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.41
Lokasi IPAL, IPLT, TPA Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Kap. Pengolahan (M3/HARI)		Luas (Ha)
		IPAL	IPLT	TPA
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam			28,00
2	Sumatera Utara	32.010		
3	Sumatera Barat			54,84
4	Riau			20,00
5	Kepulauan Riau		82,00	
6	Jambi		196,60	145,25
7	Sumatera Selatan		42,00	102,00
8	Bangka Belitung			9,50
9	Bengkulu			25,00
10	Lampung			52,40
11	DKI Jakarta	48.400		
12	Jawa Barat	261.500		445,90
13	Jawa Tengah	4.666		181,82
14	DI Yogyakarta	15.000		14,60
15	Jawa Timur			197,82
16	Banten	5.617		48,90
17	Bali	61.000	78,40	57,50
18	Nusa Tenggara Barat			
19	Nusa Tenggara Timur			
20	Kalimantan Barat			54,55
21	Kalimantan Tengah			
22	Kalimantan Selatan	1.000		88,26
23	Kalimantan Timur	800	333,40	115,95
24	Sulawesi Utara			
25	Sulawesi Tengah			50,00
26	Sulawesi Selatan		700,00	110,20
27	Sulawesi Tenggara		27,00	27,00
28	Gorontalo			4,00
29	Sulawesi Barat			3,50
30	Maluku		39,00	5,00
31	Maluku Utara		30,49	7,00
32	Papua			
33	Irian Jaya Barat			38,00
Indonesia		429.993	1.528,89	1.886,99

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 4.42
Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase Tahun 2007

No.	Provinsi	Hasil Pelaksanaan				
		Air Limbah		Persampahan		Drainase
		Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Ha
1	2	3	4	5		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	4	52.400	52
2	Sumatera Utara	8	8.892	5	150.640	23
3	Sumatera Barat	9	4.500	4	69.027	22
4	Riau	1	4.000	1	3.440	36
5	Kepulauan Riau	2	6.333	-	-	14
6	Jambi	2	3.000	3	2.400	28
7	Sumatera Selatan	2	3.000	3	2.400	50
8	Bengkulu	1	3.000	3	9.606	14
9	Bangka Belitung	2	3.000	2	3.059	4
10	Lampung	2	3.000	3	106.000	75
11	Banten	4	3.000	3	41.654	17
12	DKI (Jabodetabek)	1	417	1	21.322	3
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	4	20.015	5	378.640	0
14	Jawa Tengah	7	6.983	3	9.600	74
15	DI Yogyakarta	3	6.335	3	58.986	0
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	9	7.500	7	474.823	72
17	Kalimantan Barat	2	3.000	3	192.266	15
18	Kalimantan Tengah	4	4.024	3	2.400	11
19	Kalimantan Selatan	2	12.321	3	63.730	0
20	Kalimantan Timur	4	4.453	3	66.665	12
21	Sulawesi Utara	1	3.000	3	24.966	45
22	Gorontalo	4	4.000	3	189.600	13
23	Sulawesi Tengah	1	13.000	-	-	14
24	Sulawesi Barat	1	2.000	2	10.248	29
25	Sulawesi Selatan	1	3.000	-	-	27
26	Sulawesi Tenggara	1	2.000	2	37.260	18
27	Bali (Sarbagita)	1	140.488	4	523.340	0
28	Nusa Tenggara Barat	-	-	2	14.999	15
29	Nusa Tenggara Timur	1	3.000	2	3.200	20
30	Maluku	-	-	-	-	78
31	Maluku Utara	-	-	2	95.760	0
32	Papua	-	-	-	-	23
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	30
Indonesia		80	277.261	82	2.608.431	834

Sumber : Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2007

Tabel 4.43
Pengembangan PS Permukiman Kawasan Perbatasan
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008

No.	Provinsi	Jalan Lingk. (m)				Saluran Lingk. (m)			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kalimantan Barat		300		5.016	2.088	1.239		2.000
2	Kalimantan Timur	6.000	2.880					660	390
3	Sulawesi Utara								
4	Nusa Tenggara Timur	1.574				1.800	3.170	2.472	
5	Maluku	200	2.700	2.505	2.920				
6	Papua								
7	Kepulauan Riau						3.800	1.425	
8	Nanggroe Aceh D				649,80			300	809,80
9	Sumatera Utara							100	
10	Riau							1.369,40	
11	Maluku Utara					892			
12	Papua Barat								

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.43 (Lanjutan)
Pengembangan PS Permukiman Kawasan Perbatasan
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008

No.	Lokasi	Jalan Poros Desa (m)				Pos Jaga (Unit)			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kalimantan Barat	9.604	11.275	7.338	3.000	1			
2	Kalimantan Timur			2.880	7.445				
3	Sulawesi Utara	2.463	9.945,76	8.627,10	9.373				
4	Nusa Tenggara Timur		4.840	3.062			1	200	
5	Maluku		5.400	5.300	6.250				
6	Papua		12.800	8.330	6.885				
7	Kepulauan Riau		8.000	4.700					
8	Nanggroe Aceh D			1.096	300				
9	Sumatera Utara								
10	Riau			3.517,90	2.815,66				
11	Maluku Utara			3.758					1
12	Papua Barat			400				1	1

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.43 (Lanjutan)
Pengembangan PS Permukiman Kawasan Perbatasan
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008

No.	Lokasi	Kawasan				Penduduk Terlayani (Jiwa)			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kalimantan Barat	3	10	3	3	8.350	20.250	6.350	1.400
2	Kalimantan Timur	1	1	3	3	5.768	2.540	5.200	6.800
3	Sulawesi Utara	1	9	11	8	1.096	5.800	20.504	12.694
4	Nusa Tenggara Timur	3	8	5	6	2.000	9.470	6.450	1.200
5	Maluku	1	8	3	4		5.000	13.000	13.841
6	Papua	1	6	6	3	750	3.600	17.170	1.900
7	Kepulauan Riau		5	3	2		8.690	26.987	400
8	Nanggroe Aceh D			3	2			5.856	
9	Sumatera Utara			1	1			400	300
10	Riau			3	2			10.329	13.495
11	Maluku Utara			1	1	3.234		940	200
12	Papua Barat			2	1			200	200

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.44
Penyediaan PS Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil/ Daerah Tertinggal
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008

No.	Provinsi	Jalan Lingk. (m)				Saluran Lingk. (m)			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAD	-	-	-	1.941	-	-	-	-
2	Sumatera Utara		1.793	1.635	-	-	574	-	-
3	Sumatera Barat	1.574	833,33	-	-	-	-	120	-
4	Riau	1.000	2.432	-	1.617,57	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	800	1.400	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	960	-	-	-	-	223	-	254
7	Sumatera Selatan	1.720	1.585	-	-	-	-	-	-
8	Bangka Belitung	-	800	-	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	2.100	-	-	2.429	559	150	-
10	Lampung	-	-	-	-	1.100	-	-	-
11	Banten	-	1.142	-	-	-	-	-	-
12	Kalimantan Barat	-	2.620	-	-	-	-	-	-
13	Kalimantan Timur	-	2.083,72	-	-	1.677	-	-	-
14	Kalimantan Selatan	-	1.882	-	-	-	-	-	-
15	Sulawesi Utara	-	6.181	-	-	-	-	-	-
16	Gorontalo	-	810	-	-	-	340,60	-	-
17	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	570,50	-	-
18	Sulawesi Selatan	1.932	1.311	-	-	-	-	-	-
19	Sulawesi Tenggara	-	6.882	-	-	712	3.341	-	2.000
20	Sulawesi Barat	-	-	4.000	-	-	-	-	-
21	Bali	2.972	19.633	-	-	3.817	612	-	-
22	NTB	-	1.695	-	1.182	-	186,92	3.650	811
23	NTT	-	2.108,34	-	-	-	750	-	-
24	Maluku	-	1.271,40	-	-	750	-	-	-
25	Maluku Utara	2.528	2.443	-	-	-	360	-	-
26	Papua	-	-	-	-	-	-	500	-
27	Irian Jaya Barat	-	2.000	-	-	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.44 (Lanjutan)
Penyediaan PS Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil/ Daerah Tertinggal
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008

No.	Lokasi	Jalan Setapak (m)				Talud (m)			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAD	-	500	2.447	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	400	898
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	310,70
4	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	170	-	-
5	Jambi	1.468	1.409	-	-	-	-	-	-
6	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	612	584
7	Bengkulu	-	250	-	-	-	96	-	-
8	Lampung	2.750	-	-	-	1.208	-	-	-
9	DKI Jakarta	-	952	-	-	-	-	-	-
10	Jawa Barat	-	-	-	902	-	-	-	-
11	Kalimantan Barat	-	930	-	-	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	2.540	-	-	-	-	-	200	-
13	Gorontalo	250	1.112	-	-	-	990,50	550	-
14	Sulawesi Tengah	-	3.017	3.000	-	-	-	-	-
15	Sulawesi Tenggara	2.512	503	6.837	-	52	548	447	-
16	Sulawesi Barat	-	3.130	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	744,50	-	-	-	-	-	-
18	NTB	-	-	-	-	-	-	-	329
19	Maluku	1.000	-	-	-	-	-	-	-
20	Maluku Utara	-	-	-	-	-	40	-	-

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.44 (Lanjutan)
Penyediaan PS Permukiman Di Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil/ Daerah Tertinggal
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2008

No.	Lokasi	Kawasan				Penduduk Terlayani (jiwa)			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAD	-	1	2	2	-	5.000	2.875	3.500
2	Sumatera Utara	1	2	1	1	1.496	4.300	1.250	5.500
3	Sumatera Barat	1	1	2	1	1.800	2.250	555	1.509
4	Riau	1	1	1	2	727	1.500	1.800	2.200
5	Kepulauan Riau	2	2	1	2	1.000	1.475	500	1.613
6	Jambi	3	6	1	1	630	1.400	600	280
7	Sumatera Selatan	1	2	-	1	660	1.500	-	1.250
8	Bangka Belitung	2	2	1	2	879	1.250	918	790
9	Bengkulu	1	2	1	-	832	1.000	320	-
10	Lampung	2	-	-	-	1.386	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	2	-	-	-	6.902	-	-
12	Banten	-	1	2	2	-	1.250	3.085	400
13	Jawa Barat	-	-	-	1	-	-	-	553
14	Jawa Timur	-	-	2	-	-	-	4.442	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	2	-	-	-	4.011
16	DI Yogyakarta	-	-	-	2	-	-	-	3.444
17	Kalimantan Barat	-	2	1	1	-	1.710	3.360	820
18	Kalimantan Tengah	-	1	2	2	-	3.000	2.500	9.750
19	Kalimantan Timur	1	2	1	1	1.500	2.590	1.025	1.240
20	Kalimantan Selatan	-	1	2	2	-	1.500	5.891	400
21	Sulawesi Utara	1	3	2	2	1.128	5.500	500	460
22	Gorontalo	2	3	1	1	500	2.124	-	6.875
23	Sulawesi Tengah	-	2	7	2	-	1.150	2.666	400
24	Sulawesi Selatan	5	2	2	3	668	2.525	862	600
25	Sulawesi Tenggara	5	5	4	1	2.500	10.040	13.114	1.000
26	Sulawesi Barat	-	1	2	2	-	1.793	583	400
27	Bali	5	4	2	2	8.976	22.882	6.300	500
28	NTB	-	1	4	2	-	3.764	3.190	1.115
29	NTT	1	1	1	2	-	5.000	2.000	575
30	Maluku	1	1	1	2	1.000	850	1.000	1.700
31	Maluku Utara	3	4	4	1	3.450	2.468	460	405
32	Papua	2	5	2	1	400	600	2.180	200
33	Irian Jaya Barat	1	2	1	1	250	179	848	101

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.45
Penyehatan dan Pengembangan Permukiman
Daftar Investasi Tahun 2005 - 2006

No.	Provinsi	Volume Tahun 2005 (Kws.)			
		Kasiba/ Lisiba	KTP2D	Pasca Bencana	PP Kecil/ Terpencil
1	2	3	4	5	6
1	NAD	-	-	10	-
2	Sumatera Utara	17	11	-	1
3	Sumatera Barat	10	4	-	1
4	Riau	2	3	-	1
5	Kep. Riau	2	1	-	2
6	Jambi	3	4	-	3
7	Sumatera Selatan	5	1	-	1
8	Bangka Belitung	4	2	-	-
9	Bengkulu	1	2	-	1
10	Lampung	5	1	-	-
11	DKI Jakarta	-	1	-	-
12	Jawa Barat	14	3	-	-
13	Banten	6	-	-	-
14	Jawa Tengah	15	7	-	-
15	DI Yogyakarta	2	4	-	-
16	Jawa Timur	8	8	-	-
17	Kalimantan Barat	5	1	-	-
18	Kalimantan Tengah	4	5	-	-
19	Kalimantan Selatan	6	2	-	-
20	Kalimantan Timur	6	6	-	1
21	Sulawesi Utara	6	4	-	1
22	Gorontalo	5	2	-	2
23	Sulawesi Tengah	3	2	-	-
24	Sulawesi Selatan	15	24	-	5
25	Sulawesi Tenggara	3	6	-	5
26	Bali	3	4	-	5
27	Nusa Tenggara Barat	4	2	-	-
28	Nusa Tenggara Timur	4	2	7	1
29	Maluku	1	3	-	2
30	Maluku Utara	2	1	3	3
31	Papua	1	1	2	2
32	Irian Jaya Barat	1	2	-	1

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.45 (Lanjutan)
Penyehatan dan Pengembangan Permukiman (P2P)
Daftar Investasi Tahun 2005 - 2006

No.	Provinsi	Volume Tahun 2006 (Kws.)			
		RSH	KTP2D	Pasca Bencana	PP Kecil/ Terpencil
1	2	3	4	5	6
1	NAD	2	4	-	1
2	Sumatera Utara	1	9	-	2
3	Sumatera Barat	5	6	-	1
4	Riau	1	3	-	1
5	Kep. Riau	1	1	-	2
6	Jambi	1	5	-	6
7	Sumatera Selatan	2	4	-	2
8	Bangka Belitung	1	2	-	2
9	Bengkulu	1	2	-	2
10	Lampung	3	2	-	-
11	DKI Jakarta	4	-	-	2
12	Jawa Barat	13	5	-	-
13	Banten	6	2	-	1
14	Jawa Tengah	18	12	-	-
15	DI Yogyakarta	4	4	-	-
16	Jawa Timur	6	10	-	-
17	Kalimantan Barat	2	6	-	2
18	Kalimantan Tengah	6	4	-	1
19	Kalimantan Selatan	4	6	-	1
20	Kalimantan Timur	1	3	-	2
21	Sulawesi Utara	1	5	-	3
22	Gorontalo	1	4	-	3
23	Sulawesi Tengah	3	19	-	2
24	Sulawesi Selatan	2	9	-	2
25	Sulawesi Tenggara	14	7	-	6
26	Sulawesi Barat	3	6	-	1
27	Bali	1	3	-	4
28	Nusa Tenggara Barat	3	4	-	1
29	Nusa Tenggara Timur	1	4	6	1
30	Maluku	1	3	1	1
31	Maluku Utara	4	3	5	4
32	Papua	1	2	-	5
33	Irian Jaya Barat	1	2	-	2

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.46
Pengembangan Lingkungan Perumahan Pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
Daftar Investasi Tahun 2005 - 2006

No.	Provinsi	Jalan Lingk. (m)		Saluran Lingk. (m)		Jalan Setapak (m)		Plat Duiker (m)		MCK (unit)	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NAD	-	5.098,45	-	1.764	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	3.960	6.973	-	2.772	-	-	4	-	-	-
3	Sumatera Barat	2.069	2.100	837	2.216,69	1.618	-	16	-	-	-
4	Riau	6.946	7.250	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kep. Riau	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	2.682	3.766	-	5.362	-	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	202	6.745	254	1.536,65	-	-	-	-	-	-
8	Bangka Belitung	-	2.400	-	400	-	-	-	-	6	-
9	Bengkulu	1.100	5.183,10	-	401	-	-	-	2	-	-
10	Lampung	1.900	4.451	-	3170	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4.046	13.258	-	1.328	-	3.168,20	-	28	-	-
13	Banten	765	1.074	-	-	880	1.500	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	2.572,38	18.194,30	1.200	-	-	-	-	-	-	-
15	DI Yogyakarta	4.789	12.984	2.113	1.463	-	-	-	-	-	1
16	Jawa Timur	4.000	4.230,50	-	5.397,40	-	-	-	-	-	-
17	Kalimantan Barat	730	3.070	210	-	296	2.795	-	-	-	-
18	Kalimantan Tengah	4.000	-	2.677	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Selatan	4.221	5.467,60	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1.461,73	6.410	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sulawesi Utara	-	4.842,32	-	532	-	-	-	2	-	-
22	Gorontalo	-	7.830	-	3.894,87	-	-	-	-	-	-
23	Sulawesi Tengah	4.917	3.435	3.121	4.206	550	-	-	-	-	-
24	Sulawesi Selatan	4.444	4.143	6.193	12.731	394	-	20	28	-	-
25	Sulawesi Tenggara	1.673	8.541	3.405	9.411	-	-	33	25	2	3
26	Sulawesi Barat	-	-	-	5.216	-	2.784	-	-	-	-
27	Bali	3.875	5.601,30	3.698	3.877,99	-	-	49	35	-	-
28	Nusa Tenggara Barat	2.410	3.524,96	1.725	2.094	-	-	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Timur	1.250	4.452,25	944	2.749,17	-	-	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	2.101	1.652	3.050	1.500	-	-	-	-
31	Maluku Utara	1.052	1.399	674	-	-	-	-	-	-	-
32	Papua	213,35	700,26	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Irian Jaya Barat	-	1.033	-	1.000	1.720	-	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.46 (Lanjutan)
Pengembangan Lingkungan Perumahan Pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
Daftar Investasi Tahun 2005 - 2006

No.	Provinsi	Gorong-Gorong (unit)		Jembatan (unit)		Talud (m)		Tambatan Perahu (m)		Kws.	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
4	Riau	10	-	-	-	-	-	-	-	3	3
5	Kep. Riau	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Jambi	4	-	-	-	-	-	-	-	4	5
7	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
9	Bengkulu	-	-	-	-	-	96	-	-	1	2
10	Lampung	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	Jawa Barat	-	3	-	1	-	2.267,20	-	-	3	9
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12
15	DI Yogyakarta	-	10	-	-	147	46	-	-	4	4
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10
17	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
18	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
19	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
20	Kalimantan Timur	-	2	-	4	-	-	500	-	6	7
21	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
22	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
23	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19
24	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9
25	Sulawesi Tenggara	-	-	1	1	-	362	-	-	6	7
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
27	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
28	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
29	Nusa Tenggara Timur	-	2	-	-	-	750,96	-	-	2	4
30	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
31	Maluku Utara	1	-	-	-	205	90	-	1	2	3
32	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
33	Irian Jaya Barat	-	3	-	-	-	-	-	-	2	2

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.47
Peningkatan Kualitas Permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2006

No.	Provinsi	Jalan Lingk. (m)		Saluran Lingk. (m)		Jalan Setapak (m)		Gorong-Gorong (Unit)		Talud (m)	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NAD	-	1.615	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	950	1.334	-	-	18	8	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	-	-	1.570	2.183	-	-	-	-	-	30
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
12	Banten	-	50	480	-	-	-	9	5	10	170
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kalimantan Barat	-	1.968	-	-	-	-	1	-	-	-
17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulawesi Utara	-	-	-	-	200	1.000	-	-	-	50
21	Gorontalo	-	-	-	1.400	-	-	-	-	-	-
22	Sulawesi Tengah	-	-	-	867	-	-	-	-	-	125
23	Sulawesi Selatan	-	-	675	322	-	-	-	-	330	1.124
24	Sulawesi Tenggara	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100
25	Bali	-	-	-	1.150	-	-	-	-	-	-
26	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.47 (Lanjutan)
Peningkatan Kualitas Permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan
Indikator Kinerja Output T.A. 2005 - 2006

No.	Provinsi	Jalan Poros Desa (m)		Plat Duiker (m)		Pasar Desa (Unit)		Penduduk Terlayani (Jiwa)	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAD	6.660	4.633,05	-	-	-	-	7.323	4.125
2	Sumatera Utara	4.800	10.783	-	-	-	-	4.161	37.040
3	Sumatera Barat	-	6.080	950	3	-	-	4.050	10.538
4	Riau	5.600	10.892	-	-	-	-	1.000	3.500
5	Kep. Riau	4.000	4.950	-	-	-	-	950	4.250
6	Jambi	-	7.840	-	-	-	-	9.000	9.205
7	Sumatera Selatan	6.140	11.454	1.570	5	-	-	30.968	16.100
8	Bangka Belitung	10.200	20.000	-	-	-	-	1.064	7.265
9	Bengkulu	3.000	4.910	-	-	-	-	1.000	8.650
10	Lampung	5.014	10.600	-	-	-	-	1.500	4.200
11	Jawa Barat	10.143	12.175	-	-	1	-	19.902	15.825
12	Banten	4.548	4.420	480	-	-	-	100.897	20.542
13	Jawa Tengah	17.200	15.961	-	-	-	-	35.609	37.990
14	DI Yogyakarta	6.655	11.369	-	-	-	-	2.000	42.968
15	Jawa Timur	19.778	66.312	-	-	-	-	85.097	54.507
16	Kalimantan Barat	7.280	4.900	-	-	-	-	11.704	6.800
17	Kalimantan Tengah	6.404	7.342,42	-	-	-	-	7.532	6.700
18	Kalimantan Selatan	5.080	10.560	-	-	-	-	3.700	10.150
19	Kalimantan Timur	500	2.778	-	-	-	-	1.000	5.162
20	Sulawesi Utara	2.500	4.100	-	-	1	-	3.750	11.676
21	Gorontalo	5.350	5.200	-	-	-	-	13.500	4.350
22	Sulawesi Tengah	7.154	7.070	-	-	-	-	20.759	8.100
23	Sulawesi Selatan	14.588	20.155	675	2	-	-	48.589	10.077
24	Sulawesi Tenggara	2.900	15.200	-	7	-	-	18.413	16.949
25	Sulawesi Barat	-	12.760	-	-	-	1	-	8.663
26	Bali	3.373	5.473	-	-	-	-	13.792	12.545
27	Nusa Tenggara Barat	1.600	14.700	-	-	-	-	7.217	37.575
28	Nusa Tenggara Timur	3.000	9.038,20	-	-	-	-	1.000	4.300
29	Maluku	1.800	3.250	-	-	-	2	12.000	5.070
30	Maluku Utara	6.000	4.000	-	-	-	1	3.000	2.850
31	Papua	3.000	5.841	-	-	-	-	2.125	3.625
32	Irian Jaya Barat	3.000	6.700	-	-	-	-	15.000	1.684

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.48
Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan
Indikator Kinerja Output T.A. 2007 - 2008

Pengembangan Fungsi Kawasan

No.	Provinsi	Saluran (m)		Kawasan (Kws.)		Rmh. Terlayani (Unit)		Jmj. Jiwa Terlayani (Jiwa)	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sumatera Utara			2	2	240	188	1.200	938
2	Sumatera Barat								
3	Riau								
4	Kep. Riau								
5	Sumatera Selatan			1		500		2.500	
6	Lampung								
7	Jawa Barat		214,60		2		2.500		10.000
8	Banten				2		800		6.000
9	Jawa Tengah	261				200	1.050	1.000	4.100
10	DI Yogyakarta			1	5		7.146		28.584
11	Jawa Timur	339,01		1	2	4.000	569	2.000	2.274
12	Kalimantan Barat								
13	Kalimantan Tengah								
14	Kalimantan Selatan				1		400		1.600
15	Kalimantan Timur		771		3		1.050		4.200
16	Sulawesi Utara			1	1		500	7.000	2.000
17	Gorontalo		255		1		450		2.250
18	Sulawesi Tengah				1		500		2.000
19	Sulawesi Selatan			1	1	1.520	500	7.600	2.000
20	Sulawesi Tenggara				1		500		2.000
21	Bali				1		500		2.000

Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.49
Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan RSH
Indikator Kinerja Output T.A. 2007 - 2008

No.	Provinsi	Saluran (m)		Jalan Poros/ Akses (m)		Gorong-Gorong (Unit)		Talud (m)	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NAD	4.702	4.421	4.589	1.431	-	-	77	-
2	Sumatera Utara	1.129,10	-	1.261,50	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	4.082,50	1.036	4.845	1.789,36	-	4	122	-
4	Riau	1.054	800	2.601	2.317,15	17	5	-	-
5	Kep. Riau	-	-	950	800	-	-	-	-
6	Jambi	1.450	514	1.250	563	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	967	2.355	3.204	1.490	-	-	-	-
8	Bangka Belitung	940	1.380	-	950	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	4.505	-	1	-	-	-
10	Lampung	-	1.640,90	1.185	1.580	45	79	-	-
11	Jawa Barat	363	1.311	45.233,58	23.619,33	-	-	-	-
12	Banten	-	-	5.440	3.146	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	943,20	3.651,20	4.034,50	12.354,72	-	-	655	215
14	DI Yogyakarta	1.281	-	3.877	-	-	-	218	-
15	Jawa Timur	3.970,70	-	3.278	3.148	-	1	-	-
16	Kalimantan Barat	1.185	-	1.185	2.245	-	-	-	-
17	Kalimantan Tengah	-	-	1.400	1.920	-	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	-	1.000	7.361,39	3.236	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	200	-	200	1.000	-	-	-	-
20	Sulawesi Utara	-	-	2.866,76	-	-	-	-	-
21	Gorontalo	2.021,13	-	1.650,99	1.949	-	-	-	-
22	Sulawesi Tengah	2.550,90	981,35	3.119,80	2.198,09	-	-	-	-
23	Sulawesi Selatan	2.266	900	5.116	1.196	-	-	-	-
24	Sulawesi Tenggara	2.072	-	1.300	1.400	-	-	-	-
25	Sulawesi Barat	-	-	2.260	-	-	-	-	-
26	Bali	1.769,10	3.502,23	4.901,45	2.493,01	-	-	-	-
27	Nusa Tenggara Barat	755	571	1.825,50	775	-	-	-	-
28	Nusa Tenggara Timur	-	-	2.806,93	2.302,33	-	-	-	-
29	Maluku	450	1.832,50	1.000	-	2	28	-	-
30	Maluku Utara	-	-	2.000	414	-	-	-	-
31	Papua	742,25	-	3.245,60	-	-	-	684	-
32	Irian Jaya Barat	-	-	3.062	700	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.49 (Lanjutan)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kawasan RSH
Indikator Kinerja Output T.A. 2007 - 2008

No.	Provinsi	Plat Duiker (unit)		Kawasan (Kws.)		Rmh. Terlayani (Unit)	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAD	-	-	6	3	7.585	2.274
2	Sumatera Utara	-	-	1	-	5.250	-
3	Sumatera Barat	13	2	3	3	5.250	1.464
4	Riau	-	-	5	3	6.750	2.023
5	Kep. Riau	-	-	2	1	2.708	2.252
6	Jambi	-	-	2	-	5.250	972
7	Sumatera Selatan	-	-	4	2	5.370	3.752
8	Bangka Belitung	-	-	1	1	1.026	674
9	Bengkulu	-	-	7	3	7.920	2.427
10	Lampung	260	-	1	2	1.250	2.532
11	Jawa Barat	37	-	14	3	20.681	3.581
12	Banten	-	-	6	4	5.724	650
13	Jawa Tengah	6	64	8	5	7.563	4.220
14	DI Yogyakarta	-	-	6	1	15.124	2.232
15	Jawa Timur	-	-	8	5	23.715	10.748
16	Kalimantan Barat	-	-	2	2	2.200	1.880
17	Kalimantan Tengah	-	-	2	1	1.680	1.693
18	Kalimantan Selatan	-	-	9	4	9.573	3.526
19	Kalimantan Timur	-	-	1	1	328	3.096
20	Sulawesi Utara	-	-	3	5	860	5.100
21	Gorontalo	-	-	2	2	529	1.018
22	Sulawesi Tengah	-	23	4	2	1.154	3.716
23	Sulawesi Selatan	-	-	4	2	9.045	1.040
24	Sulawesi Tenggara	2	-	4	1	4.274	2.232
25	Sulawesi Barat	-	-	4	2	2.737	1.166
26	Bali	-	8	3	3	6.511	3.222
27	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	2	1.200	909
28	Nusa Tenggara Timur	-	-	2	1	2.570	2.676
29	Maluku	-	-	1	2	500	862
30	Maluku Utara	-	-	1	1	1.400	461
31	Papua	-	-	2	1	500	859
32	Irian Jaya Barat	-	-	2	1	450	1.521

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.50
Pengembangan KASIBA/ LISIBA
Rekapitulasi Hasil Pembangunan Tahun 2005

Tersedianya Dukungan PSD Permukiman Pada KASIBA/ LISIBA

No.	Provinsi	Jalan Lingk. (m)	Saluran Lingk. (m)	Rumah Terhuni (KK)
1	2	3	4	5
1	Sumatera Utara	6.040	6.037	2.340
2	Sumatera Barat	12.157	7.391	2.245
3	Riau	4.268	3.454	411
4	Kep. Riau	2.200	3.950	650
5	Jambi	6.250	7.500	93
6	Sumatera Selatan	5.972	6.121	3.456
7	Bangka Belitung	2.428	8.542	2.364
8	Bengkulu	15.086	-	1.124
9	Lampung	6.537	9.779	6.500
10	Jawa Barat	59.425	354	1.493
11	Banten	6.718	-	392
12	Jawa Tengah	15.670	8.095	954
13	DI Yogyakarta	4.389	6.082	250
14	Jawa Timur	7.500	14.640	185
15	Kalimantan Barat	6.666	3.830	350
16	Kalimantan Tengah	4.172	3.200	755
17	Kalimantan Selatan	15.879	-	1.950
18	Kalimantan Timur	9.462	-	1.576
19	Sulawesi Utara	8.006	1.457	2.950
20	Gorontalo	9.062	4.510	2.000
21	Sulawesi Tengah	1.161	5.302,75	242
22	Sulawesi Selatan	8.550	5.735	1.882
23	Sulawesi Tenggara	-	2.489	960
24	Bali	2.772	5.493	425
25	Nusa Tenggara Barat	6.139	3.477	2.000
26	Nusa Tenggara Timur	4.400	4.542	3.545
27	Maluku	271	845	475
28	Maluku Utara	2.799	-	300
29	Papua	2.738	-	200
30	Irian Jaya Barat	600	2.630	500

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.51
Bantuan Sarana dan Prasarana
Indikator Kinerja Output T.A. 2006

No.	Provinsi	Saluran Lingk. (m)	Jalan Poros (m)	Kawasan (Kws.)	Jml. Rmh. Terlayani (Unit)
1	2	3	4	5	6
1	NAD	1.068,25	1.103,78	2	2.000
2	Sumatera Utara	237	650	1	267
3	Sumatera Barat	3.398,33	3.400	5	1.891
4	Riau	-	813	1	120
5	Kep. Riau	-	1.000	1	691
6	Jambi	400	700	1	400
7	Sumatera Selatan	507	1.700	2	500
8	Bangka Belitung	-	600	1	564
9	Bengkulu	50	1.063	2	356
10	Lampung	3.709	3.757	3	2.200
11	DKI Jakarta	1.038	-	6	3.029
12	Jawa Barat	925	-	12	1.316
13	Banten	-	6.104	6	1.936
14	Jawa Tengah	7.022,40	10.712,88	18	7.032
15	DI Yogyakarta	1.860	1.638	4	1.170
16	Jawa Timur	7.500,30	7.497	6	11.900
17	Kalimantan Barat	1.684	2.255	2	1.272
18	Kalimantan Tengah	-	10.061	6	1.410
19	Kalimantan Selatan	-	4.187,50	4	1.357
20	Kalimantan Timur	80	-	1	920
21	Sulawesi Utara	2.721	2.033,88	2	1.341
22	Gorontalo	669,56	1.918,84	1	758
23	Sulawesi Tengah	2.027	2.507	3	1.019
24	Sulawesi Selatan	1.638	1.711	2	779
25	Sulawesi Tenggara	3.165	1.700	14	942
26	Sulawesi Barat	3.072	-	3	1.305
27	Bali	506,30	1.427	1	900
28	Nusa Tenggara Barat	-	4.333,30	3	8.738
29	Nusa Tenggara Timur	1.442,85	2.848	1	7.500
30	Maluku	1.307,15	1.928,42	1	1.281
31	Maluku Utara	490	3.972	4	529
32	Papua	1.000	1.803	1	500
33	Irian Jaya Barat	-	496	1	45

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.52
Program Peningkatan Prasarana Dan Sarana Perdesaan
Indikator Kinerja Output T.A. 2007

Peningkatan Infrastruktur Skala Kawasan

No.	Provinsi	Jalan Poros (m)	Desa	Kawasan (Kws.)	Jml. Jiwa Terlayani (Jiwa)
1	2	3	4	5	6
1	NAD	9.361	17	6	12.105
2	Sumatera Utara	11.882	9	7	5.124
3	Sumatera Barat	10.020	7	6	32.134
4	Riau	6.802,45	4	4	6.407
5	Kep. Riau	3.300	2	1	2.000
6	Jambi	7.600	3	3	12.000
7	Sumatera Selatan	9.913	7	5	24.030
8	Bangka Belitung	7.878	2	2	51.377
9	Bengkulu	3.850	3	3	5.748
10	Lampung	14.348	3	3	25.952
11	Jawa Barat	18.181	8	8	43.681
12	Banten	10.000	7	3	7.490
13	Jawa Tengah	93.220,80	79	13	219.191
14	DI Yogyakarta	9.388	23	4	27.496
15	Jawa Timur	113.013,49	64	16	159.912
16	Kalimantan Barat	9.761	8	3	-
17	Kalimantan Tengah	3.200	3	3	2.300
18	Kalimantan Selatan	7.625	4	4	7.058
19	Kalimantan Timur	4.000	1	1	2.500
20	Sulawesi Utara	-	3	3	1.733
21	Gorontalo	8.200	5	2	17.329
22	Sulawesi Tengah	7.849,86	9	5	18.352
23	Sulawesi Selatan	17.331	11	11	11.463
24	Sulawesi Tenggara	10.310,88	7	7	12.093
25	Sulawesi Barat	9.900	5	5	1.987
26	Bali	10.919	6	5	14.300
27	Nusa Tenggara Barat	7.955	5	5	8.190
28	Nusa Tenggara Timur	7.608,04	5	5	11.500
29	Maluku	3.700	3	2	35.000
30	Maluku Utara	6.113	2	2	1.530
31	Papua	3.950	5	5	5.040
32	Irian Jaya Barat	8.674	5	5	2.292

Sumber : Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.53
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan (Termasuk Eks-Transmigrasi)
Indikator Kinerja Output T.A. 2008

No.	Provinsi	Jalan Poros (m)	Desa	Rumah Terlayani (Unit)	Penc. Pelayanan (Jiwa)
1	2	3	4	5	6
1	NAD	3.513	3	2.375	9.500
2	Sumatera Utara	6.718	6	2.820	14.100
3	Sumatera Barat	10.065,86	6	1.475	6.706
4	Riau	4.997	3	-	3.800
5	Kep. Riau	550	2	-	10.022
6	Jambi	1.706	3	362	1.810
7	Sumatera Selatan	6.987	5	2.275	11.175
8	Bangka Belitung	3.940	2	499	1.463
9	Bengkulu	-	4	-	-
10	Lampung	37.582	10	9.064	49.521
11	Jawa Barat	3.856	2	-	-
12	Banten	-	6	-	-
13	Jawa Tengah	10.812	11	-	41.638
14	DI Yogyakarta	-	13	-	-
15	Jawa Timur	116.686	50	33.198	134.699
16	Kalimantan Barat	3.870	3	-	-
17	Kalimantan Tengah	10.610	5	4.188	16.750
18	Kalimantan Selatan	7.782	4	2.041	8.162
19	Kalimantan Timur	3.470	3	-	3.250
20	Sulawesi Utara	-	7	7	20.000
21	Gorontalo	5.200	4	2.400	12.000
22	Sulawesi Tengah	-	4	-	-
23	Sulawesi Selatan	46.305,65	38	-	-
24	Sulawesi Tenggara	5.297	4	500	2.550
25	Sulawesi Barat	-	5	-	-
26	Bali	7.410	4	300	1.200
27	Nusa Tenggara Barat	4.500	3	3.890	15.558
28	Nusa Tenggara Timur	3.052,23	4	2.000	8.000
29	Maluku	24.150	6	2.190	8.760
30	Maluku Utara	-	2	215	860
31	Papua	924	2	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	1	-	-

Sumber : Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.54
Analisis Pencapaian Di Bidang Air Minum, 2007 - 2008

No.	Provinsi	Pencapaian Air Minum (Lt/dtk)		Perubahan Pencapaian *	Jiwa Yang Dilayani (Jiwa)		Perubahan Jiwa Terlayani *	Rasio Jiwa per Kapasitas Produksi *	
		2007	2008	(%)	2007	2008	(%)	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	53	181	241,51	28.650	36.660	27,96	540,57	202,54
2	Sumatera Utara	1.208	487	-59,69	193.110	91.950	-52,38	159,86	188,81
3	Sumatera Barat	284	142	-50,00	14.750	20.220	37,08	51,94	142,39
4	Riau	145	106	-26,90	52.700	26.370	-49,96	363,45	248,77
5	Kepulauan Riau	59	83	40,68	14.980	16.890	12,75	253,90	203,49
6	Jambi	47	96	104,26	16.000	26.070	62,94	340,43	271,56
7	Bengkulu	118	172	45,76	29.635	37.000	24,85	251,14	215,12
8	Sumatera Selatan	326	220	-32,52	599.284	45.320	-92,44	1.838,29	206,00
9	Bangka Belitung	373	132	-64,61	18.499	23.950	29,47	49,60	181,44
10	Lampung	258	101	-60,85	35.920	12.130	-66,23	139,22	120,10
11	Banten	633	245	-61,30	77.400	315.000	306,98	122,27	1.285,71
12	Jawa Barat	548	505	-7,85	130.800	118.110	-9,70	238,69	233,88
13	Jawa Tengah	555	933	68,11	91.490	128.600	40,56	164,85	137,83
14	DI Yogyakarta	113	130	15,04	32.675	14.160	-56,66	289,16	108,92
15	Jawa Timur	1.080	678	-37,22	231.600	43.030	-81,42	214,44	63,47
16	Kalimantan Barat	117	212	81,20	129.005	53.090	-58,85	1.102,61	250,42
17	Kalimantan Tengah	464	162	-65,09	43.920	53.120	20,95	94,66	327,90
18	Kalimantan Selatan	271	129	-52,40	64.115	28.740	-55,17	236,59	222,79
19	Kalimantan Timur	910	599	-34,18	72.740	107.030	47,14	79,93	178,68
20	Sulawesi Utara	239	154	-35,56	42.240	24.040	-43,09	176,74	156,10
21	Gorontalo	65	51	-21,54	10.500	4.000	-61,90	161,54	78,43
22	Sulawesi Tengah	487	110	-77,41	18.060	29.350	62,51	37,08	266,82
23	Sulawesi Selatan	543	409	-24,68	99.845	21.510	-78,46	183,88	52,59
24	Sulawesi Barat	43	77	79,07	24.555	18.490	-24,70	571,05	240,13
25	Sulawesi Tenggara	115	195	69,57	11.935	50.900	326,48	103,78	261,03
26	Bali	153	150	-1,96	28.590	52.520	83,70	186,86	350,13
27	Nusa Tenggara Barat	317	443	39,75	25.165	121.550	383,01	79,38	274,38
28	Nusa Tenggara Timur	307	132	-57,00	25.530	61.710	141,72	83,16	467,50
29	Maluku	119	156	31,09	112.400	61.980	-44,86	944,54	397,31
30	Maluku Utara	122	99	-18,85	19.135	7.600	-60,28	156,84	76,77
31	Papua	83	184	121,69	6.647	21.570	224,51	80,08	117,23
32	Irian Jaya Barat	290	157	-45,86	9.715	29.470	203,35	33,50	187,71
Total		10.445	7.630	-26,95	2.311.590	1.702.130	-26,37	221,31	223,08

Sumber : Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Catatan : * Hasil Analisis Pusdata, Departemen PU

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum merupakan salah satu dukungan dalam kegiatan kestatistikan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dukungan ini dalam rangka menyediakan data kuantitatif, dengan harapan dapat berguna bagi kegiatan manajemen khususnya dalam penyusunan program dan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum.

5.1 Kesimpulan

Departemen Pekerjaan Umum memegang peranan penting di dalam penyediaan prasarana dan sarana di bidang ke-PU-an untuk menunjang sektor-sektor strategis lainnya, seperti kependudukan, ketenagakerjaan, ekonomi, konstruksi, potensi lahan, transportasi, perumahan dan lingkungan permukiman. Hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang sumber daya air, jalan, dan jembatan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan permukiman, serta penataan ruang relatif menunjukkan keefektifannya dan berhasil memberi kontribusi yang cukup dalam aspek pemerataan dalam menjangkau sebagian besar daerah dan lapisan masyarakat secara memadai.

Untuk menunjang pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pembangunan yang menjadi tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum, dibutuhkan informasi guna pembangunan prasarana dan sarana bidang ke-PU-an yang berkaitan dengan masing-masing sektor strategis diatas. Program

ataupun rencana kegiatan bilamana didukung oleh data kuantitatif dan data kualitatif tentunya mempunyai nilai yang nyata dan positif.

Informasi statistik yang disajikan lebih bersifat kuantitatif dimana terdiri dari tabulasi, grafik dan analisis khusus di bidang ke-PU-an yang menggambarkan keadaan atau perkembangan pembangunan yang menjadi tugas Departemen Pekerjaan Umum selama ini. Informasi tersebut mengenai statistik wilayah, kependudukan dan ketenagakerjaan, ekonomi, konstruksi, potensi lahan, transportasi, perumahan dan lingkungan permukiman, bencana alam, Infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penataan Ruang.

5.2 Saran

Untuk pembangunan ke depan, masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan, khususnya bagi daerah-daerah yang belum terjangkau di kawasan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dari proses pembangunan prasarana dan sarana bidang ke-PU-an, selalu terjadi perubahan-perubahan yang berupa peningkatan kualitas maupun kuantitas dari hasil-hasil pembangunan tersebut, sehingga penyajian informasi selalu mengikuti perubahan yang terjadi. Untuk itu informasi harus terus dikembangkan disamping harus di remajakan agar keandalan informasi tersebut dapat dipercaya.

Untuk bisa mendapatkan informasi statistik yang dapat diandalkan, perlu terus ditingkatkan kerjasama antara Pusdata dengan sumber-sumber data di Unit-Unit Kerja dan Satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ataupun instansi terkait lainnya. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusianya serta dengan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan analisis data.

Kepada semua pihak, baik dari dalam maupun luar lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, diharapkan dapat memberi saran-saran yang dimaksud guna lebih menyempurnakan penyajian dari Buku Induk Statistik PU. Semoga BIS PU ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.